

MUHAMMAD AS HIKAM (editor)

MENYONGSONG

2014-2019

MEMPERKUAT INDONESIA
DALAM DUNIA YANG BERUBAH



MENYONGSONG

2014-2019

MEMPERKUAT INDONESIA
DALAM DUNIA YANG BERUBAH

MUHAMMAD AS HIKAM (editor)

MENYONGSONG

2014-2019

MEMPERKUAT INDONESIA
DALAM DUNIA YANG BERUBAH



Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah

Hak Cipta (copy right)
Badan Intelijen Negara (BIN)

Editor: Muhammad AS Hikam

xx + 468 hlm.; 16 x 22,6 cm

ISBN: 978-602-70221-0-2

Diterbitkan oleh
cv. rumah buku
Jl. Salemba Tengah No. 61 A
Jakarta Pusat 10440
Telp. 021-31902652
Fax. 021-31902769
www.rubudesign.co

Desain cover: Dzanie
Layout isi: Gunadi Gaisani
Ilustrasi cover: ixpert | www.shutterstock.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



BADAN INTELIJEN NEGARA KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik dan gembira atas diterbitkannya buku ***“MENYONGSONG 2014-2019: Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah”***.

Buku tersebut merupakan salah satu implementasi amanat UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang tujuannya memberikan prediksi mengenai gambaran masa depan Indonesia dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Dinamika dan perkembangan global yang semakin kompleks dan kompetitif saat ini telah membawa berbagai pengaruh signifikan terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2014, setelah berlangsungnya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di Indonesia, akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu suksesi kepemimpinan nasional yang ditandai dengan terpilihnya seorang Presiden baru. Oleh sebab itu, sangat layak jika bangsa kita melakukan berbagai persiapan menghadapi dinamika dan perkembangan yang akan terjadi di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mungkin akan terjadi

pada era pasca 2014. Diperlukan semacam kesiapan warga negara dan para penyelenggara negara RI untuk menghadapi dinamika dan perkembangan NKRI pada lima tahun ke depan melalui upaya-upaya kreatif dan konstruktif untuk memperluas pemahaman, merangsang dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pada saat yang sama, dapat memperluas pemahaman masyarakat internasional tentang Indonesia.

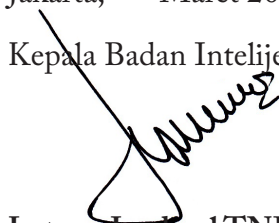
Saya berharap, penulisan buku ini akan dapat dijadikan referensi bagi seluruh komponen bangsa dan pihak-pihak lain untuk ikut memikirkan dan menentukan masa depan bangsa.

Demikian sambutan saya, semoga buku ini bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian serta semakin memperkokoh semangat kebangsaan kita guna mewujudkan Indonesia yang Jaya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan Intelijen Negara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marciano Norman', is written over a diagonal line that descends from the date 'Maret 2014'.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman

PRAKATA EDITOR

Buku di hadapan para pembaca ini bermula dari gagasan dan, sekaligus, prakarsa dari Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN), Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman, yang memandang perlu dibuatnya sebuah kajian *forecasting* atau prakiraan ke depan kondisi bangsa dan NKRI terkait permasalahan strategis yang diperkirakan terjadi dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2014-2019), serta bagaimana langkah-langkah antisipasi dan pemecahannya. Selanjutnya, kajian *forecasting* seperti itu nantinya harus dapat diakses secara terbuka di ranah publik dengan tujuan agar seluruh komponen bangsa -bersama-sama BIN- dapat ikut memikirkan dan, pada gilirannya, menyumbangkan berbagai tawaran jawaban terhadap dinamika dan tantangan yang sedang dan akan terjadi serta berdampak strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masih menurut beliau, penyusunan dan penerbitan kajian strategis oleh BIN yang dapat diakses publik secara terbuka tersebut tetap sejalan dengan salah satu tugas pokok dan fungsi lembaga, yaitu melakukan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) serta memberikan masukan-masukan strategis dalam lingkup keamanan nasional untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan nasional.

Momentum untuk segera mewujudkan gagasan dan prakarsa tersebut sangat tepat. Salah satu pertimbangan utamanya adalah fakta bahwa pada 2014 bangsa Indonesia akan melaksanakan agenda kenegaraan lima tahunan yang sangat penting maknanya bagi peri-

kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). Yang pertama akan bermuara pada terpilihnya wakil-wakil rakyat (DPR dan DPRD) dan wakil-wakil daerah (DPD); sedangkan yang kedua akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menjalankan tugas konstitusionalnya mulai 2004 sampai 2014, kepada Presiden Republik Indonesia terpilih. Khusus dalam kaitan dengan Pemilu Presiden, maka untuk pertama kalinya semenjak Reformasi digulirkan pada 1998, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Presiden yang bukan petahana (*incumbent*) dan akan mengemban tugas dalam suatu lingkungan strategis yang memiliki berbagai dinamika yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi para pemimpin, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan seluruh komponen bangsa lainnya untuk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman yang jernih dan memadai mengenai permasalahan serta tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang, agar lebih jelas dalam melakukan pilihan-pilihan strategis demi kesinambungan proses untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, berdaulat, bermartabat, mandiri, dan maju sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan di dunia.

Dewan Analis Strategis-Badan Intelijen Negara, yang merupakan lembaga non-struktural yang berfungsi sebagai tangki pemikir (*think tank*) untuk pimpinan BIN, kemudian ditunjuk sebagai pelaksana kajian tersebut. Sudah barang tentu segenap anggota serta tim analisis Dewan Analis Strategis BIN menyambut dengan antusias dan sekaligus tertantang atas kepercayaan pimpinan serta penugasan

dari pimpinan tersebut. Antusias, karena buku ini merupakan publikasi pertama BIN pasca terbentuknya UU No 17 Th. 2011 Tentang Intelijen Negara, yang bisa diakses, dibaca, dipelajari, dan dibicarakan secara terbuka oleh publik di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Selain bermaksud mengajak seluruh anak bangsa ikut memikirkan masa depan negerinya, buku ini juga menjadi salah satu perwujudan komitmen BIN terhadap amanat reformasi, yakni agar lembaga ini semakin dekat dengan rakyat dan, pada saat yang sama, rakyat pun akan semakin merasa memiliki (*melu handarbeni*) BIN. Melalui publikasi terbuka semacam ini, maka terbuka peluang yang sama bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama dengan BIN, secara dialogis memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan-gagasan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pada saat yang sama, Dewan Analisis Strategis BIN tertantang untuk menghasilkan sebuah buku yang memiliki daya tarik bagi khalayak yang luas dan mudah dibaca serta dimengerti, namun tanpa mengabaikan kriteria dan kaidah sebagai karya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itulah prinsip yang dipegang oleh Dewan Analisis Strategis BIN adalah menjaga keseimbangan antara substansi yang bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dengan sifat dan gaya penulisan buku yang enak dibaca oleh publik yang sudah barang tentu bukan hanya dari kalangan akademisi saja.

Dengan latar belakang itulah sejak April 2013 sampai Februari 2014, Dewan Analisis Strategis BIN telah melakukan kerja sama dengan para pakar untuk merencanakan dan menyusun kajian, serta menerbitkannya dalam bentuk buku yang, *alhamdulillah*, terlaksana dengan tepat waktu. Melalui berbagai pertimbangan, maka buku ini

mencakup bidang-bidang berikut ini: 1) *Lingkungan Strategis Global dan Regional*; 2) *Ideologi, Politik dan Pemerintahan*; 3) *Sosial Budaya*; 4) *Ekonomi*; 5) *Sumber Daya Alam dan Kebijakan Energi Nasional*; 6) *Pertahanan dan Keamanan*; dan 7) *Diplomasi dan Hubungan Internasional*. Dalam setiap bidang terdiri atas beberapa sub-bidang yang dianggap strategis bagi kehidupan bangsa dan Negara. Proses yang cukup panjang dan intensif berjalan selama hampir satu tahun; mulai dari pembuatan proposal, penyusunan pembedangan dan tim penulis, proses penulisan dan uji sah, sampai pada tahap finalisasi, termasuk penyuntingan dan penerbitan buku. Dalam rangka menjaga kualitas ilmiah, maka para pakar yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini telah dipilih secara cermat dari berbagai bidang yang dianggap representatif dalam kompetensi inti (*core competence*) mereka. Sementara itu, untuk pengawasan proses dan penjaminan mutu (*quality assurance*), selain diselenggarakan seminar-seminar intern berkala, juga dibuat forum-forum *Focus Group Discussions* (FGDs), yang secara keseluruhan melibatkan sekitar 100 orang, terdiri atas para pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan yang berperan sebagai panelis dan/atau penanggap aktif. Tahap akhir dalam proses penjaminan mutu adalah penyelenggaraan seminar-seminar Nasional untuk mendapatkan masukan terakhir sebelum penerbitan. Dalam kaitan ini Dewan Analis Strategis BIN bekerja sama dengan Himpunan Peneliti Indonesia (*Himpenindo*) telah menggelar dua kali seminar nasional di Jakarta dan Denpasar yang secara keseluruhan dihadiri sekitar 300 peserta, terdiri atas para ilmuwan, praktisi dan profesional, serta pemangku kepentingan dalam bidang-bidang terkait.

Sesuai gagasan awalnya, tujuan terpenting dan utama buku ini bukanlah menyajikan berbagai jawaban dan/atau preskripsi-preskripsi siap pakai yang bersifat final atau mengarahkan serta mengikat publik. Buku ini lebih dimaksudkan untuk memberikan gambaran ke depan dan mencari pemecahan terhadap dinamika serta masalah-masalah strategis dalam rentang waktu 5 tahun yang akan datang di Indonesia, yang bertumpu pada dinamika Lingkungan Strategis (*lingstra*) baik pada tataran global maupun regional. Jadi, walaupun dalam bab-bab buku ini terdapat berbagai rekomendasi-rekomendasi, maka sifatnya masih terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Dengan perkataan lain, berbagai rekomendasi yang ada seyogyanya dipahami secara *heuristic* atau penjelajahan, yakni berbagai tawaran kemungkinan konsekuensi yang bisa terjadi dan/atau bisa diikuti, termasuk manakala ingin dibuat berbagai preskripsi kebijakan strategis. Dengan semangat dan penyikapan seperti itu publik masih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk ikut berpartisipasi memikirkan persoalan-persoalan bangsa dan negara dan memberikan pemikiran mereka secara terbuka dan proporsional.

Sebagai sebuah hasil kerja sama yang intensif dan produktif dan merupakan perpaduan harmonis dari banyak pihak, maka pada tempatnyalah jika Dewan Analis Strategis BIN mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berjerih payah memeras tenaga dan pikiran bagi keberhasilan karya ini. Terutama terimakasih kepada Pimpinan BIN, yaitu Kepala dan Wakil Kepala BIN, karena adanya kepercayaan yang besar kepada Dewan Analis Strategis BIN dan perhatian, dorongan, serta dukungan penuh dari kedua beliaulah maka pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian pula, ucapan terimakasih disampaikan kepada Sekretaris Utama BIN bersama seluruh staf beliau yang telah memberikan dukungan administratif yang vital bagi kelancaran pelaksanaan tugas selama hampir satu tahun terakhir. Dan tak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya, tidak ada karya manusia yang tak memiliki kelemahan dan kekurangan, sebagaimana kata pepatah: “*Tiada gading yang tak retak.*” Buku ini pun tentu masih memiliki kelemahan dan kekurangan disana-sini baik dari aspek substansi maupun di luarnya. Namun, itulah yang sampai saat ini bisa kami wujudkan sesuai kapasitas dan upaya yang maksimal dari tim. Kritik dan komentar dari pembaca serta publik adalah sebuah keniscayaan agar memberikan berbagai tilikan lebih dalam dan alternatif pemikiran yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan pemahaman kita bersama. Untuk itu kepada semua pihak yang memberikan berbagai kritik, saran, dan komentar berisi gagasan dan pemikiran yang lebih mendalam, Dewan Analis Strategis BIN menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik dan diridhai-Nya kepada bangsa kita dalam mencapai cita-cita luhur menuju Indonesia Raya!

Jakarta, Maret 2014

Dr. Muhammad AS Hikam, MA.
Editor

UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan, apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para pakar dan timnya yang, bersama para anggota dan tim analis Dewan Analis Strategis BIN, sejak awal telah terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan dan penulisan buku ini. Mereka adalah Anies Baswedan, PhD; Dr. Alie Humaedi, S.Ag, M.Hum; Prof. Dr. Firmanzah; Dr. Kurtubi; Dinna Wisnu, Ph.D; dan Dr. Eddie Prasetyono; Shofwan Al Banna Choiruzzad, PhD; Dr. Zaim Uchrowi, MDM; Dr. Jazuni, SH, MH; Dr. Ari Prihandoko, MSc; Saiful Hakam, MA; Dr. Rizal Edi Halim; S.Sos; Dr. Luky Adrianto; Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc, F.Trop; Dr. Mahmud Syaltout; Akbar R Subekti, MSi; Muhammad Arif Anwar, S.Sos; A.Ag. Dwinta Kuntaladara; Yuli Muthmainnah; dan Mohammad Anthoni.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada koordinator penyusunan buku, Sekretaris Dewan Analis Strategis BIN, dan para anggota dan tim analis Dewan Analis Strategis BIN, yang dalam hal ini sekaligus berperan sebagai liaison dan pendamping koordinator. Dewan Analis Strategis BIN juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara intensif berpartisipasi baik dalam FGDs maupun Seminar Nasional dalam rangka memberikan masukan dan meningkatkan mutu kajian serta buku ini. Terutama kepada Pengurus Pusat Himpenindo Bpk. Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, MSc; dan Dr. Laksana Tri Handoko, serta Wakil Kepala LIPI Bapak Dr. Ir. Djusman Sajuti, MSc. Panelis dan partisipan aktif dalam FGDs dan Seminar Nasional diantaranya adalah: Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Wijoyo; Brigjen TNI

A. Hafil Fuddin (Paban Sintel); Kol. Dr. Anton Nugroho, MMDS, MA; Prof. Dr. Azyumardi Azra; Prof. Dr. Abdul Munir Mulkan; Dr. Abdul Aziz; Dr. Agung Wasono; Andi M Taufik; Mayjen TNI Abdul Chasib; Dr. Alex Chandra; Dr. Bagus FB Utomo; Bey Khasman; Ir. Budi Basuki, MM; Dr. Connie Rahakundini Bakrie; Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorodjakti; Dr. Dirgo D. Purbo; Prof. Dr. Djarot Sulistio Wisnubroto; Djipto Situmorang; Kol. Laut (T) Dohar S; Ir. A. Edy Hermantoro, MSc; Prof. Dr. Ermaya Suradinata; Dr. Faisal Mutaqin, MSi; Prof. Dr. Farouk Muhammad; Dr. Fedy Sondita; Dr. Faisal Basri, MA; Freddy Panggabean; Prof. Dr. Hikmahanto Juwana; Dr. Hendri Saparini; Prof. Dr. Hasyim Djalal; Dr. Harry Prihantono; Kol. H. Simatupang; Dr. Ichsanuddin Noorsy; Prof. Ir. Ida Ayu Giriantari, M.Eng.Sc, PhD; Dr. I Gede Arya Sugiarta, M.Hum; Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti; Prof. Dr. Indria Samego, MA; Dr. Imam Sugema; Brigjen TNI Jamaluddin Mubarak, MSi (Han); J. Victor Rembeth; Prof. Dr. Ketut Ardhana; Dr. Kusnanto Anggoro; Dr. Lili Romli; Ir. Marwan Batubara, MSc; Dr. Makarim Wibisono; Melda Kamil Adrianto, SH, LLM, PhD; Mangadar Situmorang; Dr. Makmur Keliat; Dr. Nico Harjanto; Pri Agung Rakhmanto, Ph.D; Dr. Laksda TNI (P) Robert Mangindaan; Dr. Refly Harun, SH, MH, LLM; Dr. Robertus Robert; Dr. Ir. Ridwan Djamaludin, MSc; Prof. Dr. Salim Said; Sofjan Wanandi; Dubes Soemadi Brotodiningrat; Dubes Sabam P. Siagian; Prof. Dr. Syamsudin Haris; Prof. Dr. Singgih Riphath; Brigjen Pol Drs. Sad Harunantyo; Dr. Santo Darmosumarto; Dr. Teuku Rezasyah; Mayjen TNI Tisna Komara; Wiwiek Setyawati Firman; Yanuar Rizky, SE, AK, MH; dan Dr. Zastrouw Al Ngatawi. Kepada para peserta Seminar Nasional baik di Jakarta maupun Bali, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya atas semua masukan dan komentar yang bermanfaat bagi peningkatan mutu kajian.

Dalam penerbitan buku yang melibatkan banyak pihak dan substansi yang sangat kompleks seperti ini peran tim editor, tak pelak lagi, sangat penting dan vital. Bukan saja dalam hal penyuntingan dan penyelarasan bahasa, tetapi juga masukan-masukan substantif yang ikut meningkatkan nilai tambah dan mutunya. Atas kerja keras para anggota tim editor, yang terdiri atas Budhiarto Shambazy, Dr. H. Wawan Purwanto dan Dr. Zaim Uchrowi, dalam seluruh proses panjang penyuntingan buku ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. *Last but not the least*, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf administrasi Dewan Analisis Strategis BIN yang merupakan pendukung utama rangkaian proses pelaksanaan dan kelancaran penugasan. Mereka telah melakukan seluruh tugas yang diberikan dengan penuh pengabdian dan tak mengenal lelah.

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman	v
Prakata Editor Dr. Muhammad AS Hikam, MA.	vii
Ucapan Terima Kasih	xiii
Ringkasan Eksekutif	xxi
Bab I Lingkungan Strategis Di Tengah Dunia yang Berubah	1
● Lingkungan Strategis Global	5
● Lingkungan Strategis Regional	38
● Lingkungan Strategis Nasional	45
Bab II Politik Menuju Demokrasi Terkonsolidasi	55
● Posisi Politik Indonesia	60
● Membaca Masa Depan	69
● Skenario Jangka Pendek	95
● Dampak pada Masa Depan	97
● Demokratisasi dan Ideologi	99
● Ikhtisar dan Rekomendasi	106
Bab III Sosial Merajut Keindonesiaan Kita	109
● Dinamika Ancaman	116

● Dampak ke Masa Depan	146
● Upaya dan Strategi Mengatasi Ancaman	160
● Ikhtisar dan Rekomendasi	173
 Bab IV Ekonomi	
Menembus <i>Middle Income Trap</i>	179
● Landasan Ekonomi Indonesia	183
● Proyeksi 2014-2019	204
● Tantangan Pembangunan 2014-2019	214
● Ikhtisar dan Rekomendasi	222
 Bab V Sumber Daya Alam	
Modal Menjadi Negara Besar	229
● Kebutuhan Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	232
● Tantangan ke Depan	248
● Sistem dan Tata Kelola Sumber Daya Alam	259
● Solusi Pengelolaan Sumber Daya Alam	282
● Ikhtisar dan Rekomendasi	299
 Bab VI Pertahanan	
Membangun Indonesia Kuat	303
● Sistem dan Postur Pertahanan	306
● Dinamika Ancaman	319
● Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman	358
● Ikhtisar dan Rekomendasi	362

Bab VII Hubungan Internasional	
Memperjuangkan Kepentingan Nasional	365
● Kepentingan Nasional dan Kepentingan Vital Indonesia	368
● Kelemahan yang Perlu Diperbaiki	396
● Gangguan dan Ancaman	422
● Ikhtisar & Rekomendasi	425
Catatan	431
Daftar Pustaka	439



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lingkungan Strategis	Di Tengah Dunia yang Berubah Bagian ini membedah lingkungan global, regional, serta nasional yang menjadi lingkungan strategis pembangunan Indonesia dalam kurun 2014-2019 ke depan.
Politik	Menuju Demokrasi Terkonsolidasi Bagian ini membahas perkembangan politik yang akan terjadi dalam lima tahun mendatang, khususnya terkait dengan pelaksanaan demokrasi.
Sosial Budaya	Merajut Keindonesiaan Kita Bagian ini menguraikan ancaman dan dampaknya di bidang sosial dalam periode pembangunan mendatang menyangkut berbagai aspek sekaligus.
Ekonomi	Menembus <i>Middle Income Trap</i> Bagian ini memaparkan proyeksi optimis ekonomi Indonesia beserta tantangan yang harus dihadapi untuk bisa tinggal landas di tahap berikutnya

Sumber daya Alam	Modal Menjadi Negara Besar Bagian ini menggambarkan skenario yang diperlukan untuk mengelola kekayaan berupa sumberdaya alam, termasuk mengantisipasi krisis energi
Pertahanan	Membangun Indonesia Kuat Bagian ini mengangkat hasil simulasi terhadap berbagai dinamika ancaman bagi pertahanan Indonesia di masa depan.
Hubungan Internasional	Memperjuangkan Kepentingan Nasional Bagian ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam diplomasi dan hubungan internasional dihadapkan tantangan-tantangan baru global

Lingkungan Strategis: ‘Di Tengah Dunia yang Berubah’

Terdapat tiga aspek yang menjadi lingkungan strategis yang akan dihadapi Indonesia pada kurun 2014-2019, antara lain; lingkungan global, regional, serta nasional. Pada lingkungan global terdapat ketidakpastian perekonomian, terutama menyangkut Krisis Eropa serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Perhatian politik juga bergeser ke Asia Pasifik, meskipun Amerika Serikat, Uni Eropa, serta Rusia masih menjadi aktor besarnya. Di kawasan regional, kebangkitan China dibidang ekonomi dan menjadi perhatian semua kalangan. Ketegangan di kawasan Laut China Selatan meningkat. Sementara itu di lingkup nasional, pergantian kepemimpinan

Nasional dengan seluruh implikasinya menjadi hal terpenting untuk dicermati. Rentetan bencana serta keterbatasan dalam energi menjadi faktor lain yang juga perlu diperhitungkan.

Politik: 'Menuju Demokrasi Terkonsolidasi'

Perjalanan negara pasca-Reformasi 1998 menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan menjadi 'negara gagal' seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Sebaliknya, Indonesia sudah relatif kokoh sebagai negara 'demokrasi formal'. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan Indonesia menjadi negara 'demokrasi penuh' atau bahkan negara 'demokrasi maju/terkonsolidasi' yang dipandang mampu mewujudkan stabilitas kesejahteraan. Untuk itu, Indonesia perlu mencapai tingkat pendapatan sebesar 6.000 dolar AS per kapita lebih dulu. Terdapat 10 kriteria di bidang ekonomi, politik dan pemerintahan, serta penegakan hukum untuk menilai kemampuan Indonesia meningkatkan level demokrasinya. Dari penilaian tersebut diyakini hanya akan ada sedikit kemajuan bagi Indonesia terhalang aspek pemerataan dan masyarakat politik otonom yang menurun.

Sosial: 'Merajut Keindonesiaan Kita'

Fenomena kependudukan yang sering diistilahkan sebagai 'Bonus Demografi' menjadi latar utama pembangunan bidang sosial budaya tahun 2014-2019. Bayang-bayang kekerasan dan konflik sosial tahun-tahun sebelumnya juga menjadi ancaman. Bidang pendidikan dan kesehatan perlu lebih mengedepankan paradigma '*intangible*' untuk mengimbangi pendekatan '*tangible*'-nya selama ini. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih mengutamakan pada bidang yang menjadi kekayaan Indonesia yakni hayati, kebumian,

serta budaya. Penguatan etika dan integritas diperlukan dunia hukum. Pendekatan kearifan lokal dan kebangsaan untuk menguatkan solidaritas sosial. Kesadaran kebhinekaan hendaknya dikuatkan untuk membangun mosaik indah Indonesia guna menekan konflik SARA.

Ekonomi: “Menembus *Middle Income Trap*”

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia berhasil meraih pencapaian yang baik dengan pertumbuhan sekitar 6 persen. Hal itu meneguhkan posisi Indonesia sebagai anggota negara-negara G20 yang menguasai 85 persen perekonomian dunia. Tidak berlebihan bila Indonesia kemudian membuat proyeksi optimis untuk perekonomian 2019 dengan pertumbuhan 7 persen, GDP 6.950 dolar AS per kapita, dan angka kemiskinan 4-5 persen saja. Tantangan untuk mewujudkan itu tidak ringan. Kekuatan yang dimiliki Indonesia untuk pembangunan perekonomiannya adalah kekayaan alam, besarnya kekuatan pasar domestik, serta konsistensi kebijakan dalam menjaga iklim makro. Kekuatan yang bersifat relatif itu harus mengatasi beberapa aspek kritis seperti masalah ketahanan pangan, ancaman keterbatasan pasokan energi, lemahnya industri, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur di saat perekonomian dunia masih serba tidak pasti. Kerendahan hati untuk bersedia belajar dari negara-negara tetangga yang lebih sukses sungguh diperlukan.

Sumber Daya Alam: “Modal Menjadi Negara Besar”

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas di dunia. Kekayaan tersebut bersama dengan kekayaan alam lainnya sebenarnya merupakan modal

untuk dapat menjadi negara besar. Namun, momentum terbesar untuk mewujudkan itu sudah berlalu seiring dengan telah banyak tereksplotasinya sumber-sumber tersebut. Dengan produksi minyak sebesar satu juta barel per hari dan kebutuhan 1,6 juta barel pada 2013 hingga 1,9 juta barel pada 2019, Indonesia terpaksa menjadi negara pengimpor. Sementara itu, kekayaan alam berupa hutan serta perikanan dan kelautan juga belum tergarap dengan baik dan bahkan rusak. Perlu regulasi dan format baru dalam pengelolaan minyak, pembangunan kilang baru, serta pengembangan sumber energi lain mulai dari energi terbarukan, geothermal, hingga PLTN yang menjadi tumpuan negara-negara industri. Keterbatasan energi merupakan penghambat terbesar Indonesia untuk maju. Sementara itu, pengembangan kekayaan perikanan dan kelautan juga masuk prioritas.

Pertahanan: “Membangun Indonesia Kuat”

Persaingan kekuatan Amerika Serikat – China merupakan aspek yang paling dicermati dalam masalah pertahanan global. Meskipun China terus meningkatkan kekuatan militernya dan Amerika Serikat menurunkan nilai anggaran pertahanannya, Amerika Serikat masih memegang kendali pertahanan global maupun Asia Pasifik. Konflik kawasan menyangkut wilayah perbatasan, merebaknya kejahatan transnasional, ancaman terorisme, kejahatan *cyber*, ancaman separatisme, serta ancaman situasional merupakan tantangan bagi pertahanan Indonesia. Hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa ketahanan Indonesia terhadap dinamika ancaman dari negara lain dalam posisi lemah. Penyeragaman persepsi antar-institusi pemerintah menyangkut peta ancaman, peningkatan anggaran

pertahanan, serta penegakan kedaulatan wilayah baik darat, laut, maupun udara diperlukan untuk membangun Indonesia yang kuat.

Hubungan Internasional: Memperjuangkan Kepentingan Nasional

Diplomasi dan hubungan internasional bukan semata untuk mewujudkan perdamaian dunia bagi seluruh umat manusia, melainkan juga untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing. Sejauh ini, Indonesia belum banyak menggunakan diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional tersebut. Setidaknya terdapat empat kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Keempatnya adalah kepentingan nasional bidang ekonomi, kepentingan nasional bidang politik, kepentingan nasional bidang sosial budaya, serta kepentingan nasional bidang pertahanan. Untuk dapat melaksanakan peran baru tersebut, perlu dilakukan beberapa pembenahan, di antaranya adalah soal desain politik luar negeri serta pengembangan sistem kelembagaannya. Beberapa doktrin yang dipergunakan dalam politik luar negeri Indonesia seperti ‘ribuan teman tanpa musuh’ (*thousand friends zero enemy*) atau ‘keseimbangan dinamis’ (*dynamic equilibrium*) perlu dikaji ulang karena membingungkan dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional tersebut.

BAB I

— LINGKUNGAN STRATEGIS —

DI TENGAH DUNIA YANG BERUBAH



LINGKUNGAN STRATEGIS

DI TENGAH DUNIA YANG BERUBAH

“Banyak yang berkata bahwa dunia kita sekarang berada di titik kritis untuk bisa maju atau runtuh. Jika kita tidak bertindak bersama secara bertanggung jawab, jika kita tak bertindak sekarang, kita berisiko tergelincir dalam lingkaran kemiskinan, degradasi, serta kehilangan harapan.”

~ Sekjen PBB Ban Ki Moon ~

Pesta kembang api dari pelosok Merauke hingga New York yang menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa pada malam Tahun Baru 1 Januari 2014 mewakili optimisme umat manusia terhadap masa depan dunia. Berbagai resolusi yang dinyatakan, baik oleh pribadi maupun negara menggambarkan harapan terhadap keadaan yang lebih baik setidaknya pada tahun berjalan. Dalam perjalanannya, realitas dunia tak selalu seperti yang diharapkan masing-masing pihak. Beberapa peristiwa di tingkat global, regional, serta nasional pada triwulan pertama tahun 2014

menunjukkan selalu terdapat harapan dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi umat manusia.

Di Jenewa pada akhir Januari 2014 misalnya. Indonesia dan juga beberapa negara lain yang berpartisipasi dalam konferensi tentang Syria mengharapkan titik terang dari krisis yang berkepanjangan dan telah menelan korban sangat besar. Harapan tersebut pada akhirnya harus terbentur pada kenyataan bahwa perbedaan pendapat kedua pihak yang berseteru begitu dalam, dan belum terjembatani oleh diplomat senior yang disegani dunia sekaliber Lakhdar Brahimi sekalipun. Tak lama setelah sebuah harapan pupus, muncul angin segar dengan berakhirnya krisis politik Ukraina melalui pemberhentian Presiden Yanukovych oleh parlemen. Namun segera setelah itu muncul kecemasan baru menyangkut kawasan Crimea yang melibatkan negara adidaya Rusia. Masalah internal Ukraina pun berkembang menjadi persoalan internasional.

Dinamika yang berkembang bukan hanya di tingkat global, melainkan juga di ranah regional melalui terjadinya tragedi. Yakni, peristiwa hilangnya pesawat Malaysia Airlines dalam penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Persoalan itu bukan hanya menjadi masalah internal Malaysia melainkan juga menjadi persoalan seluruh kawasan. Selain memunculkan pertanyaan tentang aspek keselamatan penerbangan, tragedi tersebut juga menguji daya kerja sama antarnegara di kawasan Laut China Selatan yang selama ini disibukkan oleh sengketa wilayah menyangkut sejumlah kepulauan. Semua negara terlibat dalam pencarian pesawat tersebut termasuk China, negara yang paling menjadi persoalan untuk dapat mencari kesepakatan di wilayah sengketa tersebut.

Sementara itu, dinamika dalam negeri didominasi oleh dua bencana besar yakni letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan Gunung Kelud di Jawa Timur. Belasan orang tewas akibat bencana Sinabung selain kerusakan sentra pertanian terpenting di pulau Sumatera. Sedangkan tragedi Kelud berdampak ke kawasan yang sangat luas, termasuk memaksa sejumlah bandara di empat provinsi menutup kegiatan operasionalnya. Setelah itu masyarakat Tanah Air juga dikejutkan oleh aksi sadistik pasangan mahasiswa remaja yang membunuh temannya karena alasan sederhana. Peristiwa yang mengundang pertanyaan mendasar: Seburuk apakah potret sosial Indonesia sekarang sehingga melahirkan fenomena seburam itu? Semua hal tersebut terjadi saat seluruh masyarakat tengah menghadapi momen yang menghadirkan harapan sekaligus kecemasan berupa Pemilihan Presiden untuk periode mendatang. Pemimpin baru selalu membawa harapan baru, namun berbagai ketidakpastian dalam masa transisi pemerintahan selalu menghadirkan kerawanan yang tidak diharapkan.

Berbagai realitas di atas baru merupakan permulaan dari realitas lingkungan strategis yang akan dihadapi bangsa dan pemerintah Indonesia dalam masa 2014-2019 mendatang. Seluruh aspek dalam lingkungan strategis di tingkat global, regional, serta nasional tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL

Konflik Syria, sekali lagi, merupakan salah satu potret masalah yang dihadapi masyarakat global. Pertikaian yang terjadi bukan semata antara pemerintahan rezim Al-Assad dengan kalangan oposisi

yang berusaha menggulingkannya, melainkan juga mewakili kepentingan negara atau kelompok politik tetangganya seperti Iran dan kelompok Hizbullah di Lebanon di satu sisi, dengan Saudi Arabia dan Israel di sisi lainnya. Lebih dari sebatas perselisihan tingkat regional Timur Tengah, konflik Syria juga menjadi ajang perebutan pengaruh antarpenguasa lama dunia. Amerika Serikat di satu sisi, dengan Rusia sisi lainnya. Maka penyelesaian konflik Syria dapat menjadi salah satu barometer kemampuan dunia untuk menyelesaikan masalah nyata.

Masalah politik merupakan salah satu aspek dari lingkungan strategis global yang perlu dicermati. Sejumlah aspek lain yang juga menentukan adalah bidang sosial, ekonomi, sumber daya alam dan energi, juga pertahanan dan diplomasi yang bertaut satu dengan yang lain membentuk dinamika global yang kompleks. Saling ketergantungan yang rumit yang juga diistilahkan sebagai *complex interdependence* antar negara telah dikemukakan oleh Joseph Keohane dan Joseph Nye pada dasawarsa 1970-an. Manifestasi keadaan ini dalam ekonomi tampak pada berkembangnya proses-proses produksi barang dan jasa yang mengandalkan mata rantai global yang juga mensyaratkan semakin tingginya mobilitas dan migrasi populasi dari satu negara ke negara lain. Implikasinya tentu semakin kompleks, karena negara bisa semakin sensitif dan rentan terhadap tekanan eksternal serta euforia partisipasi publik dalam proses kebijakan dan politik.

Aspek-aspek pembentuk dinamika lingkungan strategis global yang dihadapi semua negara termasuk Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Politik

Tatanan politik global tidak berubah secara mendasar semenjak berakhirnya Perang Dingin pada awal dasawarsa 1990-an. Meskipun masih terus menghadapi tantangan internal yang tidak mudah, Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia karena keunggulannya dalam berbagai hal sekaligus, yakni politik, pertahanan, ekonomi, dan teknologi serta inovasi. Tragedi 11 September 2001 berupa serangan teroris yang menghancurkan pusat bisnis di New York, dan merusak sebagian dari Pentagon serta menciptakan rasa takut pada sebagian besar masyarakat menunjukkan bahwa Amerika Serikat tak lagi sekuat di masa lampau. Apalagi setelah terpukul oleh krisis ekonomi 2008 yang menghancurkan kepercayaan publik sampai tingkat bawah.

Di dunia militer, Amerika Serikat juga kesulitan mengakhiri secara baik intervensi di Irak maupun Afghanistan, dengan meninggalkan ketidakpastian dalam keamanan serta ketegangan politik terus-menerus pada bangsa-bangsa tersebut. Hal yang menegaskan kekurangefektifan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Sementara itu di bidang ekonomi, masyarakat dunia juga mulai menjagokan China untuk segera merebut posisi nomor satu dari Amerika Serikat. Semua itu dipandang sebagai isyarat merosotnya kekuatan Amerika Serikat, walaupun sebenarnya negara tersebut masih tetap menjadi kekuatan utama dunia. Hal tersebut ditegaskan oleh Fareed Zakaria dalam bukunya *The Post American World* (2009) yang menggarisbawahi bahwa AS masih tetap ada dan dalam banyak sisi tetap dominan dari segi kekuatan.

Setelah Amerika Serikat, Eropa Barat masih merupakan aktor besar dalam peta politik global. Kawasan tersebut memang menghadapi persoalan ekonomi yang tidak mudah setelah sejumlah negara anggotanya menghadapi krisis keuangan yang serius seperti Yunani. Namun Eropa Barat yang dimotori Jerman dengan stabilitas ekonomi dan politiknya, masih sangat berpengaruh terhadap percaturan global. Berbagai penyelesaian persoalan politik global, seperti fenomena "Musim Semi" di Timur Tengah serta ketegangan menyangkut reaktor nuklir Iran, tak lepas dari keterlibatan Eropa Barat. Begitu pula penyelesaian masalah negara-negara di kawasan Afrika, seperti perang saudara di negara yang baru merdeka, yakni Sudan selatan; pemberontakan di Mali, hingga tragedi genosida di Afrika Tengah.

China adalah kekuatan baru yang semakin diperhitungkan. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia selama beberapa tahun, hingga penambahan kekuatan militernya secara nyata, China mulai dipandang sebagai satu-satunya negara yang paling berpeluang menggusur Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia di masa mendatang. Analisis tersebut memang masih jauh dari realitas. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri lagi bahwa pengaruh China terhadap masyarakat internasional memang menguat dari waktu ke waktu. Dalam sejarah peradaban modern, posisi China dalam kancah internasional belum pernah sekuat pada beberapa tahun belakangan ini dan masih akan menguat lagi dalam masa lima tahun mendatang.

Rusia juga merupakan kekuatan dunia yang tak dapat diabaikan. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia mencoba bangkit

untuk kembali menjadi ‘penantang Amerika Serikat sebagaimana negara komunis Uni Soviet dulu yang runtuh melalui gerakan *glasnost* dan *perestroika* pada era Presiden Gorbachev. Peran Rusia yang mengambil kesempatan untuk berseberangan dengan Amerika Serikat dalam konflik Suriah menjadi bukti bahwa kekuatan Rusia tidak dapat diabaikan. Krisis politik Ukraina juga mencerminkan cukup kuatnya pengaruh Rusia di percaturan global, khususnya Eropa Timur dan Asia Tengah. Begitu Parlemen Ukraina menjatuhkan Presiden Yanukovich yang pro-Moskow atas desakan oposisi, kelompok bersenjata pun mengibarkan bendera Rusia di gedung pemerintah Crimea, wilayah selatan Ukraina. Putin pun segera mengerahkan kekuatan militer untuk membela “kepentingan Rusia” di Ukraina.

Di luar aktor-aktor besar tersebut terdapat sejumlah pelaku penting dalam kancah politik global. Di Timur Tengah, misalnya, Israel masih menjadi kekuatan kunci yang mengendalikan dinamika keadaan di kawasan tersebut. Belum mampunya Palestina menjadi negara yaang benar-benar merdeka ditentukan oleh faktor Israel. Krisis politik Mesir yang ditandai pelengseran Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis, tak lepas pula dari kepentingan Israel. Begitu pula ketegangan menahun antara Barat dan Iran yang menjadikan nuklir sebagai isu utamanya, walaupun Israel sendiri memiliki reaktor nuklir yang jauh lebih kuat.

Di Asia Timur, Korea Utara melanggengkan posisi lamanya sebagai ‘pencilan’ yang memberi warna beda pada kawasan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah membuktikan pada dunia mampu

menembus menjadi negara maju sebagaimana Eropa Barat dan Amerika Utara. China sedang dalam proses menuju ke arah itu, walaupun masih memerlukan waktu untuk mengatasi berbagai persoalannya sendiri. Korea Utara melanjutkan gaya kediktatoran pemimpin tunggal dinasti Kim, walaupun kini dipegang oleh pemimpin generasi ketiga yakni Kim Jong-Un yang sempat merasakan pendidikan di Swiss. Kekuasaan Korea Utara terus menempatkan diri sebagai 'kerikil' yang mengganggu langkah-langkah negara sekitarnya.

Sebaliknya dari Korea Utara, Australia menjadi aktor terpenting dalam peta politik antarbangsa di kawasan Pasifik Barat. Hal tersebut terjadi karena sebagai ujung tombak Barat di Asia, Australia memiliki berbagai aspek kekuatan negara-negara Barat mulai dari politik, ekonomi, militer, hingga teknologi. Australia juga mampu mengembangkan diri sebagai salah satu negara paling sejahtera di dunia, dengan memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di peringkat 2 dunia, dan hanya tertinggal oleh Norwegia. Hal tersebut sedikit banyak ikut menguatkan posisi tawar Australia dalam percaturan politik global.

Aktor-aktor tersebut secara umum tidak berubah dari masa sepuluh tahun silam. Tetapi dinamika yang berkembang dalam politik internasional semakin kompleks. Dalam konteks demokratisasi di Timur Tengah, misalnya, Amerika Serikat bersikap mendua. Pada satu sisi perlu ikut mengamankan proses demokratisasi yang berlangsung, namun di sisi lain juga membiarkan kepentingan sekutu lamanya seperti Israel dan Saudi Arabia untuk menyabot proses demokrasi seperti menyangkut

kemenangan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir atau menguatnya gerakan kelompok politik Syiah di Bahrain.

Hubungan Amerika Serikat serta Eropa dengan Iran juga melahirkan dinamika baru yang perlu dicermati. Selama tiga dasa warsa, Iran ditetapkan sebagai ‘musuh bersama’ Barat serta Arab. Namun, bersamaan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Ahmadinejad serta naiknya Presiden Rouhani dari ‘kelompok moderat’, Amerika Serikat serta Barat melonggarkan ketegangannya dengan Iran lewat mediasi Kerajaan Oman. Kepentingan praktis negara-negara Barat untuk menguatkan ekonominya serta kecenderungan ‘politik humanis’ Presiden Barrack Obama mendorong Amerika dan blok Barat memilih jalan pragmatis tersebut dengan mengebelakangkan kepentingan sekutu lamanya, yakni Israel dan Saudi. Mengawali 2014, kekuatan ekonomi Barat mulai kembali masuk ke Iran sedangkan pemerintah Iran juga mulai aktif membangun kerja sama ekonomi dengan kawasan Asia Tengah, Asia Tenggara serta Asia Timur.

Perubahan terbesar dalam lima tahun terakhir adalah keagresifan China dalam meluaskan pengaruh di Afrika. Perluasan pengaruh tersebut terutama menggunakan pendekatan ekonomi untuk pemasaran produk-produk China, serta pengembangan kerja sama eksplorasi energi. Tidak hanya melalui pendekatan ekonomi, China juga menggunakan pendekatan budaya. Di berbagai negara di Afrika, kursus-kursus Bahasa Mandarin berkembang pesat. Berbagai upaya itu membuat pengaruh China di Afrika menguat, bersaing dengan negara-negara Barat yang selama ini berpengaruh besar di benua tersebut. Menguatnya

pengaruh China di Afrika masih akan berkembang dalam lima tahun mendatang.

Perubahan besar yang juga terjadi adalah pergeseran pusat gravitasi geo-strategis dunia ke Asia Pasifik. Duta Besar Soemadi Brotodiningrat dalam sebuah diskusi mengutip pernyataan Hillary Clinton saat menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa “Asia Pasifik telah menjadi pengendali kunci politik global. Masa depan politik bakal ditentukan di Asia”. Asia-Pasifik adalah lokasi utama tempat motor-motor penggerak ekonomi dunia berada. Lebih dari 41 persen penduduk dunia tinggal di kawasan ini, dan mereka rata-rata berusia muda dan meningkat terus daya belinya. Tak kurang dari 50 persen transaksi perdagangan dunia terjadi antarnegara di kawasan ini, aktivitas perdagangan dan konektivitas antarnegara sangat dinamis pula di kawasan ini, sehingga negara-negara yang perekonomiannya ingin berkembang kemudian berusaha membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan ini.

Kondisi ini berbeda dengan saat gravitasi hubungan internasional berpusat di Trans-Atlantik. Saat itu, relasi antarnegara diwarnai oleh peradaban dan sistem nilai yang relatif lebih homogen dibandingkan peradaban dan sistem nilai dunia sekarang. Yakni didominasi oleh sistem nilai dan ideologi Barat, baik dalam ekonomi, tata kelola masyarakat, maupun tentu saja politik. Dalam perkembangannya saat ini, sistem politik demokrasi liberal Amerika Serikat dapat bersandingan dengan sistem politik komunis yang mengadopsi pasar bebas China, walaupun juga masih menyisakan ketegangan dalam

beberapa masalah. Realitas baru dalam politik global seperti itu yang harus dihadapi dan diterima negara-negara dunia, tanpa kecuali Indonesia dewasa ini.

2. Sosial Budaya

Lingkungan strategis global yang juga perlu diperhatikan dalam lima tahun mendatang adalah aspek sosial budaya yang terkait erat dengan politik internasional. Keterkaitan tersebut terlihat dalam analisa lama Samuel Huntington melalui buku *The Clash of Civilizations* (1996). Lewat buku tersebut Huntington menyebutkan bahwa fenomena masa depan dunia, yakni Abad 21 sekarang, akan ditandai dengan konflik global yang ditentukan oleh keberpihakan berdasar faktor sosial budaya seperti agama dan etnisitas. Secara sederhana dapat dipaparkan bahwa dunia akan diwarnai ketegangan antar Blok Barat berhadapan dengan koalisi China dan negara-negara Islam Timur Tengah. Prediksi ketegangan dunia itu diperkuat oleh buku *The Geopolitics of Emotion* dari Dominique Moisi (2009) yang menggambarkan suasana psikologis sejumlah negara di dunia, yakni antara harapan, rasa takut, dan percaya diri.

Benturan peradaban secara frontal seperti yang diramalkan tersebut memang tidak terjadi. Meskipun demikian, kemunculan ‘budaya’ yang tidak lagi persis sama dengan budaya Barat di pusat peradaban dunia tidak terhindarkan. Potret sosial budaya dunia secara umum semakin beragam. Wacana ilmiah dan kebijakan yang berkembang justru mendorong kebebasan bagi negara manapun untuk menonjolkan kekhasan modelnya masing-

masing, termasuk dalam pengelolaan ekonomi dan politik. Dalam wacana ilmiah ada istilah ‘indigenisasi konsep’, yakni pengembangan konsep-konsep yang berdasar pada nilai kearifan setiap bangsa. Hal tersebut juga berkembang dalam studi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendorong upaya mencari kekhasan makna dan praktik di tingkat negara dan kawasan serta tidak sekadar ikut norma internasional.

Dalam studi ekonomi dan perlindungan tenaga kerja, berkembang kajian seputar keragaman penerapan prinsip-prinsip kapitalisme. Ada observasi dan eksplorasi ilmu sosial menyangkut peranan budaya dan nilai-nilai masyarakat dalam variasi penerapan sistem ekonomi pasar di sejumlah negara. Pandangan lama bahwa nilai-nilai demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas akan menjadi satu-satunya nilai dalam sistem politik dan ekonomi pasca keruntuhan Uni Soviet sudah dipandang tidak berlaku lagi. Dunia justru mendorong adanya keragaman sesuai dengan tata nilai di masing-masing negara.

Pada tataran kebijakan, China dan Indonesia termasuk yang berkecenderungan ke arah itu. Presiden Xi Jinping dalam kunjungannya ke Jakarta pada bulan Oktober 2013 mengatakan bahwa yang ingin dikembangkan China adalah respek pada negara-negara lain, terlepas dari apapun pilihan mereka untuk sistem politik maupun pembangunan ekonomi yang dianut. Sejumlah tokoh Indonesia, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, dalam beragam forum termasuk menyuarakan bahwa kecepatan demokratisasi di kawasan ASEAN tidak bisa disamakan dengan kecepatan demokratisasi di belahan

dunia lain. Indonesia aktif berbagi pengalaman berdemokrasi, menyelesaikan konflik, dan model kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat pada negara-negara lain yang memintanya.

Sejumlah analis juga mengkaji Islam dalam kaitannya dengan budaya demokrasi serta pembangunan. Dasarnya adalah bahwa Islam dipandang sebagai suatu kekuatan sosial yang sedang mencari tempat dalam politik ekonomi global. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana Islam sebagai suatu ajaran dan cara pikir berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan? Berbagai kejadian di negara-negara Timur Tengah membuat pengamat sangat berhati-hati membawa variabel Islam dalam kajian internasional. Masalah Islam tidak dapat disimpulkan secara ‘hitam-putih’ begitu saja. Sebagaimana disebutkan oleh Gregory Gause III (2011), perkembangan demokratisasi di Timur Tengah masih perlu terus dicermati. Apalagi terdapat indikasi bahwa selama ini ada pemahaman yang keliru terhadap kepemimpinan di kawasan tersebut.

Promosi demokrasi oleh negara-negara Barat masih terus dilakukan seperti melalui dukungannya selama ini terhadap gerakan ‘Musim Semi’ di Timur Tengah. Tekanan Amerika Serikat terhadap persoalan Hak Asasi Manusia di China- termasuk dukungan pada Pemimpin Tibet Dalai Lama- juga menjadi petunjuk masih aktifnya negara tersebut untuk menyebarkan nilai-nilainya. Namun wajah demokrasi yang perlu diadopsi tidak lagi harus persis seragam. Wajah demokrasi dalam beberapa tahun mendatang juga akan semakin bervariasi dengan beradaptasi pada nilai budaya masing-masing negara.

Keragaman nilai budaya di pusaran pusat peradaban dunia makin diterima oleh banyak pihak. Meskipun demikian, di sisi lain, globalisasi nilai-nilai budaya juga tak terhindarkan. Masyarakat dunia dari berbagai bangsa dan negara yang berbeda menggunakan pakaian, kendaraan, alat komunikasi, peralatan rumah tangga, hingga mengonsumsi produk dari dengan merek-merek global yang sama. Jejaring toko, restoran, hingga barang konsumsi harian yang sama menjangkau hingga pelosok-pelosok negara-negara berbeda. Seolah tidak ada lagi batas antarnegara bagi merek-merek global.

Globalisasi nilai-nilai budaya tersebut tak terlepas dari perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, 2014-2019, dunia akan semakin tersatukan oleh teknologi tersebut dengan menyingkirkan sekat-sekat geografis dan bahkan budaya. Fenomena internet, media sosial, hingga program-program berbasis Android, bukan hanya memudahkan komunikasi antar masyarakat, melainkan juga mengubah secara mendasar paradigma lama dalam politik, ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya. Teknologi Informasi menjadi agen terpenting dalam demokratisasi masyarakat dunia.

Bersamaan dengan menipisnya sekat-sekat antarbangsa dan negara tersebut muncul fenomena *global citizen*, atau ‘warga dunia’ yang tidak lagi mempersoalkan kebangsaan. Belum ada angka statistik menyangkut hal ini, tetapi kecenderungan untuk bekerja di negara lain, bermigrasi, bahkan pindah kewarganegaraan lain semakin menguat di berbagai bangsa,

terutama di kalangan muda. Perhatian generasi muda dalam masa lima tahun mendatang dan seterusnya terhadap aspek global akan semakin menguat, melampaui batasan kebangsaannya masing-masing.

Tuntutan untuk mencari peluang di negara-negara lain memang tak terhindarkan lantaran pertambahan penduduk di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang, yang tinggi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 7,5 milyar jiwa. Kenaikan

Pada tahun 2019, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 7,5 milyar jiwa. Kenaikan jumlah penduduk tersebut secara umum akan memberikan tekanan pada penyediaan pangan, energi, perumahan, serta aspek-aspek pelestarian lingkungan.”

jumlah penduduk tersebut secara umum akan memberikan tekanan pada penyediaan pangan, energi, perumahan, serta aspek-aspek pelestarian lingkungan. Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, juga akan menaikkan perpindahan warga dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju seperti gelombang imigran gelap yang mencoba masuk Australia melalui perairan selatan Indonesia. Hal tersebut memberikan tekanan sosial pada banyak negara, termasuk negara-negara yang menjadi jalur perlintasannya.

3. Ekonomi

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ada pergeseran pusat geo-strategis peradaban global dari Trans Atlantik ke Asia

Pasifik. Hal tersebut tentu menyangkut pula bidang ekonomi. Kecenderungan ke arah itu telah dicermati banyak negara sejak dua dasawarsa terakhir dengan terbentuknya Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Dari waktu ke waktu, keterhubungan antarnegara di kawasan ini semakin menguat. Apalagi dalam beberapa tahun mendatang. Selama ini Amerika Serikat dan Jepang sebagai mitra utamanya di sisi barat Pasifik menjadi aktor utama pertautan ekonomi kawasan ini. Namun memasuki Abad 21, selepas krisis moneter 1998, Korea Selatan pun mulai meneguhkan diri sebagai pelaku penting kemajuan ekonomi dunia yang berpusat di Asia Pasifik.

Terkait dengan kemajuan kawasan Asia Pasifik, yang paling dicermati para pengamat ekonomi tentu adalah perkembangan ekonomi China. Negara dengan penduduk terbesar di dunia namun mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pula secara global. Pemerintahan China yang komunis mencengangkan dunia karena menerapkan ekonomi pasar secara efektif. Kota-kota di negara tersebut berubah dengan pesat menjadi kota modern sebagaimana kota-kota di negara maju. Pembangunan infrastruktur berstandar tinggi menjangkau seluruh wilayah negeri tersebut. Kuatnya pasar domestik setempat juga mengundang para investor asing untuk masuk ke negara yang menyebut diri sebagai ‘negara pusat’ atau Tiongkok tersebut. Sementara itu, perusahaan-perusahaan China yang telah kuat karena pasar domestiknya pun berekspansi ke seluruh pasar global.

Ekspansi China secara agresif dilakukan oleh negara, baik

melalui dukungannya pada perdagangan maupun investasi. Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, Afrika, bahkan Amerika Latin menjadi wilayah sasarannya. Seperti dikemukakan Wakil Menteri Perdagangan China yang dikutip *China Daily* (11/8/12), total investasi China di ASEAN telah meningkat 70 persen. China bahkan membentuk *The China-ASEAN Investment Cooperation Fund* atau *China ASEAN Fund* yang merupakan perusahaan ekuitas swasta berbasis di Belanda. Perusahaan tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah China, melalui *China Investment Corporation* dan *International Finance Corporation*. Sebagian dana lembaga tersebut sudah diinvestasikan di perusahaan-perusahaan di Kamboja, Laos, Filipina dan Thailand. Investasi China di kawasan ini umumnya di sektor perhubungan, bendungan, pembangkit listrik, dan eksplorasi sumber pertambangan.

China juga bergerak cepat di Afrika. Seperti dikutip dari *China.org.cn* (12/7/13), Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa investasi mereka di Afrika sudah melampaui investasi Amerika Serikat di sana. Hal tersebut menempatkan China sebagai mitra dagang terbesar negara-negara Afrika. Pertumbuhan investasi China di kawasan tersebut mencapai 30 kali lipat sejak 2005. China juga aktif memberi pinjaman pada negara-negara kaya minyak di Afrika, seperti pinjaman 1,1 milyar dolar AS pada Nigeria. Untuk menguatkan posisinya, China juga membentuk *China-Africa Cooperation Forum*.

Kehadiran China di Afrika ditandai dengan pertambahan jumlah warganya yang tinggal di benua itu. Menurut *Consultancy Africa Intelligence*, 'Chinatown' ada pada hampir semua negara Afrika,

baik berupa sejumlah restoran masakan China sampai yang berisi ribuan pedagang dan pusat bisnis milik orang China. Komunitas China terbesar saat ini ada di Afrika Selatan dan Namibia. Di negara seperti Libya pun terdapat puluhan ribu orang China yang berbisnis di sana. Investasi China di Afrika umumnya disektor pertambangan, perdagangan, perbankan, manufaktur, teknologi informasi, farmasi dan pertanian.

Fenomena ekonomi China yang disebut bakal menggusur Amerika Serikat itu menggoda pengamat untuk memberi julukan khusus. Seperti julukan BRICS yang mencakup Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan yang dilemparkan oleh ekonom dari lembaga Goldman Sachs. Brazil merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Amerika Latin; Rusia dan India juga kekuatan besar ekonomi di Asia Pasifik. Sedangkan Afrika Selatan menempati posisi nomor satu di Afrika. Tak cukup dengan istilah BRICS, muncul pula istilah MIST yang mencakup Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, serta Turki. Istilah yang tidak penting dan sekadar menjadi pemanis diskusi karena dari keempat negara tersebut baru Korea Selatan yang mampu menjadi negara maju. Ketiga negara lainnya termasuk Indonesia masih harus menyelesaikan banyak persoalan dasar sebelum dapat mengikuti jejak Korea.

Turki memang menjadi salah satu potret kecil kemajuan ekonomi dunia. Ditopang limpahan pengembangan industri Eropa, terutama Jerman sebagai sekutu lamanya, negara itu mencatat angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di benua tersebut dalam lima tahun terakhir. Sayangnya potret ekonomi

dunia di luar Turki dan Asia Timur serta Tenggara cenderung muram. Terutama di negara-negara Eropa di sisi Mediterania seperti Yunani, Italia, Spanyol, serta Portugal yang menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan. Begitu pula Irlandia yang pada dasawarsa sebelumnya memiliki perkembangan ekonomi yang cukup mengesankan.

Krisis ekonomi Eropa membawa dampak signifikan bagi peningkatan angka pengangguran kaum muda, termasuk yang berpendidikan tinggi. Menurut data OECD, jumlah penganggur usia muda di Eropa naik 30 persen sejak 2007 dan diprediksikan masih akan meningkat terus. Setidaknya terdapat sembilan negara Eropa yang memiliki angka pengangguran melebihi 25 persen dari total tenaga kerja di negaranya masing-masing. Masa pengangguran pun berjangka waktu lebih lama dari biasanya. Satu dari lima orang muda usia 15-24 tahun di Uni Eropa menganggur lebih dari 12 bulan.

Tekanan ekonomi bahkan dirasakan juga oleh negara-negara besar Eropa. Hanya Jerman dengan pondasi ekonominya yang sangat kuat, yang tidak goyah oleh tekanan ekonomi beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, Jerman pun ikut terkena imbas resesi ekonomi Eropa karena praktis menjadi satu-satunya pihak yang diharapkan ‘menolong’ tetangganya keluar dari keadaan sekarang. Posisi ekonomi Inggris serta Perancis saat ini tidak cukup kuat kalau juga harus menjadi penyelamat kesulitan bersama Eropa yang kemudian ternyata juga harus menanggung masalah Ukraina sebagai beban baru. Kelompok pro-Barat Ukraina baru memenangkan pertarungan melawan kelompok

pro-Moskow melalui konflik politik yang menghancurkan perekonomiannya. Mau tidak mau, Eropa yang masih ‘sakit’ harus pula membantu Ukraina memulihkan keadaan, termasuk perekonomiannya.

Amerika Serikat sebagai pemimpin besar dunia, khususnya Blok Barat, sudah mengawali dengan mencairkan pinjaman 1 milyar dolar AS pada pemerintahan sementara Ukraina. Langkah itu tidak mudah dilakukan karena Amerika Serikat sama sekali tidak dalam posisi longgar secara ekonomi. Akibat krisis 2008 yang disebabkan skandal ‘*subprime-mortgage*’, atau gadai bertingkat, sampai awal 2014 belum juga pulih. Apalagi negara itu kemudian menghadapi krisis fiskal pula yang memaksa pemerintah membekukan seluruh kegiatannya sendiri selama 16 hari pada Oktober 2013. Hal yang tak mungkin dilakukan oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi di Eropa dan juga Amerika Serikat membawa implikasi tak sedikit pada Asia, terutama Jepang serta China yang banyak membeli obligasi Amerika Serikat. India yang sempat dijagokan sebagai salah satu kandidat kekuatan ekonomi dunia setelah China, juga terimbas besar oleh krisis negara-negara Barat. Nilai tukar mata uang India merosot, sebagaimana juga nilai tukar mata uang Indonesia oleh sebab yang lebih kompleks, saat Amerika menghadapi krisis fiskal 2013. Keadaan itu juga menunjukkan kualitas ekonomi India yang ternyata serupa Indonesia pada 1980-an, yakni banyak dipuji ekonom dunia dan bangga karena memiliki angka pertumbuhan yang tinggi namun sebenarnya belum memiliki pondasi yang cukup kuat. Tak

seperti China, India masih jauh dari layak untuk disebut sebagai kandidat negara maju sebagaimana tercermin pada peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya yang rendah, yakni peringkat 145 dunia pada 2012.

Lembaga-lembaga dunia seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia telah berusaha keras mengatasi perlambatan ekonomi tersebut. Dalam pertemuan IMF-Bank Dunia ke-67 di Tokyo yang bertema '*Global Challenges Global Solutions*' disebutkan bahwa krisis dan perlambatan ekonomi yang terjadi di sejumlah kawasan seperti Eropa dan Amerika Serikat membutuhkan pendekatan komprehensif. Pendekatan tersebut bukan hanya berupa pembenahan defisit fiskal dan sektor finansial, melainkan juga perlu kebijakan-kebijakan mitigasi terhadap dampak negatif isu-isu pembangunan. Stabilisasi pasar keuangan, penguatan zona Eropa, peran ekonomi Asia, kebijakan ketenagakerjaan, industrialisasi, pertumbuhan berkelanjutan, investasi kesehatan dan hingga program Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium menjadi penekanan.

IMF mengakui bahwa krisis ekonomi yang bersumber dari krisis utang di zona Eropa ini merupakan krisis yang kompleks. Saat Amerika Serikat menghadapi krisis akibat gadai bertingkat pada tahun 2008, para pengambil kebijakan sepakat dengan opsi yang sama, yaitu stimulus fiskal. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsumsi dan produksi pada tingkat yang aman. Sehingga perekonomian dapat bergairah kembali. Namun, krisis yang terjadi saat ini jauh lebih rumit dan kompleks dibanding

dengan krisis tiga-empat tahun sebelumnya.

Kepala Tim Ekonom IMF Olivier Blanchard menyatakan bahwa krisis kali ini telah mengjungkir-balikkan pemahaman dan pengetahuan ekonomi yang selama ini diyakini benar. Krisis kali ini menghadirkan isu-isu baru yang perlu dikaji secara mendalam oleh para ekonomi, akademisi dan pengambil kebijakan. Berbagai instrumen klasik dipandang tidak layak lagi dipakai, yang berarti bahwa ilmu ekonom sekarang sudah tidak lagi memadai untuk menjawab perkembangan tantangan keadaan. Sebuah kesadaran yang semestinya dimiliki oleh para ekonom setelah gagal mengantisipasi dan mencegah krisis moneter 1998 di Asia.

Di sejumlah forum multilateral lainnya seperti G20 dan APEC, para pemimpin dunia juga berusaha menemukan formula yang tepat untuk menangani krisis yang terjadi. Namun, kompleksitas krisis membuat pencarian solusi secara global belum menemukan kesepakatan. Besar kemungkinan solusi krisis kali ini tidak membutuhkan konsep atau landasan tingkat global, tetapi solusi-solusi praktis di tingkat kawasan dan lokal. Maka IMF menekankan pentingnya kerja sama dan 'berbagi pengetahuan' antarnegara dan kawasan untuk membantu mengatasi krisis yang terjadi sekarang. Asia, khususnya Timur dan Tenggara, menjadi pihak yang paling diharapkan menarik perekonomian dunia untuk kembali sehat.

4. Sumber daya alam

Lingkungan strategis menyangkut sumber daya alam di tingkat global tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial,

ekonomi, bahkan keamanan. Terus bertambahnya jumlah penduduk dunia serta tuntutan pertumbuhan ekonomi telah mendorong meningkatnya konsumsi energi dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi memang tidak merata. Negara-negara industri maju, dalam lima tahun terakhir dan bahkan dalam dua dekade terakhir, umumnya mengalami pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada tingkat yang ‘matang’ dan relatif kecil. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan negatif.

Dalam jangka panjang, dengan jumlah penduduk dunia sekitar 10 milyar orang pada tahun 2100, konsumsi energi diperkirakan akan mencapai setidaknya sekitar 100 milyar barel setara minyak per tahun, atau sekitar 275 juta barel setara minyak per hari. Komposisi bauran energi dunia yang saat ini didominasi oleh sumber energi fosil yakni minyak, gas dan batubara akan terus berlanjut meskipun seluruh dunia sudah berusaha keras untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif non-minyak. Hingga saat ini, energi alternatif masih belum mampu menggantikan energi fosil secara signifikan, baik dari segi biaya maupun dari segi kepraktisan. Setidaknya, hingga tahun 2030 peran energi fosil diperkirakan masih sekitar 75 persen dari total konsumsi energi dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi di negara-negara berkembang yang mempunyai kapasitas untuk tumbuh. Faktor penentunya, antara lain, jumlah penduduk sebagai pasar dalam negeri yang besar, luas wilayah, kekayaan sumber daya alam yang menjadi modal dasar pembangunan, sistem sosial

politik dan keamanan yang relatif stabil, dan mutu sumber daya manusianya. Setidaknya dalam dua dekade terakhir ini, China tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ditambah dengan Korea dan Taiwan serta Jepang yang memang sudah maju menjadi negara industri sebelumnya, menempatkan kawasan Asia Timur menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang berarti juga memiliki kebutuhan energi yang sangat besar.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya, negara-negara itu berupaya untuk mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineralnya. Secara alamiah mereka harus mengimpornya karena keterbatasan bahkan nihilnya potensi cadangan sumber daya alam berupa energi dan bahan mineral. China sebenarnya juga penghasil minyak bumi dan gas. Namun karena kebutuhannya jauh di atas produksi dalam negeri, maka China melalui BUMN migasnya secara gencar melakukan ekspansi pencarian cadangan di luar negaranya, untuk memperkuat ketahanan energi migasnya.

Sebagai negara yang secara geologis mengandung potensi kekayaan sumber daya alam yang besar dan memiliki jarak yang relatif dekat, Indonesia dijadikan sebagai sumber pemasok energi dan bahan-bahan mineral mereka. China yang juga merupakan salah satu pemilik cadangan batubara terbesar di dunia, dengan sangat sadar memilih untuk mengimpor batubara sebanyak mungkin dari Indonesia. Selain itu, mereka juga mendatangkan energi dari kawasan Timur Tengah, Afrika Barat dan Australia. Dampak dari kebutuhan besar China terhadap sumber-sumber

energi adalah sengketa wilayah dengan negara-negara sekitar, menyangkut kawasan yang diperkirakan juga kaya dengan sumber energi.

Aspek sumber daya alam yang diperebutkan bukan semata terkait energi, melainkan juga lahan-lahan pertanian dengan pendekatan akuisisi atau sewa jangka panjang. Sebuah praktik yang dicurigai sebagai *land grab* atau kolonialisme gaya baru. Studi oleh Borras Jr et.al (2012) mengungkapkan bahwa pangan hanyalah sebagian saja dari motif mengapa negara-negara yang sebenarnya kaya secara ekonomi memilih untuk beramai-ramai melakukan akuisisi dan sewa lahan di negara-negara lain. Ada alasan lain yang mendasarinya tidak diubah seperti investasi biofuel, bagian dari strategi mengantisipasi perubahan iklim, dan untuk mencari sumber baru dalam memperkuat jalur arus modal di dunia yang semakin mengglobal. China banyak melakukan praktik tersebut, baik di Afrika, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin. Sejumlah negara lain seperti Australia, Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Begitu pula Malaysia, termasuk melalui perkebunan kelapa sawitnya di lahan-lahan di Indonesia.

5. Pertahanan

Amerika Serikat masih memegang posisi sebagai kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, serta kekuatan ilmu pengetahuan dan riset pada bidang teknologi masa depan. Krisis Ekonomi 2008 belum meruntuhkan Amerika Serikat dari posisi tersebut. Meskipun Amerika Serikat tetap paling kuat pada tingkatan ini, negara itu memikul berbagai beban yang tidak

selamanya bisa diatasi sendiri. Kehadiran Amerika Serikat pada perang di Irak dan Afghanistan, misalnya, telah menguras keuangan mereka dan menelan korban jiwa yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah memaksa Amerika Serikat untuk mengurangi kehadirannya di Timur Tengah. Bahkan anggaran pertahanan mereka akan dikurangi sebesar 300 milyar dolar AS selama kurun waktu 10 tahun mendatang. Tetapi, karena pertimbangan kepentingan ekonomi dan keamanan, Amerika Serikat tidak akan mengurangi kekuatan militernya di Asia Pasifik, sebagaimana tampak dari kebijakan *Rebalancing Asia Pacific* yang dicanangkan oleh Obama.

Kasus terkini berupa dugaan spionase oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk di Uni Eropa yang merupakan sekutunya, menunjukkan bahwa negara masih tetap mengutamakan kepentingan ekonomi dan keamanan masing-masing. Hal ini akan tetap diperjuangkan meskipun berpotensi merusak hubungan baik yang sudah dibangun. Dalam dunia yang anarki, di mana tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara, tindakan semacam ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang 'normal'. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam jenis peperangan yang menuju arah perang informasi.

Aktor dominan lain yakni Eropa harus mengalokasikan anggaran demi memperbaiki ekonominya. Ditambah dengan perbedaan pandangan domestik masing-masing negara pembentuknya. Ini mempersulit Eropa untuk menopang kebijakan pertahanan yang ekspansif, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun mendatang, tampaknya Eropa

akan masih berkonsentrasi pada masalah integrasi internalnya. Hal ini masih akan membutuhkan waktu yang sangat panjang dan proses yang sangat kompleks, serta tidak ada jaminan akan tercapai. Karena itu, dapat diperkirakan bahwa peran Uni Eropa dalam dunia internasional akan lebih banyak pada dimensi politik, terutama yang berkaitan dengan HAM dan demokratisasi. Koalisi minimal antara Uni Eropa dan Amerika Serikat sangat mungkin berlanjut. Namun, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, langkah militer bersama antara keduanya akan menjadi lebih sensitif setelah kasus spionase Amerika Serikat. Terlebih, langkah militer akan memakan biaya politik dan finansial yang besar yang dapat menghambat upaya penanganan krisis ekonomi.

Sebaliknya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, China justru akan menguatkan pertahanannya secara masif. Dalam dua dekade terakhir China mencatat perkembangan ekonomi dan militer yang pesat. Beberapa kalangan bahkan berani meramalkan China akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia secara ekonomi dan militer dalam dua dekade yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan tersebut, diperkirakan juga bahwa persaingan antara China dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Di satu sisi, kemunculan China sebagai negara yang kuat di Asia dapat menciptakan keseimbangan baru dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Amerika Serikat akan mencoba untuk mempertahankan posisi dominannya. Hingga beberapa tahun mendatang, Amerika Serikat masih menjadi negara yang menghabiskan paling banyak dana untuk urusan pertahanan.

6. Hubungan Internasional

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan internasional menunjukkan format yang semakin kompleks. Hal tersebut terlihat antara lain pada hubungan Amerika Serikat dengan sekutu lamanya, yakni Pakistan yang diwarnai sejumlah ketegangan, terutama dalam menangani kelompok radikal yang masuk dalam jaringan Taliban – Afghanistan. Begitu pula menyangkut hubungan Amerika Serikat dengan Iran yang selama ini merupakan musuh terpentingnya di kawasan Timur Tengah. Amerika justru melonggarkan ketegangan kedua pihak melalui manuver yang dilakukan oleh Menteri Luar Negerinya, John Kerry, seiring dengan naiknya Presiden Rouhani.

Sementara itu, Amerika Serikat juga mempunyai hubungan rumit dengan China. Secara politik Amerika Serikat masih berhadapan dengan China yang dipandang banyak melakukan praktik pelanggaran HAM. Amerika Serikat terus tampil di depan dalam urusan HAM. Selain itu Amerika Serikat juga mendukung Taiwan serta Jepang dari kemungkinan mendapat serangan militer China. Meskipun demikian, Amerika Serikat dan China terlibat dalam hubungan ekonomi yang rumit, yang pada satu sisi saling berhadapan, namun di sisi lain saling membutuhkan. China merupakan pembeli terbesar obligasi Amerika Serikat yang berarti juga ‘pemberi pinjaman’ terbesar bagi negara adidaya tersebut. Dengan demikian, China tentu berharap perekonomian Amerika-selain bergantung pada China-juga dapat tumbuh sehingga mampu membayar pinjamannya. Di sisi lain, China juga mengharap para investor Amerika menanamkan modalnya untuk menguatkan usaha di China.

Hubungan rumit tersebut terlihat dalam hubungan antarnegara ‘elite’ dalam tatanan global, seperti lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan delapan negara yang biasa berkumpul menentukan agenda ekonomi dunia (G-8). Dalam forum tersebut masing-masing negara cenderung berkeras mempertahankan kepentingan masing-masing dengan mengabaikan kepentingan bersama global. Lemahnya mekanisme dan skema kerja sama multilateral seperti PBB dan WTO, terbukti dengan tidak terselesaikannya banyak persoalan. Misalnya, persoalan ketegangan di Timur Tengah, masalah tindak lanjut untuk isu perubahan iklim, hingga kebuntuan negosiasi terkait perdagangan. Terbentuknya forum seperti G-20, APEC serta forum kerja sama ekonomi yang tumpang tindih di satu kawasan, menunjukkan bahwa relasi antarnegara berpotensi rumit.

Pada tingkat tertentu terdapat kesadaran bersama untuk membangun tata kelola global (*global governance*) serta bangunan bersama global (*global architecture*). Kesadaran tersebut adalah untuk membangun norma global yang menginginkan penjagaan perdamaian dunia. Meskipun demikian, jalan untuk mewujudkan bangunan global yang damai tersebut tidak sederhana. Harapan besar untuk membangun dunia yang aman, damai, dan sejahtera itu acapkali berbenturan keperluan pendek untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Pada kondisi seperti itu, kemungkinan konflik antar kepentingan dari masing-masing negara dapat terjadi. Berdasarkan realitas konflik beberapa tahun terakhir, setidaknya terdapat potensi lima jenis

konflik dalam politik ekonomi global di masa mendatang yang perlu menjadi perhatian:

a. Konflik akibat perang *proxy* antar kekuatan elite dunia

Konflik berupa perang non-fisik ini terjadi antarnegara-negara elite yang merasa kepentingan nasionalnya terusik. Khususnya dalam hal perebutan pengaruh terhadap negara-negara lain. Mereka akan mencari kesempatan untuk menyerang lawan politik ekonominya melalui pertarungan di lahan orang. Lima negara anggota tetap PBB dan para pembentuk agenda global di G-8 akan selalu bertarung untuk mempertahankan pengaruhnya. Amerika Serikat dengan posisinya selama ini akan terus memainkan dominasinya untuk menekan yang lain dengan menggunakan berbagai isu terorisme, senjata pemusnah massal, kebebasan melalui wilayah perairan strategis, HAM, dan lainnya. Di sisi lain, Rusia punya kepentingan untuk membalas dengan menjaga wilayah pengaruhnya di Timur Tengah, Afrika dan Asia. Rusia mungkin menghindari dari kontak senjata langsung, tetapi akan terus mencari kesempatan mempermalukan Amerika Serikat.

b. Konflik penentuan 'aturan main' dalam rezim internasional

Konflik ini adalah dalam menentukan 'aturan main' di luar kelembagaan internasional seperti PBB atau WTO. Lembaga-lembaga tersebut dipandang sebagai tameng perlindungan bagi semua negara dari kepentingan suatu negara yang memaksakan kehendaknya sendiri. Kenyataannya,

peranan lembaga-lembaga tersebut sangat terbatas untuk melindungi negara-negara lemah dari tekanan kepentingan negara adidaya. Tidak banyak negara yang mampu mengatasi tekanan-tekanan tersebut. China adalah salah satu negara yang pandai mencari kekosongan aturan main di PBB maupun WTO sehingga kepentingan nasionalnya tetap terpenuhi meskipun tetap terlihat dalam koridor patuh yang ada. Beberapa negara juga menyiasati aturan-aturan internasional. Dalam bidang perdagangan, misalnya, sejumlah negara menggunakan hambatan-hambatan nontarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan di dalam negeri seperti menggunakan kuota, karantina, dan memperlama proses di pelabuhan. Permainan aturan main yang tidak adil membuat Dewan Keamanan PBB dan instansi PBB lain tidak efektif mencari solusi berbagai kasus, seperti kasus Suriah. Tidak ada instrumen yang memadai untuk mencari solusi damai ketika ada anggota Dewan Keamanan PBB yang melakukan veto.

c. Konflik di wilayah perbatasan

Aturan internasional soal perbatasan bukan tanpa kelemahan. Hal tersebut terlihat pada semakin meningkatnya kejahatan transnasional seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan lain-lain. Lemahnya aturan soal perbatasan juga memberi ruang bagi banyak negara bertetangga untuk berkonflik soal wilayah dan untuk saling curiga. Hal ini berpotensi membahayakan relasi antarnegara, apalagi jika pemberitaan di media telanjur berisi pernyataan yang saling mengancam dan merendahkan.

Kasus konflik Laut China Selatan menunjukkan bahwa aturan tata kelola kelautan internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tidak cukup dalam menjaga kedaulatan negara-negara yang punya batas maritim. Definisi ‘pulau’ dalam UNCLOS dapat diperdebatkan, bahkan karang pun bisa diklaim sebagai pulau terluar asalkan ada kegiatan administratif dan militer oleh negara yang mengakuinya. Solusi hanya bisa dicari dan ditegakkan oleh para pengklaim. Jika satu negara besar seperti China mengatakan tidak mau mengikuti kesepakatan, sengketa masih terus berlangsung. Karena itu, sengketa di wilayah perbatasan, seperti di Laut China Selatan, berpotensi menjadi medan konflik terbuka. Amerika Serikat pun sampai sekarang belum mau meratifikasi UNCLOS.

Mekanisme yang berlaku saat ini untuk mengatasi konflik wilayah perbatasan adalah kesadaran dari negara-negara yang bersengketa untuk duduk bersama dalam mekanisme bilateral atau regional. Mekanisme ini terbukti berhasil untuk sejumlah kasus, seperti Indonesia ketika menyelesaikan batas darat dengan Papua Nugini, walaupun harus memakan waktu yang tidak sebentar. Masalah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini diurus sejak 1966 sampai 2004 dengan melewati 3 macam jenis deklarasi. Konflik perbatasan perlu penanganan yang tekun dan memakan banyak perhatian dan dana.

d. Konflik karena perebutan sumber daya alam

Konflik ini tidak bersifat tidak terbuka, namun merepotkan pemerintah daerah serta penduduk yang terkena dampak

langsungnya. Selama 10 tahun belakangan, nampak bahwa negara-negara elite dunia berusaha memastikan bahwa pasokan pangan, energi dan bahan baku industri yang menjamin kebutuhan domestik dan lapangan kerja buat penduduknya terjaga. Negara-negara besar, diikuti oleh negara industri baru seperti India dan Brazil, melakukan eksplorasi dan akuisisi lahan serta proyek-proyek besar bidang pangan, energi dan bisnis sampai ke benua lain. Afrika dan wilayah-wilayah yang kurang diberi perhatian di Asia seperti Indonesia bagian Timur menjadi sasaran investasi tersebut. Karena wilayah yang dibidik adalah yang kurang berpengalaman dalam berurusan dengan pihak asing, maka kesepakatan yang dibangun dengan pemerintah lokal berpotensi meleset dari kepentingan nasional. Efek buruknya baru akan terasakan dalam dekade berikutnya.

Konflik terkait sumber daya alam ini juga tercermin dalam syarat-syarat yang diajukan dalam kerja sama perdagangan global masa kini, antara lain di APEC dan melalui kerja sama antarkawasan. Contohnya terkait standar ramah lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa, serta Amerika Serikat. Isu tersebut juga terus didengung-dengungkan terus oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dari negara-negara yang berkepentingan tersebut.

e. Konflik akibat perang *cyber*

Indikasi potensi perang *cyber* atau perang Teknologi Informasi untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Hal tersebut dilakukan

pemerintahan suatu negara menyabotase, meretas, serta melakukan spionase terhadap sistem komputer, militer dan pertahanan dari negara lain. Atau untuk mengambil data-data rahasia dari pemerintah negara lain. Kegiatan ini dilakukan secara terencana, termasuk dengan memanfaatkan *worm* atau program yang dapat merusak peralatan komputer dan satelit serta sistem pertahanan negara lain. Selain sistem pertahanan, sistem pengelolaan listrik, air, bahan bakar, transportasi dan komunikasi juga rentan terhadap serangan macam ini.

Salah satu contoh dari perang ini adalah *worm* yang diciptakan AS dan Israel, yang diberi nama Stuxnet. Sejak masa pemerintahan Presiden George Bush Jr, program itu telah digunakan untuk menciptakan kekacauan dalam sistem pengayaan uranium milik Iran, yakni dengan kode operasi Olympic Games (NYT, 1/6/12). Kegiatan ini didukung pula oleh Presiden Barack Obama sejak hari pertama pemerintahannya. Kegiatan ini lebih canggih daripada upaya sebelumnya dari AS untuk merusak jaringan komputer anggota Al-Qaeda atau mendukung serangan udara NATO di Libya tahun 2011.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga mendeteksi adanya upaya China untuk menyerang jaringan komputer dan pertahanan AS, antara lain seperti yang dilaporkan oleh Bryan Krekel (2009) dan Desmond Ball (2011). Diperkirakan militer China menggunakan doktrin '*Local War Under Informationized Conditions*' yang didasarkan pada arsitektur yang berjejaring lengkap untuk mengoordinasikan operasi di darat, udara, laut

dan luar angkasa melalui spektrum elektromagnetik. Doktrin ini juga punya tujuan untuk mengendalikan jalur informasi musuh agar kekuatan China tetap dominan pada saat perang. Caranya adalah dengan mengembangkan ‘eksploitasi jaringan komputer komprehensif’ agar terjadi *blind spots* di jaringan sistem informasi lawan yang dapat dieksploitasi oleh China.

Cara ini akan dikerahkan oleh China sebagai *pre-emptive action* atau aksi antisipasi. Laporan itu menyebutkan bahwa cara ini sudah dipakai China untuk menyadap informasi dari Taiwan, Jepang dan AS. Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping menyempatkan bertemu untuk mencari penyelesaian atas konflik tersebut. Amerika Serikat mengklaim bahwa berdasarkan laporan dua orang terpercaya Presiden Obama, yakni Direktur Intelijen Dennis Blair dan Duta Besar AS untuk China Jon Huntsman Jr, peretasan oleh China telah merugikan perekonomian hingga lebih dari 300 milyar dolar AS per tahun. Sekitar 70 persen dari pencurian hak properti intelektual dan data perdagangan itu dilakukan oleh China (NYT 25/5/13).

Perang *cyber* juga menjadi duri dalam relasi antara Brazil dan Kanada. Presiden Brazil menuding Kanada melakukan hacking untuk mencuri informasi rahasia pemerintah Brazil seputar data pertambangan dan energi (*The Globe and Mail* 7/10/13). Skandal penyadapan telepon para pemimpin Eropa oleh Amerika Serikat, seperti yang diungkap Snowden, juga menjadi bukti nyata terjadi perang Teknologi Informasi. Begitu pula kasus penyadapan telepon Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono oleh Australia, yang sempat sedikit memanaskan hubungan kedua negara di akhir 2013.

Kelima jenis konflik di atas perlu mendapat perhatian khusus dalam hubungan internasional. Efek yang mungkin terjadi bagi Indonesia bukan hanya dalam hubungannya dengan negara lain, melainkan juga keutuhan sikap di dalam negeri. Para pelaku bisnis atau pemerintah daerah berpotensi terpecah belah atau sekadar menari di atas genderang negara lain. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak.

LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL

Kawasan Asia Timur adalah kawasan yang terbuka dan menjadi salah satu pusat interaksi kekuatan-kekuatan besar dunia. Hal ini disebabkan oleh posisinya yang sangat strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, kawasan ini juga mewarisi beberapa masalah politik-keamanan dari masa Perang Dingin yang masih belum selesai. Beberapa negara Asia Timur meraih kemajuan ekonomi seperti Jepang, kemudian disusul Taiwan, Korea Selatan dan kini China. Namun di sisi lain, isu-isu keamanan tradisional berupa sengketa kedaulatan masih menjadi sumber ketegangan hubungan antarnegara di kawasan ini. Akibatnya, kawasan ini menjadi salah satu wilayah yang sarat dengan ketegangan dan rivalitas militer.

Amerika Serikat telah mengalihkan fokus politik luar negerinya dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Perubahan kebijakan juga berpotensi menimbulkan polemik di kawasan. Berakhirnya perang di Afghanistan dan Irak, perjanjian Amerika Serikat-Iran untuk sementara menghentikan program pengayaan uranium Iran, dan bahwa konflik Syria sepertinya tidak berada dalam kepentingan

strategis Amerika Serikat. Hal tersebut membuat Amerika lebih leluasa untuk memindahkan sumber dayanya dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan dengan China dengan kekuatan militer yang makin besar dan asertif dalam berbagai masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik.

Asia Tenggara yang dimotori oleh ASEAN juga tumbuh secara ekonomi. Kawasan ini menempati posisi strategis secara ekonomi dan militer karena menghubungkan Pasifik dan Samudera Hindia. Dalam dua dasawarsa terakhir, negara-negara ASEAN juga mengembangkan

kekuatan militer dengan penekanan pada kekuatan laut dan udara. Asia Tenggara, seperti halnya dengan Asia Timur, masih menghadapi sengketa dan konflik teritorial di kawasan baik yang bersifat multilateral seperti konflik Laut China Selatan maupun yang bersifat bilateral sesama negara ASEAN. Dalam situasi seperti itu, ASEAN terus berusaha untuk mengembangkan modalitas hubungan internal. Juga modalitas untuk mengakomodasi kehadiran negara-negara besar di kawasan ini.

Selain itu, ASEAN sebagai organisasi regional seharusnya berupaya menciptakan mekanisme yang menciptakan lingkungan yang

“Beberapa negara Asia Timur meraih kemajuan ekonomi seperti Jepang, kemudian disusul Taiwan, Korea Selatan dan kini China. Namun di sisi lain, isu-isu keamanan tradisional berupa sengketa kedaulatan masih menjadi sumber ketegangan hubungan antarnegara di kawasan ini. Akibatnya, kawasan ini menjadi salah satu wilayah yang sarat dengan ketegangan dan rivalitas militer.”

nyaman bagi aktor-aktor regional. Jika hal ini tidak dilakukan, pengembangan persenjataan yang dilakukan oleh masing-masing negara dapat memicu konflik. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa ASEAN dibentuk tidak untuk menjadi organisasi regional yang tertutup, tapi sebagai organisasi regional yang mengakui adanya kepentingan negara-negara besar pada wilayah tersebut.

Secara politik, sengketa warisan Perang Dunia masih menjadi penghambat kemajuan bersama kawasan regional yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia sekarang. Luka lama China dan Korea atas penjajahan Jepang belum juga hilang. Hal itu, antara lain, ditandai dengan selalu protesnya kedua negara tersebut atas kunjungan para pemimpin Jepang ke kuil Yasukuni, yang menjadi simbol penghormatan terhadap para martir Jepang. Perebutan kepulauan Senkaku antara Jepang dan China juga merupakan perwujudan dari perselisihan tersebut. Sementara itu, semenanjung Korea juga masih terbelah menjadi dua entitas politik yang berseteru. Sementara itu, China dan Taiwan juga masih 'status quo' dan belum menemukan format yang disepakati untuk jangka panjang. Sementara itu, Australia yang mencoba meng-Asia juga tetap lebih merepresentasikan wajah 'politik Barat' dibanding dengan Asia.

Tak seperti kawasan Eropa Barat yang relatif memiliki format baku yang sama, perbedaan gaya politik di kawasan regional Asia Pasifik barat ini masih sangat tebal. Tidak hanya di Asia Timur yang masih menyimpan bara dendam sisa Perang Dunia II seperti tersebut di atas, tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina yang berupaya menerapkan model 'demokrasi penuh' sejauh ini masih berada dalam jebakan negara berpenghasilan menengah

(*middle income trap*). Singapura berhasil menembus menjadi negara maju dengan sistem politik seperti demokrasi terpimpin. Hal yang diikuti oleh Malaysia yang juga menjadi sangat maju dibanding dengan banyak tetangganya di Asia Tenggara, namun kemudian juga menghadapi guncangan politik. Thailand yang relatif siap menjadi negara industri juga harus terbelah secara politik. Sementara Vietnam masih meneruskan politik lama komunis, dan Myanmar masih menggunakan pendekatan seperti 'Orde Baru' Indonesia di masa lampau untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah sekarang.

Keragaman politik itu rentan bagi upaya membangun kesatuan yang solid kawasan ini. Hal tersebut berkorelasi pula dengan cara masing-masing negara dalam menangani aspek sosial budaya di negaranya masing-masing. China merasa sah dalam pendekatannya terhadap non-Han seperti Tibet dan Xinjiang yang dipandang oleh negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Pasifik barat, diwarnai banyak pelanggaran HAM serius. Penanganan masalah Rohingya oleh Myanmar juga mengusik perasaan anggota ASEAN lainnya. Sementara itu, masalah perlindungan tenaga kerja domestik asing di Singapura, Malaysia, Hongkong, serta Taiwan juga menjadi hal yang penting dicermati. Persoalan narkoba juga semakin menguat di kawasan regional ini dengan China menjadi pusat peredaran utamanya. Sementara itu, penetrasi budaya secara intensif melalui seni dan kuliner seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada masa sebelumnya juga menjadi fenomena di kawasan regional ini. Pemerintah Korea Selatan aktif menyebarkan 'K-Pop' ke negara-negara lainnya, sebagaimana halnya Thailand juga aktif mendukung penyebaran kulinernya ke berbagai negara.

Secara ekonomi, kawasan regional Asia Pasifik barat ini juga menjadi kawasan paling dinamis di dunia dalam beberapa tahun terakhir maupun beberapa tahun mendatang. China terus mencatatkan diri sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Negara menengah seperti Indonesia dan Filipina juga mencatat pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Sedangkan dalam industri, China mulai pula mengikuti jejak Jepang, Korea Selatan, serta Taiwan yang telah menjadi negara industri yang mapan. Thailand dan Malaysia yang beberapa dasawarsa silam masih tertinggal dari Indonesia juga makin kokoh dalam industri. Bersama Singapura, kedua negara tersebut menjadi salah satu produsen penting komputer dunia. Perusahaan kedua negara tersebut juga efektif dalam berekspansi ke negara lain. Thailand selain mengekspor mobil, juga menguasai industri pakan ternak di Indonesia. Sedangkan Malaysia selain berekspansi dalam kebun sawit juga memiliki posisi kuat dalam perbankan di Indonesia.

Dengan dinamikanya yang tinggi, kawasan regional Asia Pasifik barat juga melahirkan tingkat kesejahteraan tinggi di beberapa negara. Negara-negara di selatan dan utara Indonesia mencatat peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik. Australia, misalnya, di peringkat 2 dunia. Sedangkan Jepang, Korea Selatan, dan Singapura di peringkat 9, 10, dan 18 dunia. Malaysia, Thailand, hingga China yang harus menanggung beban penduduk sangat besar, juga mengalami peningkatan kesejahteraan yang nyata. Meskipun demikian, negara-negara di sebelah timur dan barat Indonesia, justru memiliki kesejahteraan rendah yang tercermin pada peringkat IPM-nya yang tinggi. Negara-negara tersebut adalah negara-

negara Pasifik barat seperti Papua Nugini, serta negara-negara Asia Selatan termasuk India yang sempat didengungkan sebagai salah satu kandidat kekuatan ekonomi penting dunia.

Persoalan sumber daya alam yang paling perlu dicermati adalah energi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta banyaknya jumlah penduduk memerlukan dukungan energi yang memadai. Energi konvensional seperti minyak bumi dan gas masih menjadi tumpuan harapan kawasan regional ini untuk mendukung pertumbuhannya. Kawasan Indonesia merupakan salah satu tumpuan sumber energi tersebut di kawasan ini, memanfaatkan kepentingan negara ini untuk menjualnya guna mendapatkan devisa. Australia menjadi satu-satunya negara maju yang dapat mencukupi energi dari produksinya sendiri.

Perselisihan antara Timor Leste dan Australia menyangkut celah Timor terkait dengan keberadaan sumber energi. Sengketa lama wilayah di Laut China selatan yang melibatkan China dan beberapa negara Asia Tenggara ditengarai bukan hanya persoalan kedaulatan negara, melainkan juga kepentingan mengeksploitasi sumber daya alam. Untuk tidak bergantung sepenuhnya pada minyak bumi dan gas, Jepang dan Korea Selatan banyak mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Jepang sempat mengurangi pemanfaatan PLTN menyusul kebocoran reaktor PLTN Fukushima akibat gempa dan tsunami. Karena harus menanggung beban yang terlalu berat untuk bergantung pada minyak bumi dan gas, Jepang pun mengoptimalkan kembali PLTN-PLTN nya.

Di dalam aspek pertahanan, Asia Pasifik barat adalah wilayah yang tidak memiliki konsep pertahanan bersama sebagai suatu kawasan

tunggal. Setiap negara masih menekankan pada kepentingannya masing-masing dalam berhadapan dengan negara tetangganya di kawasan yang sama. Ketegangan militer menahun antara Korea Utara dan Korea Selatan; antara Korea Utara dan Jepang, antara China dan Jepang, China dan Taiwan, serta China dan negara-negara ASEAN menjadi warna dalam masalah pertahanan dan keamanan regional. Dalam tensi yang lebih rendah terdapat pula ketegangan antara Malaysia dan Filipina serta antara Malaysia dan Indonesia menyangkut klaim wilayah. Peningkatan besar-besaran kekuatan militer China hingga beberapa tahun mendatang akan dapat meningkatkan ketegangan kawasan. Apalagi Amerika Serikat juga mulai mengalihkan sumber dayanya ke Asia Timur dan Tenggara.

Aspek hubungan internasional di kawasan regional Asia Pasifik barat ini akan diramaikan dengan isu perdagangan bebas. Dikembangkannya kerja sama perdagangan bebas menjadi hal penting yang perlu dicermati. Beberapa kerja sama tersebut adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Korea, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, Kemitraan Trans Pasifik, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), serta beberapa lainnya. Selain menyangkut kerja sama ekonomi dan perdagangan, beberapa masalah bilateral juga menghangatkan hubungan antarnegara di kawasan ini seperti masalah imigran gelap antara Australia dan Indonesia, perlindungan tenaga kerja domestik antara Indonesia dan Malaysia, persoalan kabut asap antara Indonesia-Singapura-Malaysia, serta persoalan sengketa wilayah seperti di Laut China Selatan.

LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL

Banyak perubahan yang akan terjadi pada Indonesia 2014-2019 ini. Perubahan paling nyata adalah dalam bidang politik, seiring dengan berlangsungnya Pemilihan Umum 2014 serta Pemilihan Presiden untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Komposisi legislatif tidak banyak mengalami perubahan lantaran sekitar 90 persen dari anggota DPR dari periode sebelumnya mencalonkan diri kembali. Dengan pengalaman politik yang lebih teruji, mereka bukan hanya punya kemampuan untuk terpilih kembali melainkan juga untuk lebih mewarnai DPR hingga 2019 mendatang.

Ranah eksekutif akan mengalami perubahan mendasar bersama dengan terpilihnya Presiden baru setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pergantian presiden akan diikuti dengan pergantian kabinet pula yang bukan saja akan membawa perubahan kebijakan, melainkan juga sedikit banyak mengubah pelaku utama birokrasi di bawahnya. Diharapkan, pemerintahan Kabinet 2014-2019 akan lebih efektif dan responsif dalam menghadapi tantangan dan dinamika di masa yang akan datang.

Ranah eksekutif akan mengalami perubahan mendasar bersama dengan terpilihnya Presiden baru setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan batas maksimal kepemimpinan berdasar konstitusi, yakni dua kali masa jabatan. Pergantian presiden akan diikuti dengan pergantian kabinet pula yang bukan saja akan membawa perubahan kebijakan, melainkan juga sedikit banyak mengubah pelaku utama birokrasi di bawahnya. Secara umum, pemerintahan Kabinet 2014-2019 akan lebih cepat mengambil

keputusan dan bertindak baik karena faktor gaya kepemimpinan presiden baru yang ‘lebih berani’ serta tidak terlalu mementingkan kehati-hatian, karena tantangan keadaan semakin mendesak adanya solusi-solusi nyata secara cepat.

Tantangan terberat secara politik adalah menyangkut sistem dan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dalam beberapa tahun belum menemukan format yang benar-benar mapan. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya tarik ulur pemekaran wilayah yang umumnya lebih didasarkan oleh kepentingan sekelompok kecil pihak dengan menggunakan tekanan politik, juga praktik penyelenggaraan pemerintah daerah yang kadang masih merugikan kepentingan nasional seperti politisasi isu ‘putra daerah’. Masalah reformasi birokrasi juga merupakan tantangan yang harus dihadapi setelah selama ini, upaya tersebut dikritisi tak lebih dari sekadar perbaikan ‘remunerasi’ namun belum mengarah pada peningkatan integritas serta kompetensi yang diperlukan. Masalah eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi persoalan dalam lima tahun mendatang, menyusul indikasi pelemahan lembaga tersebut oleh kalangan politik sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana pada awal 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas politik merasa terugikan oleh keberadaan KPK, dan hal tersebut masih akan berimbas hingga beberapa tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tuntutan untuk melakukan reformasi penegakan hukum juga masih akan mewarnai Indonesia tahun 2014-2019. Tuntutan tidak akan disuarakan secara massal melainkan sebatas terekspresikan dalam pandangan kritis kalangan

akademisi. Praktik ‘bisnis perkara’ yang melibatkan para penegak hukum seperti yang mencuat dalam beberapa kasus pada lima tahun terakhir, belum menunjukkan indikasi akan berhenti sama sekali, walaupun dilaksanakan program ‘remunerasi’ bagi aparat hukum. Implikasinya adalah pada perspektif negatif calon investor asing terhadap jaminan kepastian hukum untuk melakukan investasi sektor industri secara riil di Indonesia, yang bukan melalui Pasar Modal seperti selama ini.

Implikasi lain dari lemahnya kepastian hukum tersebut adalah pada rawannya konflik sosial dan keagamaan di akar rumput. Indonesia dalam lima tahun terakhir diwarnai dengan kekerasan di masyarakat seperti kasus Balinuraga di Lampung, hingga penyerangan terhadap kelompok Syiah yang menimbulkan korban jiwa di Sampang, Madura. Kerawanan sosial yang terkait dengan retaknya keindonesiaan akan gampang tersulut ketika kepercayaan publik terhadap hukum lemah. Kerawanan tersebut masih akan mewarnai kondisi sosial Indonesia lima tahun mendatang. Globalisasi ideologi, baik yang berupa beragam pemahaman keagamaan dari Timur Tengah maupun Barat, serta promosi dan advokasi gencar ideologi liberal dari Amerika Serikat akan memperkeruh kondisi sosial budaya bangsa yang memang rapuh dalam karakter dan jatidiri. Globalisasi juga memarakkan peredaran narkoba dan bahkan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Teknologi Informasi memiliki posisi penting dalam konteks sosial budaya Indonesia 2014-2019. Pada satu sisi, teknologi tersebut menjadi medium penyebaran ideologi asing, baik berupa pemahaman keberagamaan maupun nilai liberal tanpa melalui

‘Indonesianisasi’ sehingga melahirkan kerawanan sosial. Di sisi lain, Teknologi Informasi juga memberi peluang bagi Indonesia untuk melakukan lompatan pada seluruh aspek peradaban. Maka dalam lima tahun mendatang terdapat kebutuhan mendasar untuk mengoptimalkan Teknologi Informasi untuk memajukan Indonesia di seluruh aspek, termasuk sosial. Strategi optimalisasi teknologi tersebut, sebagaimana halnya strategi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau Ipteks, menjadi keperluan Indonesia ke depan.

Kesejalaran strategi pengembangan Ipteks tersebut dengan pengembangan pendidikan merupakan tuntutan lainnya. Pada 2013 Indonesia menempati peringkat 64 dari 66 negara dalam penilaian kemampuan matematika, sains, dan membaca siswa versi PISA yang dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Ringkasnya, daya nalar siswa Indonesia sangat rendah, yang tentu juga berimplikasi rendahnya daya nalar lulusannya yang mengelola berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia juga mengalami ledakan jumlah angkatan muda yang sering diistilahkan secara positif sebagai ‘Bonus Demografi’. Kedua tantangan tersebut masih akan dihadapi Indonesia hingga beberapa tahun mendatang.

Sejauh ini, otoritas pendidikan Indonesia berusaha mengatasinya melalui pengembangan sistem manajemen sekolah, peningkatan akses pendidikan hingga perguruan tinggi secara besar-besaran, serta pengembangan Kurikulum 2013. Beberapa pengamat menilai program tersebut memang diperlukan Indonesia, namun belum menjawab masalah peningkatan kualitas. Dari kecenderungan

yang ada, tantangan dunia pendidikan di Indonesia hingga beberapa tahun mendatang masih akan sama. Aspek terpenting dalam pengembangan kualitas, yakni pengembangan guru serta pengembangan karakter melalui keteladanan, belum terindikasikan akan mendapat rumusan. Demikian pula pengembangan kesehatan secara menyeluruh. Sejauh ini, program yang tertangani berupa jaminan kesehatan yang berarti 'asuransi pengobatan' paling dasar, dan belum menjangkau pembangunan kesehatan secara besar.

Ledakan jumlah penduduk yang menjadi tantangan dunia pendidikan dan kesehatan tersebut juga akan menjadi tantangan bidang ekonomi, terutama menyangkut penyediaan lapangan kerja bagi angkatan mudanya. Karena itu, para ekonom maupun kebijakan ekonomi untuk lima tahun mendatang hampir difokuskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan stabilitas makro seperti selama ini. Tantangannya adalah nilai tukar rupiah yang labil dan rawan spekulasi, tingkat subsidi untuk penyediaan energi yang dapat menggerus devisa, industri yang belum berkembang, dan pertumbuhan nilai ekspor yang cenderung stagnan. Pemerintahan baru 2014-2019 harus berhadapan dengan realitas tersebut.

Kemampuan otoritas ekonomi Indonesia yang disokong dunia akademis cukup memadai untuk mengelola pertumbuhan ekonomi di atas lima persen hingga beberapa tahun mendatang. Juga untuk menjaga stabilitas makro dengan nilai tukar Rupiah yang relatif rendah seperti pada tahun-tahun terakhir. Di luar hal tersebut, dunia ekonomi dituntut untuk mampu pula meningkatkan pemerataan pada saat produk pertanian dan barang-barang impor makin membanjiri pasar dalam negeri seiring dengan diperlakukannya

sistem perdagangan bebas, serta tenaga kerja asing yang semakin banyak mengisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Masa depan petani dan industri rumah tangga akan menjadi pertaruhan.

Posisi ekonomi saat ini menempatkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah yang dipandang rawan pada jebakan *'middle income trap'*. Jebakan yang menghalangi negara-negara yang terkena seperti Indonesia dan Filipina untuk dapat menjadi negara maju. Untuk itu sektor ekonomi dituntut mampu melakukan terobosan untuk melewati 'ambang stabilitas demokrasi' dengan GNP 6.000 dolar AS per kapita, dengan tingkat pemerataan yang lebih baik dari selama ini. Persoalannya adalah bahwa para ekonom serta otoritas perekonomian Indonesia dewasa ini belum memiliki kapasitas memadai yang teruji untuk mengaitkan ekonomi dengan pengembangan industri dan Ipteks lantaran lebih terfokus semata pada aspek makro. Apalagi konsep dan paham ekonomi dewasa ini, sebagaimana dikemukakan para ekonom dunia dalam menanggapi Krisis Eropa tersebut di atas, dipandang sudah tidak memadai lagi untuk dipergunakan dalam pengelolaan ekonomi. Kalangan ekonomi dituntut untuk lebih rendah hati belajar dari praktik yang ada di setiap negara.

Maka, tekanan untuk mengaitkan pengembangan ekonomi mendatang dengan pengembangan industri dan pengelolaan lingkungan secara baik akan menguat. Apalagi masalah sumber daya alam, khususnya masalah energi, akan menjadi titik rawan bagi Indonesia masa depan. Energi saat ini menjadi salah satu penghambat kemajuan Indonesia secara menyeluruh. Akan terdapat tuntutan untuk merumuskan strategi ketahanan ekonomi dengan berbagai

bauran sumber mulai dari minyak bumi dan gas, bahan nabati, panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga nuklir seperti yang dikembangkan Korea Selatan dan negara-negara maju lain, hingga sumber-sumber energi lain.

Tekanan untuk mengelola sumber daya alam lain seperti hutan kelautan juga akan menguat dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sebagai negara yang menjadi paru-paru dunia selain Brazil, pengelolaan hutan di Indonesia masih pada tingkat rendah baik untuk konservasi atau pelestarian maupun untuk ikut pengembangan industri. Demikian pula pengelolaan perikanan dan kelautan yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Keterbatasan kemampuan pengelolaan sumber daya alam tersebut tak lepas dari kualitas manajemen pemerintahan secara umum, yang juga terkait dengan mutu pendidikan seperti yang telah dikemukakan di depan. Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Indonesia 2014-2019.

Menyangkut aspek ketahanan bangsa secara internal terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Salah satunya adalah konflik

“...sektor ekonomi dituntut mampu melakukan terobosan untuk melewati ‘ambang stabilitas demokrasi’ dengan GNP 6.000 dolar AS per kapita, dengan tingkat pemerataan yang lebih baik dari selama ini. Persoalannya adalah bahwa para ekonom serta otoritas perekonomian Indonesia dewasa ini belum memiliki kapasitas memadai yang teruji untuk mengaitkan ekonomi dengan pengembangan industri maupun Ipteks lantaran lebih terfokus semata pada aspek makro.”

horizontal yang terjadi karena berbagai faktor. *Pertama*, adanya tekanan ekonomi, sosial politik, dan kepadatan penduduk terhadap kehidupan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Hal ini terjadi bersamaan dengan berkurangnya kemampuan negara dalam menyelenggarakan distribusi sumber ekonomi, politik dan sosial. Sebagai contoh, lebih dari separuh penduduk Indonesia mendiami Pulau Jawa yang mampu menopang kehidupan penduduknya dengan lebih baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. *Kedua*, munculnya politik identitas dengan manifestasi etnis dan penguatan kelompok-kelompok agama. Hal ini hanya akan terjadi ketika ketidakadilan distribusi sumber-sumber ekonomi dan politik dipersepsikan berimpitan dengan perbedaan identitas. Pada umumnya, masalah politik identitas-komunal ini bertahan lama dan bersifat sangat emosional. Konflik yang muncul dari politik identitas pun cenderung bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Konflik vertikal terjadi antara negara dan masyarakat yang berupa separatisme senjata dan gerakan politik yang turut menjadi ancaman nasional. Indonesia telah lama menghadapi konflik vertikal yang terjadi di Aceh dan Papua dengan semua dimensi dan perubahan karakter konfliknya saat ini. Jika dilihat akarnya, kedua konflik tersebut merupakan perpaduan antara ketidakpuasan daerah terhadap ketimpangan distribusi ekonomi dan pelanggaran fisik berupa represi. Hal ini membentuk ketidakpercayaan dan kebencian terhadap pemerintah pusat. Sentimen-sentimen seperti ini menyediakan lahan subur bagi gerakan pemisahan diri secara bersenjata. Konflik vertikal menjadi lebih rumit ketika secara

politik dan emosional melibatkan aspek kekhasan budaya, etnis, dan sejarah. Terlebih lagi apabila pihak-pihak yang melakukan separatisme mencari dan mendapatkan dukungan internasional.

Sementara itu, bencana alam juga merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Sebab, negara ini berada dalam cincin api (*ring of fire*) karena pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Keadaan geografis ini menjadikan Indonesia sangat rawan terhadap bencana alam. Telah terjadi beberapa bencana alam yang menghasilkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Sebagai contoh, tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, serta tsunami di Pangandaran. Sejarah yang lebih jauh lagi juga telah mencatat bencana alam yang sangat besar, yakni letusan Gunung Tambora, Gunung Krakatau, Gunung Agung, gelombang di sekitar Mentawai, dan lain sebagainya.

Di tengah berbagai ancaman tersebut, Indonesia juga harus tetap aktif memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kancah internasional. Kepentingan nasional secara sederhana diartikan sebagai tujuan dan ambisi suatu bangsa yang biasanya terkait dengan *power* atau kemampuan untuk berpengaruh dalam kegiatan pergaulan global. Pada tataran umum, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dari lingkungan negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih diperhitungkan dunia dengan keterlibatannya di berbagai lembaga, mulai dari ASEAN, APEC, hingga dan lain-lain. Meskipun demikian, Indonesia belum cukup efektif untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam aspek ekonomi.

Dengan slogan ‘ribuan teman dan tanpa musuh’ serta ‘keseimbangan dinamis’, Indonesia cenderung mengedepankan harmoni dalam politik luar negerinya. Kebijakan tersebut dihormati oleh negara-negara lain, namun tidak efektif untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sendiri. Ketidakefektifan tersebut ditambah dengan aspek manajemen serta kapasitas pelaku diplomasi yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk dapat berhadapan dengan kepentingan negara-negara lain. Padahal, di sisi lain, ranah hubungan internasional juga telah bergeser dengan melibatkan semakin banyak aktor-aktor non-negara. Pada 2014-2019, para aktor non-negara seperti bisnis trans-nasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan penelitian, serta media massa, akan makin aktif berperan dalam hubungan internasional.

Paparan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional, maupun nasional yang akan dihadapi Indonesia untuk masa 2014-2019 penuh tantangan. Hal tersebut terlihat pada semua aspek, baik politik, sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam, pertahanan, maupun hubungan internasional. Memerlukan tekad, upaya tanpa henti, bahkan ketulusan dan kerendahan hati untuk terus belajar agar dapat menaklukkan tantangan-tantangan tersebut. Di balik kesulitan untuk menaklukkannya justru terhampar kesempatan besar bagi Indonesia untuk dapat melompat maju sebagaimana harapan bersama seluruh anak bangsa.*

BAB II

POLITIK

MENUJU DEMOKRASI TERKONSOLIDASI



POLITIK

MENUJU DEMOKRASI TERKONSOLIDASI

“.... sejak ratusan tahun yang lalu, kita bangsa Indonesia telah merasa senasib dan sepenanggungan sehingga timbul perasaan kebangsaan, timbul perasaan persatuan, timbul kesatuan kepribadian yang telah berurat berakar turun temurun.”

~ HM Soeharto-Presiden RI ke 2 ~

Hingga tahun 2014, proses reformasi politik atau demokratisasi di Indonesia telah berjalan selama enam belas tahun. Sampai di manakah perjalanan tersebut? Apakah Indonesia telah menjadi sebuah negara demokratis? Seperti dirangkum oleh Marcus Mietzner dan Edward Aspinall (2010), pandangan para pengamat dan akad emisi tentang seberapa sukses demokratisasi di Indonesia tidaklah sama. Sebagian kalangan melihat Indonesia telah menjalankan proses demokratisasi dengan sangat baik, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami

Indonesia telah mengalami kemajuan demokrasi, namun masih mengalami permasalahan struktural, seperti korupsi dan penegakan hukum yang lemah, yang membuat demokrasi belum terkonsolidasi dengan sempurna.

kemunduran setelah beberapa waktu memulai proses demokratisasinya. Perbandingan yang paling jelas adalah dengan proses transisi demokrasi di Mesir.

Di sisi yang berseberangan, ada kelompok yang memandang bahwa demokratisasi di Indonesia tidak dapat dikatakan benar-benar berhasil. Bagi kelompok ini, perubahan demokratis di Indonesia hanyalah perubahan yang semu. Memang ada pemilihan umum di level pusat dan daerah,

namun tidak memberi perubahan yang berarti dalam struktur ekonomi politik Indonesia. Kekuasaan di berbagai tingkatan itu tetap dikuasai segelintir orang. Keikutsertaan rakyat hanya ada dalam pemilihan umum (pemilu) yang rutin. Itu pun sangat dipengaruhi politik uang dan manipulasi. Di tengah-tengah antara dua kelompok ini, ada sekelompok pengamat yang melihat, Indonesia telah mengalami kemajuan demokrasi, namun masih mengalami permasalahan struktural, seperti korupsi dan penegakan hukum yang lemah, yang membuat demokrasi belum terkonsolidasi dengan sempurna.

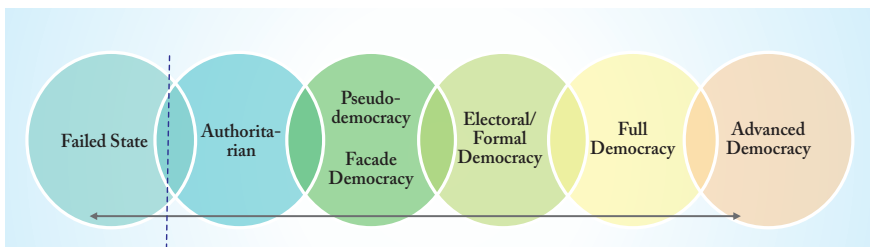
Perbedaan pandangan ini terkait erat dengan parameter yang digunakan untuk mengukur kesuksesan demokratisasi itu. *Freedom House* dan mereka yang melihat bahwa demokratisasi Indonesia adalah sebuah contoh sukses cenderung menggunakan definisi minimalis dari demokrasi. Seperti definisi Schumpeter

yang menekankan pada keberadaan pemilu untuk menentukan kepemimpinan politik dan definisi “poliarki” Robert Dahl, yang melihat pada aspek institusional.

Sementara itu, mereka yang melihat sisi negatifnya cenderung melihat bahwa aspek institusi ini hanyalah sesuatu yang bersifat semu dan permukaan saja. Dengan demikian, penentuan definisi yang digunakan akan mempengaruhi evaluasi kita terhadap tingkat keberhasilan demokratisasi di Indonesia. Lantas, definisi dan parameter apa yang digunakan dalam tulisan ini?

Masa depan politik Indonesia dapat diproyeksikan dengan menyusun “garis skenario” yang terdiri dari enam tangga bertingkat. Untuk mencapai tangga demokrasi, prasyarat pertama adalah posisi ‘negara’ yang setidaknya masuk ke dalam skenario ‘negara otoriter’. Jika negara itu ditambah dengan adanya institusi pemilu yang masih dikendalikan negara, tingkat negara tersebut naik menjadi ‘demokrasi semu’. Ketika pemilu tersebut berkembang menjadi bebas, negara tersebut masuk ke dalam kategori ‘demokrasi formal’.

Garis Skenario Masa Depan Politik Indonesia



Sumber: Andreas Schedler, 2001 & Jeff Haynes, 2001

Pada tahap ini belum ada jaminan yang kuat bagi hak-hak sipil dan politik. Begitu jaminan bagi hak-hak sipil dan politik itu telah terpenuhi secara kuat, maka negara tersebut masuk ke dalam tipologi ‘demokrasi penuh’. Tangga terakhirnya adalah partisipasi optimal dari warga negara, yang mengantarkan negara tersebut pada tipologi ideal yang disebut ‘demokrasi maju’. Untuk mengetahui titik awal posisi Indonesia di dalam “garis skenario” itu, yang perlu dilakukan adalah mengetahui tangga apakah yang telah dilalui oleh sistem politik Indonesia.

POSISI POLITIK INDONESIA

Tangga pertama adanya negara atau *stateness* telah terlampaui. Kecuali anomali berskala kecil di Papua, negara masih memegang kedaulatan seluruh wilayah. Monopoli penggunaan kekerasan (senjata) juga masih dikuasai negara, meski terjadi juga penggunaan kekerasan oleh kelompok-kelompok negara. Meski demikian, harus dicatat, negara ini bukan sesuatu yang *given* dan statis. *Failed States Index* 2013 mencatat tentang pergeseran peringkat Indonesia dalam indeks yang mengukur kerentanan menuju “kegagalan negara.”

Secara umum semua sepakat, Indonesia telah melampaui tangga ‘negara otoriter’ dengan diselenggarakannya pemilu rutin. Setelah Reformasi 1998, Indonesia melaksanakan Pemilu 1999, 2004, dan 2009. Mulai 2004, pemilihan presidenpun dilakukan secara langsung. Ini dapat dipahami mengingat penataan ulang sistem politik merupakan salah satu prioritas, seperti terlihat dalam produk hukum dan perundangan pada awal reformasi yang dirangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Produk Hukum dan Perundangan Utama
Awal Masa Reformasi**

Hukum	Isu
Amandemen Konstitusi	Reorganisasi struktur kekuasaan politik MPR, DPR dan Presiden
UU No. 33/1999	Pemilu dan partai politik
UU No. 22/1999	Desentralisasi fungsi-fungsi pemerintahan
UU No. 25/1999	Desentralisasi keuangan /transfer fiskal

Sumber: Anis Baswedan, 2013

Berdasarkan perundang-undangan yang lahir setelah Reformasi, Indonesia memulai penerapan sistem multipartai menggantikan sistem partai politik (parpol) terbatas (tiga parpol) yang dijalankan 32 tahun Orde Baru. Undang-undang mengenai parpol dan pemilu saat ini sangat progresif dibandingkan dengan praktik 32 tahun Orde Baru. Sampai pada dua ‘tangga’ yang paling dasar, demokratisasi tersebut tidak ada perbedaan pendapat. Perdebatan muncul di tangga ketiga, yaitu apakah pemilu benar-benar berjalan adil, kompetitif, dan inklusif?

Pengkaji politik dari Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah misalnya, sepakat bahwa Pemilu 2009 memang telah bersifat bebas. Namun, berulang kali ia menyatakan, pelaksanaan pemilu tersebut masih dipenuhi kecurangan yang disebutnya sebagai ‘liberal Machiavellian election’, pemilu yang liberal namun dipenuhi tipu muslihat.¹

Tanpa menafikan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya, dapat dikatakan, pemilu di Indonesia telah berlangsung dengan relatif adil, kompetitif dan inklusif. Hal ini terlihat dari hasil pemilu Indonesia yang berubah dengan dinamis. Pada tahun 1999, peraih suara terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 33,7 persen suara. Pada 2004, peraih suara terbanyak adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 21,6 persen suara. Pada tahun 2009, peraih suara terbanyak adalah Partai Demokrat dengan 20,8 persen suara. Tabel 6 di bawah ini mencatat tiga peraih suara terbanyak dalam Pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Tabel 2. Tiga Besar Pemenang Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 1999, 2004 dan 2009

1999		2004		2009	
Partai	%	Partai	%	Partai	%
PDIP	33,74	Golkar	21,62	Demokrat	20,81
Golkar	22,44	PDIP	18,31	Golkar	14,45
PPP	10,71	PKB	10,61	PDIP	14,01

Sumber: KPU, 2009

Dengan demikian, setidaknya Indonesia telah masuk ke tangga “demokrasi formal.” Di tangga selanjutnya, perdebatannya menjadi lebih pelik: apakah Indonesia sudah menjamin dengan kuat hak-hak sipil dan politik? *Freedom House* memberikan nilai 3 (1 adalah nilai terbaik dan 7 adalah nilai terburuk) pada hak-hak sipil dan nilai 2 pada hak politik di Indonesia (1 adalah nilai terbaik dan 7 adalah nilai terburuk), sehingga rata-rata Indonesia menjadi 2,5 (rating kebebasan) dan masih termasuk kategori “free” (“bebas”).²

Nilai yang cukup positif ini barangkali dapat dipahami jika ukuran yang digunakan adalah perbandingan dengan berbagai negara lain di dunia. Namun, adanya berbagai peristiwa kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparaturnegara (*by commission*) maupun melalui pengabaian oleh negara (*by omission*) yang terjadi di negeri ini terhadap berbagai kelompok minoritas, membuat sulit untuk mengatakan bahwa negara telah melindungi hak sipil dan politik warga negara dengan kuat. Menurut laporan Setara Institute, pada 2012 saja terjadi 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi di 28 provinsi di Indonesia.

Dengan membandingkan laporan kedua lembaga itu, posisi Indonesia dapat ditempatkan di antara ‘demokrasi formal’ karena ada pemilu yang adil dan kompetitif dan ‘demokrasi penuh’. Yakni, demokrasi yang dibangun dengan pemilu yang adil dan kompetitif serta perlindungan terhadap hak sipil dan politik yang kuat. ‘Demokrasi penuh’ itu belum tercapai sempurna karena negara belum mampu menjamin sepenuhnya hak sipil dan politik warga negara. Karena tangga “jaminan perlindungan yang kuat atas hak sipil dan politik” pun belum terpenuhi, maka tangga berikutnya, yaitu “partisipasi optimal dari warga negara” pun belum terpenuhi.

Secara formal semua penduduk berhak terlibat dalam politik. Tapi kenyataannya, belum semua warga negara memiliki akses pada perumusan kebijakan publik yang mempengaruhi nasib mereka karena masih dominannya kekuasaan dari sebagian elite dalam masyarakat politik Indonesia. Banyak kebijakan publik dibuat tidak untuk kepentingan publik, namun untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, untuk menghindari campur

tangan masyarakat, banyak proses pengambilan kebijakan publik dilakukan dengan tidak transparan. Dengan logika itu, kita dapat melihat, apakah sebuah negara sudah mencapai tahap ‘demokrasi maju’. Yaitu, tahapan demokrasi yang di dalamnya setiap warga negara dapat berpartisipasi optimal dalam kebijakan publik dengan melihat tingkat transparansi dan korupsi di negara tersebut?.

Dalam konteks ini, kita harus mengakui, Indonesia memang belum masuk dalam kategori “demokrasi maju.”Persepsi terhadap tingginya angka korupsi dan juga realita dari mengguritanya korupsi di Indonesia tidak bisa kita sangkal. Angka-angka menunjukan hal itu. Sebagai contoh, peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International belum mengalami perbaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan 178 negara, kita masih berada di peringkat di atas 100.

Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia



Sumber: Transparency, International, 2011

Peringkat Indonesia yang sedikit meningkat pada 2009 ke atas berkaitan dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap relatif berhasil menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di berbagai tingkat dan sektor pemerintahan, mulai dari anggota DPR dan DPRD, kepala daerah, hingga duta besar. Dari 2004 sampai 2013, terdapat 72 orang anggota DPR dan DPRD, 8 orang hakim, 9 orang menteri dan kepala lembaga, 9 orang gubernur, 34 orang walikota/bupati/wakil, serta 114 orang pejabat eselon I, II, dan III yang telah ditangkap oleh KPK.³

Selain memberikan kabar gembira bahwa kini para pejabat negara dapat dihukum karena korupsi, data tersebut juga memperlihatkan bahwa birokrasi adalah salah satu lokus di mana korupsi paling banyak terjadi. Bukan hanya jumlah nominal yang dikorupsi yang penting, melainkan juga birokrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebab, demokratisasi digulirkan di Indonesia adalah untuk terciptanya kebijakan publik yang baik dan berorientasi pada pelayanan kepentingan masyarakat.

Perjalanan Indonesia dalam proses demokratisasi tersebut mengikuti jalur transisi *double-track* yang juga dialami negara-negara demokrasi baru. Transisi ganda melibatkan track *pertama*, yaitu tindakan untuk membangun sistem politik kompetitif untuk menggantikan sistem politik tidak kompetitif yang dijalankan rezim pemerintahan otoriter sebelumnya. Pada track *kedua*, secara natural, negara-negara demokrasi baru melakukan desentralisasi kekuasaan, yang tadinya terkonsentrasi pada sedikit tangan di pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua *track* ini tidak bisa dipisahkan, yang satu mempengaruhi yang lain.

Desentralisasi diharapkan dapat memperkuat demokrasi. Sebab, desentralisasi menyediakan kesempatan bagi pemerintah daerah/lokal untuk menciptakan lingkup yang kondusif bagi demokrasi melalui beragam cara, di antaranya, memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui program-program pembangunan lokal, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan daya respons terhadap kepentingan masyarakat lokal, serta memperbaiki derajat keterwakilan karena jarak yang memerintah dan diperintah semakin pendek.⁴

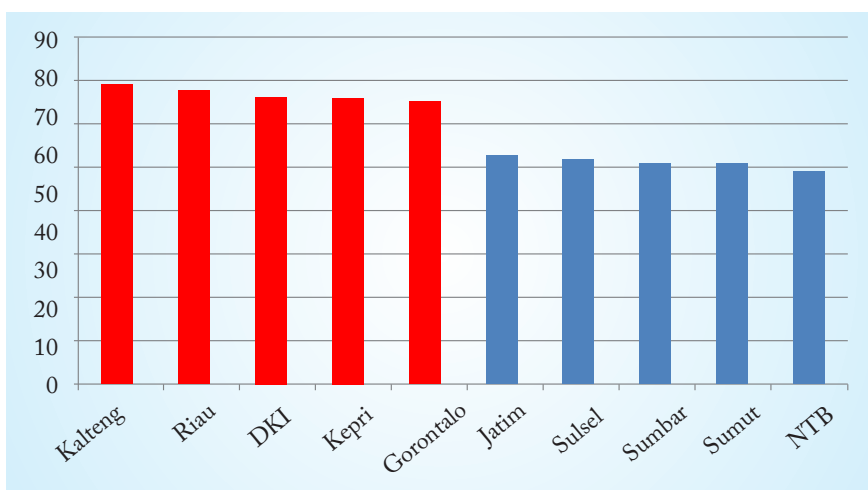
Perkembangan demokrasi yang terkait dengan desentralisasi dapat dikaji, antara lain, dengan melihat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009 yang dirumuskan tim dan didukung penuh oleh Bappenas. IDI 2009 relevan dikemukakan di sini mengingat pengukuran dilakukan sedemikian rupa sehingga bisa menangkap variasi pada setiap provinsi di Indonesia. Setidaknya ada tiga aspek demokrasi yang terpenting, yaitu kebebasan sipil (*civil liberties*), hak-hak politik (*political rights*), dan keberadaan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*) terangkum dalam data tersebut. Kajian tersebut dapat ditelaah lebih lanjut, namun setidaknya hal ini dapat membantu melihat variasi tingkat pelaksanaan demokrasi di seluruh provinsi.

Grafik itu memperlihatkan perbedaan kualitas demokrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Provinsi yang memiliki indeks demokrasi terbaik adalah Kalimantan Tengah, bukan sebuah provinsi di Jawa yang selama masa Orde Baru umumnya relatif menikmati kemajuan lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di luar Jawa.

Grafik yang sama juga memperlihatkan, provinsi-provinsi “besar” yang selama ini seringkali dijadikan referensi, seperti Jawa

Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, justru ditemukan memiliki indeks demokrasi yang rendah, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Artinya, desentralisasi memungkinkan kita melihat bahwa masyarakat kita yang tersebar di berbagai provinsi memiliki kualitas yang berbeda-beda dalam menjalankan demokrasi. Pandangan kita yang selama ini Jakarta-sentris, dan juga sampai titik tertentu “Jawa-sentris” dalam menilai segala sesuatu, termasuk menilai “kemampuan” berdemokrasi masyarakat Indonesia, sejatinya harus diubah.

**Grafik 2. Indeks Demokrasi Indonesia
(5 Provinsi Teratas dan Terbawah)⁵**

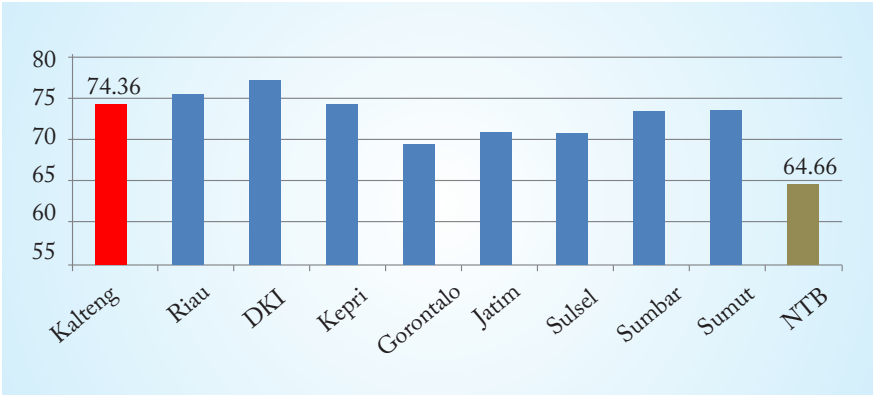


Lalu, apa pentingnya kalau kita tahu bahwa satu daerah lebih demokratis dibandingkan dengan yang lain? Salah satunya adalah untuk melihat kaitan antara demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, reformasi politik yang kita gulirkan pada saat reformasi, yaitu demokratisasi, bertujuan mewujudkan masyarakat yang lebih

adil dan makmur. Salah satu cara mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index* (IPM). Maka, menarik untuk menengok IPM kesepuluh provinsi di atas, paling tidak pada 2009.

Grafik berikut memperlihatkan sebuah pola yang penting diperhatikan. Lima provinsi dengan Indeks Demokrasi tertinggi (kecuali Provinsi Gorontalo) ternyata juga memiliki Indeks Pembangunan Manusia lebih tinggi dibandingkan dengan lima provinsi yang memiliki Indeks Demokrasi terendah. Paling tidak, hal ini memberi indikasi awal bagi kita bahwa terdapat hubungan yang asosiatif antara demokrasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan ukuran Indeks Pembangunan Manusia, di kesepuluh provinsi tersebut.

Grafik 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2009 di 10 Provinsi dengan IDI Terendah/Tertinggi



Sumber: Biro Pusat Statistik

Temuan di level daerah ini mengonfirmasi rumusan tentang sepuluh indikator kunci (terutama indikator “tingkat kesejahteraan”)

yang digunakan untuk menebak kecenderungan perkembangan konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam penelitian ini. Desentralisasi sendiri akan dibahas lebih lanjut sebagai salah satu “*driving forces*” yang akan menentukan masa depan politik Indonesia.

MEMBACA MASA DEPAN

Realitas politik Indonesia hingga 2013 menjadi landasan untuk melihat masa depan politik Indonesia, setidaknya untuk masa 2014-2019. Untuk dapat melakukan hal itu perlu ditelaah lebih lanjut sejumlah indikator penting yang berpengaruh pada perkembangan politik masa depan. Sejumlah indikator tersebut adalah tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi; pemerataan; pelebagaan masyarakat ekonomi; kebebasan masyarakat sipil; otonomi masyaralat politik; birokrasi; budaya politik demokratis; serta penegakan hukum dan penegak hukumnya.

- Indikator 1 & 2: tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi

Berbagai pihak di dalam dan di luar negeri cenderung melihat aspek kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimistis. Chairul Tanjung, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) berulang kali mengungkapkan proyeksi Indonesia yang cerah. Pada 2050, Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi terbesar dunia keempat setelah India, Cina, dan Amerika Serikat (AS) dengan ukuran ekonomi mencapai 13,9 trilyun Dolar AS, di atas Brazil (11,6 trilyun Dolar AS) dan di bawah AS (39,1 trilyun Dolar AS). Pada 2030, Indonesia diprediksikan sudah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia dan pada 2020 sudah menduduki peringkat kesembilan.⁶

Grafik 4. Proyeksi Pertumbuhan dan GDP Per Kapita Indonesia oleh Tim Visi 2030⁷



Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tingkat kesejahteraan juga akan meningkat dengan pesat. Proyeksi yang disusun oleh Visi 2030 ini menunjukkan, Indonesia akan mencapai GDP perkapita di atas 7.000 pada 2020. Optimisme yang sama juga ditunjukkan oleh para pengamat dari luar Indonesia, meskipun tingkat pertumbuhan ekonominya tidak sebesar yang diprediksikan KEN. Dalam *Imagining Asia 2020*, Indonesia diprediksikan akan mampu mencapai tingkat GDP perkapita Amerika Serikat dalam 41 tahun (dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen).

Hasil penelitian Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, dan Fernando Limongi menunjukkan adanya hubungan pendapatan per kapita dengan lamanya demokrasi dapat bertahan. Penelitian terhadap 135 negara

dari 1950 hingga 1990 tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kokoh pula demokrasi yang terbangun.

Tabel 3. Pendapatan Per Kapita dan Usia Rata-rata Demokrasi

Pendapatan Per Kapita (US Dollar)	Lama Rata-rata Demokrasi Dapat Bertahan
< 1.000	8,5 tahun
1.000 – 2.000	16 tahun
2.000 – 4.000	33 tahun
4.000 – 6.000	100 tahun
>6.000	Tak tergoyahkan

Sumber: Adam Przeworski dkk

Dengan mengacu pada penelitian itu, wajar bila terdapat optimisme bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan demokrasi. Dengan asumsi bahwa 6.000 dolar AS adalah titik kritis yang akan mengunci jalur demokrasi sehingga tidak bisa mengalami '*democratic reversal*', demokrasi di Indonesia akan dapat bertahan dengan berkelanjutan jika Indonesia telah berhasil meraih angka tersebut pada periode 2015-2020.

Namun, prediksi-prediksi optimistis ini harus disikapi dengan hati-hati karena didasarkan pada asumsi perkembangan yang tetap, linear dan positif. Contohnya, prediksi KEN yang optimistis tersebut didasarkan pada empat faktor kunci: lingkungan politik

”Jika ada krisis ekonomi yang besar dan sistem keuangan Indonesia ternyata tidak mampu menghadapi guncangan tersebut, akibatnya konsolidasi demokrasi akan terhambat.

yang baik, integrasi dengan jejaring global dan regional, demografi (*dependency ratio* yang rendah dan populasi produktif yang bertumbuh), serta sistem keuangan yang tangguh. Jika salah satu dari empat hal ini (kecuali demografi yang relatif tidak bisa diubah dengan cepat) mengalami guncangan, maka tren positif untuk konsolidasi demokrasi ini dapat berubah dengan cepat.

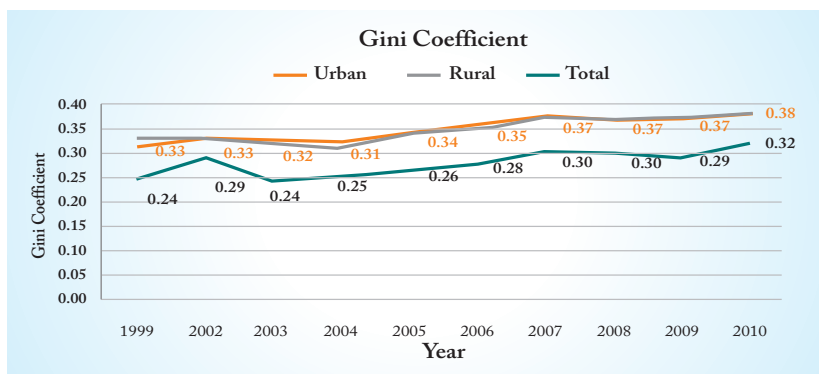
Titik kritis yang dapat diidentifikasi dalam kedua indikator ini adalah kehadiran “krisis ekonomi.” Jika ada krisis ekonomi yang besar dan sistem keuangan Indonesia ternyata tidak mampu menghadapi guncangan tersebut, kecenderungan positif pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan akan terpengaruh. Akibatnya, konsolidasi demokrasi akan terhambat. Selain akan memperkuat konsolidasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, juga bergantung pada konsolidasi demokrasi yang akan menopang kedua hal itu. Maka, melihat indikator lain yang mempengaruhi perkembangan demokrasi adalah penting.

● Indikator 3: Pemerataan

Kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia rupanya tidak dapat diimbangi dengan kecepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Secara umum, Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan kesenjangan sosial, sebagaimana

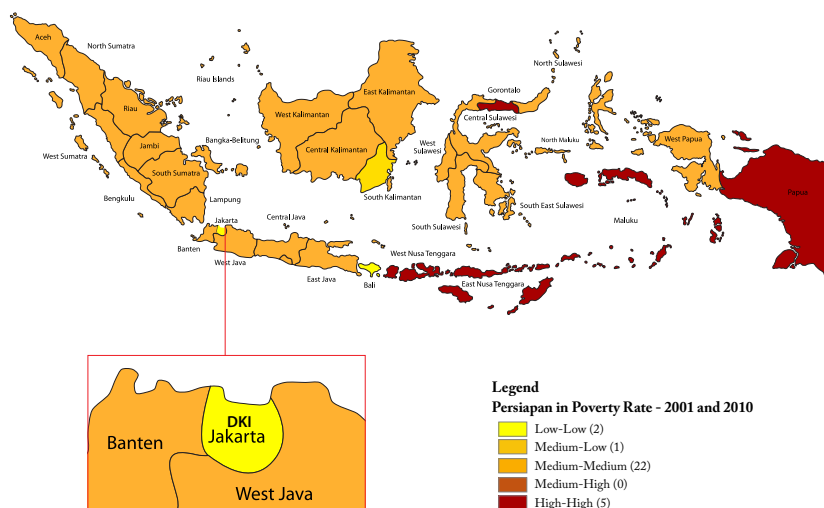
ditunjukkan oleh peningkatan koefisien gini. Kesenjangan sosial dalam ukuran koefisien gini meningkat 5 poin dari 0,33 menjadi 0,38 pada 2010 (nilai 1 adalah nilai kesenjangan tertinggi). Pada 2012, koefisien gini Indonesia telah meningkat lagi menjadi 0,41.⁸

Grafik 5. Koefisien Gini Indonesia 1999-2010⁹



Ketidak merataan yang meningkat ini juga diperumit adanya kesenjangan antar-daerah akibat pembangunan yang tidak merata. Berdasarkan penelitian Riyana Miranti, dkk (2013), tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal tingkat persentase penduduk miskin dari 2001-2010. Peta yang disusun berdasarkan tingkat persentase penduduk miskin 2001-2010 itu menggambarkan kesenjangan antar-daerah yang sangat jelas: Indonesia Timur dan Tengah secara umum berwarna merah, menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi baik pada 2001 maupun 2010.

Grafik 6. Peta Tingkat Kemiskinan Indonesia (2001-2010)¹⁰



Dalam kajian mengenai konsolidasi demokrasi, diyakini bahwa peningkatan pemerataan akan berpengaruh positif bagi konsolidasi demokrasi. Sementara itu, peningkatan kesenjangan akan menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi. Dalam indikator pemerataan ini, jika kita menerima pandangan tersebut, konsolidasi demokrasi akan mendapatkan hambatan yang serius.

Titik kritis yang dapat membalik kecenderungan ini adalah desentralisasi. Jika desentralisasi berjalan baik dan efektif, kita dapat menekan kesenjangan tersebut. Sebaliknya, jika desentralisasi menjadi “desentralisasi korupsi,” kesenjangan tersebut akan semakin terpelihara dan menjadi hambatan serius bagi konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, indikator ketiga ini akan sangat berkaitan dengan indikator keempat.

- Indikator 4: Pelembagaan Masyarakat Ekonomi (*Economic Society*)

Linz dan Stepan dalam *Toward Consolidated Democracies* mengatakan, dalam demokrasi yang terkonsolidasi dibutuhkan norma, institusi dan regulasi yang memediasi antara negara dan pasar (yang disebutnya sebagai “masyarakat ekonomi”) dengan adil dan bebas. Tidak ada demokrasi yang memiliki ekonomi terpusat kecuali mungkin pada masa perang, namun juga tidak ada demokrasi yang di dalamnya negara tidak memiliki peran sama sekali.

Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan pelembagaan itu telah dilakukan melalui berbagai undang-undang, salah satunya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu, upaya pelembagaan masyarakat ekonomi ini juga sangat berkaitan dengan upaya memerangi korupsi, karena korupsi (terutama yang melibatkan pejabat negara dan pengusaha) adalah tanda paling jelas bahwa institusi masyarakat ekonomi yang memediasi antara negara dan pasar tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, dengan memberikan gratifikasi, pengusaha mendapatkan jatah proyek dari pemerintah. Contoh lainnya sumber daya negara digunakan untuk kepentingan ekonomi kelompok-kelompok yang sedang menguasai akses terhadap sumber daya tersebut. Dalam kasus-kasus korupsi itu, batas antara negara dan pasar menjadi tidak jelas.

Dalam konteks ini, implementasi dari upaya melembagakan masyarakat ekonomi itu menjadi tantangan berat. Salah satu

Para elite yang
dibesarkan Orde Baru
namun tidak ikut
tumbang bersama
Soeharto, berlomba
mengumpulkan
sumber daya ekonomi
itu dengan terlibat ke
dalam politik.

faktor utamanya adalah karena mereka yang menguasai akses sumber daya ekonomi berupaya mengumpulkan lebih banyak lagi akses pada sumber daya ekonomi tersebut melalui proses politik. Bagi sebagian kalangan yang skeptis pada demokratisasi di Indonesia, demokrasi di Indonesia telah dibajak para elite yang dibesarkan Orde Baru namun tidak ikut tumbang bersama Suharto. Para elite ini kemudian

berlomba mengumpulkan sumber daya ekonomi itu dengan terlibat ke dalam politik.¹¹ Selain itu, para pemain baru dalam politik Indonesia pun banyak yang berperilaku sama, seperti yang kita lihat dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan parpol yang selalu menghiiasi televisi nasional. Namun kita juga melihat, ada perkembangan positif, seperti keberhasilan KPK membongkar berbagai kasus korupsi yang merusak pelebagaan “masyarakat ekonomi” ini atau reformasi birokrasi yang dipimpin oleh berbagai kepala daerah di Indonesia.

Dalam indikator keempat ini, kita melihat bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melembagakan “masyarakat ekonomi,” yang merupakan arena untuk mediasi antara negara dan pasar. Masih banyak tantangan dalam upaya tersebut, terutama karena korupsi yang sedemikian merajalela. Meskipun demikian, kita juga melihat berbagai kemajuan yang harus diapresiasi.

Titik kritis dalam indikator ini adalah “keberhasilan perang melawan korupsi.” Jika upaya pemberantasan korupsi mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat dan kepemimpinan negara, batas-batas antara negara dan pasar dapat ditegakkan dan masing-masing dapat berfungsi dengan optimal. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi hal ini, antara lain, meningkatnya jumlah kelas menengah, yang dapat menjadi penekan yang lebih kuat terhadap praktik korupsi, serta perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan kontrol yang lebih kuat terhadap penggunaan anggaran negara.

- Indikator 5: Masyarakat sipil yang hidup dan bebas

Dalam indikator ini, kecenderungan Indonesia juga beragam. *Freedom House*, lembaga internasional yang memantau kebebasan sipil dan politik di seluruh dunia, mencatat bahwa secara umum masyarakat sipil di Indonesia cukup hidup dan memiliki kebebasan. Lembaga itu menyebutkan, berbagai sektor masyarakat sipil relatif bebas meskipun juga diawasi oleh pemerintah. Kebebasan media dan kebebasan berekspresi dijamin, meskipun penyensoran untuk isi yang dianggap melanggar tata susila merupakan hal yang sering terjadi. Lembaga ini juga mencatat, Indonesia memiliki masyarakat sipil yang kuat dan aktif, meskipun ada beberapa kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) yang diawasi pemerintah. Secara umum, kebebasan akademik juga diakui.

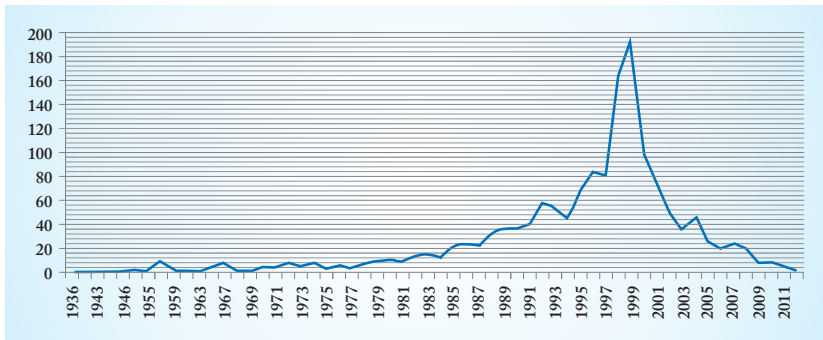
Meskipun demikian, banyak pula kejadian berupa tekanan terhadap aktivis masyarakat sipil. Negara juga masih tercatat

sering melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Dalam laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang berjudul “Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius,” tercatat, ada total 49 orang yang menjadi korban penyiksaan selama rentang waktu 2010-Juni 2011. *Freedom House* juga mencatat bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diadili bahkan setelah transisi demokrasi.

Data tersebut berkaitan dengan aspek “kebebasan.” Lalu, seberapa “hidup” kah masyarakat sipil di Indonesia? NGO Review yang dituliskan oleh STATT, lembaga konsultan yang diminta oleh AusAid untuk melakukan penelitian tentang lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia, memperkirakan, ada sekira 2.293 LSM yang aktif di seluruh Indonesia. Riset lapangan yang dilakukan untuk penulisan *review* tersebut menemukan bahwa di antara lembaga masyarakat sipil yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (sejumlah 11.468 organisasi), lembaga yang aktif sekitar 20 persennya.¹²

Populasi LSM tersebut juga terpusat di Jawa. Sebanyak 22 persen dari total LSM yang terdaftar di pemerintah Indonesia berada di Jakarta. Penelitian tersebut juga menemukan, ada keterkaitan antara tingkat pendapatan daerah dan keberadaan LSM: semakin tinggi pendapatan daerah di daerah tersebut, semakin tinggi pula jumlah LSM yang ada di daerah itu. Salah satu temuan menarik lain dari penelitian STATT tersebut adalah bahwa sekitar 37 persen LSM tersebut didirikan pada rentang waktu 1997-2001.

Grafik 7. Tahun Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat¹³




Dengan demikian, kita melihat bahwa demokratisasi membuka ruang yang lebih luas bagi hadirnya lembaga swadaya masyarakat. Adapun mengenai mengapa lebih sedikit lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada periode setelah 2005 sangat berkaitan dengan perkembangan lembaga-lembaga tersebut yang kini sudah relatif mapan.

Kecenderungan positif lain adalah tumbuhnya masyarakat kelas menengah yang memiliki akses pada teknologi informasi yang dikenal sebagai sosial media. Meskipun masih terbatas di kalangan perkotaan, penggunaan sosial media telah mampu mempengaruhi berbagai wacana publik karena banyaknya pejabat, tokoh politik, aktivis dan jurnalis yang ada di ruang sosial tersebut. Beberapa contoh yang menunjukkan potensi kekuatan masyarakat sipil jika dikelola melalui media sosial adalah kasus perseteruan antara Polisi dan KPK (Kasus “Cicak vs Buaya”) dan kasus “Koin untuk Prita.” Anak-anak muda perkotaan juga banyak mengorganisasi jejaring melalui berbagai organisasi kepemudaan yang mengoptimalkan media sosial ini. Indonesia,

khususnya Jakarta, menduduki peringkat tinggi di antara kota besar dunia dengan jumlah pengguna *facebook* terbanyak menurut www.socialbakers.com.

Tabel 4. Kota dengan Pengguna Facebook Terbesar di Dunia¹⁴

#	City	County	Users 
1.	Bangkok	Thailand	8 682 940
2.	Jakarta	Indonesia	7 434 580
3.	Istanbul	Turkey	7 066 700
4.	London	United Kingdom	6 139 180
5.	Bogota	Colombia	6 112 120
6.	Sao Paulo	Brazil	5 718 220
7.	Santiago	Mexico	4 294 820
8.	Mexico City	Chile	4 129 700
9.	Mumbai	India	3 700 460
10.	Buenos Aires	Argentina	3 533 840

Meskipun secara umum kecenderungannya positif, ada beberapa kecenderungan negatif, yaitu dengan kemunculan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang dipandang dapat membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Catatan penting lainnya adalah mengenai ketimpangan distribusi LSM yang dapat menjadi lebih timpang lagi dengan semakin menguatnya peran media sosial, karena akses terhadap media sosial tersebut masih terkonsentrasi di perkotaan. Di Indonesia, penetrasi internet masih kecil, hanya 34,1%. Namun, penetrasi ini tumbuh dengan cepat, apalagi dengan kehadiran teknologi telepon seluler yang mampu mengakses internet dengan harga murah.

Hal yang dapat mengubah situasi dengan cepat adalah jika ada keputusan politik yang mendorong pembatasan dan pengendalian aktivitas masyarakat sipil, seperti UU Ormas yang lebih keras atau UU yang mengatur penggunaan media sosial.

- Indikator 6: Masyarakat politik yang relatif otonom

Ada dua kecenderungan yang penting untuk diamati di dalam aspek “masyarakat politik” ini. Yang pertama adalah partai politik dan yang kedua adalah desentralisasi. Tentang partai politik, hampir semua pengkaji politik memercayai bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang sehat.

Berkaitan dengan hal itu, terdapat kecenderungan adanya stagnasi atau malah kemunduran di dalam pengelolaan parpol. Parpol semakin terkonsentrasi di tangan individu elite yang berpengaruh, sehingga capaian elektoralnya pun berkaitan dengan pengaruh individu tersebut. Sebagai contoh, Partai Demokrat hanya mendapatkan 7,5 persen suara pada 2004 namun menjadi 20,9 persen karena faktor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, PDI Perjuangan pernah meraih 33,7 persen pada 1999 karena popularitas Megawati namun kemudian anjlok menjadi 18,5 persen pada 2004, seiring menurunnya popularitas Megawati.

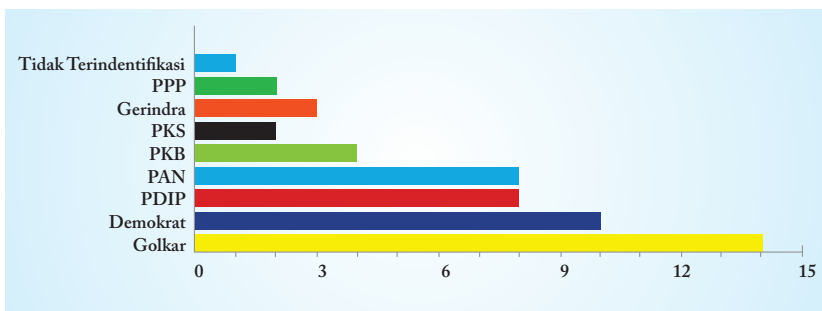
Maraknya korupsi yang dilakukan para elite partai, baik di level pusat maupun daerah juga berpengaruh terhadap anggapan bahwa partai tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Partai Golkar dan PDI Perjuangan menduduki peringkat pertama dalam jumlah kepala daerah yang berasal dari partai tersebut yang tersangkut korupsi. Ada 52 orang kepala daerah yang berasal dari Golkar dan 33 orang kepala daerah dari PDIP yang tersangkut korupsi.¹⁵

Tabel 5. Kasus Korupsi Kepala Daerah Berdasarkan Asal Partai

No	Partai	Dapat izin	Belum dapat izin	Ditangani	Jumlah diperiksa
1.	Golongan Karya	26	10	16	53
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20	12	1	33
3.	Persatuan Pembangunan	4	1	0	5
4.	Demokrat	5	4	2	11
5.	Amanat Nasional	5	0	0	5
6.	Keadilan Sejahtera	0	1	0	1
7.	Kebangkitan Bangsa	6	0	0	6
8.	Koalisi	15	9	7	31
9.	Independen	1	0	0	1
10.	Belum teridentifikasi	1	1	0	2
	Total	83	38	26	147

Sumber: Dokumentasi Tren Korupsi ICW 2012

Grafik 8. Jumlah Elite Partai di Tingkat Pusat Terkena Kasus Korupsi¹⁶



Sumber: Dokumentasi ICW 2012

“Prestasi” parpol yang seperti itu membuat masyarakat tidak memiliki identifikasi parpol yang kuat. Survei nasional CSIS menemukan bahwa hanya 4,7 persen responden yang memiliki kartu anggota parpol dan hanya 2,5 persen yang pernah menyumbangkan dana untuk parpol.¹⁷

Kecenderungan penting kedua adalah apa yang disebut dengan “desentralisasi.” Negara-negara yang baru saja mengalami transisi menuju demokrasi sering melakukan transisi *double track*, yaitu transisi ganda yang meliputi: (1) pembangunan sistem politik yang kompetitif untuk menggantikan sistem politik tidak kompetitif yang dijalankan oleh rezim pemerintahan otoriter sebelumnya serta (2) desentralisasi kekuasaan, yang tadinya terkonsentrasi pada sedikit tangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, desentralisasi adalah tren penting yang akan sangat berpengaruh pada terwujudnya masyarakat politik yang relatif otonom. Desentralisasi dapat dilihat sebagai proses politik di mana distribusi kekuasaan secara territorial dilakukan. Desentralisasi meliputi transfer kewajiban, sumber-sumber daya, dan kewenangan dari unit pemerintahan di level yang lebih tinggi ke unit pemerintahan di level yang lebih rendah.

Berbagai penelitian akademik menemukan, ada kaitan antara luas wilayah pemerintahan dan demokrasi. Dua pertiga dari negara-negara yang berpenduduk kurang dari satu juta orang dikategorikan ‘bebas’, sementara hanya sepertiga dari negara-negara berpenduduk lebih dari sejuta orang dikategorikan ‘bebas’. Di negara yang luas wilayahnya besar seperti Indonesia, desentralisasi dapat memperpendek jarak antara pemerintah dan rakyat, sehingga diharapkan dapat menciptakan demokrasi yang lebih berkelanjutan.

Secara umum, desentralisasi menghasilkan kecenderungan positif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi mengenai efek dari desentralisasi di negara-negara demokrasi baru

menunjukkan, ada dampak desentralisasi terhadap perilaku pemilih. Remmer dan Gelineau dalam studinya tentang politik Argentina menemukan, pemilih yang hidup di daerah-daerah yang berbeda pada derajat tertentu juga mempertimbangkan dan membandingkan perbedaan dalam situasi ekonomi antar-daerah dengan situasi ekonomi daerah tempat tinggalnya.¹⁸ Temuan ini senada dengan yang ditemukan oleh para peneliti politik pada transisi demokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah.

Pemilihan kepala daerah langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap pemimpin dan partai yang memerintah dengan membandingkannya dengan pemimpin daerah di daerah lain. Lambat laun, pemimpin daerah akan terdorong untuk semakin akuntabel. Kecenderungan ini dibuktikan, misalnya, dengan kemunculan pemimpin-pemimpin daerah berprestasi yang kemudian menjadi calon pemimpin alternatif di panggung politik nasional.

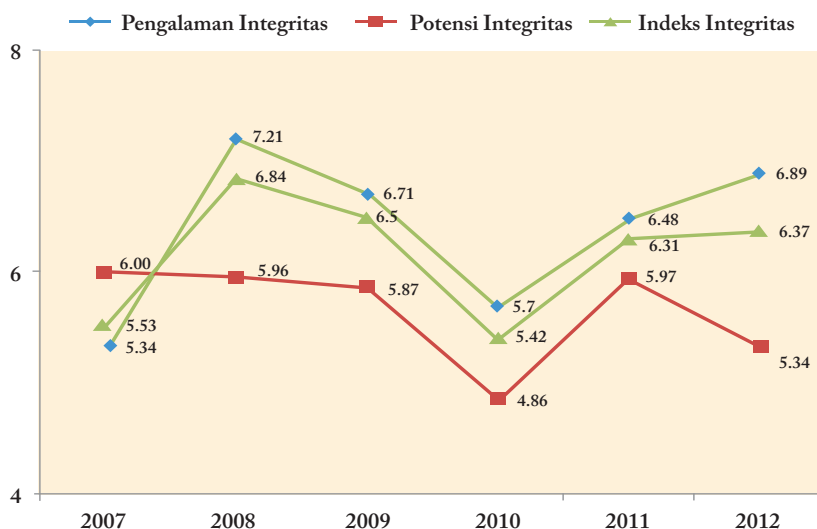
Berdasarkan pembahasan di atas, di dalam indikator ini kita menemukan kecenderungan positif dan negatif. Kecenderungan negatif tampak di dalam pengelolaan parpol, sementara kecenderungan positif ada di dalam desentralisasi. Dengan demikian, titik kritisnya juga ada di dua aspek tersebut. Setelah 2014, tokoh-tokoh kuat seperti SBY dan Megawati akan mulai berkurang pengaruhnya, apakah partai-partai akan mampu membenahi pengelolaan partainya sehingga dapat berfungsi dengan baik? Apakah desentralisasi akan terus berlanjut atau akan ada dorongan untuk melakukan resentralisasi kekuasaan ke pemerintah pusat?

- Indikator 7: Birokrasi negara yang berfungsi baik

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting dalam reformasi politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Untuk melakukan reformasi birokrasi, berbagai upaya telah dilaksanakan, baik yang berkaitan dengan masalah kelembagaan maupun yang berkaitan dengan kualitas manusianya. Tulisan ini tidak hendak membahas reformasi birokrasi yang kompleks itu secara komprehensif karena memang bukan tujuan dari penelitian ini. Tapi hendak melihat bagaimana kira-kira kecenderungan perkembangannya.

Berkaitan dengan tujuan tersebut, ada satu indikator yang dapat membantu kita untuk melihat perkembangan itu. Sejak 2007, KPK menerbitkan laporan integritas pelayanan publik untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kinerja layanan publik serta potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi dan korupsi. Berdasarkan indikator-indikator pengalaman korupsi dan potensi korupsi di berbagai layanan publik, disusunlah indikator untuk menilai integritas berbagai layanan publik itu yang disebut dengan Indeks Integritas Nasional. Berdasarkan laporan dari 2007 hingga 2012, kita melihat adanya fluktuasi Indeks Integritas Nasional, yang menunjukkan bahwa kemajuan reformasi birokrasi yang diukur melalui kualitas pelayanan publik masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Grafik 9. Indeks Integritas Nasional 2007-2012¹⁹



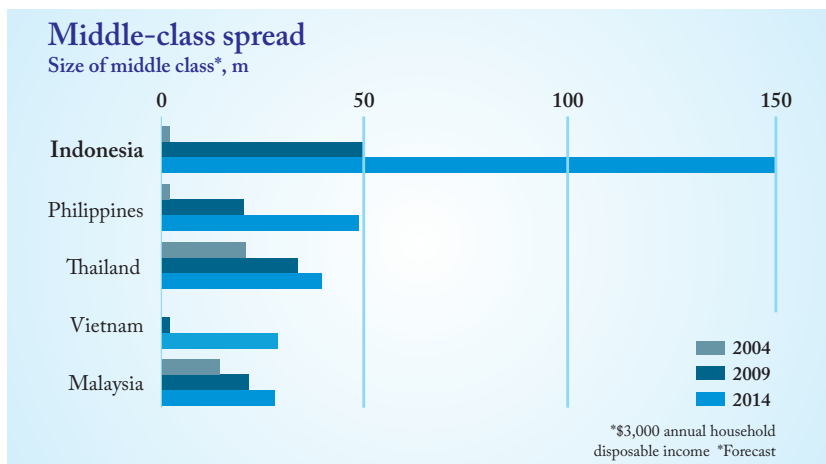
Selain menunjukkan stagnasi, grafik di atas juga menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia (dalam konteks ini menunjukkan apakah birokrasi berfungsi dengan baik atau tidak). Negara lain seperti Korea Selatan, sebut KPK, memiliki nilai Indeks Integritas yang mencapai 9. Pada 2012, sebanyak 20,6 persen responden masih mengaku bahwa mereka mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya resmi untuk mendapatkan pelayanan publik.

Secara umum, kita melihat bahwa pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Namun, ini dapat dipahami karena birokrasi adalah sesuatu yang terkait dengan politik dan budaya, sehingga perubahannya tidak bisa cepat. Karena itu, ada beberapa kecenderungan positif yang

harus diapresiasi, seperti mulai adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah layanan publik, misalnya dengan diluncurkannya <http://satulayanan.net/>. Seiring dengan penetrasi internet yang meningkat, kita mengharapkan, pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi itu dapat membuat birokrasi berfungsi lebih baik lagi.

Kecenderungan positif lainnya adalah pertumbuhan kelas menengah Indonesia. *The Economist* meramalkan, pada 2014 Indonesia akan memiliki sekitar 150 juta orang penduduk yang tergolong kelas menengah. Jumlah kelas menengah yang bertambah ini dapat memberikan pengaruh pada birokrasi karena mereka cenderung lebih berdaya untuk melakukan kritik pada pelayanan publik yang mereka rasakan.

**Grafik 10. Pertumbuhan Kelas Menengah
di Asia Tenggara²⁰**

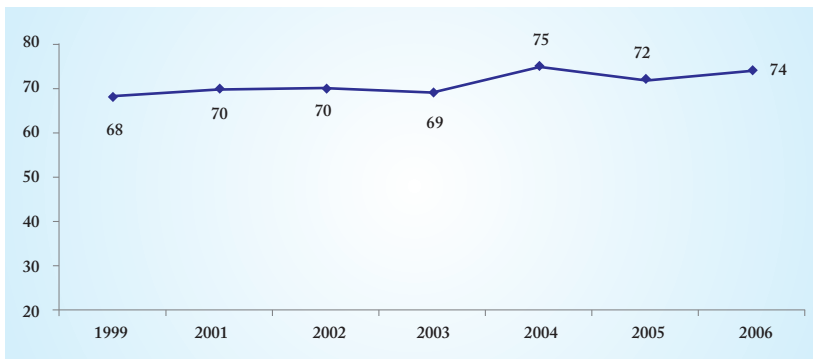


Sumber: Nomura; World Bank; CEIC

● Indikator 8: Budaya Politik Demokratis

Indikator penting berikutnya adalah adanya budaya politik demokratis. Di level masyarakat, hal ini dapat dilihat dari seberapa luas masyarakat yang mendukung diterapkannya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Sayangnya, saat ini penelitian yang mengukur tingkat dukungan terhadap demokrasi tersebut masih sangat terbatas. Salah satu survei yang pernah mengukur hal tersebut adalah survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 2003-2006. Ditambah dengan beberapa survei sebelumnya, laporan survei tersebut memberikan potret perkembangan dukungan terhadap demokrasi dari tahun 1999 hingga 2006.

**Grafik 11. Presentase Masyarakat yang Mendukung
Bahwa Demokrasi adalah Sistem Terbaik
untuk Diterapkan di Indonesia²¹**



Kecenderungan tersebut menunjukkan kecenderungan yang stabil, berkisar di antara 70 persen. Angka ini masih di bawah negara-negara demokrasi yang sudah mapan seperti Jerman

sebesar 93 persen, Amerika Serikat 88 persen, atau Jepang 88 persen. Presentase ini hampir sama dengan presentase dukungan terhadap demokrasi di Meksiko dan Filipina yang demokrasinya masih belum stabil. Kisaran angka ini ditemukan lagi pada penelitian yang lebih baru Pada 2010, survei IFES Indonesia menemukan, 72 persen responden yang tahu tentang demokrasi mengatakan bahwa mereka menyukai sistem demokrasi.

Sekarang banyak sticker yang memasang pesan kerinduan pada sistem pemerintahan sebelum reformasi 1998 yang berbunyi "*Piye Kabare? Enak Jamanku tho Le?*" ("Bagaimana Kabarmu, Enak Zaman Saya Kan?")

Melihat perkembangan dari 1999 hingga 2010 dari berbagai survei, kita melihat bahwa dukungan terhadap demokrasi relatif stabil pada kisaran 70 persen. Meskipun demikian, kita juga melihat ada kecenderungan kemunduran yang harus diawasi. Memang belum ada penelitian yang mengonfirmasi bahwa ada kemunduran pandangan terhadap demokrasi, namun gejala-gejala yang terlihat di masyarakat membuat kita harus waspada Misalnya, sekarang banyak *sticker* yang memasang pesan kerinduan pada sistem pemerintahan sebelum reformasi 1998 yang berbunyi "*Piye Kabare?Enak Jamanku tho Le?*"("Bagaimana Kabarmu, Enak Zaman Saya Kan?").

Kecenderungan lain yang harus disikapi dengan baik adalah perkembangan teknologi yang membuat paparan pada berbagai ideologi yang menolak demokrasi menjadi lebih mudah. Di

berbagai segmen masyarakat, masih ada kelompok-kelompok yang menolak demokrasi. Tentu saja, penyikapan terhadap kelompok-kelompok tersebut harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga mereka dapat “terserap” ke dalam sistem demokrasi. Lebih jauh lagi mengenai hal ini akan dibahas pada bagian demokrasi dan ideologi.

- Indikator 9 & 10: Penegakan hukum yang adil dan penegak hukum yang terpercaya

Bagian ini sebenarnya membahas dua indikator, yaitu penegakan hukum (*law enforcement*) dan penegak hukum (*law enforcer*). Namun, kedua indikator tersebut dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Mengapa pada bagian metodologi tidak ditulis menjadi satu indikator saja? Hal ini supaya kita dapat melihat kepada dua hal yang terpisah, yaitu proses penegakan hukum dan lembaga penegak hukumnya.

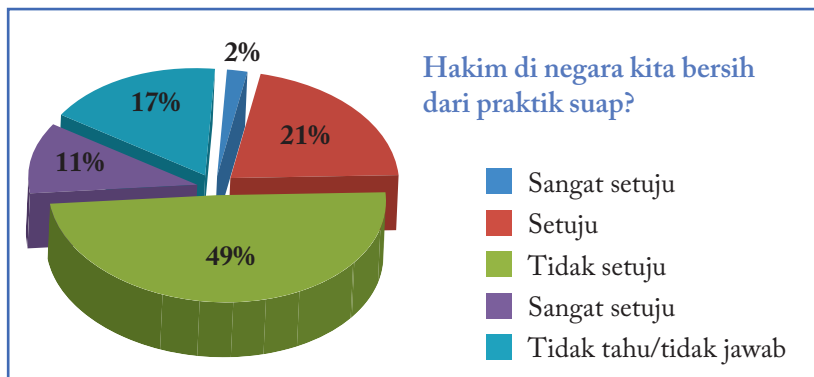
Pada 2013, *Indonesian Legal Roundtable* menerbitkan laporan yang melihat pandangan masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan, penegakan hukum di Indonesia masih memerlukan banyak pembenahan. Ada lima elemen *rule of law* yang dimasukkan ke dalam indikator indeks persepsi negara hukum tersebut, yaitu: (1) pemerintahan berdasarkan hukum; (2) independensi kekuasaan kehakiman; (3) penghormatan, pengakuan dan perlindungan HAM; (4) akses terhadap keadilan; dan (5) peraturan yang terbuka dan jelas. Dalam penelitian ini, elemen 4 dan 5 dapat kita masukkan untuk melihat indikator

kesembilan (penegakan hukum yang adil) dan elemen 1 dan 2 dapat kita gunakan untuk melihat indikator kesepuluh (penegak hukum yang terpercaya).

Indeks tersebut menunjukkan hal yang sering dibicarakan oleh publik, yaitu bahwa penegakan hukum kita masih lemah. Dalam hal akses terhadap peradilan dan peraturan yang terbuka dan jelas, masing-masing elemen tersebut mendapatkan nilai 4,27 dan 3,13 (dari nilai maksimal 10). Dalam hal pemerintahan berdasarkan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman, indeks tersebut memberi nilai 4,77 dan 4,72.

Jika kita telisik lebih mendalam lagi, kita akan mendapati bahwa pandangan masyarakat terhadap penegak hukum masih sangat rendah. Penelitian ILR tersebut memperlihatkan bahwa 60 persen sangat tidak setuju dan tidak setuju jika dikatakan bahwa hakim di Indonesia bebas dari suap.

Grafik 12. Pandangan tentang Hakim dan Suap



Sumber: Indonesian Legal, Roundtable. 2013

Berdasarkan pembahasan di atas, kita melihat bahwa penegakan hukum dan lembaga penegak hukum di Indonesia masih dipersepsikan buruk oleh masyarakat. Tentu saja, meskipun tidak seratus persen menggambarkan apa yang terjadi, persepsi ini menunjukkan, kedua hal tersebut masih harus diperbaiki. Meskipun ukuran dalam dua indikator ini menunjukkan prestasi yang buruk, sebenarnya ada beberapa kecenderungan positif yang akan semakin menguat.

Kecenderungan positif yang pertama adalah adanya KPK dan keberhasilan institusi tersebut mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, setidaknya dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Namun, kita melihat masih adanya benturan antara KPK dan lembaga negara yang lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Kecenderungan positif yang lain adalah kecenderungan positif yang sama dengan yang mempengaruhi indikator-indikator sebelumnya, yaitu tumbuhnya kelas menengah dan meningkatnya penggunaan internet, yang dapat membuat pengawasan terhadap penegakan hukum dan lembaga penegak hukum menjadi lebih kuat.

Dari berbagai indikator tersebut di atas dapat diketahui kemungkinan kemajuan atau kemunduran masa depan demokrasi Indonesia. Untuk memudahkan analisa lebih lanjut, kecenderungan perkembangan sepuluh indikator tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Mengukur Kemungkinan Skenario

Unsur	Indikator Kunci	Meningkat	Menurun	Titik Kritis
Ekonomi	Tingkat Kesejahteraan	Meningkat, dengan catatan.		Krisis Ekonomi
	Pertumbuhan ekonomi			
	Tingkat Pemerataan		Menurun	Krisis Ekonomi Desentralisasi
	Pelembagaan <i>Economic society</i>	Stagnan		Pemberantasan korupsi
Politik dan Pemerintahan	Masyarakat sipil yang hidup dan bebas	Meningkat, dengan catatan		Kelas Menengah Teknologi Informasi
	Masyarakat politik yang otonom	Bercampur (positif: desentralisasi)	Bercampur (negatif: partai melemah)	Desentralisasi, Penguatan Partai (terutama setelah 2014)
	Birokrasi negara yang berfungsi baik	Stagnan		Perang melawan korupsi Kelas Menengah Teknologi Informasi
	Budaya politik demokratis	Stabil/Stagnan, dengan kemungkinan kemunduran		Ideologi non-Demokrasi Kepercayaan pada Negara
Penegakan Hukum	Penegakan hukum yang adil (<i>law enforcement</i>)	Stagnan		Perang melawan korupsi Kelas Menengah Teknologi Informasi
	Institusi hukum yang terpercaya (<i>law enforcer</i>)			

Pada tabel di atas terdapat tiga indikator yang menunjukkan kecenderungan meningkat, yakni tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan masyarakat sipil yang hidup dan bebas. Satu indikator, tingkat pemerataan, cenderung menurun. Satu indikator lainnya memiliki kecenderungan bercampur, yaitu indikator masyarakat politik yang otonom, sedangkan lima

indikator dalam posisi stagnan. Kelimanya adalah pelembagaan *economic society*; birokrasi yang berfungsi dengan baik; budaya politik demokratis; penegakan hukum yang adil; serta lembaga penegak hukum yang terpercaya.

Meskipun penelitian ini tidak dilakukan dengan melakukan kuantifikasi terhadap indikator-indikator tersebut, setidaknya kita dapat menebak bahwa perkembangan konsolidasi di Indonesia akan cenderung stagnan, meskipun ada sedikit kemajuan dan kemunduran dalam beberapa aspek. Dengan demikian, skenario yang paling mungkin terwujud pada tahun 2020 adalah bahwa Indonesia tidak akan bergeser banyak dari posisinya yang sekarang di garis skenario, yaitu di antara “*formal democracy*” dan “*full democracy*.”

Secara umum, kemungkinan Indonesia untuk mengalami *democratic reversal* menjadi negara otoriter atau negara gagal tidak cukup besar, kecuali jika ada kejadian besar, seperti krisis ekonomi yang parah atau hilangnya kepercayaan terhadap negara dalam derajat yang besar sebagai akibat dari gagalnya perang melawan korupsi dan pelembagaan partai politik. Di sisi lain, Indonesia juga agaknya mengalami kesulitan untuk maju menjadi negara ‘demokrasi penuh’ atau ‘demokrasi maju’, kecuali jika Indonesia dapat memanfaatkan semua titik kritis untuk menuju ke arah yang positif, seperti perang melawan korupsi, desentralisasi yang baik, penguatan kelas menengah, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengawal demokratisasi.

SKENARIO JANGKA PENDEK

Jika dilihat dalam skenario jangka panjang yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, proyek reformasi politik di Indonesia akan cenderung berjalan di tempat, kecuali jika kejadian-kejadian penting di ‘titik kritis’ yang telah diidentifikasi itu terjadi. Dalam konteks ini, kelembaman itu akan segera dihadapkan pada satu momentum penting yang akan memberikan peluang bagi terjadinya berbagai kemungkinan ‘titik kritis’, sehingga dapat mengubah dengan tajam arah perkembangan politik Indonesia. Baik dari posisi stagnasi menjadi kemajuan demokrasi maupun dari stagnasi ke kemunduran demokrasi. Pemilu 2014 merupakan ‘titik kritis’ tersebut.

Konstelasi politik yang terbentuk setelah Pemilu 2014 itu akan memiliki peluang besar untuk mempengaruhi 10 indikator yang menggambarkan perkembangan arah konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, jika pemerintahan yang baru kuat dan memiliki komitmen pada pemberantasan korupsi, demokrasi Indonesia akan bergerak maju karena beberapa indikator, seperti pelebagaan masyarakat ekonomi serta penegakan hukum akan ikut bergeser ke arah yang positif. Sebaliknya, jika konstelasi yang terbentuk nanti menghasilkan konstelasi politik yang membuat pengambilan kebijakan menjadi tidak efektif, peluang kita untuk terkena krisis ekonomi akan menciptakan peluang terjadinya kemunduran demokrasi. Hal tersebut terkait dengan dampaknya pada indikator 1, 2, dan 3.

Konstelasi politik setelah Pemilu 2014, tak lepas dari keadaan tahun-tahun sebelumnya yang sangat dinamis. Tokoh yang semula

dijagokan sebagai presiden dengan cepat diungguli pendatang baru di kancah politik nasional. Meskipun berbagai survei dilakukan, berapa raihan suara masing-masing partai juga sulit diprediksikan sampai hasil pemilu benar-benar ditetapkan. Meskipun perkembangan sangat dinamis, setidaknya kecenderungan umum yang relatif tidak berubah, dapat memberi petunjuk tentang wajah politik setelah Pemilu 2014. Sejumlah kecenderungan tersebut adalah: (1) Tiadanya satu partai yang dominan; (2) Kuatnya figur; (3) Besarnya pengaruh elite partai; dan (4) Besarnya kelompok non-partai.

Sejak sistem multipartai diterapkan, kita menyaksikan bahwa tidak ada satu partai pun yang dominan. Setelah Reformasi tidak ada partai yang melampaui perolehan 50 persen dari total suara pemilih. Angka tertinggi yang diperoleh pasca Reformasi adalah 33 persen, yakni oleh PDIP pada Pemilu 1999. Setelah itu, raihan tertinggi terus menurun. Berkurangnya jumlah partai secara signifikan pada tahun 2014 ternyata juga tak mampu menaikkan suara tertinggi secara signifikan seperti pada masa sebelum Reformasi. Artinya, tidak ada partai politik yang tampil menjadi kekuatan dominan.

Seperti pada 2004 dan 2009 yang mengukuhkan ketokohan SBY, kecenderungan publik masih akan mengarah pada ketokohan figur. Hal itu terlihat pada perbedaan secara nyata tingkat suara yang diperoleh presiden terpilih pada 2014 dengan perolehan suara partai yang mendukungnya. Artinya, tokohlah yang lebih dipilih oleh masyarakat daripada partai politik, termasuk partai politik yang mengusung tokoh tersebut.

Selain itu, dinamika politik juga sangat ditentukan oleh peran elite partai. Sebelum Pemilu, elite partai dapat mempengaruhi perumusan

peraturan dan persiapan pemilihan umum tersebut. Setelah pemilu legislatif, kecilnya suara masing-masing partai termasuk pemenang pemilu akan menguatkan lobi di antara elite partai. Lobi di antara para elite partai itulah yang akan berperan penting dalam masa depan politik Indonesia pasca-Pemilu 2014.

Kecenderungan yang tidak kalah pentingnya adalah besarnya kelompok yang tidak memiliki afiliasi pada partai politik. Survei Nasional CSIS menemukan bahwa hanya 4,7 persen responden yang memiliki kartu anggota partai dan hanya 2,5 persen yang pernah menyumbangkan dana untuk partai. Tabel 13 juga menunjukkan bahwa sebanyak 42,5 persen responden belum memiliki pilihan partai politik.

DAMPAK PADA MASA DEPAN

Bila tidak terjadi hal luar biasa dalam peta politik nasional, masa depan Indonesia setelah Pemilu 2014 dapat diprediksikan dengan baik. Peta politik Indonesia akan diwarnai dengan koalisi pelangi yang dimotori figur presiden dan elite partai. Konstelasi politik yang kurang lebih serupa dengan masa-masa sebelumnya. Tidak ada satu partai pun yang dominan, sehingga semua partai harus berkoalisi. Dalam koalisi tersebut, elite partai akan memainkan peranan penting. Selain elite partai, peran penting juga akan dimainkan oleh presiden terpilih yang merupakan figur sentral yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

Dalam perspektif skenario jangka panjang, kira-kira apa dampak “Koalisi Pelangi” semacam itu? Dampak pertama berkaitan dengan

pembuatan kebijakan. Dengan koalisi yang berisi beragam partai itu, apakah pembuatan kebijakan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien? Jika pembuatan kebijakan seringkali tidak efektif dan tidak efisien karena menjadi ajang negosiasi antar-elite politik, apakah pemerintah akan mampu mengambil kebijakan yang paling tepat jika ada krisis besar yang harus segera ditanggulangi dengan kebijakan yang solid? Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, ‘krisis ekonomi’ adalah kemungkinan ‘titik kritis’ yang dapat menciptakan kemunduran demokrasi jika tidak dikelola dengan baik.

Dampak lainnya berkaitan langsung dengan indikator-indikator perkembangan konsolidasi demokrasi, baik aspek ekonomi, politik, maupun *rule of law*. Jika koalisi yang terbentuk adalah koalisi pelangi, apakah “perang melawan korupsi” yang akan membawa dampak positif bagi pelebagaan masyarakat ekonomi dan penguatan masyarakat politik akan bisa dimenangkan? Apakah desentralisasi akan dapat efektif sebagai sarana melakukan pemerataan kesejahteraan dan memperkuat masyarakat politik yang otonom serta masyarakat sipil yang bebas?

Tidak ada jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebab, jawabannya akan sangat berkaitan dengan beberapa faktor penentu. Faktor pertama adalah figur pemimpin (presiden). Seberapa kuatkah sang presiden terpilih, termasuk jika harus berseberangan dengan koalisi pendukungnya? Seberapa kuatkah komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi? Faktor kedua adalah partai politik. Apakah partai politik akan memperkuat dirinya dengan kaderisasi yang baik? Apakah elite-

elitenya akan bertindak berdasarkan kepentingan konstituen atau hanya untuk kepentingan pribadi?

DEMOKRATISASI DAN IDEOLOGI

Ideologi adalah salah satu aspek penting yang terkait dengan konsolidasi demokrasi. Seperti telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, semakin terkonsolidasinya

demokrasi ditandai dengan semakin meluasnya aktor-aktor politik yang menerima pelaksanaan demokrasi dan memiliki loyalitas terhadap demokrasi sebagai aturan main. Mereka yang secara ideologis menolak demokrasi mengalami moderasi dan menerima demokrasi sebagai aturan main. Awalnya, komitmen ini bersifat instrumental saja, dalam arti bahwa sistem politik demokratis dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologisnya. Seiring dengan konsolidasi demokrasi yang menguat, komitmen instrumental berubah menjadi komitmen mendasar kepada kerangka demokrasi.

Dengan demikian, secara umum kita dapat mengatakan bahwa perkembangan konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari tingkat penerimaan berbagai aktor politik terhadap sistem demokrasi sebagai aturan main satu-satunya dalam politik itu. Jika demokratisasi semakin terkonsolidasi, kelompok-kelompok dengan beragam ideologi yang awalnya menolak demokrasi, sedikit demi sedikit menerima demokrasi sebagai “aturan main” dalam politik.

Jika demokratisasi semakin terkonsolidasi, kelompok-kelompok dengan beragam ideologi yang awalnya menolak demokrasi, sedikit demi sedikit menerima demokrasi sebagai “aturan main” dalam politik.

Apakah hal tersebut terjadi di Indonesia? Bagian ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat fenomena depolarisasi ideologi di Indonesia.

- Gejala depolarisasi ideologi

Temuan berbagai lembaga penelitian mengonfirmasikan kecenderungan yang terlihat di dalam hasil pemilu pasca-Reformasi. Suara partai-partai yang secara formal mengusung Islam mengalami kecenderungan menurun. Banyak yang kemudian melihat ini sebagai fenomena menurunnya pengaruh Islam dalam politik. Namun, jika kita melihat dengan lebih mendalam, partai-partai di kutub seberang partai-partai Islam (Anies Baswedan menggunakan istilah “*Secular-exclusive*”²²) pun sekarang lebih terbuka terhadap simbol-simbol keagamaan. Caleg-caleg PDIP pun banyak yang mengenakan jilbab. Dengan demikian, menurunnya suara partai-partai Islam bukanlah sebuah fenomena tunggal. Ini dapat dipahami sebagai bagian dari fenomena yang lebih besar: depolarisasi ideologi. Partai-partai bergeser ke tengah, yang tergambar dalam istilah khas Indonesia ‘nasionalis-religius.’

Dibanding dengan fenomena beberapa negara lain, depolarisasi ideologi di Indonesia dapat dipandang dengan kacamata positif. Di Mesir misalnya, polarisasi ideologi setelah Mubarak jatuh pada 2011 terlihat sangat nyata. Polarisasi antara kelompok agamis dengan kelompok sekuler membuat kepemimpinan politik Mesir tidak efektif menjalankan pemerintahan. Polarisasi tersebut juga masih terlihat di Turki sebagai sisa gerakan sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kamal Attaturk pada awal Abad 20.

Di Indonesia, memang ada kompetisi dan konflik di antara Islamisme dan sekularisme, namun sejarah revolusi Indonesia menunjukkan bahwa benih depolarisasi itu telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Islam, liberalisme, sosialisme dan nasionalisme bercampur baur, saling meminjam dan saling mempengaruhi, dalam menggerakkan perlawanan terhadap kolonialisme.²³ Pada masa penjajahan Jepang, otoritas Jepang melihat bahwa kelompok-kelompok Islam adalah kekuatan penting di masyarakat dan kemudian mencoba mengendalikannya dengan mendirikan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).²⁴ Saat Republik Indonesia berdiri, laskar-laskar santri, seperti Hizbullah dan Sabilillah dimasukkan ke dalam ketentaraan Republik.

Polarisasi ideologi terlihat kuat pada masa-masa awal kemerdekaan. Pada saat itu, terjadi perdebatan yang keras mengenai dasar negara dan posisi Islam di negara yang baru saja berdiri itu.²⁵ Polarisasi ini menghasilkan kebuntuan pada Konstituante dan membukakan jalan bagi Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pada masa kekuasaan Soeharto, negara melakukan deideologisasi secara sistematis sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan dan menjaga stabilitas politik. Salah satu strateginya adalah dengan menekan kelompok-kelompok Islam Politik, sehingga pada 1980-an para aktivis politik Islam merenungkan kembali orientasi dan strategi keterlibatan Islam dalam politik. Inilah yang menurut Bachtiar Effendy kemudian melahirkan “Intelektualisme Islam Baru” yang mencoba menjembatani antara Islam dan negara.²⁶ Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir

yang terus bergerak di bawah tanah, kelompok-kelompok Islam di Indonesia mulai masuk ke birokrasi dan bahkan masuk ke partai penguasa yaitu Golkar. Kecenderungan ini mendapatkan momentum dengan perkembangan politik pada akhir 1980-an yang membuat Soeharto mendekati kelompok-kelompok Islam.

Bersamaan dengan meningkatnya keagamaan masyarakat sejak 1980-an, keterlibatan kelompok-kelompok Islam di dalam birokrasi dan partai penguasa membuka jalan bagi depolarisasi. Kelompok-kelompok Islam menyadari bahwa partai Islam bukan satu-satunya jalan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam (sehingga mereka kemudian menyalurkannya ke berbagai jenis partai), sementara kelompok-kelompok sekuler kemudian memandang bahwa ternyata menjadi religius tidak selalu berarti mengkhianati komitmen kebangsaan.

- Berkah atau kutukan?

Apa dampak dari kecenderungan depolarisasi ideologi tersebut terhadap sistem politik Indonesia? Dalam hal ini, Islamis-Sekuler bukan satu-satunya peta spektrum ideologi. Namun, peta spektrum yang lain pun (liberal-kerakyatan, misalnya) mengalami depolarisasi yang serupa. Walaupun kita bersyukur bahwa kita tidak mengalami kutukan polarisasi seperti yang terjadi secara ekstrim di Mesir, kita juga tak dapat serta merta bergembira.

Depolarisasi ideologi atau de-ideologisasi merupakan muara dari dua sungai: rasionalisme dan pragmatisme. Semakin rasional seseorang, semakin mudah ia melepaskan diri dari postulat-postulat ideologis dalam melihat sebuah masalah, sehingga ia dapat lebih mudah berdiskusi dan berkompromi dengan

kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Demikian pula, semakin pragmatis seseorang, semakin mudah ia melampaui batasan-batasan ideologis, selama langkah tersebut dapat memberikan keuntungan. Jika depolarisasi ini lebih banyak diwarnai rasionalisme, kita dapat bergembira karena perdebatan tentang kebijakan publik dapat lebih hidup dan terukur, tidak lagi dibayang-bayangi sekat identitas ideologis. Namun, jika depolarisasi ideologi ini lebih banyak didorong pragmatisme, yang terjadi justru sebaliknya. Perdebatan tentang kebijakan publik akan jarang dan walaupun terjadi kualitasnya tidak baik karena yang menjadi ukurannya adalah kepentingan dan keuntungan masing-masing aktor.

Aliran sungai manakah yang lebih mewarnai depolarisasi ideologi di Indonesia? Agaknya, pragmatisme lebih dominan. Hal ini terlihat misalnya dari proses legislasi yang sering tidak terarah di Dewan Perwakilan Rakyat. Stephen Sherlock dari *Center for Democratic Institutions* misalnya, menyimpulkan di dalam penelitiannya tentang cara kerja DPR RI bahwa banyak proses pengambilan keputusan di DPR yang dibuat dengan tidak sistematis. Tidak ada rancangan kebijakan yang jelas dari partai-partai mengenai berbagai permasalahan penting.

Dampak lain dari deideologisasi yang didorong oleh pragmatisme ini adalah melemahnya ikatan antara partai politik dengan masyarakat karena semua partai dianggap “sama saja.” Hal ini berdampak serius pada kualitas perekrutan politik di dalam sistem politik nasional. Karena ideologi dan *platform* tak lagi menarik, maka partai-partai ramai-ramai merekrut tokoh sebagai *vote-getter* tanpa terlalu memperhitungkan kapasitasnya.

Mencermati kecenderungan depolarisasi ideologi itu, bersamaan dengan kecenderungan tiadanya partai yang memenangkan suara secara dominan, maka terbangunnya ‘koalisi pelangi’ menjadi tak terhindarkan. Seperti pengalaman selama ini, pemerintahan dalam lingkungan politik ‘koalisi pelangi’ cenderung tidak efektif. Kebijakan lebih banyak ditentukan oleh negosiasi kepentingan daripada oleh kesepakatan tentang satu *platform* kebijakan tertentu.

Sekali lagi, depolarisasi ideologi dan lemahnya institusionalisasi partai--yang terlihat dari lemahnya keterikatan masyarakat dengan partai politik--mewarnai kehidupan politik pasca-Pemilu 2014. Dengan keadaan seperti itu, faktor pribadi pemimpin nasional dan elite politik akan sangat penting dalam mempengaruhi efektivitas.

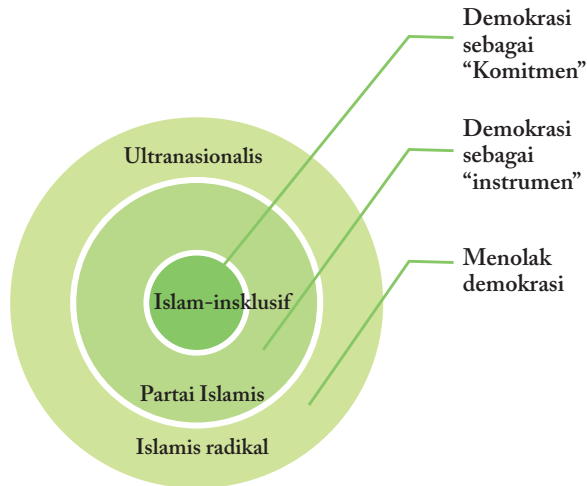
- Dampak pada demokratisasi

Dalam perspektif jangka panjang, apa kaitan antara fenomena depolarisasi ideologi tersebut dan demokratisasi? Secara sederhana, kita dapat melihat kaitannya dengan memahami depolarisasi sebagai proses moderasi ideolog, baik karena rasionalisasi maupun pragmatisasi. Karena aktor politik mengalami moderasi ideologi, ada perubahan cara pandang terhadap berbagai aspek dalam politik, termasuk dalam sikap mereka terhadap demokrasi. Dengan demikian, “depolarisasi ideologi” secara umum membawa kecenderungan positif bagi konsolidasi demokrasi karena aktor-aktor politik mengalami moderasi dalam sikap mereka terhadap demokrasi. Artinya, kelompok-kelompok yang menolak demokrasi, dengan terjadinya depolarisasi ideologi, dapat mengalami perubahan pandangan dan sikap terhadap demokrasi.

Depolarisasi ideologi, diasumsikan dapat memperluas aktor-aktor yang menerima demokrasi sebagai aturan main satu-satunya di dalam politik karena membuat mereka yang secara ideologis menolak demokrasi menjadi semakin moderat. Karena pandangan mereka semakin moderat, mereka dapat memiliki pandangan baru tentang demokrasi. Jika digambarkan ke dalam lingkaran-lingkaran yang menggambarkan tingkat penerimaan pada demokrasi, depolarisasi ideologi dapat mendorong meluasnya lingkaran aktor yang menerima “demokrasi sebagai alat” dan “demokrasi sebagai komitmen.” Aktor-aktor yang “menolak demokrasi” dapat diserap ke dalam lingkaran mereka yang menerima demokrasi sebagai komitmen instrumental.

Saat ini, depolarisasi membuat partai-partai Islamis semakin mendekati lingkaran aktor yang menerima demokrasi sebagai komitmen, atau setidaknya menerima demokrasi sebagai instrumen yang dapat diterima untuk memperjuangkan ideologinya. Meskipun demikian, kita juga melihat, masih ada kelompok-kelompok di lingkaran terluar, yaitu mereka yang menolak demokrasi. Di lingkaran terluar ini, ada kelompok Islamis radikal yang menolak demokrasi karena dianggap sebagai sebuah sistem yang berasal dari luar Islam. Selain itu, ada juga kelompok yang dalam tulisan ini disebut sebagai “ultranasionalis,” yaitu kelompok yang melihat bahwa demokrasi telah melemahkan posisi negara. Untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, kedua tipologi kelompok ini harus dapat diserap ke dalam lingkaran aktor yang menerima demokrasi, setidaknya sebagai komitmen yang bersifat instrumental.

Bagan 2. Lingkaran Sikap Aktor terhadap Demokrasi



Dalam konteks ini, depolarisasi juga memunculkan tantangan tersendiri untuk mendorong kelompok-kelompok yang menolak demokrasi merevisi sikap dan pandangan mereka. Depolarisasi yang diwarnai pragmatisme dan dicemari berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh partai-partai dari beragam spektrum ideologi dapat menggerus kepercayaan terhadap demokrasi. Jika depolarisasi tidak dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dijangkiti oleh korupsi, lingkaran aktor yang menerima demokrasi semakin mengecil. Tentu, hal ini berarti bahwa konsolidasi demokrasi akan terhambat dan Indonesia terancam menuju '*democratic reversal*'.

IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Sebagai sebuah bangsa, kita layak untuk bersyukur bahwa Indonesia telah menapaki proses reformasi politik sejak 1998 dengan relatif lebih

sukses dibandingkan dengan berbagai negara lain. Namun, elaborasi kita terhadap politik Indonesia hari ini dan skenario perkembangan konsolidasi demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa setelah mencapai titik tertentu (di antara “demokrasi formal” dan “demokrasi penuh”), kita berjalan di tempat. Hal ini disebabkan oleh beratnya masalah yang sudah mengurat akar seperti korupsi dan penegakan hukum yang lemah.

Dari sudut pandang yang positif, skenario “berjalan di tempat” ini dapat diartikan bahwa kemungkinan Indonesia untuk kembali menjadi negara otoriter sebenarnya cukup kecil. Namun, hal itu bukannya tidak mungkin. Penelitian ini menemukan “titik kritis” yang dapat memicu kemunduran demokrasi, misalnya krisis ekonomi yang parah dan kegagalan perang melawan terorisme.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan, ada beberapa “titik kritis” yang dapat diwujudkan untuk mengeluarkan Indonesia dari stagnasi konsolidasi demokrasi yang sedang dialami dan diramalkan akan terjadi tersebut. Berdasarkan identifikasi terhadap kecenderungan-kecenderungan dan titik-titik kritis itulah, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. Secara umum, rekomendasi-rekomendasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan tiga hal: *functioning political governance*, *functioning economy*, dan *rule of law*.

Di antara rekomendasi tersebut adalah agar reformasi birokrasi di berbagai sektor pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (“*good governance*”) terus ditingkatkan. Begitu pula upaya reformasi di berbagai lembaga penegak hukum.

Selanjutnya, keberlanjutan program desentralisasi perlu diupayakan dengan memastikan agar berfungsi dengan baik untuk pemerataan kesejahteraan dan penguatan kesadaran politik masyarakat. Hal itu perlu ditopang oleh peran semua komponen bangsa untuk bahu membahu memenangkan “perang melawan korupsi.” Pemimpin Nasional 2014-2019 perlu dikondisikan untuk menjaga komitmen secara kuat dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum.

Tata kelola parpol, seperti menyangkut pengaturan pendanaan partai secara lebih transparan, semestinya juga menjadi perhatian semua pihak. Hal itu dapat ditopang dengan penguatan masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan seluas-luasnya, serta penataan proses perekrutan pejabat publik sehingga dapat mencegah korupsi, jual beli jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Salah satu cara yang dapat digunakan, misalnya, melakukan pembuktian terbalik secara berkala atas kekayaan calon pejabat publik.

Perumusan kembali berbagai UU yang mengatur bidang politik juga diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan parpol yang sehat. Selanjutnya, sosialisasi budaya Pancasila dan demokrasi dengan berbagai metode yang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi. Kelompok-kelompok yang menentang Pancasila dan demokrasi perlu diidentifikasi dan didekati secara baik, bukan dengan kekerasan. Penggunaan langkah sosialisasi yang tepat akan dapat membawa mereka untuk masuk dan terserap ke dalam sistem politik yang demokratis.*

BAB III

————— SOSIAL BUDAYA —————

MERAJUT KEINDONESIAAN KITA



SOSIAL BUDAYA

MERAJUT KEINDONESIAAN KITA

“Marilah kita bangun bangsa ini dan kita tinggalkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Pertanyaan dasarnya adalah sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap, meninggikan kepentingan bersama...dan mengalahkan kepentingan pribadi pemimpin bangsa kita.”

~ KH Abdurrahman Wahid-Presiden RI ke-4 ~

Setidaknya dua kali sepekan pada awal tahun 2014, jutaan pasang mata menanti aksi para remaja itu lewat layar televisi. Mereka adalah anak-anak Batak, Timor, Ternate, hingga Mamuju yang dikomandani *Arek* Surabaya Evan Dimas dalam tim sepakbola yang menjadi ikon baru Indonesia, yakni PSSI U-19. Tim asuhan pelatih Indra Syafri itu keliling ke berbagai kota di Indonesia, menjalani pertandingan ujicoba sebelum mengikuti kejuaraan Asia.

Selain yang menyaksikan lewat layar kaca, puluhan ribu masyarakat gegap gempita menyambut mereka dengan menyesaki setiap stadion tempat pertandingan. Tak penting lagi perbedaan yang satu dengan yang lain. Semua adalah ‘putra Indonesia’, dan masyarakat selalu menunggu aksi mereka di lapangan hijau.

Mengindonesia dengan mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan golongan apapun memang menjadi arus utama fenomena Indonesia saat ini. Fenomena yang selalu disebutkan oleh Prof. Azyumardi Azra dari Universitas Islam Negeri Jakarta di setiap forum diskusi kebangsaan yang dihadapinya. “Proses mengindonesia terus berjalan dan tidak dapat dihentikan,” tegasnya. Proses yang mengesampingkan perbedaan itu sudah lama dipraktikkan masyarakat, seperti di desa adat Bali yang membuat *Pedanda* dan pemuka *Islam Bali Asli* terlibat bersama dalam perayaan agama masing-masing. Juga oleh sejumlah desa adat di Maluku, tempat warga Nasrani membantu membangun masjid dan warga Muslim membantu membangun gereja, serta pada hampir semua suku di Papua tempat keluarga Muslim dan Nasrani biasa saling membantu dalam kegiatan bersama.

Sayangnya, potret indah kehidupan bermasyarakat atau sosial tersebut sering ternodai oleh tragedi kemanusiaan di berbagai tempat, yang kemudian tersiar ke seluruh Indonesia. Awal Reformasi sudah diwarnai dengan kerusuhan dan penjarahan di Jakarta. Lalu muncul konflik berdarah yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar di Ambon dan Halmahera Utara, Poso, hingga Sambas dan Sampit. Belum lagi aksi bersenjata yang mengatasnamakan kemerdekaan untuk lepas dari Indonesia seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Begitu pula terorisme yang meledak di berbagai wilayah baik yang bersifat lokal maupun transnasional yang berafiliasi dengan jejaring teroris di negara-negara tetangga seperti Malaysia serta Filipina.

Kekerasan massa seperti peristiwa Bali Nuraga di Lampung, kerusuhan Sampang di Madura, perang antarkampung di Nusa Tenggara Timur dan Barat, serta wilayah di Sulawesi, Maluku dan Papua selayaknya tak ada lagi pada Abad 21 ini. Belum lagi pelanggaran keadaban umum atau perilaku, baik yang dimunculkan semena-mena di depan publik, baik berupa pelanggaran ketertiban lalu lintas, demonstrasi buruh menuntut upah dengan menutup jalan tol, pertengkaran artis yang diangkat oleh pemberitaan *infotainment*, pornoaksi dan perekamannya yang dilakukan oleh siswa-siswa SMP, maupun perkelahian pelajar dan bahkan mahasiswa oleh sebab yang tidak penting. Kenyataan itu mengundang pertanyaan besar, apakah masyarakat sudah sedemikian jenuh dengan kehidupan sosial bangsa yang banyak diwarnai keruwetan? Ataupun Indonesia belum cukup kokoh dan matang sebagai bangsa untuk menghadapi perubahan dunia yang kompleks sehingga harus terjebak dalam keruwetan sosial yang menyebar?

Dunia jelas tengah berubah. Di tengah perubahan tersebut, Indonesia dituntut memperkuat posisinya di kancah global ketika sebagian masyarakat sendiri masih berpolemik dan berkonflik secara internal. Indonesia diharapkan menjadi bangsa dan negara yang kokoh saat sebagian masyarakat belum siap dan mapan secara sosial budaya. Apalagi ada kecenderungan melunturnya nilai-nilai luhur keberagaman atau kebhinekaan dalam pergaulan hidup antarkelompok bangsa. Dalam situasi seperti itu, apakah mungkin

merajut ke Indonesia dengan menghilangkan konektivitas geohistoris, baik kebanggaan sebuah bangsa ataupun ingatan kolektif membangun bangsa yang besar?

Pada periode 2014-2019, kematangan masyarakat dalam bidang sosial budaya sungguh diperlukan. Periode ini menjadi fase penting dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia akan segera memasuki usia 75 tahun kemerdekaan dan pergantian kepemimpinan nasional, melainkan juga merupakan bagian awal dari fase 'Bonus Demografi'. Pada 2014, jumlah penduduk Indonesia mencapai 249 juta jiwa dengan jumlah usia produktif sebesar 169 juta orang. Angka tersebut diperkirakan dapat meningkat menjadi 270 juta pada tahun 2019.

Pada saat itu jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam rentang usia produktif sebesar 70 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Hal ini memungkinkan nilai *dependency ratio* yang rendah. Artinya kelompok usia produktif hanya menanggung sedikit orang yang berada pada usia non-produktif. Pada 2014, dari setiap 100 orang produktif menanggung 45 orang tidak produktif, sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkarya. Terlebih ketika kualitas SDM usia produktif tersebut benar-benar memiliki daya saing secara nasional ataupun global, dan didukung penyediaan lapangan kerja yang luas.

Jika kualitas SDM masih rendah sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2013, berada pada peringkat 121 dan kuantitas lapangan kerja masih sedikit seperti masih banyaknya penduduk Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga di negara lain,

Bonus Demografi pun tidak berbuah apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat dan kebesaran bangsa. Jika kedua aspek utama ini, yaitu kualitas SDM yang baik dan kuantitas lapangan kerja yang banyak, terpenuhi, Bonus Demografi diprediksi juga akan melahirkan Bonus Ekonomi bagi kelompok menengah-atas karena pertumbuhan ekonomi, dan kelompok bawah secara alami akan terlibat dalam proses pertumbuhan itu. Oleh karena itu, Bonus Demografi dapat menjadi kesempatan emas bagi Indonesia, sebagaimana dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Tingkat Tinggi Bisnis antara ASEAN dan Uni Eropa, Mei 2011, dan menjadi bencana jika tidak dimanfaatkan secara tepat.

Periode 2014-2019 menjadi penanda dari titik tolak peningkatan kesejahteraan bangsa. Peningkatan di bidang ekonomi yang didukung oleh dinamika politik nasional dan internasional yang aman, misalnya, akan berpengaruh kuat bagi peningkatan bidang sosial budaya, khususnya pendidikan, kesehatan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau Ipteks, ikatan kebangsaan, dan demikian sebaliknya. Kemungkinan ke arah itu memang terbuka lebar, tergantung pada kapasitas masyarakat Indonesia beserta lingkaran strategis yang mencakupnya. Oleh karena itu, jika berbagai hal seperti kualitas sumber daya manusia belum mampu ditingkatkan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih terbatas, penegakan hukum masih lemah, solidaritas sosial antar anggota warga bangsa masih belum solid, serta benih-benih konflik SARA belum diselesaikan dan belum dikelola dengan baik, maka kesempatan yang langka itu akan menjadi sia-sia.

Banyak pengamat percaya bahwa Indonesia tak akan menjadi ‘negara gagal’ seperti yang disebutkan beberapa kalangan. Namun, kegagalan dalam mengelola Bonus Demografi akan membuat sulit keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bonus Demografi berarti “usia produktif sedikit terbebani oleh usia non-produktif, berpotensi meningkatkan kesejahteraan”. Maka, sekali kesempatan itu tidak direngkuh, momen untuk bangkit sepertinya lama kembali. Bisa jadi, secara internal, negara akan kehilangan kepercayaan dari warga negara. Ketidakpercayaan itu membuahkan konflik politik dan sosial budaya yang terus hadir dalam jangka lama.

Kegagalan untuk memanfaatkan Bonus Demografi dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat semesta juga membuat wibawa Indonesia menurun di kancah pergaulan dunia. Kegagalan itu hanya akan menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia mengelola dirinya sendiri berada pada tingkat rendah. Rendahnya kepercayaan dunia juga akan berpengaruh pada tingkat rasa percaya diri masyarakat Indonesia sendiri. Karena itu, pembangunan sosial secara mendasar pada periode 2014-2019 penting untuk dilakukan, terutama terkait dengan kesempatan emas Bonus Demografi tersebut.

DINAMIKA ANCAMAN

Terdapat beberapa aspek yang perlu dicermati dalam bidang sosial budaya yang dapat memberikan ancaman berarti terhadap masa depan Indonesia. Setidaknya ada lima poin penting yang menjadi persoalan Indonesia hari-hari ini hingga beberapa waktu mendatang. Kelima hal tersebut adalah keterbatasan akses serta kualitas layanan

pendidikan dan kesehatan; lemahnya penegakan hukum; paradigma pengembangan Iptek yang lemah dan kelirunya; solidaritas sosial kebangsaan yang meluntur; serta adanya konflik SARA dan reduksi hak-hak kewarganegaraan bagi kalangan minoritas.

1. Keterbatasan akses serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan

Bonus Demografi sebagaimana dinyatakan, selain menjadi kesempatan emas, juga dapat menjadi bencana bagi Indonesia. Surplus penduduk pada usia produktif dapat tidak berarti apa-apa bagi kemajuan Indonesia jika tidak mampu menunjukkan produktivitasnya yang sejalan dengan standar serta kebutuhan global secara menyeluruh. Bahkan jumlah penduduk pada usia produktif dapat menjadi beban negara sebagaimana mereka yang tidak produktif bila dalam kenyataannya mereka memang tidak sungguh-sungguh produktif. Kekhawatiran itu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia secara umum masih terbilang rendah dibandingkan bangsa lain, baik pengangguran terbuka maupun pengangguran tersembunyi khususnya yang terselubung di balik sistem kelembagaan formal yang tidak efektif.

Bila kualitas SDM Indonesia memang benar-benar dapat diandalkan, negara ini berpeluang menembus batas untuk menjadi negara maju. Sementara bila SDM tidak dapat diandalkan, Indonesia akan tertahan sebagai negara *mediocre* seperti saat ini. Kunci utama kualitas SDM tersebut adalah pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam dua bidang ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Namun, secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat yang terukur dari

“Bila kualitas SDM Indonesia memang benar-benar dapat diandalkan, negara ini berpeluang menembus batas untuk menjadi negara maju. Sementara bila SDM tidak dapat diandalkan, Indonesia akan tertahan sebagai negara *mediocre* seperti saat ini. Kunci utama kualitas SDM tersebut adalah pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.”

aspek pendidikan dan kesehatan belum memadai untuk menjadi pendorong Indonesia agar dapat lepas landas seperti beberapa bangsa lain. Secara umum, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan belum mampu mengangkat bangsa untuk menjadi bangsa yang cerdas dan sehat. Sejumlah realitas menjadi penanda seberapa tingkat pencapaian pembangunan pendidikan dan kesehatan. Praktik korupsi yang masih tinggi dan melemahnya sikap pluralitas dan multikulturalisme menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum mampu membangun integritas SDM dan keadaban umum yang beradab.

Lemahnya struktur industri juga penanda bahwa pendidikan belum cukup melahirkan profesionalitas bangsa. Tidak hanya itu, rendahnya kualitas pendidikan tercermin pada praktik perkuliahan dan demonstrasi pelajar atau mahasiswa. Kedua praktik ini dapat menunjukkan bahwa pendidikan tidak cukup menyenangkan bagi para siswa sehingga harus menyalurkan energi pada hal-hal merusak. Bila pembelajaran berjalan baik, para siswa akan fokus mengembangkan diri, menambah pengetahuan dan ketrampilan, serta menyiapkan berbagai hal terkait dengan tujuannya di masa depan. Demikian pula dengan demonstrasi pelajar atau mahasiswa, mungkin berawal dari kepedulian terhadap suatu hal. Fenomena

itu juga menunjukkan bahwa pemberdayaan otoritas lokal oleh Kementerian Pendidikan Nasional juga belum berjalan secara baik.

Di sisi lain, keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta semakin banyaknya kalangan menengah atas yang mencari pengobatan di luar negeri menjadi potret nyata dunia kesehatan. Kondisi ini menjadi cermin dari nilai IPM bangsa. Laporan yang dirilis UNDP pada Mei 2013, nilai IPM Indonesia berdasar perhitungan tahun sebelumnya adalah 0,629 atau peringkat 121 dari 186 negara di dunia yang menggunakan penilaian IPM. Nilai tersebut meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 0,624 atau secara peringkat naik tiga level dari peringkat 124 dunia.

Pada satu sisi, kenaikan itu adalah suatu keberhasilan pengelolaan pembangunan Indonesia setidaknya di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, pencapaiannya dipandang belum cukup memadai bagi Indonesia, jika didasarkan pada komposisi sumber daya alam, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Perhatikan, misalnya di wilayah-wilayah yang dekat dengan ibukota saja, seperti Banten, Bogor dan Bekasi, kualitas sarana dan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terlihat rendah. Apalagi di wilayah perbatasan antarnegara seperti Sebatik, Singkawang, dan Nusa Tenggara Timur beserta wilayah pedalaman, akses terhadap dua pelayanan itu benar-benar rendah, bahkan tidak ada.

Jika penilaian IPM di atas dijabarkan secara parsial, tampak bahwa nilai bidang pendidikan relatif rendah yakni sebesar

0,577. Hal ini menunjukkan, pembangunan pendidikan di Indonesia selama ini belum cukup berhasil, walaupun terdapat sejumlah kemajuan nyata yang hasilnya baru dapat dirasakan beberapa tahun mendatang. Sementara pengukuran IPM pada aspek kesehatan dikaitkan dengan angka harapan hidup atau rata-rata usia pada akhir hayat setiap orang. Di Indonesia, angka harapan hidup mencapai 69,8 tahun hingga menghasilkan indeks kesehatan IPM sebesar 0,785. Dibanding dengan banyak negara lain yang mencapai lebih dari 70 tahun, angka harapan hidup tersebut relatif rendah namun sudah meningkat secara signifikan dibanding dengan angka harapan hidup pada masa awal pembangunan tahun 1980, yakni 57,6 tahun.

Angka harapan hidup bukan satu-satunya alat pengukur tingkat kemajuan pembangunan kesehatan. Banyak lagi ukuran yang dipakai untuk menilai level pembangunan kesehatan setiap negara, seperti tingkat mortalitas atau kematian ibu melahirkan yang digunakan oleh program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Pada 2013, tingkat mortalitas ibu melahirkan adalah 220 orang per 100.000 kasus yang termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Kasus kematian umumnya karena pendarahan akibat persalinan yang dilakukan di rumah. Tidak hanya itu, ada juga indikator lain, yaitu: (a) tingkat kematian bayi; (b) prevalensi penyakit yang terkait dengan sanitasi seperti malaria, demam berdarah, dan TBC; (c) tingkat kematian warga akibat gaya hidup yang tidak sehat seperti serangan jantung dan stroke; (d) tingkat ketergantungan pada narkoba dan tingkat gangguan jiwa juga masih cukup tinggi.

Dari kenyataan di atas menunjukkan, posisi Indonesia pada pembangunan pendidikan dan kesehatan dunia masih berada pada peringkat menengah bawah, jauh dari semestinya sebagai sebuah negara besar yang kaya sumber daya alam serta memiliki peran strategis dalam percaturan dunia. Tingkat kemajuan pembangunan pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh yang masih relatif rendah, seperti dicerminkan oleh tingkat IPM Indonesia yang termasuk dalam kelompok 10 besar terendah di Asia Timur dan Pasifik bersama Papua Nugini maupun Kiribati. Bila kondisi ini terus ada pada tahun-tahun ke depan, maka kesempatan emas dari Bonus Demografi tidak terambil.

Selain itu perlu diperhatikan beberapa ancaman terkait pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada periode 2014-2019, yaitu: (a) beban kependudukan yang besar; (b) paradigma pembangunan pendidikan dan kesehatan yang masih didominasi paradigma modern yang menghendaki pendekatan linear, mekanistik, dan serba terukur secara kuantitatif atau ‘eksak’; (c) struktur, sistem dan budaya birokrasi yang tidak efektif melaksanakan pekerjaan nyata dalam menyejahterakan masyarakat; (d) praktik politik dan sistem partai politik nasional yang berorientasi pada politik uang telah mendorong terjadinya korupsi dalam skala massif, sehingga menjadi contoh negatif bagi upaya membangun masyarakat berkarakter, sehat, dan cerdas yang dikehendaki oleh sektor pendidikan dan kesehatan; (e) keberdayaan otoritas lokal yang masih minim; (f) tekanan globalisasi yang di satu sisi menciptakan budaya konsumtif dan hedonistik, walaupun di sisi lain memunculkan peningkatan

aspirasi masyarakat melalui media massa; dan (g) menjamurnya *enclave* lembaga pendidikan berdasarkan ikatan primordialisme yang dapat menggerus inklusivitas dan multikulturalisme masyarakat secara tradisional. Keberhasilan menjawab ancaman ini yang akan menghadirkan pembangunan yang nyata dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

2. Lemahnya penegakan hukum

Tiga bulan terakhir pada tahun 2013, setidaknya empat polisi tewas mengenaskan di jalanan. Tiga di antaranya tewas di kota pinggiran Jakarta. Satu yang lain tewas di jalanan ibu kota. Polisi sebagai penegak hukum sepertinya tidak berdaya di depan para pelaku pelanggarnya. Belakangan kepolisian menyebut bahwa penembakan tersebut terkait dengan aksi para ‘teroris’, walaupun terdapat pula kematian polisi karena aksi pelaku kriminal. Apapun yang menjadi penyebabnya, rangkaian peristiwa tersebut juga menjadi indikasi merosotnya wibawa polisi sebagai penegak hukum.

Di sisi lain, seorang jenderal polisi terseret tuduhan korupsi besar hingga terungkap memiliki kekayaan ratusan milyar rupiah. Di peradilan tindak pidana korupsi, pihaknya masih saja berkilah seolah sebagian kekayaannya merupakan hasil jual keris. Sebuah fenomena menarik diperhatikan: Seorang yang semestinya penjunjung tinggi fakta-fakta material hukum memunculkan aspek berbau ‘klenik’. Jenderal polisi ini pula yang sebelumnya juga terkait masalah arogansi kepolisian hingga ‘menyerang’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ‘Cicak vs Buaya’. Dalam aspek kekayaan, terungkap pula seorang polisi berpangkat Aiptu yang disebut memiliki transaksi perbankan

melebihi angka Rp 1 Trilyun, hasil dari usaha yang diduga ilegal berupa jual beli BBM, hasil hutan, serta jasa perkapalan.

Bukan hanya dari jajaran kepolisian yang bermasalah secara hukum. Aparat kejaksaan dan peradilan juga menghadapi masalah serupa. Di Bandung dan Semarang, jaksa dan hakim digiring KPK dengan tuduhan gratifikasi terhadap putusan perkara. Kasus ini menjadi pelanjut dari kasus jaksa Cyrus Sinaga dan beberapa hakim di Semarang dan Jakarta. Tidak jarang mereka berkompromi dengan para terpidana, untuk meminimalkan atau bahkan membebaskan dirinya dari hukuman yang akan ditetapkannya. Belum selesai kasus di pengadilan rendah itu, tiba-tiba mencuat kasus gratifikasi yang menimpa elemen penting di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dua lembaga penegakan hukum yang seharusnya berwibawa dan dipenuhi orang yang benar-benar menjaga integritas. Namun, dengan mudahnya para penegak hukum itu melanggar dan menenggelamkan kewibawaan penegakan hukumnya. Seperti yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang tertangkap tangan oleh KPK dengan tuduhan suap dan pasal pencucian uang. Media internasional pun mengangkat masalah ini.

Penegakan hukum di Indonesia sepertinya benar-benar jauh dari harapan. Padahal saat Reformasi, penegakan hukum merupakan elemen pertama dari enam Agenda Reformasi, yaitu: (1) Penegakan supremasi hukum; (2) Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (3) Pengadilan mantan presiden Soeharto dan para kroninya; (4) Amandemen UUD 1945; (5)

“Polisi, jaksa, hakim dan panitera banyak terlibat dalam mafia peradilan. Hal ini tidak terlepas dari peran pengacara yang ‘mediator’ penegakan hukum dengan pihak terhukum. Sebagian kalangan legislatif ikut berperan dalam pelemahan penegakan hukum, seperti terjadi pada rekayasa beberapa ayat pada Rancangan Undang-Undang Tembakau”.

Penghapusan dwifungsi ABRI, serta (6) Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Keenam agenda reformasi itu merupakan masalah hukum, sehingga tidak berlebihan jika perbaikan hukum disebut sebagai agenda utama reformasi.

Hingga saat ini, upaya penegakan supremasi hukum tersebut tidak berjalan secara baik. Sering diungkapkan secara seloroh bahwa “penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas”. Masyarakat kecil dengan perkara yang kecil dihukum berat, sementara orang besar dengan perkara yang besar dihukum ringan. Polisi, jaksa, hakim dan panitera banyak terlibat dalam mafia penradilan. Hal ini tidak terlepas dari peran pengacara yang ‘mediator’

penegakan hukum dengan pihak terhukum. Sebagian kalangan legislatif ikut berperan dalam pelemahan penegakan hukum, seperti terjadi pada rekayasa beberapa ayat pada Rancangan Undang-Undang Tembakau.

Penegakan hukum sesungguhnya tidak terlepas dari kekokohan tiga pilar bangunan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman (1984: 4), yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga aspek tersebut masih harus dibangun secara kuat. Meskipun demikian, persoalan yang lebih mendasar adalah menyangkut integritas

para penegak hukumnya sendiri yang masih suka ‘dibeli’ atau ‘menjual diri’ pada pelanggar hukum.

Persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah pengaruh sosial budaya dalam supremasi hukum. Bangsa ini dengan mudah mendengarkan gagasan supremasi hukum. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, kehidupan masyarakat bangsa telah menempatkan ‘supremasi sosial-ekonomi’ lebih utama daripada penegakan hukum. Hal ini terlihat misalnya pada praktik penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan melalui mekanisme ‘damai’. Banyak perkara hukum lain yang juga diselesaikan tanpa menjaga integritas penegakan hukum. Pengaruh sosial budaya yang menyulitkan penegakan hukum antara lain adalah nilai-nilai tenggang rasa dan paternalistik yang mentradisi dalam kehidupan masyarakat kita (Muhammad 2013).

Permasalahan itu juga akan tetap menjadi ancaman bagi penegakan hukum pada periode 2014-2019, walaupun akan ada perbedaan dan perkembangan yang cukup signifikan dalam persoalan hukum baru, seperti *cybercrime*, pencucian uang, kejahatan politik, dan sebagainya. Ada prediksi beberapa ancaman penegakan hukum pada periode 2014-2019 apalagi jika dihubungkan dengan Bonus Demografi dan kontestasi politik Indonesia, yaitu:

Pertama, ancaman yang berhubungan dengan substansi hukum. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, yaitu; (a) pembuatan peraturan dan perundangan-undangan diwarnai oleh politik hukum yang didasarkan pada kepentingan politik kekuasaan

(seperti otonomi/pemekaran daerah, politik identitas) dan kepentingan ekonomi seperti pada kasus RUU Tembakau; (b) penabrakan aturan baru terhadap aturan lama yang menimbulkan kesulitan implementasinya; (c) adanya persoalan baru yang belum atau tidak maksimal diatur dalam perundang-undangan, misalnya kejahatan pencucian uang dan *cybercrime* yang belum begitu terlihat jelas dalam KUHP.

Kedua, ancaman yang berhubungan dengan struktur hukum. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi; (a) apakah struktur hukum yang ada sebelum reformasi memang bermasalah sehingga perlu dibenahi atau perlu ditopang dengan “struktur hukum” yang baru; (b) apakah struktur hukum yang dibentuk setelah reformasi memang betul-betul diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan apakah keberadaan struktur hukum tersebut memang cukup efektif untuk menyelesaikan masalah.

Adanya lembaga baru akibat perubahan UUD 1945 dapat membuat tugas dan peran lembaga hukum bertumpang tindih. Misalnya menyangkut peran dalam pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, lembaga baru seperti KPK memiliki mandat yang jelas dalam pemberantasan korupsi tersebut. Di sisi lain, lembaga lama seperti kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus demikian. Kebutuhan terhadap lembaga-lembaga baru memang terasa karena lembaga-lembaga penegakan hukum yang lama umumnya belum cukup tereformasi.

Kepolisian, misalnya, masih rawan untuk menjadi ‘pusat korupsi’ karena menjadi pintu pertama bagi para pelaku kejahatan untuk

berkompromi. Hal tersebut juga terindikasikan pada tingkat kesejahteraan serta gaya hidup banyak polisi yang jauh di atas kebanyakan orang dari profesi lainnya. Kejaksaan dan peradilan juga memiliki kecenderungan koruptif melalui ‘senjatanya’ untuk meninggikan atau merendahkan hukuman. Mahkamah Agung juga masih disorot sebagai ‘pelindung koruptor’.

Ketiga, budaya hukum yang masih dihantui oleh ‘mafia hukum’ atau ‘mafia peradilan’. Hal tersebut tak lepas dari ketertutupan lembaga penegak hukum dalam pengawasan publik. Persoalan hukum paling serius di Indonesia masa kini adalah korupsi. Lembaga-lembaga hukum yang lama secara umum masih belum sepenuhnya ‘legowo’ untuk berada dalam pengawasan lembaga-lembaga baru yang dibentuk untuk mendukung Reformasi.

Keempat, ancaman di luar sistem dan struktur lembaga penegakan hukum, adalah banyaknya pihak lain yang memanfaatkan situasi lemahnya penegakan hukum untuk kepentingan pemerasan. *Kelima*, pemberitaan media massa yang terlalu berlebihan dalam kasus hukum seorang telah memberi pengaruh besar terhadap netralitas dan prinsip penegakan hukum di Indonesia, yaitu prinsip “praduga tidak bersalah”. *Keenam*, aspek otonomi atau pemekaran daerah terlebih yang masuk ke dalam kebijakan otonomi khusus, seperti Papua dan Aceh juga ikut menghambat penegakan hukum. Upaya tebang pilih dalam penyelesaian kasus hukum berdasarkan kepentingan politik seperti ini menjadi indikasi atau preseden buruk penegakan hukum di Indonesia pada periode 2014-2019.

3. Kekeliruan paradigma pengembangan Iptek

Kekeliruan paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga merupakan persoalan Indonesia di ranah sosial budaya. Kekeliruan itu, antara lain, dalam menerjemahkan *green policy* sebagai kebagai kebijakan. Indonesia dikenal memiliki kekayaan luar biasa pada sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati, khususnya terkait barang-barang tambang (minyak bumi, mineral), gas bumi, panas bumi, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan non- hayati yang juga sangat kaya. Kekayaan tersebut semestinya menjadi modal terpenting dalam pengkajian dan pengembangan Iptek. Dalam khazanah bangsa di masa lalu, kedua sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Semestinya keduanya dikembangkan lagi untuk memperkuat posisi Indonesia ke depan melalui pengembangan Iptek.

Pengembangan Iptek di Indonesia dari masa ke masa senantiasa terkait dengan perkembangan global. Pada masa awal sejarah misalnya, pengembangan Iptek tersebut terhubung dengan perkembangan peradaban India, dan kemudian Arab serta Cina. pada masa kolonial, pengembangan Iptek tersebut terputus akibat eksploitasi kekuasaan penjajah. Wilayah Nusantara ini menjadi sasaran eksploitasi bangsa-bangsa Eropa melalui penjajahan yang dilakukannya. Penjajahan memang bukan hanya bertujuan menguasai perdagangan dan sumber komoditas, melainkan juga melakukan produksi langsung komoditas itu dan mengekspornya ke segenap penjuru dunia, termasuk *bioresources* sebagai tujuan utama pelayaran samudera bangsa Eropa (Schiebinger 2004).

Kekuatan pendorong penjajahan itu pada dasarnya *bioprospecting*, atau eksploitasi kekayaan biologis daerah sasarannya. *Colonial bioprospecting* dan sekaligus menjadi titik perhatian (*mainstream*) perkembangan Iptek yang dilakukan Belanda di tanah jajahannya. Praktik *colonial bioprospecting* terutama dilakukan bangsa Eropa pada masa keemasan penjelajahannya, yaitu tahun 1500 hingga 1700 (Cook 2007; Parthesius 2010) dan diikuti pula Jepang pada abad ke-19 dan ke-20 yang terus berlanjut hingga tiap-tiap koloni akhirnya memerdekakan diri (Schiebinger 2004). Hingga sekarang, praktik seperti ini masih terjadi walaupun dilakukan dalam bentuk yang halus.

Pembajakan bio (*biopiracy*) sebagai bentuk yang lebih tersamar dari *bioprospecting* antara lain dilakukan melalui kerja sama penelitian antara lembaga asing dan lembaga-lembaga pemerintah. Seperti melalui kerja sama JICA (*Japan International Cooperation Agency*) dengan lembaga penelitian seperti LIPI dan Kementerian Pertanian. Hal tersebut terjadi karena pemerintah tidak memberikan prioritas secara khusus terhadap penelitian sumber daya hayati Indonesia yang serba melimpah, sehingga para peneliti bekerja sama dengan asing untuk memperoleh pendanaan.

Praktik *biopiracy* bukan hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga perusahaan-perusahaan besar bekerja sama dengan masyarakat adat pemilik *bioresources* dan *local knowledge*-nya. Perusahaan multinasional di bidang farmasi dan makanan adalah kelompok *non government* yang paling banyak melakukan *biopiracy*. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa *biopiracy* adalah salah

satu bentuk “penjajahan modern”. Pararel dengan *bioprospecting* dan *biopiracy* adalah *geoprospecting* dan *geopiracy*. Keduanya dipraktikkan oleh penguasaan suatu negara terhadap negara lain atau oleh perusahaan multinasional terhadap kemampuan sumber daya bumi dari wilayah masyarakat adat di negara berkembang. Walaupun perlu dicatat bahwa *colonial geoprospecting* tidak segencar fenomenanya pada *colonial bioprospecting* setidaknya hingga akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20 (Hutchinson 1996; van Bemmelen 1970; Hutchinson & Taylor 1978).

Kekayaan hayati dan nonhayati Indonesia punya potensi luar biasa besar untuk menyejahterakan masyarakat. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu mengolah dua kekuatan itu sebagai basis pengembangan Ipteknya yang memiliki dampak bagi kesejahteraan? Di sisi lain perlu dicermati bahwa pemanfaatan kedua kekuatan itu juga mempunyai dampak negatif yang perlu diwaspadai, yakni berupa pengaruhnya pada gangguan stabilitas nasional dan pelemahan daya tawar Indonesia. Hal ini adalah dampak sampingan dari campur tangannya entitas, baik politik maupun ekonomi internasional dan domestik terhadap perkembangan Iptek berbasiskan pada *biopiracy* dan *geopiracy*. Asing tentu tak menginginkan Indonesia mampu mengelola kekayaan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) sendiri.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut bukan tak ada. Cetak biru pengembangan Iptek Indonesia, antara lain, pernah disusun Bappenas pada 2003. Namun, cetak biru itu belum mampu melahirkan hal yang mendasar bagi perkembangan

Iptek yang memajukan bangsa. Ada beberapa persoalan di dalamnya; (a) masih terfokus pada keanekaragaman hayati dan strategi konservasinya; (b) belum menyentuh pemanfaatan *biodiversity* itu untuk tujuan ekonomis (*bioprospecting*) nyata bagi peningkatan kesejahteraan; (c) tidak dibekali pendekatan *futuristic* terhadap bidang Iptek apa saja yang sebaiknya dikembangkan dalam kaitan dengan pemanfaatan *biodiversity*. (d) kurang-jelas dalam mengulas bahaya nyata yang mengancam yaitu *biopiracy* dan *geopiracy* pada era globalisasi (*colonial bio-geopiracies sensu lato*) yang tidak hanya melibatkan negara asing, tetapi juga perusahaan multinasional berkekuatan ekonomi besar, baik internasional maupun domestik.

Dengan kata lain, cetak biru itu belum menyentuh akar permasalahan sebenarnya dari kegagalan Iptek di Indonesia, yaitu lemahnya penguasaan ilmu dasar penunjang *bio-geoprospecting* sehingga tetap membuka peluang seluas-luasnya bagi praktik *biopiracy* dan *geopiracy* pihak lain untuk merongrong sumber daya alam yang seharusnya diteliti dan dikelola bangsa Indonesia sendiri. Kalaupun bermitra dengan negara lain atau swasta, maka ilmuan Indonesia lebih berperan aktif mengambil kebijakan, memantau, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa. Belum pula, misalnya, ia menyinggung pula seputar *bioterrorism* yang dapat muncul kapan pun pada era globalisasi seperti ini.

Beberapa lembaga pemerintah, seperti LIPI, Ristek, BPPT, dan Lapan. LIPI, sebagai otoritas penelitian di Indonesia, dalam lima tahun terakhir mulai kembali mengarahkan kembali secara

bertahap perkembangan Iptek dengan berbasis pada sumber daya alam. Langkah awalnya dimulai dengan pendataan ulang dan status terkini dari sumber daya itu (Widjaja 2011). Hal ini dianggap sebagai awal yang baik untuk kembali meletakkan *bioprospecting* sebagai paradigma Iptek bangsa. Tentu saja bukan dengan pola *bioprospecting* kolonial, namun lebih pada pemenuhan tujuan didirikannya NKRI ini, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Namun, langkah awal dan program lanjutannya seperti pengembangan ilmu dasar pendukungnya sekali lagi tak didukung dengan alokasi pembiayaan yang memadai.

4. Solidaritas sosial yang meluntur

Ciri penting Indonesia adalah identitas kebangsaannya terus dibangun dengan menjaga ‘identitas keindonesiaan’, dengan sama sekali tidak berbasis kepada identitas dan tradisi etnis tertentu. Suku berpopulasi terbesar, Suku Jawa, tidak menghendaki dan memaksakan sama sekali pengaruh tradisi dan budayanya, terutama bahasa, ke dalam identitas kebangsaan. Hal ini menjadi modal penting untuk membentuk kesadaran dan ikatan kebangsaan Indonesia yang multi-etnik. Artinya, solidaritas sosial atas nama ‘keindonesiaan’ dibangun di atas realitas dan tantangan kuat akan keragaman dan perbedaan di antara suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat.

Model kebangsaan multikultur ini senantiasa berusaha melampaui realitas perbedaan dan mampu mengatasi perbedaan etnis dan menjelmaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI). Kenyataannya, masyarakat sadar dan mengakui

keberagaman, lalu berproses “menjadi Indonesia” yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Pilar-pilar kebangsaan lain, seperti Pancasila dan UUD 1945 yang mengakui perbedaan itu pun tetap dijaga dan dilestarikan dalam suatu pemahaman bersama membangun Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II 1928.

Kesadaran demikian dibangun di atas landasan geo-historis yang kokoh. Yakni bangsa dan negara ini disatukan oleh ikatan geografis dan sejarah sekaligus. Dalam kesadaran tersebut, lautan merupakan pemisah namun justru pemersatu Indonesia. Ini berarti bahwa pulau besar di Indonesia bukan merupakan suatu kesatuan daerah secara geografis, melainkan satu kesatuan wilayah negara. Setidaknya ada lima pembagian daerah secara geografis dengan berbasis pada sudut pandang sejarah dari ikatan persaudaraan lama yang menjadi jalan setapak ide kebangsaan.

Pertama, daerah geo-historis pada kedua sisi Selat Malaka, tercakup daerah pantai timur Sumatra dan pantai barat Semenanjung. *Kedua*, daerah geo-historis pada kedua sisi Selat Sunda mencakup Lampung di bagian selatan Sumatera dan Banten di bagian barat Pulau Jawa. *Ketiga*, daerah geo-historis pada kedua sisi Laut Jawa. *Keempat*, daerah geo-historis yang berada di Selat Makassar. *Kelima*, daerah geo-historis wilayah di Laut Maluku berbatasan dengan Kepulauan Filipina dekat dengan Mindanao dan Sulu, mencakup pulau rempah-rempah: Papua, Banda, Ambon, Seram, Buru, Ternate, Tidore, dan Manado.

Luasnya bentangan geo-historis di atas, membuka beberapa ancaman terhadap ikatan kebangsaan bersamaan dengan tumbuhnya nasionalisme itu sendiri. Dahulu, khususnya di masa Indonesia klasik, perebutan wilayah kekuasaan antar kerajaan terjadi antara satu dan lainnya. Sementara pada zaman kolonial, adu domba dan politik belah bambu untuk penguasaan wilayah dan sumber produksi menjadi ancaman terbesar. Pasca kemerdekaan, beberapa ancaman bersifat internal dan eksternal dari negara bekas penjajah pun terus terjadi. Secara internal, pertikaian dari perbedaan ideologi antara partai, politik aliran dan organisasi etnik berlangsung sehingga mengabaikan solidaritas sosial kebangsaan. Saat itu banyak partai politik bersikeras mengutamakan kepentingan praktis jangka pendek dan jarang merumuskan kepentingan nasional berjangka panjang.

Banyak tragedi merupakan hasil pertentangan politik aliran itu seperti peristiwa Madiun 1948; Pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat; Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara serta Peristiwa Gerakan 30 September. Ancaman solidaritas sosial kebangsaan pasca kemerdekaan sampai Orde Lama, adalah lebih pada persoalan perbedaan kepentingan politik terutama persoalan pembagian jatah pembangunan.

Trauma politik pada masa awal kemerdekaan dan Orde Lama telah membuat pemerintah Orde Baru memilih sikap represif. Tidak jarang negara menggunakan tindakan keras bagi elemen pengganggu atau golongan politik yang berusaha mengkritisi dan mempersoalkan dasar negara dan kebangsaan. Pembicaraan

dan persoalan tentang suku, agama dan ras sangat dilarang dan tabu demi menjaga stabilitas politik, ketertiban dan keamanan. Negara menciptakan tafsir tunggal atas Pancasila dan kebangsaan. Kenyataan sebagai bangsa yang pluralis dan multikulturalisme direduksi menjadi perbedaan yang bisa disatukan dalam satu wajah keindonesiaan.

Seperti tidak belajar dari sejarah sebelumnya, pada era Reformasi, masyarakat terlalu *euphoria* sehingga terjebak kembali pada perilaku yang mengancam kebangsaan. Politik aliran dikedepankan dalam menunjukkan identitas diri dan golongan. Kebijakan pemerintah yang berorientasi kuat pada ekonomi pasar dan desentralisasi, terutama menyangkut investasi bidang pertambangan dan perkebunan, menimbulkan konflik sosial di masyarakat seperti konflik agraria antara kelompok bisnis, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Persoalan kolonial model baru seperti yang disebutkan pada sub perkembangan Iptek pun muncul dalam persoalan ancaman non-senjata terhadap solidaritas kebangsaan. Hal ini semakin dirunyamkan oleh persoalan otonomi daerah yang sebagian besar wilayah belum siap menjalankan tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, pada periode 2014-2019, selain ancaman “klasik” yang disebutkan di atas, maka ancaman terbesar bangsa Indonesia dalam persoalan solidaritas kebangsaan setidaknya ada empat. *Pertama*, menguatnya politik aliran yang dikemas dalam politik identitas atas nama golongan, suku, dan agama. Pembedaan antara pribumi dan asing, antara identitas diri dan *liyan* semakin diperkuat dengan terakomodasinya politik identitas

yang diusung dalam kebijakan dan praktik otonomi daerah. Tanda-tanda seperti itu telah terlihat nyata pada lima tahun terakhir ini, seperti pada kasus masyarakat dan pemerintahan Banten (Serang, Lebak, dan Pandeglang), Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya.

Kedua, pemanfaatan isu kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam praktik politik, terlebih ketika bangsa Indonesia tidak bisa meraih kesempatan Bonus Demografi yang akan hadir pada 2014-2019. Tantangan berat ini secara teoritis meliputi sikap kritis dari publik bahwa kebangsaan, juga Sumpah Pemuda dan Pancasila, mengalami stagnasi penafsiran. Pemahaman kebangsaan menjadi sekadar ritual dalam bentuk upacara dan peringatan dan bahkan dianggap cita-cita utopia, terlalu ideal dan sulit diwujudkan. Solidaritas sosial kebangsaan kehilangan makna dan fungsi jika tidak ditafsirkan dan dikembangkan secara filosofis sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih, ketika masyarakat tidak mencapai kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam cita-cita bersama kehidupan berbangsa. Tidak mustahil ada pandangan, apa artinya berbangsa Indonesia bila mereka tetap saja berada pada garis kemiskinan dan jurang kesenjangan sosial yang terlalu lebar antara yang mapan dan yang biasa.

Ketiga, menguatnya budaya populer, baik dalam wujud sosial media maupun praktik budaya populer, pada ruang publik dalam mengapresiasi kebebasan individu, khususnya yang mempertontonkan penolakannya terhadap kemapanan kehidup-

an berbangsa. Keberadaan situs sosial media yang menafikan atau merendahkan martabat bangsa, dan kehadiran kelompok *Punk*, *Indies*, dan gank motor secara liar tidak dapat dianggap sepele, karena jika dibiarkan terus akan membentuk makna lain dalam mengartikan kebersamaan dan solidaritas sosial kebangsaan yang mengutamakan penghargaan antara satu dan lainnya.

Keempat, ledakan arus informasi termasuk kebebasan pers dan media yang memberitakan paham yang bertolak belakang dengan ide dasar kebangsaan. Saat ini pemerintah mempraktikkan mazhab ekonomi pasar secara penuh bagi media, --mungkin karena tuntutan demokrasi ala Barat--, bahkan sejumlah persoalan politik dan agama dengan sensitivitas tinggi cenderung diserahkan kepada publik. Realitas ini memberi ruang luas bagi media massa dan golongan fanatik agama untuk tampil ke depan menjadi aktor penting penentu kebijakan. Akhirnya, tidak mengejutkan jika masalah moral, perbedaan aliran keagamaan, dan toleransi beragama menjadi ajang keributan dan cenderung dipentaskan secara publik yang dapat memicu konflik sosial dan mengurangi keadaban publik.

5. Konflik SARA dan reduksi kewarganegaraan kelompok minoritas

Sebagaimana pada bidang-bidang yang disebutkan sebelumnya, maka perkembangan dan lingkungan strategis dari keadaan hubungan antar-agama dan etnik di Indonesia pun mengalami permasalahan yang tidak dapat dianggap ringan. Fenomena yang muncul akhir-akhir ini adalah reduksi kewarganegaraan

“Dua dekade pasca-Reformasi, masyarakat belum sepenuhnya dewasa dalam memaknai dan mempraktikkan demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan kaum Reformis. Hal ini terlihat jelas dalam kualitas penerimaan masyarakat terhadap kelompok minoritas dari sisi keagamaan ataupun identitas etnik”.

bagi kelompok minoritas keberagamaan dan etnik, diiringi dengan berbagai konflik Suku Ras Agama dan Antargolongan (SARA) yang bersifat komunal. Dua dekade pasca-Reformasi, masyarakat belum sepenuhnya dewasa dalam memaknai dan mempraktikkan demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan kaum Reformis. Hal ini terlihat jelas dalam kualitas penerimaan masyarakat terhadap kelompok minoritas dari sisi keagamaan ataupun identitas etnik.

Pasca-Reformasi, setidaknya tercatat tiga konflik SARA bersifat besar dan komunal, yaitu konflik agama (Kristen-Islam) di Ambon Maluku pada 2000, konflik agama (Kristen-Islam) di Poso pada 2002, dan konflik suku antara Dayak dan Madura di Kalimantan (Sampit, Sambas, Ketapang) pada 2004 yang memakan korban ribuan jiwa. Dua di antara tiga konflik itu bernuansa gagalnya hubungan antar agama. Konflik Dayak Madura yang kelihatannya konflik kesukuan, tetapi juga dapat dibaca dengan sudut pandang hubungan antar agama, yaitu bahwa Dayak mayoritas Kristen dan Madura adalah Islam, walaupun tidak terjadi masalah apapun antara Dayak dan komunitas Islam lainnya.

Menyusul setelah itu, lima tahun terakhir ini, kejadian-kejadian berbau SARA lain, seperti (a) kasus Sampang

Madura yang melibatkan konflik antara kelompok Sunni dan Syiah pada tahun 2011-2012, dan disusul dengan peristiwa Jember September 2013; (b) peristiwa Cikeusik Banten berupa penyerangan kelompok Ahmadiyah pada 2012; (c) peristiwa Ahmadiyah di Bogor tahun 2011, (d) konflik Balinuraga-Lampung pada Oktober 2012; dan (e) beberapa peperangan antar desa dan kelompok ulayat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, serta disusul oleh kejadian lain yang tersebar di berbagai daerah dengan pola dan sebab berbeda-beda. Beberapa endapan kebencian dan stigmatisasi terhadap kelompok lain pun masih kuat dipegang beberapa komunitas di Indonesia. Endapan seperti ini menjadi tanda laten dari pecahnya konflik SARA bersifat komunal di kemudian hari.

Ketika suatu kelompok minoritas diposisikan pada titik nadir, maka dalam banyak kasus hak-hak kewarganegaraan mereka pun diimpit dan direduksi. Aksesibilitas terhadap pelayanan publik dibatasi, apalagi hak-hak mereka yang berhubungan dengan praktik keagamaan di mana dasar-dasar plakat itu ditetapkan. Hal ini terlihat nyata pada kasus kelompok Syiah di Sampang Madura, kelompok Ahmadiyah di Cikeusik dan Kuningan, kelompok gereja Kristen Yasmin di Bogor, dan sebagainya. Belum lagi perlakuan kepada kelompok kepercayaan di beberapa daerah. Jaminan terhadap hak kewarganegaraan anggota pengikut ini mengalami pengurangan yang didasarkan pada konsepsi *liyan* yang memperhadapkan dengan dirinya (*self* atau *al-ana*), yaitu karena “mereka yang berbeda dari kami”.

Konsepsi kewarganegaraan dan kebangsaan tentu tidak dibangun berdasarkan makna “mereka yang berbeda dari kami”. Konsepsi itu

tentu didasarkan pada ikatan keanggotaan mereka sebagai “warga negara” dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika konsepsi tentang *liyan* ini terus *menggeranyut* pada setiap individu warga negara, negara kesatuan ini akan hancur berkeping-keping. Artinya, negara pun menjadi kalah atau ditundukkan oleh pihak lain yang memberi plakat warga negara lain itu dengan identitas yang mengurangi atau membatasi hak kewarganegaraan yang seharusnya dijamin dan diberikan oleh negara.

Konsepsi *liyan* ini pula yang semakin menguat pasca-Reformasi, ketika politik identitas kelompok etnik di daerah menguat dan menemukan salurannya atas nama kebebasan dan HAM, sebagaimana isu strategik global, baik pada bidang politik maupun sosial ekonomi. Sayangnya, selain ekspresi kekuasaan “kaum pribumi” untuk menduduki jabatan politik dan perangkat pemerintahan, politik identitas juga disalahartikan sebagai pemangkiran dari hubungan antar-kelompok berbeda etnik, bahasa, agama, dan stratifikasi sosial ekonominya. Bentuk-bentuk wilayah komunitas yang bersifat kantong (*enclave*) sebagai akibat jaringan kekerabatan bersifat tradisional, kesamaan agama, dan dampak program kolonisasi pada zaman Belanda ataupun transmigrasi pada masa pemerintahan RI, kemudian diartikan sebagai sesuatu yang membuat penghuninya berbeda antara satu dan lainnya. Keadaan seperti ini yang memperkuat faktor pemicu berbagai konflik komunal atas nama suku, agama, dan ras di Indonesia.

Beberapa konflik “agama”, misalnya, tidak melulu dianggap konflik komunal atas nama suku atau agama, tetapi juga dipicu

oleh beberapa aspek lain, termasuk politik identitas. Selain juga ada persoalan sejarah yang belum diselesaikan pada masa lalu, misalnya, persaingan ketat antara misi kristenisasi dan islamisasi yang disertai persaingan etnik antara suku-suku asli yang berada di Ternate ataupun suku Bugis, Bone, dan Makasar yang Islam, serta suku Ambon dan suku Papua non-Austronesia lain yang mayoritas adalah Kristen.

PETA ANCAMAN

Berdasarkan kronologi dan amatan terhadap fenomena konflik SARA di Indonesia, maka ancaman yang akan dihadapi bangsa Indonesia pada periode 2014-2019, setidaknya ada tujuh jenis ancaman, yaitu:

- Masih menguatnya politik identitas etnis dan politik aliran agama mayoritas, ataupun implementasi keliru politik identitas kelompok minoritas karena keterbukaan akses ataupun karena jaminan dari dunia internasional (HAM). Konsepsi antara diri (*self, al-ana*) dan yang lain (*other, al-akhar*) dipraktikkan secara tegas dalam kehidupan bersama, dan akhirnya meledak menjadi konflik komunal SARA. Terlebih ketika politik identitas ditumpangi motif kekuasaan seperti yang tercermin pada Pemilu. Adalah keniscayaan, intensitas ancaman konflik komunal atas nama agama dan suku di Indonesia pun akan semakin tinggi dan meluas cakupannya. Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pada ancaman ini adalah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Kalimantan dan NTT.

- Kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dan warga pendatang, baik melalui kebijakan transmigrasi maupun migrasi alami dari berbagai komunitas masyarakat. Wilayah rawan dari sisi seperti ini adalah Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan, plus Papua. Dalam konsepsi ini, program transmigrasi pun identik dengan kolonisasi, terlebih didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Lalu apa yang salah? Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara jeli, yaitu; (a) aspek kepemilikan lahan untuk program transmigrasi; (b) pembentukan ruang kewilayahan permukiman penduduk. Banyak kasus penyerobotan tanah ulayat dari kelompok etnik yang berdomisili di tempat itu sejak awalnya, baik untuk permukiman yang umumnya masih dapat dimaklumi, maupun untuk perkebunan baru yang disiapkan bersamaan dengan datangnya para transmigran. Hal seperti ini terlihat jelas pada kasus kepemilikan tanah Anak Suku Dalam di Jambi, komunitas Dayak di Kalimantan pada program transmigrasi sejuta lahan bakau (Walhi 2002; AMAN 2001; dan YMP 2007), dan komunitas adat Tau Taa Vana di pedalaman Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah (Humaedi 2012). Jika hal ini terus dibiarkan, maka konflik SARA dengan dasar konflik agraria akan cenderung meningkat.
- Kebijakan Otonomi Khusus, baik yang diberikan kepada Papua maupun Aceh. Pasa satu sisi, hal ini dipahami sebagai jalan tengah yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi ketegangan yang terus-menerus terjadi. Namun, di sisi lain, Otsus menjadi jalan terang dari menguatnya ikatan primordialisme SARA di wilayah-wilayah yang cenderung memiliki tingkat tinggi

intensitas konflik. Akibatnya, ancaman konflik SARA semakin terlihat jelas, khususnya ditujukan kepada anggota masyarakat yang dianggapnya bukan bagian utama dari kebijakan Otsus itu diberikan. Misalnya, Otsus diberikan untuk Provinsi Papua, hal ini dimengerti sebagai buah keberhasilan dari tuntutan kelompok adat Papua dalam memperjuangkan “kemerdekaan tanah Papua” dengan model lain, yaitu tetap terikat dalam NKRI, namun hati dan perasaannya melanglang buana mencari identitas diri. Karena hal ini adalah hasil perjuangan kelompok beridentitas Papua, maka identitas etnik lain tidak diperkenankan mencicipi dana Otsus tersebut. Akhirnya, penguasaan terhadap program-program kebijakan Otsus sepenuhnya berada pada kelompok etnik Papua.

- Pemusatan *enclave-enclave* dari berbagai komunitas, baik sebagai hasil kolonisasi (Yeoh 2011), transmigrasi, maupun bentukan alami dengan wilayah tradisional kaum pribumi yang didasarkan pada etnik dan agama. Pola permukiman yang bersifat *enclave* dalam program transmigrasi, misalnya, sangat membahayakan tata hubungan berbagai komunitas di kemudian hari. Bukan hanya sesama transmigran, melainkan juga terhadap komunitas adat penghuni ulayat awalnya. Dalam banyak kasus, permukiman transmigrasi dibuat berdasarkan asal kewilayahan kelompok-kelompok transmigran. Transmigran Bali dikumpulkan menjadi satu permukiman sendiri; orang Lombok dan NTT juga diperlakukan demikian; orang Jawa dan Sunda demikian pula diberikan tempat permukimannya. Namun pada perkembangannya, pola ini telah membentuk solidaritas primordial yang membahayakan hubungan antar etnik.

- Proses interaksi dan akulturasi dua atau lebih dari karakter kebudayaan masing-masing etnik dan penganut keagamaan yang tidak berhasil atau mengalami kegagalan dalam suatu irama kehidupan bersama (Humaedi 2013). Kegagalan interaksi disebabkan perasaan primordialisme atau penilaian secara rigid sekat-sekat sosial ekonomi pada setiap komunitas. Elemen sosial paling bawah merasa risih “dibiarkan”, sementara elemen tingkat menengah ke atas lebih asyik memikirkan dirinya. Jika dihubungkan pada konteks kebudayaan etnik, ada sikap *etnocentrisme* yang membuat kelompoknya memisahkan diri dan lebih memilih membiarkan kelompok komunitas lain. Jika dihubungkan pada kelompok keagamaan, pembiaran tanpa komunikasi akan menumbuhkan praduga yang berbuah isu pemicu konflik.
- Campur tangan pihak lain atas nama politik kekuasaan dan politik aliran keagamaan. Campur tangan ini didasarkan pada primordialisme dan fanatisme paham politik dan paham keagamaan, baik lokal maupun trans nasional. Salah satu praktik yang terlihat adalah pembentukan sel-sel atau jaringan kelompok terorisme dan kelompok radikal lainnya berdasarkan jaringan trans-nasionalnya. Praktik terorisme yang menghantui hubungan antar-agama dan berimbas pada stabilitas sosial politik dan keamanan negara dibangun atas dasar campur tangan seperti ini. Suatu konsorsium yang berada di balik pembajakan kapal-kapal di Somalia sebagai salah satu praktik sumber pendanaan, berperan aktif dalam pembiayaan jaringan terorisme di dunia. Beberapa konsorsium lain pun secara aktif telah memberikan sokongan penuh kelompok keagamaan dalam negeri yang memicu konflik

dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah pada tahun-tahun terakhir ini.

- Adanya akar persoalan konflik bersifat essensialisme dan melekat pada kelompok masyarakat di wilayah tertentu. Pendekatan essensialisme ini sengaja diajukan setelah memperhatikan kecenderungan berbagai konflik yang ada di Indonesia pada periode sebelumnya. Jika diamati secara seksama dalam peta rawan bencana BNPB 2011, bahwa wilayah rawan konflik, juga merupakan wilayah yang diprediksikan sebagai wilayah rawan bencana alam. Apa yang disebut Peta “Cincin Api di Jalur topografis Sulawesi”, misalnya juga wilayah rawan konflik sosial sebagaimana yang terjadi di Poso, Tentena, Morowali, dan Sigi Birimaru. Demikian juga apa yang disebut “Jalur api perbukitan Barisan dan Patahan Sumatera” juga diindikasikan sebagai wilayah yang memiliki ancaman bencana sosial yang sama kuatnya dengan ancaman bencana alamnya, misalnya kasus Warsidi pada 1980 an dan konflik Aceh (Humaedi 2013). Pada kasus Pulau Jawa, terlihat jelas, perbukitan Menoreh yang rawan longsor, kekeringan, dan kebakaran, juga menjadi tempat paling penting dalam sejarah konflik pedesaan, seperti pada cerita “Api di Bukit Menoreh” yang menggambarkan pertarungan terus-menerus antara para penguasa kerajaan Pajang dan Mataram; atau kerusuhan di Pekalongan Atas (Humaedi 2008) dan Kiai Ahmad Rifai di Kendal (Jamil 2002). Dalam kacamata *culture materialisme* sebagaimana yang dinyatakan Marvin Harris (1976), sepertinya ada satu pandangan linear, bahwa kerawanan wilayah dari sisi ekologi, juga memiliki pengaruh kuat bagi kerawanan

wilayah dari sisi psikologi, antropologi, dan sosiologis. Artinya, aspek-aspek lingkungan telah menciptakan satu kondisi tertentu beserta karakter masyarakat yang berpotensi pada meletupnya suatu konflik. Memang harus diakui bahwa cara berpikir seperti ini belum tentu dapat diterima oleh banyak orang karena seringkali dianggap artifisial, sebelum ada perbandingan antara peta rawan bencana dan peta ancaman konflik di seluruh wilayah Indonesia. Namun setidaknya dapat dijadikan rambu-rambu kewaspadaan bahwa ancaman konflik SARA berdasarkan prinsip esensialisme seperti ini selalu ada di wilayah mana pun dan kapan pun.

DAMPAK KE MASA DEPAN

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia masa depan haruslah Indonesia yang merdeka, berdaulat, serta adil dan makmur. Dalam kehidupan sosial, hal tersebut berarti kehidupan bermasyarakat yang dinamis, sejahtera, serta bebas mengaktualisasikan diri masing-masing tanpa merugikan siapapun dengan terikat oleh kesadaran dan rasa cinta bersama sebagai satu bangsa. Pada tataran pribadi atau perorangan di masyarakat, Indonesia yang merdeka, berdaulat, serta adil dan makmur tersebut mewujudkan pada perilaku seluruh warga yang santun dan cinta damai, berakarakter dan beretos kuat, inovatif dan maju, beretika dan taat hukum, cinta bangsa dan menjunjung kearifan lokal, serta menghargai sesama tanpa membedakan identitas apapun baik suku, agama maupun golongan.

Gambaran mulia kehidupan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia tersebut harus menghadapi

ancaman nyata dalam berbagai bidang seperti tersebut di atas. Seperti rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang tercermin, baik pada nilai dan peringkat IPM Indonesia maupun beberapa ukuran lain; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terarah sehingga tidak memberi nilai tambah; penegakan hukum yang sarat dengan kepentingan uang; solidaritas sosial yang retak; bahkan juga radikalisme dan kekerasan yang mengorbankan kelompok masyarakat lemah dan minoritas. Hal tersebut akan menjadi penghambat signifikan bagi Indonesia untuk menjadi bangsa besar di dunia, bukan hanya dari aspek politik melainkan juga ekonomi dan budaya.

Dinamika ancaman dalam bidang sosial dari berbagai aspek serta kemungkinan dampaknya terhadap masa depan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Dinamika Ancaman Sosial dan Dampaknya

BIDANG	ANCAMAN	DAMPAK
Pendidikan dan Kesehatan	Belum berpusat pada aspek kualitas	Bangsa yang lemah nalar, kesehatan, dan karakter
Iptek	Tanpa strategi pengembangan jelas, pencurian kekayaan bangsa	Tak memiliki lokomotif inovasi pendorong kemajuan bangsa
Hukum	Penegakan sarat kepentingan uang	Bangsa yang lemah dalam etika dan kepastian hukum
Solidaritas sosial	Solidaritas yang retak	Tak terbangun sinergi sosial yang kuat
Keberagaman	Kekerasan terhadap kelompok lemah dan minoritas	Pelemahan terhadap martabat bangsa dan warganegara

1. Pendidikan dan kesehatan

Kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan selama ini terhitung masih lemah sebagaimana tercermin pada nilai IPM Indonesia tersebut di atas yang berada di peringkat 121 atau menengah bawah dunia. Dalam bidang pendidikan hal tersebut, antara lain, tercermin pada tingkat pendidikan masyarakat Indonesia secara rata-rata yang baru sekitar enam tahun, atau sederajat dengan lulusan sekolah dasar. Bukan hanya lama pendidikan rata-rata yang ditempuh masyarakat, melainkan kualitasnya pun masih rendah. Hal tersebut tergambar dari hasil penilaian PISA yang dilakukan oleh Badan Dunia untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2013 yang menempatkan para siswa Indonesia di peringkat 64 dari 66 negara yang dinilai.

Kenyataan buruk ini tidak cukup diketahui masyarakat luas karena tertutup keberhasilan beberapa siswa Indonesia yang mampu meraih medali, bahkan medali emas, dalam Olimpiade Sains Dunia. Penilaian PISA menyangkut kemampuan dalam matematika, sains, dan membaca yang hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata siswa Indonesia lemah dalam penalaran, baik logika, analisa, maupun sintesa, yang juga diistilahkan sebagai berada pada posisi *low order thinking system*. Lemah dalam penalaran tentu bukan hanya dimiliki siswa, melainkan juga para lulusan sekolah secara umum yang kemudian mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan atau jabatan publik. Hal itu menjelaskan pertanyaan lama, mengapa pejabat publik

sekarang masih kalah dalam kualitas dibanding pada masa awal kemerdekaan.

Dalam bidang kesehatan sebagai sektor yang juga menyerap anggaran besar setelah pendidikan, kelemahan program pembangunan selama ini juga masih terasa. Indonesia masih bergulat dengan persoalan kesehatan dasar, seperti angka kematian bayi dan ibu melahirkan hingga ‘penyakit miskin’, seperti TBC, yang secara umum masih ternasuk tertinggi di Asia Tenggara. Pembangunan kesehatan Indonesia masih berada pada taraf yang lebih rendah dibanding dengan Thailand dan Malaysia misalnya. Terobosan besar berupa jaminan pengobatan melalui lembaga BPJS pada 2013, baru merupakan langkah untuk menyediakan pengobatan di tingkat dasar yang semestinya sudah dijalankan sejak 25 tahun silam, dan belum merupakan pembangunan kualitas kesehatan secara ideal.

Persoalan infrastruktur bangunan sekolah, pro-kontra pelaksanaan Ujian Nasional, sertifikasi serta kualitas guru, kualitas buku pelajaran, pornoaksi di kalangan siswa, perkelahian pelajar maupun mahasiswa, hingga politik kampus masih mendominasi perhatian dunia pendidikan. Sementara itu, dunia kesehatan lebih banyak menggarap hal-hal dasar seperti yang telah ditetapkan dalam program dunia Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (MDG's), serta menyerahkan program pelayanan medis kelas menengah dan atas pada mekanisme pasar yang melahirkan komersialisasi pengobatan melalui rumah-rumah sakit secara luar biasa.

Otoritas Pendidikan telah berusaha membuat terobosan dengan meluncurkan Kurikulum 2013 untuk memasukkan karakter sebagai bagian dari pengajaran. Upaya untuk membangun karakter tersebut masih terkendala oleh dua hal, yakni kualitas dan kesiapan guru sebagai aspek terpenting di dunia pendidikan, serta paradigma yang digunakannya masih terfokus pada aspek *tangible* berupa ‘paradigma sistem’ yang lebih terukur dan belum menuju ‘paradigma pendidikan’ yang lebih kualitatif dan *intangible*. Sedangkan karakter lebih terkait dengan ‘paradigma pendidikan’ dibanding dengan ‘paradigma sistem’. Hal serupa terjadi dengan kesehatan yang masih mengedepankan ‘paradigma medis’ yang *tangible* dibanding dengan ‘paradigma kesehatan’ yang *intangible*.

Paradigma seperti itu tampaknya masih akan dominan dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan pada kurun 2014-2019. Sebab, itulah yang diketahui dan telah menjadi kebiasaan pemerintah selama ini. Kebiasaan untuk mengembangkan dan mengendalikan program sendiri oleh Otoritas Pusat dibanding dengan memberdayakan Otoritas Daerah yang semestinya menjadi ujung tombak pembangunan pendidikan dan kesehatan, juga masih akan berlanjut karena birokrat pusat tak ingin ‘kehilangan program’. Dengan demikian, dalam lima tahun mendatang, meskipun kualitas masyarakat hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan akan meningkat, peningkatannya belum akan cukup signifikan. Dalam lima tahun ke depan, masyarakat belum akan cukup kuat dalam penalaran, kesehatan, apalagi karakter yang diperlukan Indonesia maju, baik dalam aspek ekonomi, teknologi, budaya maupun berbagai aspek peradaban lainnya.

2. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)

Negara-negara maju adalah bangsa yang memiliki lokomotif inovasi yang mampu menarik gerbong kemajuan bangsanya berupa pengembangan teknologi sebagaimana Jepang dan Korea Selatan pada industri otomotif dan elektronika, Amerika Serikat pada industri militer dan Teknologi Informasi, dan Taiwan pada industri komputer. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terarah tersebut mendorong negara-negara itu mampu menguasai seluruh ikutannya, yang pada satu sisi membawa keuntungan ekonomis yang sangat besar serta di sisi lain juga mengangkat martabat bangsa. Potensi terbesar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Indonesia adalah dalam bidang hayati, kebumian, serta budaya yang sayangnya tidak cukup dikembangkan apalagi dijadikan sebagai prioritas unggulan pengembangan.

Selama ini, sumber-sumber Iptek yang menjadi bahan material penelitian dalam bidang fisik seperti hayati dan kebumian dalam posisi yang rawan. Dalam beberapa kasus, pencurian bahan material penelitian telah banyak terjadi, baik secara langsung maupun terselubung. Dinyatakan secara langsung, misalnya, bahan material dicuri langsung dari lokasi penelitian oleh peneliti luar negeri yang sering mengatasnamakan pari wisatawan ataupun aktivis lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Tidak jarang para wisatawan mengambil sampel bebatuan, tumbuhan, dan biota laut untuk dibawa pulang ke negerinya, tetapi kemudian dikembangkan sebagai bahan material penelitian yang berguna bagi pengembangan Ipteknya.

Ada pula modus pencurian bahan material yang mengatasnamakan kurator seni yang melibatkan orang Indonesia, seperti pada kasus pencurian benda-benda pusaka pada Museum Gajah pada awal September 2013. Kasus pencurian tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai sindikat pencuri yang membutuhkan uang dari logam mulia bahan material arkeologisnya, tetapi bisa diartikan sebagai pihak penghubung antara kepentingan ekonomi murni dan pihak pengembang Iptek yang membutuhkan bahan material penelitian. Hal seperti ini pun sebenarnya sering terjadi pada hilangnya arsip-arsip nasional, khususnya yang berhubungan dengan manuskrip lama (kitab, dokumen) dari Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional.

Pencurian tidak langsung, umumnya, terjadi atas nama kerja sama penelitian pengembangan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dengan pihak luar negeri, baik atas nama negara, perusahaan maupun lembaga swadaya (lembaga donor) yang mengambil bahan material pengembangan Iptek berupa material *biopiracy* dan *geopiracy*, plus kekayaan budayanya, kemudian diakui sebagai temuannya sendiri. Pada kasus Tawon Garuda, misalnya, Rosichon Ubaidillah, Peneliti LIPI tidak diakui sebagai salah satu penemunya. Namanya disingkirkan oleh kedua peneliti lain saat pengajuan tulisan ke sebuah jurnal internasional. Demikian juga kasus penelitian bahasa yang dilakukan orang Indonesia di Halmahera Utara. Selain penelitian bahasa, ia ditugaskan pula dengan cara didampingi ahli lain, untuk melakukan kajian kekayaan sumber daya alam. Akhirnya, sebuah perusahaan

tambang emas asing yang cukup terkenal melakukan eksplorasi di Maluku Utara setelah penelitian bahasa itu. Demikian juga kerja sama yang dilakukan Norwegia dan Jerman kepada beberapa lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Tengah, selain aspek sosial kemanusiaan, bahan material penting dari wilayah Poso, Morowali, dan Tojo Una-una pun dibawa dan dianalisa bagi pengembangan Iptek di negaranya. Semua hal ini terjadi, karena sekali lagi, penegakan hukum dalam perlindungan sumber-sumber hayati dan kebumian beserta kekayaan sosial budaya tidak dilakukan secara tegas, integral dan holistik.

Dampak dari peta ancaman pengembangan Iptek, khususnya dalam *colonial bio* dan *geopiracies sensu lato*, termasuk *cultural production* pada era globalisasi tidak bisa dipandang ringan, karena hal ini bersangkut paut dengan kedaulatan negara, kemandirian bangsa, dan integritas atau jati diri sebuah bangsa yang besar. Sementara itu, bangsa juga kesulitan untuk dapat maju secara pesat mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa yang telah maju karena tidak ada keserempakan langkah berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh paling nyata adalah tidak adanya prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebumian, yang dalam hal ini terkait batubara. Para pemegang konsesi batu bara hingga pemerintah daerah pun cenderung menjual mentah secara murah dibanding mengolahnya untuk dapat memberi nilai tambah. Pihak Indonesia hanya sedikit mendapat uang, sedangkan nilai tambahnya dinikmati oleh industri China, India, bahkan Vietnam. Dalam industri sawit, Indonesia juga harus menjadi pengekor dan pemimpin atas

Malaysia. Padahal tidak ada bangsa pengekor dan berorientasi keuntungan yang cepat dan gampang yang dapat menjadi bangsa besar.

3. Hukum

Hukum merupakan salah satu wajah terpenting suatu negara karena menjadi pembeda langsung antara kumpulan manusia primitif yang diatur oleh kemampuannya berada kuat dan sebuah negara yang memiliki tatanan baik di semua aspeknya. Hukum ikut berperan dalam kehilangan dan kerusakan kekayaan potensial Indonesia berupa kekayaan hayati dan kebumihantaraan seperti tersebut di atas, juga berperan besar dalam keretakan sosial dan pembangunan, baik bidang politik, ekonomi, maupun budaya.

Sebagaimana disebutkan pada peta ancaman, aspek penegakan hukum merupakan aspek paling kentara dan terkena ancaman dari periode krusial 2014-2019. Ancaman itu dapat melekat pada tiga pilar utama penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Juga ada ancaman lain dalam bidang penegakan hukum, yaitu pengaruh dari kekuasaan dan pemilik modal terhadap politik hukum dalam proses penyusunan perundang-undangan. Prediksi seperti ini tidak mustahil terjadi. Pada periode krusial seperti itu, banyak pihak baik bersifat pribadi, kelompok, masyarakat hukum adat, maupun pihak lain yang mengatasnamakan warga negara, akan berusaha mempengaruhi politik hukum dari suatu keputusan pemerintah dan ketetapan legislatif. Kasus Bloomberg yang terjadi pada 2012-2013 tentang RUU Tembakau juga mungkin terulang pada periode mendatang.

Kuatnya kepentingan uang dalam penegakan hukum menjadi persoalan sehingga negara tidak dapat menjamin pemenuhan hak-hak warga negara untuk berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Hukum lebih menguntungkan warga negara kaya dan kelompok elite kekuasaan, sementara warga negara miskin akan diperlakukan tidak adil. Penegakan hukum ibaratnya hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika fenomena ini terus

“Hukum lebih menguntungkan warga negara kaya dan kelompok elite kekuasaan, sementara warga negara miskin akan diperlakukan tidak adil. Penegakan hukum ibaratnya hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.”

merebak sampai periode 2014-2019, disertai jurang perbedaan yang antara yang miskin dan kaya semakin lebar, serta media hanya mempertontonkan kisruh politik, baik politik kekuasaan, politik aliran maupun politik identitas, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara yang dapat berbuntut panjang seperti anarkisme, terorisme, bahkan tindakan subversif.

Kepentingan uang bukan hanya membuat sangat banyak penegak hukum yang terlibat dalam jual beli perkara, baik dari jajaran polisi, kejaksaan, maupun kehakiman, melainkan juga melahirkan kolusi dengan kalangan politik dan pengusaha. Seiring dengan transisi kekuasaan, hak tersebut akan mendorong praktik politik dagang sapi yang melahirkan kasus-kasus korupsi tingkat tinggi seperti Century, Hambalang, Alat Kesehatan, dan lainnya yang belum terselesaikan. Selain itu, juga akan menguatkan benturan

antara lembaga penegakan hukum seperti KPK dengan polisi, KPK dengan Kejaksaan, KPK dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Polisi dengan Kejaksaan, Kejaksaan dengan Pengadilan, KPK dengan Mahkamah Agung, dan lembaga advokat yang satu dengan lembaga advokat lainnya.

Pelemahan hukum secara luas akan terjadi dan semakin besar karena peran media, khususnya televisi, yang mencampurkan hukum dengan opini. Kelemahan itu juga ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baru mampu melahirkan lulusan dengan tingkat penalaran dan karakter yang rendah, sehingga etika serta integritas bangsa yang menjadi landasan bagi tegaknya hukum juga rendah.

4. Solidaritas sosial

Seperti ditekankan ilmuwan sosial Francis Fukuyama, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh modal sosial yang dimiliki bangsa tersebut, sedangkan modal sosial itu adalah *trust* atau rasa percaya satu sama lain. Rasa percaya antar seluruh elemen bangsa itulah solidaritas sosial yang diperlukan Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan berada pada posisi rendah. Ancaman menguatnya politik identitas dan politik aliran yang melemahkan solidaritas sosial tersebut berdampak pada perlambatan laju proses mengindonesia berbagai elemen bangsa yang berbeda, sekaligus melemahkan daya sinergi yang dapat membuat bangsa menjadi kuat.

Penegakan hukum, sekali lagi, menjadi aspek penting pemelihara kebangsaan, karena dengan jalannya ia bisa mengatasmakan negara untuk memenuhi hak kewarganegaraan sekaligus meminta pertanggungjawaban kewajiban warga negara kepada negaranya. Maka, aspek solidaritas ini menjadi perekat dan pemersatu dari semua elemen masyarakat yang multiwarna dari lima bentangan geo-historis yang berbeda itu. Dalam sejarahnya, kebangsaan Indonesia ini awalnya tidak dibangun melalui “statuta hukum” *de yure* dan *de formal* yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tetapi, melalui konsepsi tentang “kesadaran hidup” bersama dalam satu bangsa. Sebuah kesadaran, sesuatu yang abstrak dan tidak bernilai di hadapan hukum, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa menyatukan kehidupan bersama dalam satu wadah yang sama, bangsa Indonesia.

Kesadaran itulah yang kemudian didefinisikan menjadi “negara Indonesia” yang secara sah di hadapan hukum karena dilandasi UUD 1945, asas Pancasila, dan piranti hukum lainnya. Hal tersebut ditopang dengan solidaritas sosial kebangsaan yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan untuk tujuan perjuangan yang sama. Kesadaran bersama ini menjadi anomali dari kedaulatan negara, bila negara tidak mampu menjamin hak warga negaranya sebagai pendukung setia ikatan tersebut, ataupun diperlakukan hanya sebagai “kelompok terbuang, pelengkap, dan kaum pinggiran” yang dihadirkan untuk sekadar memenuhi hajat sedikit orang. Anomali seperti inilah yang menjadi ancaman berbahaya pada periode 2014-2019 karena berdampak sistemik kepada kedaulatan negara.

5. Kekerasan terhadap kelompok minoritas

Ancaman radikalisme dan kekerasan terhadap kelompok lemah dan minoritas jelas berdampak pada pelemahan bahkan pelecehan martabat bangsa sendiri. Sedangkan bangsa-bangsa maju dan makmur selalu bangsa yang menghargai dan menjunjung tinggi martabat bangsanya. Dalam beberapa tahun terakhir, praktis radikalisme dan kekerasan tersebut begitu nyata dan masih berpotensi menjadi ancaman pada kurun lima tahun mendatang. ‘Kehadiran’ negara sungguh diperlukan untuk mengatasi ancaman seperti itu, sebagaimana terlihat pada sejumlah kasus terdahulu, diyakini berbagai kekerasan terhadap kelompok minoritas berlangsung karena negara ‘tidak hadir’.

Pada kasus Cikeusik misalnya, ketika sekelompok masyarakat menyerang dan membakar rumah kelompok Ahmadiyah. Tanda-tanda penyerangan sudah terlihat sejak awal dengan adanya koordinasi massa menggunakan simbol “janur kuning”. Saat itu, negara tidak serta merta mencegah sejak dini, sehingga kerugian jiwa dan material pun terjadi setelahnya. Negara pun mendapat sorotan dunia internasional sebagai pihak yang tidak mampu melindungi hak asasi manusia, khususnya kepada kelompok minoritas keberagamaan.

Selama bertahun-tahun lintas generasi, masyarakat sebenarnya telah memiliki mekanisme internal untuk meredam konflik. Namun, selalu ada hal baru yang dibawa pihak eksternal dari lingkungan strategis global dan regional, membuat masyarakat lebih gampang bertindak anarkis. Penyerangan Amerika kepada

Taliban di Afganistan dahulu telah memicu kekerasan dalam negeri Indonesia, berupa gerakan dan kejahatan terorisme yang dilakukan jaringan Al-Qaida. Demikian juga konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah telah membawa pengaruh besar bagi hubungan internal kelompok keagamaan Islam di Indonesia. Padahal, kedua paham itu masuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa para pedagang dari masing-masing Jalur Sutraya.

Tingkat kualitas pendidikan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum, juga menjadi faktor penentu utama gampang merebaknya kekerasan terhadap minoritas. Media juga berperan dalam globalisasi informasi sehingga terjadi sebaran paham ideologi transnasional ke wilayah Indonesia tanpa lebih dahulu memahami konteks sosial dan budaya yang diperlukan untuk penerapannya. Hal-hal tersebut membuat api kekerasan gampang tersulut, khususnya kekerasan bermotif keagamaan terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, dalam konflik SARA yang berlatar etnik, faktor kesenjangan sosial ekonomi, seperti pada kasus Bali Nuraga di Lampung, menjadi penentu utama. Dalam seminar pra-peluncuran buku 'Menyongsong 2014-2019' ini di Denpasar, Bali, ditekankan bahwa kelompok minoritas pun perlu berkontribusi mencegah kekerasan yang ditujukan kepada mereka dengan tidak bersikap 'eksklusif'. Keeksklusifan yang menguatkan tuduhan *liyan* yang menjadi alasan kerusuhan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan terhadap masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta dan Solo pada Mei 1998.

UPAYA DAN STRATEGI MENGATASI ANCAMAN

Berdasar kerangka konektivitas geo-historis kebangsaan, sejumlah ancaman yang akan dapat membawa dampak negatif pada pembangunan bidang sosial budaya untuk masa lima tahun mendatang dapat diatasi dengan dua mekanisme. Kedua mekanisme tersebut adalah: (a) mekanisme alami yang tersusun dari kapasitas masyarakat bangsa melalui proses pengalaman lintas generasi; dan (b) mekanisme buatan, baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun negara melalui kewenangan, kepemimpinan (*leadership*) dan kekuasaannya.

Mekanisme alami yang juga disebut mekanisme internal adalah mencakup aspek-aspek kultural yang benar-benar terlahir dari masyarakat, walaupun tidak menafikan adanya pengaruh dari faktor-faktor luarnya. Mekanisme seperti ini disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai *resilience* (Kerangka Aksi Hyogo 2007) yang berarti serangkaian kemampuan suatu sistem sosial dari masyarakat yang rentan terpapar bahaya, untuk menghindari, menjauhi, menghadapi, dan mencegah segala ancaman dan risiko yang ada di sekitarnya.

Kapasitas masyarakat dalam pengertian itu berarti merujuk pada kelembagaan tradisi dan sistem sosial budaya yang dikenal masyarakat. Lembaga tradisi ini mencakup mekanisme sosial, kepemimpinan lokal tradisional, dan organisasi kultural yang juga bermakna sebagai kearifan lokal. Menurut John Haba (2007), kearifan lokal memiliki ciri dan fungsi berikut: (a) penanda identitas sebuah komunitas; (b) sebagai elemen perekat kohesi sosial; (c)

unsur budaya yang tumbuh dari bawah, eksis dan berkembang dalam masyarakat, bukan unsur budaya yang dipaksakan dari atas; juga (d) berfungsi memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas.

Selain itu, kearifan lokal juga: (e) dapat mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*; dan (f) mampu mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi dan mekanisme bersama untuk mempertahankan diri dari kemungkinan terjadinya gangguan atau perusakan solidaritas kelompok sebagai komunitas yang utuh dan terintegrasi. Kearifan lokal sepertinya menjadi jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal (Saini via Abdullah 2008).

Mekanisme internal dalam menghadapi ancaman bidang sosial budaya, setidaknya menghadirkan lima jenis strategi, yaitu: (a) strategi pelestarian sistem nilai masyarakat (Haba 2007; Abdullah 2008); (b) strategi kaderisasi, dalam antropologi disebut pola penyapihan dan pengasuhan (Sheldon 1997); (c) strategi belajar berbudaya, dapat melalui keterlibatan langsung atau proses mengingat (Fromkin 1997); (d) strategi menjaga kekuasaan, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud, seperti dinyatakan Anderson (1997) dan Hefner (1990); dan (e) strategi pemanfaatan lembaga tradisi dalam berbagai ranah kehidupan (Kleden Probonegoro & Humaedi 2012).

Mekanisme kedua adalah mekanisme buatan yang didasarkan pada kewenangan dan kepemimpinan melalui kebijakan dan program. Dalam makna kedua ini, aspek motivasi dan komitmen kebangsaan aparatur negara seperti PNS, TNI dan Polri juga menjadi peta

kekuatan yang cukup ampuh. Penegakan hukum pada tindak pidana yang dapat memicu konflik SARA hanya bisa dilakukan negara. Karena, bila penegakan hukum diserahkan kepada masyarakat, dampaknya lebih berbahaya lagi, yaitu praktik main hakim sendiri, baik di ruang tertutup maupun di jalanan, dan akhirnya supremasi hukum kemudian kalah oleh supremasi sosial budaya yang belum tentu juga dapat menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana penyebab konfliknya.

Tentu saja, tidak semua peta ancaman mampu diselesaikan negara, karena jika proses dan strategi mengatasi ancaman itu digantungkan sepenuhnya kepada pemerintah, bisa saja ancamannya berkembang dalam format atau bentuk lain, bahkan semakin merebak di berbagai tempat. Kekhawatiran seperti ini dapat saja terjadi, karena perspektif berbeda dan bertolak-belakang antara pemerintah dan masyarakat. Perspektif pemerintah dalam mengatasi ancaman pada umumnya tertuju pada prinsip stabilitas keamanan, sehingga seringkali berujung pada kriminalisasi dan stigmatisasi yang menghilangkan hak kewarganegaraan dari pihak-pihak yang dianggap mengancam itu.

Beberapa upaya serta strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman pada aspek sosial budaya dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Aspek pendidikan dan kesehatan

Penguatan nilai-nilai bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk mengatasi ancaman dalam bidang tersebut, baik melalui penggalan nilai-nilai Pancasila maupun kearifan

lokal. Pasca Orde Baru, Pancasila nampak ditinggalkan, padahal nilai-nilai yang terkandung cukup mewakili kearifan bangsa, baik dalam etika, nilai-nilai normatif, maupun keluwesan sosial. Namun, sebagian besar masyarakat seolah antipati terhadap Pancasila. Generasi muda kelahiran 1990 dan 2000 mengalami kondisi labil karena tidak menghayati secara mendalam falsafah kehidupan berbangsa ini. Akibatnya, generasi terakhir ini menjadi target ancaman dan pengancam stabilitas paling potensial. Hal ini dimengerti karena ketidakpahaman mereka, dan hanya dijejalkan ide “kebebasan reformasi” yang tidak tahu arahnya. Demikian juga, nilai-nilai dan produk kearifan lokal banyak belum tergali.

Memperkuat kebijakan otonomi daerah juga merupakan strategi penting untuk menyongsong 2014-2019. Artinya, kebijakan yang bersangkutan paut pada persoalan penguatan bidang pendidikan dan kesehatan dengan skema otonomi daerah perlu didorong. Sebab, pihak yang paling tahu keadaan wilayahnya adalah pemerintah daerah sendiri. Penguatan bidang pendidikan dan kesehatan akan berhasil tentu dengan memperhitungkan tingkat kesiapan dan upaya pemberdayaan otoritas lokal masing-masing.

Memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi. Indonesia sampai tahun 2013 juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan pemakaian teknologi informasi tercepat. Sayangnya, hal itu tidak diiringi meningkatnya produktivitas pemakainya. Perubahan itu bukan hanya mengubah pola komunikasi di masyarakat, melainkan juga pola informasi

dan pembelajaran secara mendasar. Artinya, perlu upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan dan penemuan teknologi kesehatan.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)

Memperkuat paradigma perkembangan Iptek berbasis pada sumber daya merupakan strategi sangat diperlukan bagi Indonesia. Seluruh bangunan Iptek Indonesia mulai dari kebijakan hingga prioritas penelitian Iptek harus dilandasi dengan pemanfaatan seefektif dan seefisien mungkin sumber daya alam dan kultural untuk kemaslahatan bangsa. Paradigma tersebut sebenarnya tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. *Bioprospecting*, *geoprospecting*, dan geo-historis kultural dapat menjadi arus utama Iptek Indonesia 2014-2019.

Sistem pengembangan Iptek Indonesia harus bertumpu secara penuh pada sinergi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri. Ketiga unsur Iptek tersebut terlalu lama berjalan sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang jelas sehingga banyak ditemukan kasus duplikasi penelitian dan penelitian mubazir. Hasil penelitian yang sangat potensial untuk dikembangkan tidak mendapatkan dukungan dalam pengembangannya. Akhirnya, hasil penelitian tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar negeri. Selain itu, meningkatkan daya saing bangsa, sejak usia dini sampai usia lanjut, juga diperlukan. Dengan demikian pada masa produktif mereka dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa.

3. Aspek penegakan hukum

Hukum sebagai panglima kehidupan bangsa bukan sekadar retorika dan para penegak hukum bukan sekadar ‘macan ompong’. Penegakan hukum harus terimplementasikan dalam praktik kehidupan berbangsa tanpa pandang bulu. Paparan di atas telah menyebutkan bahwa hukum menjadi tidak berdaya, karena tiga pilar penegakan hukum ternodai oleh politik hukum berkepentingan dan mafia hukum yang menyebabkan praktik korupsi. Strategi mengatasi ancaman penegakan hukum periode 2014-2019 harus dikaitkan dengan tiga pilar hukum dan karakteristik ancaman pada masing-masing pilar.

Memetakan kembali *job description* setiap pegawai fungsional di lembaga penegakan hukum, karena pejabat fungsional ini diperlukan untuk mendorong keberhasilan Tupoksi kelembagaan. Para penilai dan penanggung jawab, serta pimpinan mendorong efisiensi pegawai dengan mengutamakan prinsip kinerja dan produktivitas. Indikator keberhasilan dalam penegakan hukum menjadi nilai jenjang karier. Hal tersebut perlu ditopang dengan penguatan fungsi-fungsi kelembagaan yudikatif. Lembaga-lembaga yang memiliki penegakan hukum perlu duduk bersama untuk membicarakan kembali pembagian tugas dan wewenangnya agar tidak lagi terjadi benturan seperti antara KPK dan kepolisian, dan sebagainya.

Memperkuat pengawasan internal dan mendorong adanya pengawasan eksternal juga merupakan upaya yang diperlukan. Pengawasan internal dianggap kurang berhasil karena sering kali

membela korpsnya, namun pengawasan ini bisa berjalan baik jika promosi jabatan yang memiliki gugus tugas inspektorat dan penegakan etika berasal dari luar, sementara pengawasan eksternal terdiri dari LSM dan media massa. Keduanya dianggap cukup ampuh untuk mengawasi kinerja dan kerja sama kelembagaan penegakan hukum. Sementara itu, pengaturan kembali sinergitas kelembagaan di antara Komisi DPR urusan Hukum dengan Kabinet. Untuk memperkuat sinergi kelembagaan, perlu dilakukan upaya “magang” bagi pegawai yang memiliki kepakaran sama di lembaga tempat magang.

Beberapa upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang mengedepankan mekanisme buatan, karena menghindarkan adanya supremasi sistem sosial budaya, khususnya yang bersifat paternalistik. Strategi di atas harus terinternalisasi ke setiap pegawai atau lembaga yang terlibat. Strategi itu adalah pemberdayaan dan pendampingan para penegak hukum, sekaligus promosi jabatan yang didasarkan pada kinerja dan produktivitas.

4. Solidaritas sosial kebangsaan

Dua aspek terakhir ini saling memiliki hubungan erat, solidaritas sosial kebangsaan dengan aspek konflik SARA dan hubungan antaragama. Kedua hal itu umumnya saling menstimulus. Bila solidaritas sosial di antara kelompok masyarakat lemah, konflik SARA dan kerenggangan hubungan antaragama akan muncul. Sebaliknya, bila hubungan antaragama di masyarakat dalam keadaan baik, solidaritas sosial pun akan terwujud.

Walaupun demikian, agar kajian ini komprehensif, maka pemetaan di antara keduanya dilakukan terpisah, termasuk tantangan dan dampak masing-masing. Setidaknya, ada empat tantangan yang terlihat dalam solidaritas sosial kebangsaan, yaitu: (a) menguatnya politik aliran berupa politik identitas atas nama golongan, suku, dan agama. (b) kontekstualisasi politik kebangsaan terkait masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. (c) menguatnya budaya populer pada apresiasi dan ekspresi kebebasan individu di ruang-ruang publik yang mempertontonkan penolakan terhadap kemapanan kehidupan berbangsa. (d) ledakan arus informasi dan pengetahuan termasuk kebebasan pers dan media.

“Bila solidaritas sosial di antara kelompok masyarakat lemah, konflik SARA dan kerenggangan hubungan antaragama akan muncul. Sebaliknya, bila hubungan antaragama di masyarakat dalam keadaan baik, solidaritas sosial pun akan terwujud.”

Pertanyaannya adalah bagaimana upaya dan strategi mengatasi tantangan? Dalam kaitan aspek ini, mekanisme internal masyarakat lebih besar dibandingkan dengan mekanisme buatan dari pemerintah. Sebab, solidaritas sosial kebangsaan menjadi modal dasar atau kapasitas yang dimiliki oleh setiap masyarakat, dan menjadi peta kekuatan sebuah bangsa. Hanya saja intensitas, kuantitas dan kualitas memiliki perbedaan dan mengalami perubahan. Peningkatan atau penurunan tergantung pada besarnya ancaman yang muncul. Perlu dicatat beberapa hal

menarik bahwa dari sisi keindonesiaan ada sesuatu yang luar biasa, yaitu ketika terjadi konflik politik antar-masyarakat dan antar-golongan politik, adalah suatu hal tabu bahkan dosa jika salah satu pihak melontarkan prasangka etnis atau prasangka kesukuan. Ini menunjukkan bahwa kebangsaan dan keindonesiaan, dijunjung tinggi oleh segenap penduduk Indonesia. Demikian juga dalam kebangsaan-keindonesiaan patut diingat bahwa keragaman suku dan tradisi tetap diakui, diajarkan, dan dihadirkan. Namun bukan sebagai suatu alat pemisah dan pembeda dalam kehidupan politik, melainkan sebagai bentuk kekuatan tradisi.

Termasuk juga dalam soal kehidupan politik identitas warga negara yang tidak dikaitkan dengan identitas kesukuan. Ini dibuktikan dalam pencatatan kartu tanda penduduk. Asal-usul suku tidak masuk sebagai kategori pencatatan dan bahan penting informasi. Ini adalah bentuk sederhana pengejawantahan model kebangsaan-keindonesiaan. Ini berarti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi mekanisme alami yang baik dalam solidaritas sosial kebangsaan. Dengan demikian, upaya dan strategi mengatasi ancaman itu lebih ditekankan pada peningkatan internalisasi kebangsaan dan perasaan solidaritas sosial itu sendiri.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu: *Pertama*, publik politik, terutama anak-anak muda, didorong untuk saling mengenal dan saling mempelajari tradisi dari beragam suku sebagai bagian dari proses pembelajaran makna keindonesiaan. Pandangan hidup, kearifan lokal, kebudayaan material, beserta kebudayaan lainnya berupa tari, musik daerah, dan seni kerajinan

daerah perlu digalakkan untuk diajarkan di sekolah sebagai bagian dari pendidikan kesenian dan perwujudan dari semangat solidaritas sosial kebangsaan dan mendorong kebanggaan terhadap negara bangsanya.

Kedua, pendidikan kebangsaan perlu ditafsirkan ulang atau dikontekstualisasikan dengan situasi pada masa kini. Kisah-kisah pahlawan bangsa misalnya, perlu dinarasikan ulang menjadi suatu kisah populer namun penuh makna perjuangan mempertahankan kedaulatan negeri dan mempersatukan suku-suku bangsa. Patut diingat kembali bahwa cerita ataupun wiracarita pada masa silam merupakan landasan mendasar untuk mengingatkan kembali pengalaman bersama sebagai satu bangsa berjuang menentang kolonialisme. Nilai kepahlawanan dari tokoh-tokoh pejuang perlu mencakup ketekunan, kesabaran, dan kerja keras mereka. Pahlawan merupakan aktor penting dalam pendidikan kebangsaan. Penceritaan pahlawan harus dikaitkan pada tantangan atas ide kebangsaan di masa kini.

Ketiga, negara perlu mengapresiasi dan memberikan penghormatan kepada sosok-sosok baru pahlawan dalam berbagai bidang, seperti aktivis lingkungan, ilmuwan, pengusaha kreatif, dan petani kreatif. Definisi pahlawan bangsa dan negara harus diperluas seiring keragaman profesi dan pekerjaan.

Keempat, ide kebangsaan perlu dikontekstualisasikan dengan tantangan politik dan sosial pada masa kini sehingga bersifat efektif dan fungsional. Ini berarti bahwa nilai kebangsaan perlu disebar dan ditafsirkan dalam berbagai bidang.

Hal ini perlu dilakukan agar nilai-nilai kebangsaan tetap kontekstual dan memiliki makna sosial dan tidak terbatas pada aktivitas ritual politik.

Kelima, negara perlu memberikan dukungan bagi kreativitas musik dan lagu kebangsaan dan mendorong kesadaran untuk saling menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan. Patut diingat bahwa negeri kita sangat luas dan masyarakat pun sangat beragam. Karena itu, perlu jejaring kultur perekat, terutama melalui musik kebangsaan, sehingga satu perasaan kebangsaan yang sama sekaligus untuk menjelaskan betapa pentingnya persatuan di tengah aneka ragam perbedaan.

5. Kebhinekaan dan konflik SARA

Beberapa upaya dan strategi mengatasi ancaman dalam persoalan kebhinekaan, khususnya konflik SARA dan hubungan antaragama, dapat dilakukan sebagai berikut. *Pertama*, membumikan dan mensosialisasikan kearifan lokal yang tertuang dalam pandangan hidup, wasiat, dan praktik kebudayaan yang mengarah pada kehidupan harmonis kelompok masyarakat yang berbeda etnis dan agama. Hal ini juga akan mendorong semangat dan sikap hidup yang berfaham pluralisme dan multikulturalisme dalam menyikapi perbedaan sosial budaya di antara warga negara.

“Ani himor laling gabenai, iwiu mai gereja oho do pi rumai pifeteng. Fou mar himor e natei mesjid oho do pi rumai pifeteng.” “Kalau ada hujan lebat, tanah longsor dan banjir bandang, maka gereja yang akan menjadi benteng penghalangnya. Kalau ada badai dan

gelombang datang dari laut, masjid yang akan menjadi benteng penghalangnya.” Ungkapan itu dikenal masyarakat heterogen Kafoa di Probur Utara Nusa Tenggara Timur (Humaedi 2013). Hal tersebut merupakan kekayaan budaya dan kearifan luar biasa yang harus dijaga dan dikenalkan ke semua masyarakat Indonesia.

Kedua, mengedepankan pendekatan budaya daripada pertimbangan secara keagamaan dalam penyelesaian masalah yang dapat memicu konflik. Pandangan dan praktik budaya sebenarnya lebih kokoh dan dapat teraplikasikan kepada semua anggota kelompok masyarakat. Sementara agama, walaupun kokoh karena didasarkan pada prinsip transendensi, di mana kebahagiaan hidup surga pasca meninggalnya manusia menjadi janji Tuhan yang diperjuangkan, memiliki peluang kecil dalam penyesuaian dengan kelompok berbeda penganutnya. Orang Nusa Tenggara Timur mengibaratkannya, “agama (Islam dan Kristen) dibawa oleh air laut. Sementara tradisi dan budaya terlahir dari bumi dipijak.” Suatu pengibaran bahwa aspek kebudayaan sebenarnya lebih kuat daripada agama, karena budaya terlahir dari wilayahnya secara lintas generasi, sedangkan agama hanyalah bentukan yang didapati orang di suatu wilayah dalam suatu bentuk yang sudah jadi. Pengibaran seperti itu juga sama dengan kata-kata bahwa budaya terlahir dari “perut bumi” dan agama terbawa dari “arus laut”, sebagaimana dikenal orang Indonesia Timur lainnya.

Ketiga, mengedepankan tafsir keagamaan yang kontekstual dan kemaslahatan umat secara umum. Pengakuan kebenaran,

tidaklah dianggap sah bila diperhadapkan dengan pihak luar agamanya, yang tentu juga memiliki pengakuan kebenarannya sendiri. Konflik SARA atas nama agama sering terjadi bila tiap-tiap penganut agama memaksakan pengakuan kebenaran itu kepada pihak lain, terlebih ketika diiringi kepentingan ekonomi politik dan politik identitas etnik di belakangnya. Jika ini terjadi, agama yang membawa pesan perdamaian dan kebaikan, seperti Islam dan Kristen ataupun agama lain seolah akan dianggap sebagai agama yang mengajarkan dan mempraktikkan kebiadaban. Padahal perilaku kebiadaban adalah kontra naluri kemanusiaan dan demikian juga kontra dari ruh suci keagamaan.

Kelima, mendorong aktualisasi konsepsi agama damai yang bisa menjadi penanding utama dari gerakan agama garis keras yang bisa memporakporandakan tatanan sosial. Hal ini menjadi penting, khususnya ketika konsepsi agama damai dihadapkan dengan agama di luar dirinya, maka ia pun bisa menjadi pencipta keharmonisan. Namun, prinsip dan praktik agama damai juga harus diimbangi pula dengan keinginan, prinsip, dan praktik kehidupan dari para penganut agama di luarnya; yang tentu akan membuahkan perdamaian yang baik dan indah bagi pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Di sinilah peran negara untuk mengatur agar konsep dan praktik keberagamaan berdiri di atas penghargaan terhadap pemeluk agama lain.

Keenam, memperkuat kembali dan mendorong praktik bersama yang mengedepankan dan berasaskan pada keadaban umum. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban bersama dan kesejahteraan yang adil dan beradab bagi seluruh warga negara.

Ketujuh, dialog kekarya-an lintas organisasi dengan dasar penghargaan hubungan antar-agama (*interfaith logic*) merupakan salah satu mekanisme buatan yang paling mungkin bisa dilakukan. Meskipun demikian, pelaksanaan dialog tersebut tidak boleh bersifat basa-basi atau sekadar proyek lintas agama saja. Sementara itu, pada tingkat komunitas, perlu keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin atau pengurus peribadatan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap aspek-aspek keagamaan.

Kedelapan, pengedepanan prinsip-prinsip *interfaith logic* dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. *Interfaith logic* atau kerangka berpikir yang mendalam mengenai hubungan antar agama menjadi dasar kesepahaman itu, sementara di sisi yang lain satu mitologi tentang “keindonesiaan” atau kenusantaraan perlu juga dibangun bersama sebagai alat ikat dari berbagai kelompok etnik yang tersebar di Indonesia.

IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Indonesia periode 2014-2019 adalah Indonesia yang menantang pada semua aspek kehidupan termasuk sosial budaya yang langsung berhadapan dengan dua hal besar, yakni ledakan penduduk yang diharapkan menjadi ‘Bonus Demografi’ serta serbuan budaya global yang dapat meminggirkan budaya bangsa sendiri. Tantangannya adalah mempercepat proses ‘mengindonesia’ berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya merajut keindonesiaan serta membangun martabat bangsa. Realitas atau kondisi nyata dalam aspek pendidikan dan

kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penegakan hukum, solidaritas sosial, serta keberagaman dan keberagaman bangsa yang dalam beberapa tahun terakhir masih jauh dari ideal, berpotensi menjadi ancaman bagi upaya merajut keindonesiaan dan membangun martabat bangsa ke depan.

Dampak dari ancaman tersebut cukup nyata, yakni peningkatan kualitas nalar, kualitas kesehatan, serta karakter bangsa yang selama ini rendah tidak akan cukup signifikan untuk dapat membuat Indonesia tinggal landas. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terfokus memprioritaskan khazanah kekayaan bangsa berupa sumber daya hayati, kebumihant, serta budaya bukan saja akan gagal menarik inovasi bangsa guna memenuhi kesejahteraan masyarakat, melainkan juga masih rawan terhadap pencurian sumber-sumbernya oleh pihak asing. Sementara itu, kecenderungan dunia hukum yang lemah dalam integritas dan etika serta belum tampak upaya signifikan untuk terbebas dari praktik kepentingan uang seperti yang selama ini, berpotensi menjadi penghambat terbesar Indonesia untuk maju.

Dampak lain dari ancaman-ancaman nyata di dalam bidang sosial pada kurun 2014-2019 adalah keretakan sosial hasil dari cara pandang ‘aku vs kamu’ dan bukan cara pandang ‘kita’. Cara pandang tersebut menyatakan bahwa orang atau kelompok masyarakat yang memiliki identitas berbeda adalah *liyan* atau *others* yang boleh dijauhi dan kalau perlu dihadapi dengan kekerasan. Apalagi, bila kelompok itu adalah kelompok minoritas. Keretakan sosial seperti itu dikuatkan oleh praktik negatif Otonomi Daerah yang memunculkan isu ‘putra daerah’ dengan mengorbankan

kepentingan kualitas dan kepentingan terwujudnya keindonesiaan. Padahal, seperti dikemukakan Fukuyama, modal terpenting suatu bangsa adalah modal sosial berupa *trust* sebagai perekat sinergi bangsa secara menyeluruh.

Terkait solidaritas sosial, banyaknya konflik SARA dan gerakan radikal keagamaan yang menebarkan kecemasan dan berujung konflik berdarah beberapa tahun terakhir ini juga masih menjadi ancaman. Tingkat kematangan masyarakat memang menjadi salah satu penyebabnya. Meskipun demikian, ketidakhadiran negara serta ketidaktegasan hukum menjadi faktor yang lebih penting lagi. Apalagi, di tengah kecenderungan globalisasi informasi yang membuat peristiwa-peristiwa di luar negeri dapat menjadi picu kekerasan di Tanah Air, serta peran yang tidak disadari media yang membuat pelaku anarkisme dan radikalisme dapat menjadi ‘pahlawan’ karena terekspos pemberitaan menyangkut ‘keberaniannya’. Realitas seperti itu sungguh merendahkan dan melecehkan martabat bangsa.

Dengan ancaman serta dampak yang akan terpapar seperti itu, diperlukan beberapa upaya mendasar, yang dipayungi oleh nilai-nilai kearifan lokal serta jatidiri bangsa sendiri. Upaya yang diperlukan tersebut antara lain:

Pertama, otoritas pendidikan dan kesehatan perlu mengubah paradigma pembangunannya dari yang bersifat *tangible* menjadi *intangible*. Yakni, untuk mengedepankan ‘paradigma pendidikan’ sebagai pembentuk karakter sebagai pengimbang ‘paradigma sistem’ kuantitatif yang dipakai selama ini bagi otoritas pendidikan. Kualitas guru yang dalam hal ini terutama aspek karakter sebagai titik lemah

dunia pendidikan lebih tepat diatasi dengan ‘paradigma pendidikan’ dibanding ‘paradigma sistem’. Sedangkan otoritas kesehatan, saatnya lebih mengedepankan ‘paradigma kesehatan’ dibanding ‘paradigma medis’ dalam lima tahun mendatang.

Pegeseran paradigma tersebut bukan saja diperlukan di tingkat pengambil kebijakan, melainkan juga di seluruh jajaran birokrasi, dan bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang mendukungnya. Yakni pada universitas-universitas yang menjadi mencetak guru atau tenaga pendidik (LPTK) di dunia pendidikan, serta fakultas kesehatan masyarakat dan perguruan tinggi kesehatan. Pentingnya ‘paradigma kesehatan’ bahkan perlu pula ditekankan pada pendidikan kedokteran yang secara spesifik memang bermaksud mendalami medis. Selain itu, sudah saatnya pula otoritas pendidikan dan kesehatan mengurangi pembuat program-program pusat sendiri, untuk lebih fokus memberdayakan dan mendampingi otoritas daerah yang menjadi ujung tombak layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memprioritaskan pada bidang hayati, kebumian, serta budaya yang memang merupakan kekuatan asli Indonesia. Dengan demikian, bidang-bidang tersebut dapat menjadi mesin penggerak inovasi bangsa secara terarah sehingga kompetitif di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Perlindungan terhadap sumber-sumber hayati, kebumian, dan budaya juga diperlukan untuk mencegah pencurian baik kasar maupun halus terhadap kekayaan bangsa seperti barang tambang termasuk mineral serta plasma nutfah, oleh banyak pihak

dari berbagai negara, hingga pencurian status kepemilikan produk-produk kesenian dan budaya, seperti yang dilakukan Malaysia.

Ketiga, reformasi penegakan hukum diperlukan mulai dari peningkatan integritas, karakter, hingga kompetensi para penegak hukum agar dapat menjalankan perannya secara semestinya. Penanaman kesadaran kebangsaan penting dilakukan kembali bersama dengan pendalaman spiritualitas untuk membebaskan penegak hukum dari budaya rendah kepentingan uang melalui kolusi jual beli perkara. Seleksi yang ketat, sistem pelatihan dan pengembangan diri yang baik, penyediaan imbalan dan fasilitas yang memadai, serta pembudayaan gaya hidup sederhana akan membantu mewujudkan hal tersebut. Di negara-negara maju, aparat hukum adalah orang-orang yang paling terjaga dalam integritasnya. Sudah saatnya hal tersebut terwujud di Indonesia.

Keempat, ikatan sosial yang cenderung memudar beberapa tahun terakhir hendaknya dapat diperkuat pada periode 2014-2019 melalui promosi dan pengondisian kesadaran kebangsaan. Nilai-nilai geo historis perlu digali, dibangkitkan, dan disosialisasikan kembali melalui berbagai media. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa yang memiliki karakter dan budaya global dengan berakar kokoh pada nilai-nilai budaya sendiri. Nilai-nilai kebangsaan berupa kesadaran kebhinekaan dan nilai karakter Pancasila, serta keragaman kearifan lokal yang dimiliki Indonesia, merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa global yang teguh dengan karakter budayanya sendiri seperti yang ditunjukkan oleh China dan India.

Kelima, kebhinekaan dalam segala hal mulai dari etnisitas hingga keragaman agama hendaknya dijadikan sebagai modal utama untuk membangun mosaik Indonesia yang indah. Hanya masyarakat primitif dan terbelakang yang berselisih karena perbedaan identitas dan menyelesaikan perselisihannya melalui kekerasan. Masyarakat Indonesia secara umum sudah berada pada taraf yang jauh lebih tinggi dari tingkatan tersebut, sehingga konflik SARA tidak pada tempatnya lagi walaupun masih berpotensi terjadi pada masa lima tahun mendatang. ‘Kehadiran’ negara, kepastian hukum, kelapangan hati kelompok mayoritas, kerendahan hati untuk tidak eksklusif kelompok minoritas, serta penataan ulang otonomi daerah yang berekses ke politik identitas akan membantu mewujudkan terbangunnya mosaik tersebut.

Dengan berbagai upaya tersebut, tatanan sosial Indonesia ke depan akan dapat terbangun secara kuat walaupun untuk perwujudannya pada periode 2014-2019 belum tertopang dengan pondasi yang cukup memadai. Namun, dengan upaya bersama secara sungguh-sungguh, keindonesiaan akan terajut untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat, yang tergambar bukan hanya tim Garuda Jaya di lapangan sepakbola, melainkan juga di semua lapangan kehidupan lainnya.*

BAB IV

— EKONOMI —

MENEMBUS MIDDLE INCOME TRAP



EKONOMI

MENEMBUS MIDDLE INCOME TRAP

“Sekali-kali, tidaklah boleh kepentingan segolongan kecil yang hartawan bertentangan dengan kepentingan golongan rakyat banyak yang miskin. Keadilan yang kita kehendaki adalah keadilan bersama yang didasarkan atas kemakmuran dan kebahagiaan”.

~ Sutan Sjabrir- Perdana Menteri RI ke-1 ~

Dalam dua atau tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia terus menunjukkan gejala pertumbuhan yang memuaskan ketika ekonomi dunia justru dihantui oleh krisis Eropa yang berkepanjangan, Timur Tengah yang masih digoyang dinamika politik, serta Amerika Serikat yang mengalami defisit fiskal. Pada saat seperti itu, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan di atas enam persen pada 2011 dan 2012 meskipun sedikit turun lagi pada 2013. Dengan tingkat tersebut, Indonesia sempat mencatatkan diri sebagai salah satu negara anggota kelompok G20 yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi, yakni 6,5 persen pada 2011.

Indonesia bergabung dalam G20 sebagai kelompok negara-negara yang menguasai sekitar 85 persen perekonomian dunia pada 2009. Profil perkembangan Indonesia beberapa tahun ini membawa perhatian sejumlah negara serta lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia yang memproyeksikan Indonesia bersama dengan Brazil, China, India, Korea Selatan dan Rusia akan menyumbang 50 persen pertumbuhan global pada 2025. Dengan pendapatan atau Produk Domestik Bruto sebesar 825 milyar dolar AS pada 2011, Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan ukuran ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

Dalam tahun terakhir menjelang periode 2014-2019 memang terdapat beberapa pelemahan dalam indikator ekonomi Indonesia, seperti pada pertumbuhan, ekonomi nilai tukar rupiah, hingga tingkat cadangan devisa. Meskipun demikian, secara umum, perekonomian tetap baik dan stabil untuk menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi kurun waktu berikutnya. Tingkat kekuatan, dan kelemahan, landasan ekonomi Indonesia, secara utuh dapat dipaparkan sebagaimana berikut:

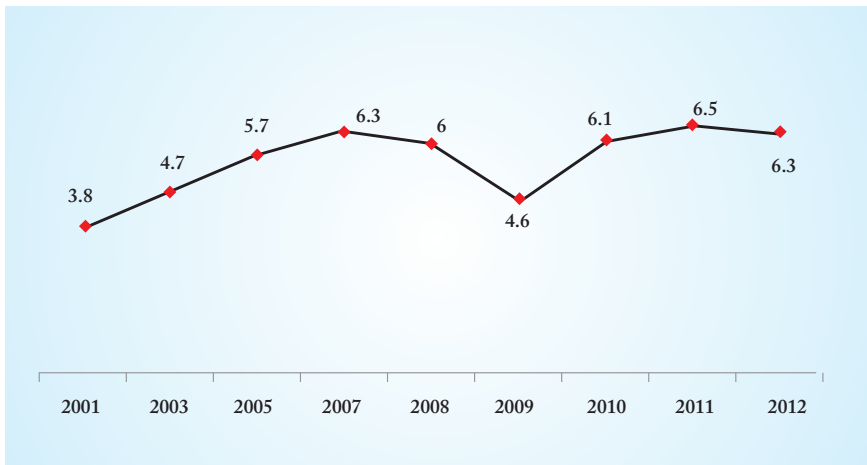
LANDASAN EKONOMI INDONESIA

Kinerja dan stabilitas perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tingkat yang relatif baik. Kinerja yang cukup bagus tersebut ditandai pada 2010, yang memberikan suatu harapan bahwa pada tahun-tahun selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan, bahkan mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti, pada tahun 2011 yang mencatat pertumbuhan 6,5 persen. Ini sebuah kinerja yang membawa optimisme tercapainya upaya peningkatan kesejahteraan melalui percepatan distribusi

pertumbuhan ke seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ini bukan hanya lebih tinggi dari angka pertumbuhan global 2011 sebesar 3,9 persen, melainkan juga tertinggi ketiga di Asia Pasifik setelah China dan India, serta tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Banyak kalangan menyebut pertumbuhan 6,5 persen merupakan pertumbuhan ‘luar biasa’ pada saat dunia dilanda krisis sejak 2008. Hal tersebut merupakan modal berharga bagi Indonesia dalam pengelolaan perekonomiannya ke depan. Pada dua tahun berikutnya, yakni pada 2012 dan 2013, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sedikit menurun. Meskipun demikian, secara umum, perekonomian sudah berada pada tataran yang relatif stabil di tengah banyak ketidakpastian dalam perekonomian global pada tahun-tahun belakangan. Gambaran lebih lengkap tentang kinerja perekonomian Indonesia dalam dasawarsa terakhir dapat dipaparkan dalam grafik berikut:

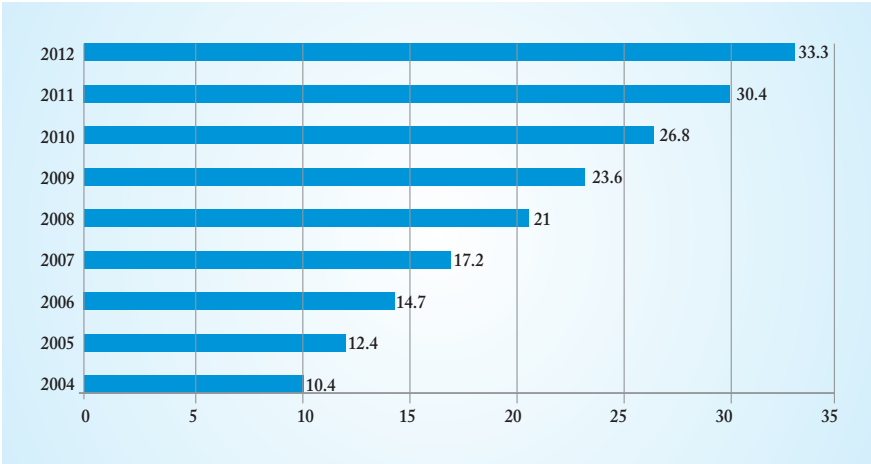
Grafik 1: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2001-2012



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS (diolah)

Kinerja perekonomian Indonesia juga tergambar pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, dari 3.000 dolar AS di pada 2010 menjadi 3.542 dolar AS pada akhir 2011. Peningkatan pendapatan per kapita ini juga mengakibatkan pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang diperkirakan mencapai 7 juta orang per tahun. Jumlah masyarakat kelas menengah, dalam hal ini menengah-rendah, pada tahun yang sama mencapai angka 130 juta jiwa atau 53 persen dari total populasi. Angka ini melonjak tajam dalam 10 tahun terakhir yang pada pasca-krisis 1998 jumlahnya hanya berkisar 25 persen dari populasi. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dapat dipaparkan dalam grafik berikut:

Grafik 2: Pendapatan Per Kapita 2004-2012 (Rp.Juta)



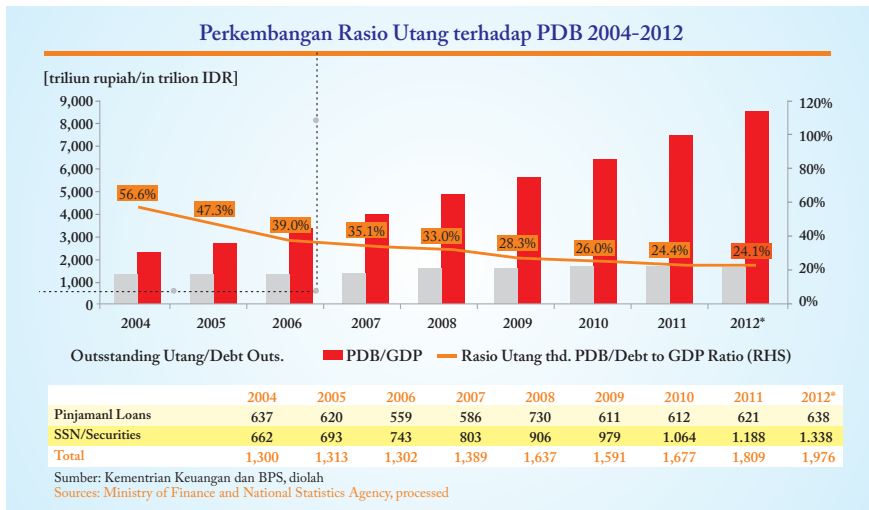
Sumber: Indikator Ekonomi, BPS (diolah)

Peningkatan kelas menengah Indonesia dalam satu dekade terakhir juga merupakan penopang struktur perekonomian nasional di mana konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga mencapai 55-56

persen. Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang bertajuk *The Rise of Asia's Middle Class* juga menunjukkan geliat kelas menengah Indonesia yang bertumbuh pesat. Bahkan, dalam laporan Bank Dunia '*Global Development Horizon 2011 – Multipolarity: The New Global Economy*', menempatkan Indonesia bersama sama dengan China, India, Korea Selatan, dan Brazil, sebagai episentrum pertumbuhan global dengan estimasi sebagian pertumbuhan global disumbangkan oleh keenam negara tersebut pada 2025. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia ini diperkirakan akan berlanjut hingga akhir periode Bonus Demografi pada 2040, saat struktur Demografi Indonesia didominasi oleh usia produktif, sementara *dependency ratio* atau persentase penduduk lanjut usia dan anak-anak semakin menurun.

Kinerja perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang dalam dekade terakhir dapat ditekan menuju level yang relatif stabil. Tahun 2001 rasio utang terhadap PDB sebesar 83 persen, menurun terus hingga 24 persen pada 2012. Rasio ini merupakan rasio utang yang sangat stabil di tengah rasio utang negara-negara kawasan Eropa, Jepang, Amerika yang mendekati 100 persen. Beberapa negara bahkan memiliki rasio utang di atas 100 persen. Dampak krisis utang zona Eropa yang berkepanjangan terhadap Indonesia relatif minim mengingat struktur ekonomi domestik relatif kuat ditopang oleh konsumsi domestik. Di sisi lain, upaya diversifikasi tujuan ekspor juga digalakkan dengan menyasar pasar-pasar non-tradisional sebagai pasar tujuan ekspor utama.

Grafik 3: Rasio Utang terhadap PDB 2004-2012



Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga positif dalam beberapa tahun terakhir memang menurun pada tahun 2013 akibat perlambatan global dan tekanan pelemahan ekonomi China dan India. Meskipun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan global yang hanya berkisar 4-4,5 persen pada periode 2010-2012. Pencapaian ini menempatkan Indonesia dalam kelompok G20 sebagai negara dengan pertumbuhan tinggi bersama China yang mencatat angka 8,1 persen serta India pada angka 5,3 persen. Sementara itu, nilai PDB Indonesia, yang dihitung berdasar harga konstan 2000, mencapai Rp2.618 triliun pada tahun 2012. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp153 triliun dibandingkan dengan nilai tahun 2011 sebesar Rp2.465 triliun.

Berdasarkan penggunaannya, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik sebesar 9,8 persen. PMTB memiliki efek pelipat ganda (*multiplier effect*) yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga menstimulasi sisi konsumsi. PMTB akan mendorong pembukaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, yang nantinya akan menstimulasi konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat tumbuh lebih dari lima persen. Sedangkan, sektor Konsumsi Pemerintah yang diharapkan memberikan sumbangan optimal pada pertumbuhan ekonomi nasional hanya tumbuh sebesar 1,25 persen.

Perlambatan konsumsi rumah tangga terjadi pada kuartal dua tahun 2013. Pelemahan ini disebabkan, antara lain, oleh tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga relatif melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 7,7 persen pada semester pertama 2012 menjadi 1,4 persen pada semester pertama 2013. Perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan realisasi belanja barang terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran dan rendahnya realisasi penyerapan belanja bantuan sosial serta belanja lain-lain akibat penundaan pencairan di beberapa kementerian dan lembaga.

Sementara itu, PMTB hingga semester pertama tahun 2013 juga mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut adalah dari 11,2 persen menjadi 5,2 persen. Perlambatan yang cukup signifikan terjadi pada jenis investasi mesin dan

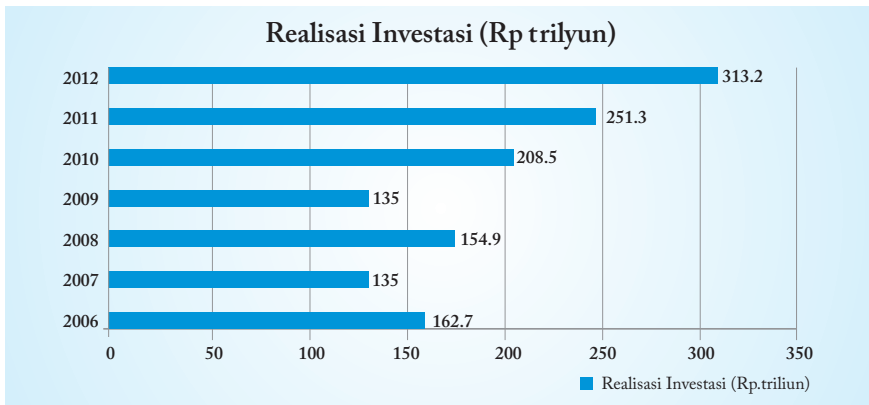
perlengkapan luar negeri, alat angkutan luar negeri, serta lainnya yang ketiganya mengalami kontraksi. Di sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menyumbang kontribusi terbesar, yakni 55 persen, sedangkan Konsumsi Pemerintah menyumbang 7 persen. Adapun PMTB 31,8 persen, ekspor 24,8 persen, dan impor 24,8 dari total PDB.

Sejumlah aspek perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir hingga proyeksinya ke depan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Investasi

Investasi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam beberapa tahun realisasinya melebihi target. Pada 2012, realisasi investasi tersebut mencapai Rp313 triliun, yang diharapkan akan meningkat menjadi Rp 500 triliun pada 2014. Persaingan untuk menarik investasi asing secara langsung tidak berjalan mudah. Persaingan antarnegara, terutama di Asia dan Amerika Latin untuk mendapatkan aliran investasi asing secara langsung menjadi semakin ketat. Para investor global akan mengevaluasi sejumlah kriteria dari mulai stabilitas sosial-politik, kepastian hukum, ketersediaan bahan baku, produktivitas tenaga kerja, teknologi sampai ukuran pasar domestik. Terlebih bagi investor yang akan menanamkan modalnya di sektor riil yang bersifat jangka panjang. Sehingga kesemua faktor tersebut akan di *netpresentvalue* kan untuk mengukur tingkat risiko dan kelayakan berinvestasi. Realisasi yang dicapai selama ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang relatif baik dalam aspek investasi.

Grafik 4: Perkembangan Realisasi Investasi 2006-2012



Sumber: BKPM

Sekarang ini, Indonesia memiliki momentum untuk dapat menarik dan memperbesar investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Setelah melalui proses *recovery* pasca krisis ekonomi 1998, struktur dan pondasi perekonomian Indonesia dianggap lebih kuat. Indonesia berpotensi menjadi kekuatan 10 ekonomi terbesar dunia pada 2020 dengan PDB 3.200 milyar dolar AS. Beberapa waktu lalu, McKinesey menerbitkan laporan yang berjudul *'The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential'*. Dalam dokumen tersebut diprediksi, pada 2030 Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia.

Pada masa tersebut, Indonesia akan mendapatkan tambahan kurang lebih 90 juta kelas menengah yang memiliki daya beli tinggi. Pada saat itu, pasar domestik Indonesia sangat besar diyakini untuk pertumbuhan konsumsi masyarakat perkotaan diprediksi meningkat secara rata-rata 7,7 persen dan menciptakan

potensi pasar sebesar 1,1 triliun dolar AS. Potensi pasar domestik Indonesia ke depan menjadi salah satu faktor penarik untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi ke-15 berdasarkan kemampuan daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP). Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas enam persen maka dapat dipastikan peluang berinvestasi di Indonesia akan semakin besar. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh semakin membesarnya kelas menengah dan kemampuan daya beli konsumen, tetapi juga potensi sumber daya alam --baik terbarukan maupun yang tidak— yang cukup besar untuk diolah. Program industrialisasi dan hilirisasi menjadi pintu masuk untuk investasi pengolahan sumber daya alam di Indonesia.

World Economic Forum (WEF) juga menjadikan Indonesia sebagai ekonomi paling kompetitif di Asia setelah Tiongkok dan Malaysia. Selain itu, survei terakhir yang dilakukan oleh UNCTAD memosisikan Indonesia sebagai negara ke-4 terbaik tujuan perusahaan multinasional berinvestasi. Dukungan proses demokratisasi yang semakin matang juga menambah nilai dan bobot kelayakan Indonesia menjadi tujuan investasi dunia.

2. Daya saing nasional

Sejumlah agenda untuk terus meningkatkan daya saing nasional masih perlu ditingkatkan. Penurunan peringkat daya saing nasional dari 46 (2011-2012) menjadi 50 (2012-2013) merupakan tekanan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan khususnya untuk menjaga iklim daya saing nasional. Pada periode 2013-2014, WEF menaikkan peringkat daya saing Indonesia ke posisi 38 atau naik 12 peringkat dari periode terdahulu. Sebelumnya,

selama tiga tahun berturut-turut, peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan. Kenaikan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kenaikan peringkat tertinggi untuk daya saingnya. Peringkat ini mengungguli empat dari lima negara BRICS, yakni Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. WEF mengidentifikasi 10 dari 12 ukuran penilaian daya saing Indonesia mendapatkan hasil yang meningkat dan membaik.

WEF menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia terus membaik seperti peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, pelabuhan, pembangkit listrik, dan fasilitas lain. Selain itu, WEF juga menilai kondisi makro ekonomi Indonesia terjaga dengan baik dengan pertumbuhan positif dan stabil. WEF juga mengapresiasi pembangunan Iptek di Indonesia di samping keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan. Naiknya peringkat daya saing yang cukup signifikan ini merupakan keberhasilan kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Sekalipun daya saing nasional mengalami peningkatan, beberapa usaha masih perlu dilakukan, seperti penyederhanaan birokrasi, perizinan, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif. Koordinasi baik antara pusat-daerah maupun lintas-kementerian perlu dioptimalkan agar memberikan kepastian bagi dunia usaha, sehingga Indonesia akan tetap mampu mengoptimalkan semua potensi investasi yang akan masuk dari penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri. Salah satu stimulan investor memperbesar kelayakan investasinya adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Maka, ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik dan bandara

“Sekalipun daya saing nasional mengalami peningkatan, beberapa usaha masih perlu dilakukan seperti penyederhanaan birokrasi, perizinan, serta peningkatan iklim usaha yang kondusif. Koordinasi, baik antara pusat-daerah maupun lintas-kementerian perlu dioptimalkan agar memberikan kepastian bagi dunia usaha.”

menjadi prioritas untuk terus kita tingkatkan. Untuk meningkatkan daya saing nasional tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan program percepatan pembangunan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan konektivitas sehingga proses produksi di tingkat nasional akan semakin menjadi lebih efisien.

3. Devisa

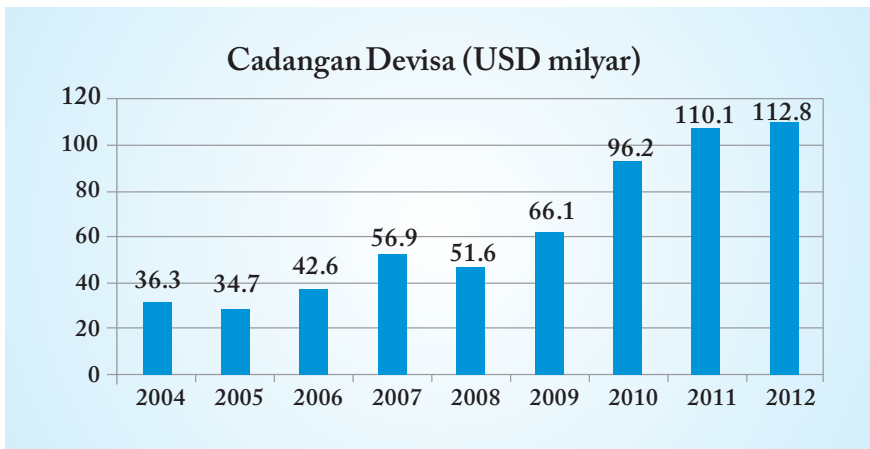
Cadangan devisa bertumbuh pesat pada periode 2010-2012, namun sedikit tertekan pada 2013 akibat defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Tahun

2012, cadangan devisa mencapai 112.8 milyar dolar AS atau naik 2.8 milyar dolar AS dibanding tahun sebelumnya. Bandingkan dengan cadangan devisa pada 2009 yang hanya sebesar 66 milyar dolar AS. Pesatnya pertumbuhan cadangan devisa periode 2010-2012 yang ditopang oleh indikasi kuatnya struktur perekonomian domestik dengan berbagai alat ukur mendorong lembaga pemeringkat dunia (Fitch, S&P, dan Moody's) menaikkan level investasi Indonesia ke zona layak investasi (*investment grade zone*).

Hingga September 2013, cadangan devisa Indonesia mencapai 95.7 milyar dolar AS. Berkurangnya cadangan devisa ini dibanding 2012, disebabkan aksi intervensi pasar yang dilakukan sepanjang

semester pertama 2013. Saat itu, gejolak pasar keuangan global telah menekan perekonomian sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Pelarian modal keluar setelah berkembang isu The Fed akan mempercepat penghentian QE3, nilai tukar mata uang Rupiah melemah sepanjang periode Januari–Agustus 2013.

Grafik 5: Cadangan Devisa 2004–2012



Sumber: Kementerian Keuangan

4. Ekspor-Impor

Tekanan pelemahan ekonomi global beberapa waktu terakhir telah berimbas pada perlambatan ekspor nasional karena berkurangnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Pada tahun 2012, ekspor Indonesia tercatat tumbuh sebesar 2 persen. Sementara itu, impor tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 6,65 persen. Peningkatan impor ini diakibatkan oleh meningkatnya impor nonm s dan migas. Selain itu, kenaikan impor juga dipengaruhi oleh meningkatnya impor bahan baku dan barang modal. Pada

2012, impor bahan baku tercatat tumbuh 7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu impor barang modal pada tahun yang sama tumbuh sebesar 15,24 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan komponen ekspor menyebabkan Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan.

Pada awal 2013, pertumbuhan ekspor kembali mengalami perlambatan menjadi 4,2 persen dari 5,3 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan impor mengalami penurunan yang cukup jauh, yaitu sebesar 0,3 persen dari 10,2 persen. Tekanan nilai tukar, pelemahan kebutuhan input impor untuk produksi komoditi ekspor dan domestik, serta kekhawatiran akan tekanan inflasi menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan impor tersebut. Defisit neraca perdagangan Indonesia pada semester pertama 2013 mencapai sebesar 3,31 milyar dolar AS, terutama disebabkan oleh defisit neraca migas serta belum membaiknya sektor nonmigas akibat pelemahan ekonomi global dan kecenderungan penurunan harga komoditas ekspor utama. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia separuh waktu pertama tahun 2013 mencapai 91 milyar dolar AS atau menurun 6,1 persen dibanding periode yang sama pada 2012. Sebesar 74,77 milyar dolar AS di antaranya berupa ekspor nonmigas. Adapun nilai kumulatif impornya pada kurun waktu yang sama adalah 94,36 milyar dolar AS atau turun 2,16 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

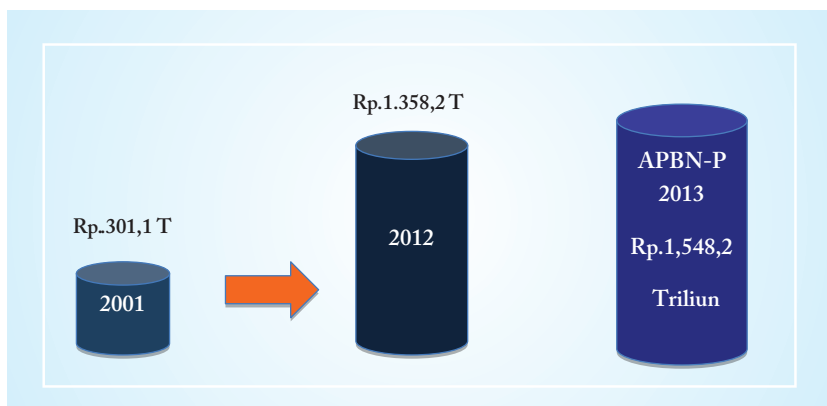
5. Struktur pendapatan

Dalam hampir satu dasawarsa terakhir, penerimaan perpajakan berkontribusi rata-rata 70 persen terhadap total pendapatan negara

dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri seperti PPh, PPn, Cukai, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya, serta pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar. Pajak dalam negeri menguasai rata-rata 96 persen dari total penerimaan perpajakan dalam kurun waktu 2006-2012, sementara pajak perdagangan internasional sebesar rata-rata 4 persen.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga 2012 telah menunjukkan peningkatan kemampuan anggaran secara signifikan. Pada tahun 2001, Pendapatan Negara dan Hibah hanya berkisar Rp 301 triliun telah meningkat menjadi sebesar Rp 1.358,2 triliun pada APBN-P 2012 atau meningkat 351 persen dalam kurun satu dekade. Sementara itu, belanja negara yang pada 2001 hanya sebesar Rp 341,6 triliun telah meningkat menjadi Rp 1.548,3 triliun pada APBN-P 2013 atau melonjak 353 persen dalam kurun satu dekade.

Gambar 1: Pendapatan Negara dan Hibah 2001 & 2012, APBN-P 2013



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan perpajakan sebagai kontributor terbesar dalam postur pendapatan negara meningkat signifikan, baik bila dihitung mulai tahun 2001 maupun 2005. Peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp980 trilyun pada akhir 2012 atau meningkat 371 persen dari tahun 2001 sebesar Rp185,5 trilyun. Bahkan target untuk tahun 2013 sesuai APBN-P, penerimaan pajak mencapai Rp1.148 trilyun atau meningkat hampir lima kali lipat dari penerimaan pajak tahun 2001. Kinerja ini tentunya menstimulasi optimisme akan tercapainya berbagai program pembangunan pemerintah baik yang tercantum dalam rancangan pembangunan jangka menengah serta panjang, maupun program pembangunan lainnya.

Meningkatnya penerimaan pajak dalam postur APBN sepuluh tahun terakhir berdampak pada berkurangnya porsi utang sebagai sumber pembiayaan dalam APBN. Rasio utang terhadap PDB menukik turun di titik kurang dari 24 persen pada 2013 dibandingkan 77 persen pada 2001. Defisit anggaran selama satu dekade juga terjaga dengan baik dengan rata-rata 1,4 persen dari PDB. Tahun 2011, defisit anggaran negara tercatat sebesar 1,1 persen atau dapat ditekan 54 persen dari tahun 2001 yang mencapai 2,4 persen. Defisit anggaran tahun 2012 sebesar 1.86 persen sedikit naik dibanding 2011 akibat tekanan defisit neraca pembayaran dan perdagangan, namun defisit ini tergolong cukup rendah, baik di kawasan maupun global.

Indonesia pada saat ini, berada pada titik akselerasi ekonomi. Ini tentunya diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Dari sisi kedisiplinan fiskal sejak periode

akhir 2000-an, Indonesia senantiasa menjaga keseimbangan fiskal dengan rasio utang yang terus menurun hingga mencapai di bawah 24 persen pada semester 1-2013. Dari sisi fundamental makroekonomi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan laju inflasi relatif rendah di Asia Tenggara, bahkan jika dibandingkan dengan sejumlah *emerging markets* lainnya. Misalnya, India yang pertumbuhannya relatif tinggi namun dengan laju inflasi 10 persen dan China dengan inflasi 6 persen. Bonus Demografi yang akan dinikmati kurun 2010-2040 merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensinya, baik dari sisi ekonomi domestik maupun perannya terhadap ekonomi global.

6. Kemiskinan dan lapangan kerja

Pertumbuhan ekonomi yang stabil, walau sedikit melambat setahun terakhir, berdampak pada penurunan indikator kemiskinan. Jumlah orang miskin sebanyak 13,33 persen atau 31,02 juta orang pada 2010 menurun menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada 2013. Banyaknya penciptaan lapangan pekerjaan baru selama lima tahun terakhir juga berdampak pada penurunan jumlah pengangguran yakni 8,59 juta orang pada tahun 2010 menjadi hanya 7,17 juta orang pada semester pertama tahun 2013.

Perlambatan ekonomi global dan krisis di zona Eropa tidak akan mengurangi upaya dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan strategi pembangunan berorientasi *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. Penyelesaian sejumlah agenda pembangunan seperti infrastruktur, jalan, pelabuhan,

bandara, telekomunikasi, dan energi menjadi pelumas bagi daya tarik investasi yang lebih tinggi. Begitu pula dengan keseimbangan fiskal yang relatif terjaga, selain meningkatkan pemanfaatan fiskal sebagai stimulus pertumbuhan, juga diperlukan upaya peningkatan daya serap anggaran.

Selain infrastruktur, kemampuan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput juga dijaga. Strategi yang dilakukan untuk itu antara lain, menyediakan aksesibilitas kepada kelompok usaha mikro dan kecil agar mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi. Mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang secara kumulatif, semenjak digulirkan tahun 2007 hingga Maret 2013, total penyerapannya sebesar Rp108,4 trilyun dengan jumlah pelaku usaha penerima mencapai 8,3 juta orang debitur. Fungsi dan peran KUR selain sebagai mekanisme pemerataan, juga untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil. Sehingga secara agregat hal ini mampu menciptakan lapangan kerja serta memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan tentu akan memperbesar ruang untuk konsumsi dan tabungan nasional.

Peningkatan perluasan lapangan kerja ini menjadi salah satu strategi keluar dari jeratan kemiskinan di Indonesia. Hingga Agustus 2012, tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 6,14 persen. Capaian ini bahkan mendapat apresiasi dalam laporan *mid-term* IMF 2012 pada saat negara-negara maju menghadapi tingginya angka pengangguran sebagai imbas dari krisis global. Selain *keep buying strategy*, berbagai program

percepatan pembangunan juga memberi andil bagi perluasan lapangan kerja yang kemudian mendorong tenaga kerja di sektor formal semakin meningkat hingga menghampiri 40 persen.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui empat klaster tidak hanya menekan angka kemiskinan tetapi juga mendorong daya beli masyarakat. Di samping itu, program pembangunan yang sedang berjalan serta aliran investasi yang masuk telah memperluas lapangan pekerjaan sebagai salah satu katalisator pengentasan kemiskinan di Indonesia. Klaster I hingga Klaster IV untuk mengakselerasi percepatan pengentasan kemiskinan sehingga mempermudah pencapaian target pada akhir 2013. Dengan berbagai program yang didesain dalam kerangka besar percepatan pembangunan, kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat ditekan hingga 8-9 persen pada akhir 2014.

Empat Klaster program pengentasan kemiskinan itu sebagai berikut. *Pertama*, berupa bantuan langsung beras untuk rumah tangga miskin (raskin), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), dan Program Keluarga Harapan. *Kedua*, pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. *Ketiga*, program berbasis usaha kecil, mikro, dan menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Keempat*, program rumah murah, angkutan umum murah, air bersih dan listrik yang makin merata, serta peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat miskin di perkotaan

Pada 2013, pemerintah mendorong program integrasi Klaster I hingga Klaster IV untuk mengakselerasi percepatan pengentasan

kemiskinan sehingga mempermudah pencapaian target pada akhir 2013. Dengan berbagai program yang didesain dalam kerangka besar percepatan pembangunan, kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat ditekan di kisaran 9,5-10,5 persen pada akhir 2013. Alokasi anggaran dalam RAPBN 2013 untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp115.5 trilyun. Dalam APBN 2013, anggaran yang dialokasikan untuk implementasi:

- Klaster pertama meliputi Program Keluarga Harapan sebesar Rp2,8 trilyun untuk menjangkau sasaran sekitar 2,4 juta rumah tangga sangat miskin. Raskin untuk 15,5 juta rumah tangga sederhana dengan anggaran Rp17.2 trilyun, dan program jaminan kesehatan masyarakat bagi 76,4 juta jiwa.
- Klaster kedua, program PNPM dialokasikan sebesar Rp13,4 trilyun meliputi program untuk perdesaan sebesar Rp9,6 trilyun dengan sasaran 5.100 kecamatan, program untuk perkotaan sebesar Rp2 trilyun bagi 10.922 kelurahan dan program pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp0,8 trilyun untuk 2.600 kelurahan.
- Klaster ketiga, pemerintah menargetkan peningkatan program KUR untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
- Klaster keempat ditargetkan untuk pembangunan rumah swadaya sebanyak 60.000 unit.

Selain itu, dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp336 trilyun, Pemerintah kembali melanjutkan program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Sekitar 45 juta siswa sekolah dasar, madrasah

ibtidaiyah, dan salafiyah ula dan sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan salafiyah wustha menjadi penerima manfaat program tersebut. Selain itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa bagi sekitar 9,4 juta orang siswa dan mahasiswa, serta dana tunjangan profesi guru sebesar Rp43,1 triliun.

Grafik 8: Anggaran Pengentasan Kemiskinan



Sumber: Kementerian Keuangan, BPS

7. Pembangunan wilayah

Pembangunan wilayah untuk mewujudkan sebaran ekonomi juga dilakukan dari Sumatera hingga kawasan Papua, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

● Wilayah Sumatera

Nilai koefisien gini wilayah Sumatera memiliki kecenderungan meningkat. Tahun 2012, nilai koefisien gini wilayah

Sumatera mencapai 0,35 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 dengan nilai koefisien gini sebesar 0,31. Peningkatan ini sering kali dimaknai sebagai sinyal semakin senjangnya pendapatan antar-rumah tangga. Namun sebagai catatan, peningkatan rasio gini juga dapat menjadi indikasi terjadinya ekspansi industri yang memberi ruang bagi pekerja dengan keahlian dan berimbas pada semakin lebarnya kesenjangan pendapatan dengan pekerja tanpa keahlian. Dengan demikian, peningkatan rasio gini dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai *fase* transisi perluasan pembangunan. Sedangkan untuk peranan pembentukan PDB Nasional, wilayah Sumatera menempati urutan kedua dengan porsi pembentukan PDB nasional sebesar 23,77 persen.

- Wilayah Jawa

Nilai koefisien gini pada wilayah Jawa memiliki kecenderungan meningkat. Tahun 2012, nilai koefisien gini wilayah Jawa mencapai 0,39 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 dengan nilai koefisien gini sebesar 0,35. Sedangkan untuk peranan pembentukan PDB Nasional, wilayah Jawa masih menempati urutan pertama dengan porsi pembentukan PDB nasional sebesar 57,63 persen.

- Wilayah Kalimantan

Nilai koefisien gini wilayah Kalimantan memiliki tren meningkat. Tahun 2012 nilai koefisien gini wilayah Kalimantan mencapai 0,36 atau meningkat dibandingkan

dengan tahun 2009 dengan nilai koefisien gini sebesar 0,33. Sedangkan untuk peranan pembentukan PDB Nasional, wilayah Kalimantan menempati urutan dengan porsi pembentukan PDB nasional sebesar 9,3persen.

- Wilayah Bali-NTT

Nilai koefisien gini wilayah Bali-NTT memiliki tren meningkat. Tahun 2012, nilai koefisien gini wilayah Bali-NTT mencapai 0,38 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 dengan nilai koefisien gini sebesar 0,34. Sedangkan untuk peranan pembentukan PDB Nasional, wilayah Bali-NTT menempati urutan kedua terkecil dengan porsi pembentukan PDB nasional sebesar 2,51 persen.

- Wilayah Sulawesi

Nilai koefisien gini wilayah Sulawesi memiliki kecenderungan meningkat. Tahun 2012, nilai koefisien gini wilayah Sulawesi mencapai 0,4 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 dengan nilai koefisien gini sebesar 0,34. Sedangkan untuk peranan pembentukan PDB Nasional, wilayah Sulawesi menempati urutan keempat dengan porsi pembentukan PDB nasional sebesar 4,73 persen.

- Wilayah Papua

Nilai koefisien gini wilayah Papua memiliki kecenderungan meningkat. Tahun 2012, nilai koefisien gini wilayah Papua mencapai 0,4 atau meningkat dibandingkan dengan tahun

2009 dengan nilai koefisien gini sebesar 0,34. Sedangkan untuk peranan pembentukan PDB Nasional, wilayah Papua menempati urutan terakhir dengan porsi pembentukan PDB nasional sebesar 2,06 persen.

PROYEKSI 2014-2019

Mengakhiri abad 21, Indonesia muncul sebagai negara berpendapatan menengah, kuat secara ekonomi, stabil secara politik, serta semakin percaya diri. Selama dasawarsa terakhir, sistem fiskal dan politik Indonesia telah mengalami transformasi. Walaupun jarang disebutkan, Indonesia ternyata juga tengah berada dalam pergeseran demografis dan geografis yang mendasar. Indonesia sekarang merupakan negara perkotaan karena lebih dari 50 persen penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Dalam lima tahun ke depan, penduduk Indonesia akan mencapai 270 juta orang, yang sekitar 60 persennya tinggal di perkotaan. Pada saat yang sama, akan terjadi penurunan tingkat kesuburan dan peningkatan tajam dalam jumlah penduduk usia tua, yang akan menjadikan Indonesia terus menikmati berkah 'Bonus Demografi' dalam dasawarsa mendatang karena penduduk berusia kerja meningkat terhadap kelompok populasi lainnya.

Pada 2020, diperkirakan jumlah penduduk usia muda 15-24 tahun akan mencapai 50-60 persen. Ini akan menjadi berkah jika penduduk usia muda tersebut memiliki keterampilan dan pekerjaan. Sebaliknya akan menjadi musibah jika mereka menganggur. Untuk menjadikan pertumbuhan penduduk usia muda sebagai

berkah, maka perlu dipikirkan strategi penyediaan lapangan kerja. Kondisi kependudukan di negara maju merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memanfaatkannya sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja. Menurut ILO, pada dasawarsa mendatang pertumbuhan penduduk negara maju khususnya Eropa, Amerika Utara, Asia Timur dan Australia akan mengalami stagnasi 2020, di mana penduduk usia lanjut meningkat 50-60 persen. Mereka akan kekurangan tenaga kerja muda. Ini peluang bagi penduduk usia muda kita.

“Pada 2020, diperkirakan jumlah penduduk usia muda 15-24 tahun akan mencapai 50-60 persen. Ini akan menjadi berkah jika penduduk usia muda tersebut memiliki keterampilan dan pekerjaan. Sebaliknya, akan menjadi musibah jika mereka menganggur.”

Sejauh ini, beberapa negara industri seperti Jerman mulai mengambil langkah mengatasi dampak kondisi tersebut, antara lain dengan mengirimkan delegasi ke Indonesia untuk kemungkinan pengiriman tenaga kerja nasional ke sana. Kondisi serupa telah dirasakan Jepang dan Korea Selatan sehingga sejak beberapa tahun terakhir, dua negara Asia itu telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja muda, baik untuk bekerja di industri maupun perawat. Hal serupa diperkirakan akan dilakukan negara maju lain dalam lima tahun terakhir. Secara umum, peluang kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah menyediakan tenaga kerja terampil untuk mengisi pasar kerja di sektor industri dan jasa kesehatan. Oleh karena itu, perlu ‘road map’ pengembangan industri jasa tenaga kerja dengan penciptaan iklim

usaha kondusif, pengembangan sistem peningkatan kualitas TKI, serta peningkatan pangsa pasar TKI.

Jika Indonesia dapat meneruskan pengembangan fondasi makroekonomi dan stabilitas politik yang telah dibentuknya serta mempercepat pertumbuhan sekaligus memastikan pertumbuhan yang merata dan berkesinambungan, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara berpendapatan menengah yang dinamis, kompetitif dan inklusif dalam dasawarsa mendatang. Namun, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Indonesia, masih banyak hal yang harus dilakukan. Pertumbuhan perlu dijaga untuk terus positif dan menguat. Pembangunan infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif menjadi pendulum pertumbuhan ekonomi tinggi.

Dengan latar belakang posisi fiskal yang kuat, peluang Indonesia pada lima tahun mendatang sangatlah luas untuk mengatasi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depan. Demokratisasi dan desentralisasi secara fundamental telah mengubah struktur pertanggungjawaban dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Perubahan ini menggarisbawahi kelemahan sistemik dalam proses dan kapasitas untuk perumusan dan implementasi kebijakan serta membuat proses implementasi reformasi menjadi tugas yang lebih menantang dan memakan waktu. Efektivitas pemerintah terbatas oleh tidak memadainya kapasitas dan pertanggungjawaban pegawai negeri dan masalah koordinasi dalam pemerintah. Dengan demikian, perbaikan dan peningkatan kapasitas aparatur negara khususnya di daerah-daerah menjadi perhatian serius untuk mengkondusifkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.

Tabel 1: Proyeksi Indonesia 2014-2019*

INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	Juta jiwa	253	257	260	263	266	270
PDB	USD milyar	1.150	1.220	1.332	1.451	1.538	1.631
Pertumbuhan PDB	%	5.8-6.1	6.2-6.5	6.2-6.5	6.5-7.0	6.8-7.2	6.8 – 7.2
PDB per kapita	USD	4.270	4.750	5.200	5.850	6.380	6.950
Koefisien Gini	%	0.4	0.39	0.39	0.36	0.35	0.35
Inflasi	%	5.5-6	4.5-5.5	4 - 5	4 - 5	4-5	4 - 5
Cadangan Devisa	US milyar	103	115	125	145	175	210
Kemiskinan	%	9.5-10.5	8.0 – 8.5	7.0-7.5	6.0-6.5	5.0-5.5	4.0-4.5
Pengangguran Terbuka	%	4.5	3.9	3.3	2.7	2.1	1.5-1.8
Rasio Elektrifikasi	%	80	83	85	90	93	95

*)Asumsi : Perlambatan global akibat pemangkasan stimulus ekonomi AS, Stagnasi Zona Eropa (dalam proses *recovery*), Ekspansi ekonomi Tiongkok, Masih tingginya volatilitas komoditas pangan dan energi, Konsumsi domestik tetap tinggi, Defisit transaksi berjalan berada pada tingkat yang relatif terjaga, Kelas ekonomi menengah tumbuh sesuai proyeksi, dan Pembangunan infrastruktur sesuai rencana MP3EI.

Tentu Pembangunan Indonesia periode 2014-2019 tidak akan terlepas dari keterhubungan atau integrasi ekonomi global. Keterhubungan ekonomi antarnegara, antarwilayah menjadi realita yang tidak bisa dihindari dan menjadi tuntutan bagi setiap negara mempersiapkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonominya di tengah kondisi keterhubungan tersebut. Integrasi ekonomi global semakin mengemuka ketika negara-negara di kawasan

Asia, Eropa, Afrika dan Amerika terus mendorong pembentukan unifikasi kawasan dalam mengatasi stabilitas ekonomi makro dalam mendorong pertumbuhan global yang berkualitas.

Periode 2014-2019, merupakan periode ketiga dari tahapan pembangunan jangka menengah nasional yakni hingga tahun 2025. Maka, presiden terpilih pada Pemilu 2014 perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perbaikan dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan ekonomi nasional yang akan ditempuh nantinya. *Path-dependency* perlu dikedepankan yang proses berikutnya akan sangat ditentukan oleh proses terdahulu. Capaian yang positif selama ini perlu diteruskan dan bahkan ditingkatkan pada periode mendatang.

Visi ekonomi Indonesia 2014-2019, terkait erat dengan rancangan pembangunan jangka panjang nasional dengan konstruksi pembangunan bertahap. Yakni, pembangunan lima tahunan atau jangka menengah hingga tahun 2025 yang diharapkan dapat menjadi basis tinggal landas Indonesia menuju negara besar. Dalam rancangan jangka panjang tersebut, terdapat delapan arah pembangunan yang dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, ditandai oleh hal-hal berikut: *Pertama*, terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran,

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. *Kedua*, makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

- b. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: *Pertama*, tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

Kedua, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. *Ketiga*, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

Keempat, tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhiya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. *Kelima*, meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.

- c. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: *Pertama*, terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. *Kedua*, menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.

Ketiga, kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. *Keempat*, mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip

toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. *Kelima*, terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

- d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ditandai oleh hal-hal berikut: *Pertama*, terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Kedua, TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal. *Ketiga*, Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.

- e. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, ditandai oleh hal-hal berikut: *Pertama*, tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Ketiga, terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. *Keempat*, terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

- f. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, ditandai oleh hal-hal berikut: *Pertama*, membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. *Kedua*, terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional. *Ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

- g. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut: *Pertama*, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. *Kedua*, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara. *Keempat*, terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. *Kelima*, kurangnya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
- h. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional, ditandai oleh hal-hal berikut: *Pertama*, adanya upaya memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. *Kedua*, memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di lingkungan internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. *Ketiga*, meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. *Keempat*, terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global. *Kelima*, meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

TANTANGAN PEMBANGUNAN 2014-2019

Perekonomian Indonesia pada periode lima tahun mendatang akan diwarnai dengan perdagangan bebas dengan negara lain seiring dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. MEA akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Dampak positifnya terkait dengan kelancaran arus perpindahan sumber daya antarnegara di kawasan ini. Selain itu, turunnya restriksi perdagangan juga akan membuat volume perdagangan meningkat dan harga barang relatif lebih rendah. Dampak negatifnya bagi kawasan adalah risiko sistemik: Krisis yang terjadi di suatu negara akan memberikan *contagion effect* yang signifikan bagi negara lain di kawasan.

Berkaca dari apa yang terjadi pada Uni Eropa, disparitas ekonomi antar-negara di suatu kawasan ekonomi bersama juga memiliki potensi yang negatif. Meskipun tujuannya untuk mengusung kepentingan bersama, namun pada akhirnya masing-masing negara memiliki kepentingan sendiri. Sehingga MEA belum tentu menghilangkan friksi antar-negara. Sebuah kawasan ekonomi biasanya akan memberikan dampak yang besar bagi negara dengan dominasi ekonomi yang besar di kawasan tersebut, seperti Uni Eropa yang relatif lebih banyak memberikan manfaat bagi Jerman dan Perancis.

Indonesia belum cukup siap menjadi pemain kunci dalam MEA meskipun memiliki sumber daya yang besar, baik sumber daya alam maupun manusia. Tertinggal dalam produktivitas dan infrastruktur, membuat Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara lain. Neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan negara-negara

di kawasan ini juga masih defisit. Dengan Thailand, Singapura, dan Malaysia pada tahun 2012, Indonesia defisit sebesar masing-masing 721 juta dolar AS, 707 juta dolar AS, serta 511 juta dolar AS. Dengan Vietnam, Indonesia membukukan defisit perdagangan sebesar 157 juta dolar AS. Bahkan Brunei Darussalam pun memaksa Indonesia defisit sebesar 281 juta dolar AS. Dalam posisi seperti itu, sebutan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara menjadi tidak banyak bermakna.

Sistem perdagangan bebas seiring dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN serta forum-forum kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, menjadi peluang sekaligus ancaman bagi perekonomian Indonesia 2014-2019. Kesiapan Indonesia menghadapi era baru perekonomian tersebut menjadi kunci seberapa besar fenomena tersebut dapat dioptimalkan untuk menjadi peluang. Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dalam perekonomian yang sehingga dapat meraih pencapaian selama ini relatif baik di antara negara berkembang, meskipun semakin tertinggal oleh negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, apalagi Singapura.

Salah satu modal penting dalam perekonomian Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah, baik berupa minyak bumi dan gas, barang tambang dan bahan mineral, sumber daya kehutanan, kelautan, maupun bahan-bahan nabati. Banyak negara mengotimalkan sumber daya alam yang dimilikinya untuk mentransformasi dari 'negara miskin' menjadi negara maju. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh Norwegia yang semula merupakan negara termiskin di kawasan Skandinavia menjadi negara paling sejahtera di dunia dengan Indeks

Pembangunan Manusia di peringkat pertama. Uang dari minyak yang dimilikinya tidak habis dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan negara, tetapi sepenuhnya diinvestasikan untuk kepentingan generasi masa depan. Kesempatan terbesar Indonesia untuk melakukan langkah seperti Norwegia sudah berlalu, namun sumber daya alam yang dimiliki masih relatif banyak dibanding negara-negara lain.

Besarnya pasar domestik juga merupakan salah satu kekuatan perekonomian Indonesia. Dengan pasar domestik yang besar, perekonomian Indonesia tak terlalu banyak terimbas oleh krisis kawasan Eropa yang masih berlangsung hingga awal 2014. Sebuah keadaan yang oleh sebagian kalangan dikritisi serupa dengan perekonomian masyarakat tradisional yang subsisten, yang tidak terpengaruh oleh perekonomian pasar sekitarnya. Meskipun demikian, kekuatan pasar domestik ini dapat dimanfaatkan untuk mengundang investasi yang akan melahirkan lapangan kerja serta perputaran ekonomi yang lebih besar. Masalahnya, kehadiran investasi juga memerlukan sejumlah prasyarat seperti infrastruktur, kepastian hukum, serta dukungan birokrasi yang bersih dan efisien, yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi Indonesia. Karena itu, arus modal asing yang masuk Indonesia lebih banyak masuk ke pasar modal dibanding sebagai investasi ke sektor riil.

Kekuatan lain dalam perekonomian Indonesia adalah konsistensi otoritas keuangan dalam menjaga iklim makro untuk selalu kondusif. Konsistensi tersebut relatif teruji selama 15 tahun pasca-Krisis Moneter 1998. Sejak itu, perekonomian Indonesia terus meningkat secara signifikan dari berbagai aspek yang telah disebutkan di atas, seperti pertumbuhan, peningkatan devisa, manajemen fiskal,

hingga pengentasan kemiskinan serta penyediaan jaminan sosial secara meluas. Pelemahan nilai tukar Rupiah pada 2013 menjadi salah satu batu uji seberapa tangguh kebijakan perekonomian Indonesia terhadap kerawanan di berbagai bidang yang akan selalu berkembang.

Selain menghadapi peluang serta ancaman di masa depan, tiga kekuatan utama perekonomian --yakni kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang besar serta konsistensi kebijakan otoritas perekonomian— juga mengelola titik-titik kritis yang menjadi kelemahan ekonomi Indonesia. Setidaknya terdapat empat titik kritis yang perlu dicermati dalam perekonomian Indonesia 2014-2019. Keempat titik kritis tersebut adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan industri, serta pengembangan infrastruktur.

Setidaknya terdapat empat titik kritis yang perlu dicermati dalam perekonomian Indonesia 2014-2019. Keempat titik kritis tersebut adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan industri, serta pengembangan infrastruktur.

1. Ketahanan pangan

Ketahanan Pangan merupakan masalah laten dalam perekonomian Indonesia. Pada awal periode 1980-an, Indonesia sempat meraih penghargaan dari Badan Dunia untuk Pangan dan Pertanian (FAO) dengan keberhasilannya mewujudkan 'swasembada beras' sebagai makanan pokok masyarakat. Namun, 'swasembada' tersebut juga melahirkan implikasi panjang berupa penyeragaman

makanan pokok yang semula beragam seperti jagung, umbi, dan sagu menjadi hanya beras. Apalagi pangan tidak lagi sebatas pemenuhan makanan pokok, tetapi juga mencakup kebutuhan terhadap daging dan buah-buahan yang banyak bergantung pada impor.

Krisis kedelai dan impor daging pada tahun 2012 dan 2013 bukan hanya berimplikasi pada ekonomi, melainkan juga pada ranah sosial dan politik. Menyangkut makanan pokok pun terjadi pergeseran dengan meningkatnya konsumsi terhadap produk gandum. Kebijakan perekonomian tidak dapat menutup mata terhadap aspek pangan tersebut dengan menyerahkan semata pada mekanisme pasar. Thailand mampu mengelola aspek pangan tersebut menjadi salah satu kekuatan ekonominya bersama dengan pariwisata, serta industri otomotif dan komputer. Thailand bahkan menguasai industri yang terkait unggas dan pakan ternak di Indonesia. Kemajuan industri pangan secara keseluruhan akan menentukan kesejahteraan petani yang sampai saat ini masih merupakan angkatan kerja terbesar di Indonesia.

2. Ketahanan energi

Hambatan terbesar bagi kemajuan ekonomi Indonesia untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju adalah keterbatasan pasokan energi. Sekalipun dipandang kaya dengan minyak bumi dan gas, Indonesia saat ini sudah menjadi negara pengimpor bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta barel per hari, yang akan terus meningkat menjadi 1,9 juta barel per hari pada tahun 2019. Kebutuhan

masyarakat terhadap listrik juga masih belum terpenuhi karena tidak adanya pembangkit baru yang dibangun. Pengembangan energi berbasis, tenaga angin, arus laut, juga tenaga surya secara masif belum dilakukan karena pertimbangan ekonomis yang masih sangat mahal. Pengembangan energi geothermal serta bahan bakar minyak nabati juga belum sungguh-sungguh dilakukan, apalagi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang menjadi tumpuan penyediaan energi seluruh negara industri. Dengan tingkat konsumsi listrik yang termasuk terendah di Asia Tenggara, sulit bagi Indonesia untuk meraih kemajuan ekonomi secara signifikan di masa mendatang. (Lihat bab selanjutnya: *“Membangun Indonesia Kuat”*)

3. Pengembangan industri

Kelemahan industri nasional telah disadari oleh otoritas perekonomian Indonesia. Kelemahan tersebut membuat Indonesia lebih berposisi sebatas sebagai pasar dibanding sebagai pelaku dalam tatanan ekonomi global. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, pemerintah telah meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan menetapkan enam koridor perekonomian. Melalui program itu, pembangunan industri domestik yang diistilahkan pula sebagai ‘hilirisasi’ dengan dukungan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terwujud.

Laporan tentang pelaksanaan program MP3EI sejauh ini menyebutkan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut antara lain

ditandai dengan adanya total investasi sebesar Rp 647 triliun pada 240 proyek, baik di sektor riil maupun untuk pembangunan infrastruktur selama dua tahun sejak program tersebut diluncurkan pada 27 Mei 2011. Pertumbuhan tersebut tentu menguatkan optimisme terhadap peningkatan kinerja ekonomi Indonesia secara umum. Meskipun demikian, masih perlu dikaji secara mendalam, apakah program tersebut mampu secara mendasar membangun pondasi bagi industrialisasi Indonesia sebagaimana negara-negara lain yang telah terbukti sukses menata pondasi industrinya seperti Korea Selatan atau belum?

4. Pengembangan infrastruktur

Kebutuhan untuk membangun infrastruktur secara baik juga telah disadari pemerintah periode 2009-2014. Hal tersebut tercakup pula dalam program MP3EI yang dianggap sebagai program andalan negara untuk kemajuan ekonomi Indonesia tahun 2014-2019 hingga periode berikutnya. Pembangunan jaringan kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, hingga kawasan-kawasan industri merupakan suatu kebutuhan. Rencana pembangunan jaringan serat optik yang menjadi pendukung pengembangan ekonomi berbasis Teknologi Informasi bahkan akan menjangkau wilayah yang sulit secara geografis seperti Papua.

Secara umum, rencana pembangunan infrastruktur tersebut dapat diandalkan untuk terwujud mengingat sifatnya yang kasat mata. Namun pembangunan secara utuh sesuai dengan kebutuhan Indonesia pada masa depan tetap perlu dicermati bersama.

Keberadaan rel jalur ganda untuk kereta api serta jalan tol sepanjang Jawa dan Sumatera serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Sulawesi sudah merupakan keharusan. Begitu pula infrastruktur yang terkait dengan pemenuhan pasokan energi nasional seperti jaringan listrik, jaringan pipa gas di perkotaan, kilang-kilang minyak dan gas dalam jumlah yang memadai serta PLTN untuk menopang pertumbuhan industri. Pembangunan infrastruktur terkait dengan pengembangan perkotaan juga sudah dalam kondisi mendesak. Semua hak tersebut memerlukan pertimbangan politik ekonomi yang seksama.

Tantangan pembangunan ekonomi Indonesia 2014-2019 tidak ringan. Tantangan tersebut bukan hanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, melainkan juga untuk mampu menembus hambatan yang diistilahkan sebagai '*middle income trap*' atau jebakan negara berpenghasilan menengah. Para ekonom dunia percaya bahwa langkah negara berpenghasilan menengah untuk dapat menjadi negara maju tidak mudah karena adanya jebakan abstrak itu. Sangat sedikit negara yang mampu lolos dari jebakan itu, salah satunya adalah Korea Selatan pada era 1980-an. Indonesia harus pula mampu menembus jebakan itu dan 'tinggal landas' sebelum 2025 bila tak ingin kehilangan momentum. Keberhasilan untuk mengatasi empat aspek kritis tersebut di atas menjadi salah satu kuncinya.

Selain itu, masih terdapat beberapa aspek lain yang juga perlu dicermati agar proyeksi pada akhir periode lima tahun mendatang itu dapat terwujud, di antaranya stabilitas politik terkait dengan pelaksanaan demokrasi secara meluas. Kesuksesan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Presiden 2014 akan menjadi penentu awal

bagaimana politik dapat berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien sebagai hasil dari Reformasi Birokrasi juga akan berperan besar dalam pencapaian target ekonomi yang telah ditetapkan. Begitu pula kepastian dalam penegakan hukum yang berpengaruh secara langsung terhadap tingkat laju investasi.

Keterkaitan yang tak kalah penting dengan pembangunan ekonomi adalah kualitas pendidikan yang mendesak kualitas angkatan kerja penopang kemajuan perekonomian. Kegagalan dalam pendidikan akan mengubah ‘Bonus Demografi’ menjadi ‘Bencana Demografi’ yang akan membebani perekonomian. Masa kritis peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah 2014-2019 sebagai tahap awal dari masa ‘Bonus Demografi’. Pembangunan kependudukan serta lingkungan juga menjadi titik kritis apakah perekonomian Indonesia mampu melaju untuk menuju ke arah negara maju atau tidak. Mampukah aspek kependudukan dan lingkungan menjadi penguat pertumbuhan ekonomi Indonesia atau malah akan menjadi beban?

IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2019 yang terkait dengan rancangan pembangunan jangka panjang dapat dipandang sebagai proyeksi yang sangat optimistis kalau bukan ambisius. Seperti tersebut di atas, tingkat pendapatan per kapita yang ingin dicapai Indonesia adalah 6.950 dolar AS dengan tingkat pemerataan yang ditunjukkan oleh koefisien gini sebesar 0,35. Pada saat itu, angka kemiskinan diharapkan hanya berkisar 4-5 persen dari total populasi,

dengan tingkat elektrifikasi atau ketersambungan pada listrik sebesar 85 persen. Seluruh pencapaian itu diharapkan terwujud saat Indonesia menanggung beban penduduk 270 juta jiwa.

Optimisme tersebut diperlukan karena tantangan perekonomian Indonesia tidak ringan. Indonesia telah kehilangan momentum terbesarnya untuk tinggal landas karena gagal memanfaatkan ‘ledakan minyak’ pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Momentum Reformasi 1998 juga tak cukup termanfaatkan sebagai pijakan untuk membangun perekonomian baru secara cepat karena tersita oleh euforia politik yang ada. Kesempatan terakhir Indonesia untuk menembus ‘jebakan berpenghasilan menengah’ (*middle income trap*) adalah kurun waktu 10-15 tahun ke depan, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersisa serta mengkapitalisasi sumber daya budaya yang belum banyak dilakukan.

Pengalaman kelam pada masa lampau menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, perekonomian Indonesia sempat menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia terutama dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga awal 1990. Pertumbuhan ekonomi mencapai yang tertinggi pada masa itu, tercatat pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 8,9 persen pada tahun 1991. Masyarakat di akar rumput merasakan kesejahteraan yang relatif baik untuk ukurannya. Namun kemudian semua cenderung terlena oleh keberhasilan yang dipuji oleh para pengamat ekonomi dunia. Pembangunan pertanian serta industri yang mulai menemukan formatnya tidak terus dikembangkan sampai akhirnya terhenti sama sekali begitu terjadi Krisis Moneter 1997-1998.

Setelah terpuruk dengan pertumbuhan minus 13 persen, inflasi mencapai 70 persen, angka kemiskinan 24 persen, perlahan perekonomian Indonesia bangkit hingga membukukan pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen, dan kembali mulai dipuji sejumlah pengamat internasional. Sementara itu, perekonomian dunia masih menghadapi ketidakpastian karena Amerika Serikat masih dalam tahap pemulihan setelah krisis *sub-prime mortgage* 2008 dan sedikit banyak juga krisis fiskal 2013. Sedangkan Eropa belum juga menemukan obat yang pas untuk mengatasi ‘demam’-nya selama dua tahun terakhir. Di tengah keadaan seperti itu, setidaknya terdapat tiga hal besar besar yang mendesak dilakukan untuk pembangunan ekonomi periode 2014-2019.

Pertama, kemajuan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi telah menarik investor dunia baik di sektor keuangan-pasar modal maupun sektor riil. Tantangan 2014-2019 terkait hal ini adalah: (a) Terus meningkatkan kemampuan dunia usaha lokal untuk berkompetisi dan mengambil peran lebih besar untuk memanfaatkan pasar domestik. Gerakan kewirausahaan dan stimulus terhadap pengusaha daerah yang tengah dilakukan perlu lebih diintensifkan. (b) Derasnya aliran investasi asing di pasar keuangan dan pasar modal membuat ekonomi Indonesia lebih terintegrasi dan sensitif terhadap isu ekonomi global. Hal ini tercermin akhir-akhir ini dampak dari kebijakan di Amerika Serikat memengaruhi pelemahan IHSG dan nilai tukar Rupiah. Kecepatan dalam pengambilan kebijakan, kehati-hatian kebijakan fiskal, koordinasi otoritas fiskal-moneter dan tetap menjaga serta meningkatkan fundamental ekonomi merupakan prinsip dasar yang perlu terus dilakukan. Apalagi perkembangan ekonomi-politik-

teknologi dunia lima tahun mendatang akan lebih sulit diprediksi dan pengaruhnya ke ekonomi Indonesia membutuhkan kewaspadaan dan kecepatan menjawab secara kolektif.

Kedua, tantangan pembangunan ekonomi dalam negeri adalah untuk terus mewujudkan masyarakat Indonesia lebih makmur, maju, merata dan berkeadilan. Untuk itu, keseimbangan pembangunan berkelanjutan antara tujuan dan motif ekonomi-sosial-lingkungan hidup juga perlu dirumuskan. Dari sisi fiskal, terus meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak dan non-pajak juga penting untuk mengurangi defisit fiskal. Sejumlah aspek kritis bagi perekonomian Indonesia ke depan seperti ketahanan pangan perlu menjadi prioritas, baik pembangunan pertanian maupun perikanan. Potensi lestari sumber daya ikan laut sekitar 6,6 juta ton per tahun hingga kini belum optimal tergarap, bahkan sering dicuri oleh nelayan tetangga sampai menempatkan negara tetangga sebagai pengeksport ikan yang sangat besar.

Ketahanan energi juga perlu menjadi prioritas Pembangunan Ekonomi 2014-2019 mengingat energi merupakan faktor kunci bisa tidaknya Indonesia melangkah menjadi negara maju. Pembangunan kilang minyak, jaringan pipa gas, serta pembangkit baru untuk listrik merupakan hal mendesak selain pengembangan bahan bakar minyak nabati. Pada saat yang sama, listrik bersumber geothermal, arus laut, hingga PLTN sebagaimana yang dipakai semua negara industri penting dikembangkan bersama dengan pengembangan listrik tenaga surya yang sekarang belum cukup ekonomis.

Pengembangan industri seperti yang telah dimulai lewat kerangka MP3EI yang akan membuka 9,6 juta orang lapangan kerja pada

32 kegiatan utama di enam koridor wilayah perlu dilanjutkan. Pengembangan industri tersebut bukan hanya untuk membuka lapangan kerja, melainkan juga untuk membuat Indonesia menjadi pelaku dan bukan sekadar menjadi pasar, setidaknya untuk pasar domestik. Semua negara besar dan kuat adalah negara industri dengan teknologi tinggi. Pengembangan industri tersebut perlu pula didukung dengan pembangunan konektivitas berupa pelabuhan, bandara udara, jalan, rel kereta api, telekomunikasi, serta infrastruktur lain.

Ketiga, pada periode lima tahun ke depan terdapat agenda penting kawasan dan dunia, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku Desember 2015 dan pelaksanaan Agenda Pembangunan Dunia Pasca-MDGs juga memerlukan perhatian untuk dimasukkan dalam program dan kebijakan periode ini. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) diperlukan karena pembangunan ekonomi secara masif tentu memerlukan dukungan SDM yang cakap dan andal. Pertumbuhan ekonomi satu persen saja memerlukan SDM sebesar 500-600 ribu. Sektor pendidikan perlu terus diperkuat termasuk meningkatkan jumlah lulusan S3. Di Indonesia pada setiap satu juta penduduk terdapat 98 orang bergelar doktor, sedangkan di Malaysia terdapat 300 orang doktor per sejuta penduduk.

Produktivitas tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil juga perlu kita tingkatkan bersama. Arah dan orientasi pendidikan sudah saatnya memberikan ruang pengembangan bagi Vokasi dan Perguruan Tinggi. Desain kurikulum diharapkan semakin mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap mendukung

arah industri nasional. Selain itu, industrialisasi juga membutuhkan dukungan riset dan penelitian tidak hanya dari universitas tetapi juga lembaga-lembaga riset nasional. Pola-pola kemitraan strategis antara Perguruan Tinggi-Lembaga Riset dan Industri perlu kita tingkatkan bersama.

Kelestarian lingkungan juga perlu menjadi perhatian bersama. Aliran investasi ke Indonesia diharapkan juga disertai dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan stabilitas sosial. Investasi dan industrialisasi hanya akan berkelanjutan apabila tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Tentu hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga segenap pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, swasta, LSM dan masyarakat untuk terus menyeimbangkan antara keuntungan ekonomis dan lingkungan serta terjaganya stabilitas sosial-bermasyarakat.

Tantangan nyata ekonomi Indonesia 2014-2019 adalah menembus tingkat pendapatan 6.000 dolar AS per kapita. Nilai tersebut yang dipandang sebagai batas bawah stabilitas politik melalui demokrasi, sedangkan stabilitas tersebut juga diperlukan untuk menjamin kemajuan ekonomi ke tahap berikutnya. Bauran strategi yang dijalankan secara serentak dan saling terintegrasi sungguh diperlukan. Apalagi para ekonom dunia juga mengingatkan bahwa krisis Eropa meyakinkan bahwa teori, konsep, serta paham ekonomi yang ada sekarang sudah kedaluwarsa (*obsolete*) untuk menjawab persoalan nyata. Dunia tidak lagi memerlukan teori besar ekonomi atau pendekatan tunggal karena terbukti tidak efektif.

Yang lebih diperlukan dunia adalah belajar dari pengalaman nyata negara-negara lain yang lebih berhasil menjalankan pembangunan ekonominya. Bagi Indonesia, di antaranya adalah belajar dari Thailand yang mampu menjadikan pertanian dan perikanan sebagai salah satu ujung tombak perekonomiannya; belajar dari Korea Selatan yang tumbuh dari negara miskin menjadi negara industri yang kuat; juga belajar dari China yang tetap merendah meskipun beberapa tahun mendatang hampir pasti bakal menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dunia menggusur Amerika Serikat. Para ekonom dan pejabat China selalu serempak menyebut bahwa langkah China masih sangat panjang untuk dapat menyejahterakan semua penduduk. Warga China masih jauh dari sejahtera dibanding warga dari banyak negara lain. Pada akhirnya, ukuran sebenarnya hasil pembangunan ekonomi adalah seberapa sejahtera seluruh warganya sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Indeks Pembangunan Manusia, dan bukan ukuran lainnya. Ketulusan dan kerendahan hati pelaku pembangunan ekonomi menjadi kuncinya termasuk untuk masa 2014-2019 ini.*

BAB V

— SUMBER DAYA ALAM —

MODAL MENJADI NEGARA BESAR



SUMBER DAYA ALAM

MODAL MENJADI NEGARA BESAR

“Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya”.

~ Soekarno-Presiden RI ke-1 ~

Indonesia merupakan negara yang secara geologis mengandung potensi kekayaan sumber daya alam yang relatif besar. Persoalannya, apakah sumber daya alam tersebut sudah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat, atau lebih banyak dinikmati pihak asing?. Banyak negara memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya. Bahkan, ada negara yang juga merupakan salah satu pemilik cadangan batubara terbesar di dunia, yaitu China, dengan sangat sadar lebih memilih mengimpor

batubara dan gas sebanyak mungkin dari Indonesia daripada mengeruk cadangannya sendiri.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang relatif melimpah, semestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi, bahkan bisa mencapai pertumbuhan '*double digit*'. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia sekitar 3.500 dolar AS, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yakni 5,5 persen. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibanding dengan China dan India yang memiliki beban kependudukan lebih tinggi dan kekayaan sumber daya alam yang lebih rendah dibanding dengan Indonesia.

KEBUTUHAN ENERGI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Sebelum memproyeksikan aspek sumber daya alam Indonesia 2014-2019, setidaknya perlu lebih dahulu mengetahui posisi sumber daya alam dan pengelolaannya selama ini. Setidaknya terdapat tiga bidang terkait dengan sumber daya alam, yakni energi, kehutanan, serta perikanan dan kelautan. Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Energi

Dari segi pemenuhan kebutuhan energi listrik, kondisi saat ini masih cukup memprihatinkan. Selain keandalan masih kurang, seperti sering terjadinya pemadaman, Ratio Elektrifikasi secara nasional, pada saat ini juga masih relatif rendah, yakni sekitar 75-80 persen. Karena kapasitas pasok listrik yang jauh dibawah kebutuhan, maka konsumsi listrik per kapita di Indonesia juga masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 1/6 dari konsumsi listrik

di Malaysia dan sekitar 1/14 dari konsumsi listrik di Singapura. Padahal, sebagian dari listrik di Malaysia dan Singapura digerakkan dari gas yang berasal dari Natuna dan Sumatera Selatan.

Bahkan, untuk daerah penghasil sumber energi batubara dan gas, seperti Kalimantan Timur, justru Ratio Elektrifikasinya masih lebih rendah. Anomali di bidang penyediaan tenaga listrik seperti terjadi di Kalimantan Timur terlihat dari masih banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) di tengah wilayah penghasil batubara dan gas terbesar di Indonesia.

**Tabel 1. Perbandingan Konsumsi Energi Listrik
Beberapa Negara**

PERBANDINGAN KONSUMSI ENERGUI LISTRIK DIBEBERAPA NEGARA					
No.	Negara	Penduduk (JutaJiwa)	Pembangkit (Miliar kWh)	GDP/ Kapita	Listrik per Kapita (kWh/Kapita)
1	Amerika Serikat	307,2	4.167,0	46.300	13.654
2	China	1.340,0	3.256,0	4.900	2.455
3	Jepang	127,1	1.195,0	33.400	8.071
4	Rusia	140,0	1.016,0	14.000	6.435
5	Kanada	33,5	612,6	38.700	17.061
6	Malaysia	25,7	102,9	14.200	3.490
7	Singapura	4,6	41,1	48.500	8.185
8	Thailand	65,9	148,4	7.900	2.079
9	Korea Selatan	48,5	440,0	25.800	8.853
10	Indonesia	240,3	142,4	3.500	591
11	Philipina	97,9	56,5	3.100	588

Sumber : Dewan Energi Nasional (DEN)

Karena elastisitas harga listrik terhadap konsumsi, nilai absolutnya, lebih kecil dari satu atau tidak elastis terhadap harga, dampak

Dalam lima tahun ke depan perlu dilakukan perubahan kebijakan agar pengurangan konsumsi dan subsidi BBM dilakukan secara rasional, komprehensif dan tidak berdampak negatif terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

kenaikan tarif terhadap penurunan konsumsi relatif kecil. Artinya, karena listrik termasuk kebutuhan primer, maka dengan ‘harga berapapun’, listrik tetap akan dibutuhkan atau dibeli oleh masyarakat.

Sementara itu, dalam hal BBM, antrean panjang masyarakat sering terjadi, terutama karena pasokan yang dibatasi kuota. Ini terkait dengan kebijakan harga BBM yang sangat dipengaruhi pertimbangan politis. Anjloknya pro-

duksi minyak mentah ditambah dengan stagnannya kapasitas kilang BBM nasional di tengah meningkatnya konsumsi BBM, telah menggiring bangsa ini menjadi salah satu negara importir migas terbesar di Asia. Dalam lima tahun terakhir ini, Pemerintah melalui BPH Migas berulang kali menggelontorkan gagasan guna menurunkan konsumsi dan subsidi BBM. Mulai dari ide pembatasan berdasarkan tahun pembuatan kendaraan hingga besar cc mesin. Ide terakhir yang saat ini diterapkan adalah dengan memasang alat *Radio Frequency Identification* (RFID) di setiap kendaraan guna memonitor dan menjatah konsumsi BBM setiap kendaraan.

Dalam lima tahun kedepan, perlu dilakukan perubahan kebijakan agar pengurangan konsumsi dan subsidi BBM dilakukan secara rasional, komprehensif serta tidak berdampak negatif terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk perlu dilakukan perubahan

cara perhitungan besaran subsidi BBM, yang selama ini mengacu kepada harga pasar. Ini perlu diubah dengan mengacu kepada konsep “Biaya Pokok BBM” agar tidak melanggar konstitusi dan sejalan dengan praktik lazim dalam dunia bisnis.

Karena produksi minyak mentah dalam negeri terus mengalami penurunan dan kapasitas kilang BBM stagnan di tengah terus meningkatnya konsumsi BBM akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk, maka impor minyak mentah dan BBM terus meningkat. Ketergantungan Indonesia pada energi (minyak mentah dan BBM) impor sangatlah besar. Ketahanan energi Indonesia saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena sangat bergantung pada energi impor.

Berbeda dengan minyak, produksi gas Indonesia masih relatif sangat besar. Namun, di dalam negeri kekurangan pasokan gas hingga saat ini masih terus dialami oleh kalangan industri, pabrik pupuk, pembangkit listrik, dan sektor transportasi. Tata kelola gas yang salah ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pada saat konsumen dalam negeri kekurangan gas, justru ekspor gas dalam jumlah yang besar terus terjadi karena sudah terikat kontrak penjualan jangka panjang.

Bahkan, sebagian dari gas yang diekspor tersebut, yakni dari Papua ke China mengikuti formula harga jual yang sangat merugikan negara dengan menggunakan patokan tingkat harga minyak mentah yang rendah, 25 dolar AS/bbls, kemudian diubah menjadi 38 dolar AS/bbls untuk kontrak jangka panjang, yakni 25 tahun. Harga jual gas ke China jauh lebih rendah dari

harga gas yang dibayar oleh pabrik pupuk. Potensi kerugian dari terjualnya gas dari Tangguh Papua ke China sekitar Rp30 trilyun/tahun.

Sementara kebutuhan energi untuk rumah tangga, yang sebelumnya dipenuhi oleh minyak tanah, kini sudah berhasil dialihkan ke LPG dan telah berhasil menghemat subsidi minyak tanah dalam jumlah besar. Namun, karena produksi LPG dalam negeri tidak bisa mengimbangi lonjakan permintaan, akibatnya sudah lebih 50 persen dari kebutuhan LPG nasional harus diimpor. Dalam lima tahun ke depan harus sudah dimulai pembangunan infrastruktur sistem jaringan pipa gas, terutama di kota-kota besar untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor.

Salah satu penyebab konsumen dalam negeri kekurangan gas, padahal produksi gas nasional relatif melimpah, adalah kurangnya infrastruktur gas. Perusahaan Gas Negara (PGN) yang bertanggung jawab atas pemenuhan konsumsi gas dalam negeri, sudah diprivatisasi. Infrastruktur jaringan pipa, termasuk jaringan untuk gas kota, kurang mendapat prioritas dari PGN karena margin yang kecil. Penyebab lainnya adalah tata niaga gas dalam negeri didesain dengan menempatkan peran perantara yang sangat dominan. *Trader* ‘membeli’ gas dari produsen untuk ‘dijual’ ke konsumen gas.

Bahkan, PGN yang mestinya berperan sebagai penyedia infrastruktur atau jaringan pipa dengan menarik *toll-fee*, kini berperan rangkap sebagai *trader* yang sangat menguntungkan pemegang saham PGN (sebagian besar investor asing) karena ‘margin’ yang besar. Namun, sistem seperti ini berakibat pada

mahalnya harga gas yang dibayar para konsumen gas dalam negeri. Kebijakan *open-access* bagi jaringan pipa yang saat ini sedang diwacanakan, haruslah membuka peluang bagi konsumen gas dalam negeri untuk bisa membeli gas secara langsung dari produsen tanpa harus lewat *trader* agar pasar gas dalam negeri menjadi efisien dan harga gas dalam negeri bisa ditekan, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Masyarakat dunia sudah lama menyadari bahwa ketergantungan yang sangat besar terhadap sumber energi fosil, seperti minyak, gas dan batubara, harus dikurangi karena energi fosil bersifat *non-renewable* (tidak dapat diperbaharui) dan kurang ramah lingkungan.

Negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat, secara serius mendanai penelitian pemanfaatan energi terbarukan, termasuk energi surya, angin, *biofuels* (bahan bakar nabati). Sejauh ini, energi terbarukan sudah banyak dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik, seperti energi surya, angin, dan panas bumi.

Di sektor transportasi, energi ini sudah dipakai dalam bentuk ethanol yang dicampur ke dalam bensin dan biodiesel yang dicampur ke dalam minyak solar. Namun, perannya dalam *energy mix* dunia masih relatif sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,3 persen pada tahun 2012. Energi terbarukan belum menggantikan energi fosil, khususnya BBM, karena biaya produksinya masih lebih mahal dari biaya produksi BBM. Setelah produksi minyak dunia akan mencapai puncaknya, yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 2050-an, barulah peran energi terbarukan punya peluang untuk mulai mendominasi *energy mix* dunia.

Berbeda dengan energi terbarukan, energi baru khususnya nuklir, sudah lebih dulu dimanfaatkan sebagai bahan baku listrik. Data menunjukkan, peran energi nuklir dalam *energy mix* dunia relatif stabil di sekitar 5-6 persen dalam waktu tiga dekade terakhir ini. Meskipun telah terjadi beberapa kecelakaan pembangkit nuklir, seperti di Three Mile Island, Pennsylvania, Amerika Serikat (1979), Chernobyl Russia (1986), dan di Fukushima Jepang (2011), pasokan listrik yang berasal dari pembangkit nuklir masih relatif stabil dan cukup dominan.

Menurut data *Electricity Information* dari *International Energy Agency* (IEA), peran PLTN dari produksi listrik dunia adalah sekitar 13,4 persen (listrik dari batubara, gas, air, BBM, dan Energi Terbarukan berturut-turut sbb: 40,8 persen; 21,3 persen; 16,2 persen; 5,5 persen; dan 2,8 persen). Negara-negara yang menggunakan PLTN saat ini, antara lain, Perancis, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Kanada, Swedia, Belgia, Swiss, Czech Republic, Slovakia, Hongaria, Inggris, Spanyol, Finland, Belanda, Argentina, Brazil, India, Pakistan, dan China.

Dengan meningkatkan perhatian publik terhadap aspek keselamatan, saat ini ada sekitar 50 PLTN baru yang sedang dibangun di seluruh dunia dan mulai beroperasi antara 2013-2017. PLTN-PLTN yang sedang dibangun ini, antara lain di: India, China, Korea, Russia, Argentina, Slovakia, Taiwan, USA, Perancis, Jepang, Romania, Pakistan dan Iran. Sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia telah berpikir untuk menggunakan nuklir sebagai alternatif energi sehingga dibentuklah Badan Tenaga

Atom Nasional (BATAN). Namun sampai sekarang, belum ada upaya sungguh-sungguh untuk memanfaatkan anugerah Tuhan berupa energi nuklir tersebut.

2. Kehutanan

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 130 juta hektare kawasan hutan, yang merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Terlalu naif membiarkan potensi sumber daya hutan yang melimpah di negeri ini tanpa pengelolaan yang memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor kehutanan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena memainkan peran vital dan sulit tergantikan, antara lain, sebagai penyangga sistem kehidupan dan faktor penentu perubahan iklim, motor penggerak perekonomian, pembuka keterisolasian wilayah, dan penciptaan lapangan kerja.

Ekosistem hutan berperan sangat penting sebagai penyangga sistem kehidupan. Deforestasi dan degradasi hutan berdampak pada rusaknya penyangga sistem kehidupan yang bermuara pada timbulnya berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan kekeringan. Kerusakan hutan dapat terjadi karena, *pertama* faktor alam, misalnya, cuaca kering dan panas ekstrim, petir, serta serangan hama dan penyakit. *Kedua*, faktor manusia, seperti pembalakan liar, perambahan, dan pembakaran yang tidak terkendali dalam pembukaan lahan untuk ladang dan perkebunan. Kebakaran hutan dapat menjadi masalah sangat serius karena dampaknya tidak hanya berskala nasional, tetapi juga lintas negara.

Isu kebakaran hutan menjadi sorotan internasional karena terkait erat dengan emisi karbon yang diduga menjadi faktor penyebab perubahan iklim global.

Satu dekade terakhir ini, masalah perubahan iklim menjadi isu strategis yang menembus batas negara. Peningkatan emisi gas rumah kaca diyakini sebagai penyebab naiknya suhu bumi. Berakhirnya Kyoto Protocol telah menggeser isu penyebab pemanasan global dari negara-negara industri maju yang menggelontorkan emisi dari cerobong industrinya ke negara-negara berkembang pemilik hutan. Degradasi dan deforestasi hutan semakin kencang dituding sebagai biang emisi, sementara masalah emisi industri semakin sayup tak terdengar. Arah konstelasi politik ekonomi global telah mematok hutan sebagai arena pertarungan isu perubahan iklim. Tak pelak, tuntutan terhadap pengelolaan hutan lestari semakin nyaring.

Pemanfaatan kayu dari pengelolaan hutan lestari merupakan salah satu kegiatan paling ramah lingkungan yang semestinya didukung. Pemanfaatan kayu untuk kebutuhan sehari-hari pasti jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan plastik atau logam. Lebih dari itu, tren pemanfaatan kayu akan memberikan sinyal positif kepada para pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Oleh karena itu, kebijakan moratorium penebangan yang tidak terfokus, tidak hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berbahaya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Salah satu fungsi penting hutan dalam sistem iklim adalah peran sentralnya sebagai regulator siklus karbon. Dalam siklus karbon, hutan berperan dalam proses penyerapan karbon (*carbon*

sequestration) dan penyimpanan karbon (*carbon stocking*). Berbeda dengan anggapan umum yang memandang negatif pengelolaan hutan produksi, apabila dicermati, pengelolaan hutan produksi justru berpotensi menjadi salah satu mekanisme yang efektif dalam upaya penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, skema pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management/SFM*) di hutan produksi melalui mekanisme TPTI

(Tebang Pilih Tanam Indonesia), TPTII (TPTI Intensif/Silin), THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan), dan Multi Sistem Silvikultur (MSS) serta berbagai sistem pendukungnya, seperti RIL (*Reduced Impact Logging*), harus didorong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga 26 persen pada tahun 2020 dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Dalam konteks ini, sektor kehutanan memikul tanggung jawab penurunan emisi lebih dari 87 persen dari total target penurunan emisi nasional (Stranas REDD+ 2012; Ridwan 2012).

Sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam implementasi *Triple Track Strategy* pembangunan ekonomi nasional, yang berorientasi pada *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-employment*

Sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam implementasi *Triple Track Strategy* pembangunan ekonomi nasional, yang berorientasi pada *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-employment* dengan memperhatikan aspek lingkungan (*pro-environment*).

dengan memperhatikan aspek lingkungan (*pro-environment*). Peran strategis sektor kehutanan sebagai motor penggerak perekonomian tidak dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, tetapi dari kuatnya keterkaitan (*linkages*) sektor kehutanan terhadap sektor-sektor perekonomian lain dan efek pengganda (*multiplier effects*) sektor kehutanan terhadap *output*, pendapatan, dan tenaga kerja. Nurrochmat *et al.* (2007) serta Nurrochmat dan Hasan (2012) menegaskan, sektor kehutanan berperan sentral dalam menggerakkan perekonomian nasional karena memiliki nilai keterkaitan ke depan (*forward linkages*) terbesar kedua dari 21 sektor perekonomian, setelah pertanian dan perkebunan.

Pembangunan sektor kehutanan berkontribusi nyata dalam membuka keterisolasian wilayah melalui kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang dilakukan oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kontribusi sektor kehutanan dalam membuka keterisolasian wilayah sudah dirasakan sejak dimulainya pengusahaan hutan di suatu wilayah tertentu. Setelah izin operasional pengusahaan hutan mulai diberikan, beberapa wilayah dapat dihubungkan dengan sistem transportasi darat yang berasal dari jalan angkutan kayu yang tidak diperkeras. Pada saat ini, jalan-jalan hutan di berbagai daerah sudah diperkeras dengan aspal dan memiliki kualitas baik dan banyak di antaranya telah menjadi jalur darat yang menghubungkan wilayah, baik antar-provinsi maupun antar-daerah.

Dengan meningkatnya intensitas kegiatan pengusahaan hutan pada periode 1980-pertengahan 1990, maka jumlah jaringan

jalan hutan yang dibangun semakin bertambah. Akibatnya, tingkat pembukaan wilayah (keterhubungan) antara satu daerah dan daerah lainnya di sekitar lokasi perusahaan hutan pun meningkat. Dengan demikian, jumlah daerah yang terisolasi di wilayah sekitar perusahaan hutan akan semakin berkurang. Perkiraan total panjang jalan hutan yang sudah dibangun di wilayah perusahaan hutan di Indonesia sampai dengan tahun 2008 adalah 351.960 km, lebih panjang dari jalan umum yang dibangun pemerintah, yaitu 249.094 km sampai dengan tahun 2006 (Budiaman *dalam* Nurrochmat & Hasan 2012). Oleh karena itu jelas, terlepas dari segala kekurangannya, keberadaan unit perusahaan HPH dan HTI telah berperan penting dalam membuka keterisolasian wilayah di berbagai pelosok nusantara melalui pembangunan infrastruktur.

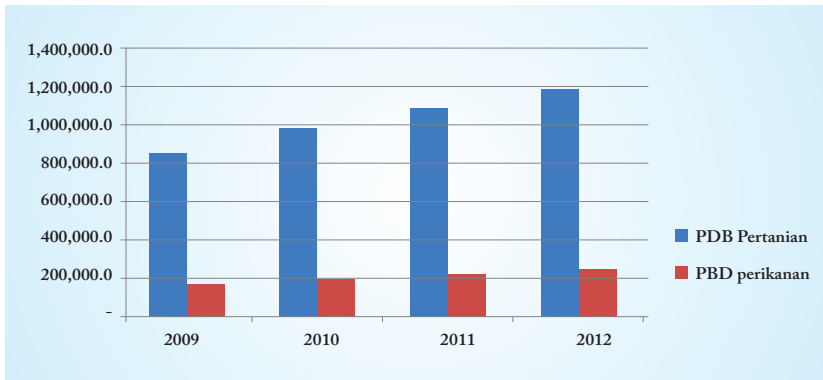
Penyerapan tenaga kerja di sektor kehutanan cukup besar dan menempati urutan ketujuh dari keseluruhan sektor perekonomian. Sektor-sektor penyerap tenaga kerja terbesar, menurut data Sakernas: (1) tanaman pangan 31,7 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, (2) perdagangan 17,8 persen; (3) jasa 12,5 persen; (4) perkebunan 5,6 persen; (5) transportasi 5,1 persen; (6) konstruksi 4,6 persen; serta (7) kehutanan dan industri kehutanan 4,0 persen (BPS 2008). Tidak jauh berbeda dengan data Sakernas, Hadianto (2010) yang menyatakan bahwa dari total lapangan kerja baru yang tercipta di seluruh sektor perekonomian, sektor kehutanan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru sebesar 4,7 persen atau menempati urutan keenam dari seluruh sektor. Sementara sektor industri kehutanan, seperti industri kayu

gajian, memberikan kontribusi sebesar 2,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja, industri bubur kertas 1,5 persen dan industri mebel sebesar 1,1 persen.

3. Kelautan dan Perikanan

Dalam konteks pembangunan perikanan, total Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan pada 2009 mencapai Rp 176.620 Milyar, yang kemudian meningkat menjadi Rp 255.332,3 milyar pada 2012 (BPS, 2013). Kontribusi PDB perikanan relatif dominan dibandingkan dengan sektor ekonomi lain di bidang pertanian, seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.

**Grafik 1. Perkembangan PDB Perikanan
Relatif terhadap PDB Pertanian**



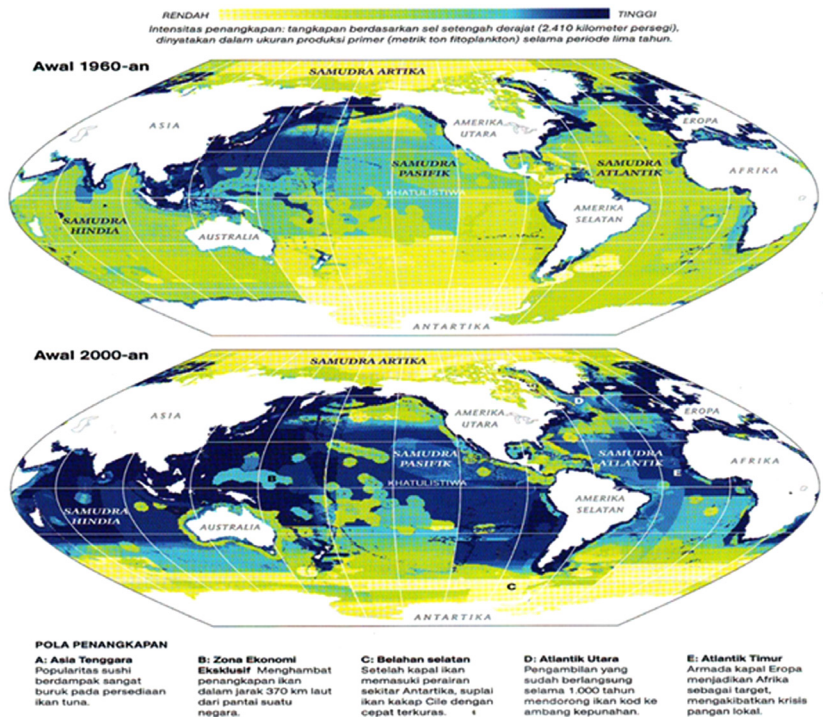
Sumber: Badan Pusat Statistik 2013

Secara umum, intensitas penangkapan ikan global menunjukkan gejala semakin tinggi. Gambar berikut menunjukkan gejala tersebut, di mana pada 1960-an, penangkapan ikan masih relatif rendah yang ditandai dengan luas *fishing ground* yang relatif

kecil. Pada awal 2000-an, penangkapan ikan semakin tinggi intensitasnya dan mulai mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam menentukan arah ke depan pembangunan perikanan karena secara geografis dan ekonomis, Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perikanan dunia.

Ladang Penangkapan Ikan

Pembukaan ladang tangkap ikan baru setengah abad yang lalu telah menyebabkan terjadinya ledakan tangkapan dunia, seiring menyebarnya armada kapal ikan dengan kapasitas yang meningkat ke seluruh penjuru laut bebas. Konsekuensinya tergambar jelas di setiap lautan.



Sumber: Tren Perikanan Global (National Geographic, 2012)

Dalam konteks perikanan global, Indonesia merupakan pemain penting sebagai negara produser perikanan besar di dunia bersama

Indonesia termasuk negara yang memiliki laut yang paling luas di Asia. Asumsi optimistis, dengan rata-rata pertumbuhan 7 persen per tahun, maka tahun 2030 kontribusi sektor perikanan dan kelautan diharapkan mencapai US \$ 40 milyar (MGI, 2012).

China, Peru dan Amerika Serikat (FAO, 2012). Negara lain yang juga menjadi produser perikanan dunia adalah, India, Rusia, Jepang, dan Norwegia. Kontribusi sektor perikanan laut Indonesia mencapai 6,1 persen dari produksi dunia dan masih di bawah China 16 persen dan Peru 8,8 persen (FAO, 2013). Sejak 1970 sampai 2011, pertumbuhan produksi perikanan Indonesia mencapai 5,05 persen setiap tahunnya.

Dalam konteks Asia dan Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang memiliki laut yang paling luas. Asumsi

optimistis, dengan rata-rata pertumbuhan 7 persen per tahun, maka pada tahun 2030 kontribusi sektor perikanan dan kelautan diharapkan mencapai 40 milyar dolar AS (MGI, 2012). ASEAN *Economic Community* (AEC) juga menjadi salah satu momentum pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pembangunan perikanan dari saat ini. Ini dalam konteks *'head to head'* keragaman perikanan antara Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN.

Tingkat produktivitas per kapal di Indonesia hanya 6,7 ton per tahun, Thailand 137,86 ton per tahun, Vietnam 19,48 ton per tahun, dan Malaysia lebih dari 30 ton per tahun. Dalam kontribusi terhadap PDB negara, Vietnam mencapai 21 persen, Malaysia 10 persen, dan Thailand 10 persen, sementara Indonesia hanya 3 persen. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 33.768.000

jiwa (13 persen), di Vietnam mencapai 12.440.000 jiwa (5 persen), China mencapai 11.750.700 jiwa (5 persen), Filipina mencapai 11.247.000 jiwa (4 persen), dan Myanmar 6.209.340 jiwa (2 persen). Mereka sebagian besar tinggal di pesisir.

Dengan produksi ketiga terbesar dunia, seharusnya usaha perikanan di Indonesia mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar pada masyarakat dan nelayan, serta menyumbang PDB yang signifikan terhadap negara. Sementara itu, dalam produksi perikanan budidaya, Indonesia juga tertinggal dari China, India, dan Vietnam. Luas seluruh lahan perairan umum di Indonesia tercatat sekitar 13,85 juta ha, terdiri dari 0,05 juta danau buatan (*man-made lake*), 1,8 juta ha danau alam (*natural lake*) serta 12,0 juta ha sungai dan rawa banjir (*flood plain*). Adapun potensi total luas perairan umum, kolam, dan mina padi (sawah) yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan budidaya adalah 139.336 ha, 541.100 ha, dan 1.538.379 ha (DKP, 2007).

Selain itu, lahan pesisir potensial untuk tambak udang ada sekitar 1,22 juta ha. Dan baru diusahakan 400.000 ha dengan produktivitas rata-rata 0,6 ton/ha/tahun. Sekitar 24 juta ha perairan laut dangkal cocok untuk usaha budidaya laut (*mariculture*) berbagai komoditas, seperti ikan kerapu, baronang, gobia, kerang mutiara, teripang, abalone, dan rumput laut yang bernilai ekonomi tinggi, dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun. Produksi perikanan budidaya juga menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan perikanan tangkap. Pertumbuhan sektor perikanan Indonesia mencapai 15 persen per tahun sejak 1970 sampai 2011.

Dalam perikanan budidaya, China berkontribusi 61 persen terhadap produksi perikanan budidaya dunia, India sebesar 7 persen, Vietnam 4,5 persen Indonesia 4,3 persen, dan Thailand 1,6 persen. Negara lainnya di bawah satu persen dari produksi perikanan budidaya dunia (FAO, 2013). Sejumlah negara ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia menjadi pesaing untuk komoditi udang, patin, dan lele yang memasuki pasar Indonesia.

TANTANGAN KE DEPAN

Tata kelola yang salah dari sumber daya migas, mineral dan batubara nasional saat ini merupakan masalah besar yang dihadapi oleh industri energi nasional, terutama setidaknya dalam tiga tahun terakhir ini. Hal ini berdampak langsung pada melemahnya ketahanan energi bangsa ini. Meski secara geologis, negara ini sangat kaya akan sumber daya energi primer yang berupa hidrokarbon (migas dan batubara), saat ini sekitar 50 persen dari kebutuhan migas nasional harus diimpor dari luar, sekitar 75 persen produksi batubara dan sekitar 55 persen produksi gas diekspor dengan harga sangat murah, sementara dalam negeri kekurangan pasokan gas dan listrik.

Tantangan terhadap sistem tata kelola yang salah itu ditunjukkan oleh fakta, antara lain, produksi minyak mentah yang sangat rendah dan terus turun di tengah meningkatnya kebutuhan karena faktor pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Padahal, secara geologis, potensi yang berbentuk sumber daya untuk minyak dan gas sangatlah besar di perut bumi Indonesia. Harga minyak dunia yang sangat tinggi dalam belasan tahun terakhir ini, semestinya akan mampu mendorong dilakukannya investasi

pencarian cadangan baru (eksplorasi), sehingga bisa mempertahankan produksi pada level 1.5 juta bbls/hari, bahkan bisa lebih tinggi lagi mengingat perkembangan teknologi sektor hulu sangat signifikan. Tapi faktanya, produksi minyak sangat rendah.

Meskipun konsumsi BBM terus meningkat secara signifikan setiap tahun, ternyata dalam belasan tahun terakhir ini, kapasitas kilang BBM relatif stagnan pada level sekitar 1.05 juta bbls/hari, karena Pemerintah/Pertamina tidak mau membangun kilang dengan alasan 'margin' yang kecil. Padahal, kapasitas kilang BBM yang dibutuhkan agar pada 2013 tidak tergantung pada import BBM, adalah sekitar 1.6 juta bbls/hari. Ini merupakan tantangan besar yang harus segera ada solusinya untuk menghindari ambruknya ekonomi bangsa apabila terjadi gangguan terhadap arus impor BBM dari luar negeri. Sebab, lebih 40 persen kebutuhan BBM saat ini tergantung dari luar, khususnya Singapura.

Produksi minyak mentah yang rendah dan kapasitas kilang BBM yang stagnan merupakan tantangan berat. Sebab, hal ini akan meningkatkan ketergantungan pada migas impor yang semakin besar. Dan ini akan terus mendorong membengkaknya defisit neraca perdagangan migas nasional. Sementara itu, terus dikapalkannya *Liquefied Natural Gas* (LNG) Tangguh ke China meski dengan harga yang sangat murah, merupakan tantangan yang harus ada solusinya agar bangsa ini tidak terlalu rugi. Selain itu, juga agar dapat lebih memastikan terpenuhinya kebutuhan gas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan biaya pokok dan subsidi listrik, serta dapat mengurangi impor dan subsidi BBM melalui percepatan konversi BBM ke gas.

Infrastruktur gas dalam negeri yang langka ditambah dengan struktur pasar gas yang sangat tidak efisien karena peran dominan perantara, merupakan tantangan yang harus segera dipecahkan. Dengan demikian, konsumen gas dalam negeri bisa memperoleh gas yang cukup dan tidak menjadi 'obyek' para perantara. Konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang stagnan juga, antara lain, disebabkan oleh minimnya infrastruktur gas, sehingga ketergantungan pada BBM semakin besar yang bermuara pada membengkaknya subsidi BBM. Semakin tingginya ketergantungan pada *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) impor adalah tantangan dalam lima tahun ke depan. Harus ada solusi yang dapat menekan ketergantungan pada impor, antara lain, dengan menyiapkan pemakaian gas alam lewat pipa yang bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Tantangan kebijakan energi listrik nasional saat ini adalah kebijakan sumber daya energi primer (gas, batubara) dengan kebijakan kelistrikan nasional tidak selaras. Kekayaan gas dan batubara yang relatif melimpah dan merupakan bahan baku listrik yang relatif sangat murah, ternyata didorong dan disedot secara habis-habisan untuk diekspor. Pemerintah lalu 'terpaksa' menggunakan BBM yang sangat mahal dan dalam jumlah besar untuk menghasilkan tenaga listrik. Dengan alasan mendorong energi baru dan terbarukan (EBT), PLN dipaksa membeli listrik swasta (IPP) berbahan baku panas bumi (geothermal) yang juga sangat mahal, jauh di atas harga jual listrik (TDL) ke masyarakat.

Tantangan terhadap status kepemilikan cadangan migas dan bahan tambang di perut bumi sekaligus merupakan peluang menjadi sumber pembiayaan pembangunan secara masif pada masa yang akan datang. Karena sistem tata kelola yang ada saat ini tidak cukup

tegas mengatur masalah kepemilikan atas cadangan yang ada di perut bumi, ada indikasi yang kuat, kontraktor migas dan tambang asing menggunakan cadangan migas dan bahan tambang untuk meminjam uang di bank guna membiayai pengembangan lapangan migas/tambangnya. Praktik pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi seperti ini sangat terbuka, mengingat hingga saat ini tidak ada satu pihakpun, baik pemerintah maupun BUMN migas dan tambang, yang membukukan aset berupa cadangan migasnya dalam Laporan Keuangan.

Tantangan di sisi permintaan adalah bagaimana agar konsumsi energi bangsa ini tidak terlalu bergantung pada minyak/BBM. Diversifikasi energi yang sudah dicanangkan sejak 1986, terutama program konversi ke gas, ternyata masih sangat tertinggal. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dan biaya produksi, pengembangan energi baru dan terbarukan harus diperhatikan agar tidak timbul kesan ‘gali lubang timbun lubang’. Energi pengganti BBM yang berbiaya lebih mahal dari BBM hanya akan melanggengkan subsidi energi yang harus ditanggung APBN. Teknologi PLTP (geothermal) harus didorong agar listrik yang dihasilkannya tidak terlalu mahal, seperti yang terjadi saat ini. Infrastruktur dan biaya listrik yang mahal juga akan menjadi penghambat dari program ‘mobil listrik’ yang masih membutuhkan listrik.

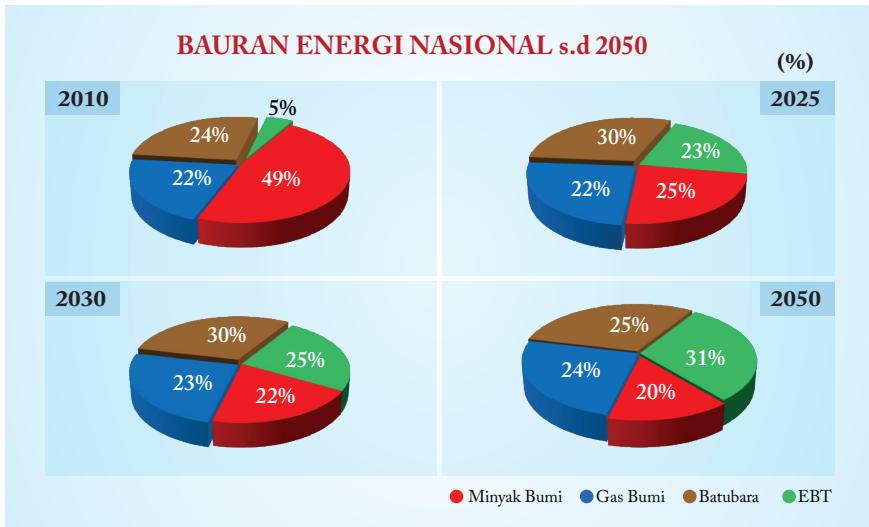
Sistem tata kelola yang bertentangan dengan konstitusi saat ini, ternyata masih tetap dipertahankan oleh Pemerintah. Lembaga BP Migas yang dinilai melanggar Konstitusi dan sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan MK No.36/PUU-X/2012, ternyata tetap dipertahankan dengan memakai baju lain, yakni SKK Migas, yang akhirnya juga terbukti merugikan

negara. Sebab, substansi kelembagaan SKK Migas sama dengan BP Migas, yakni sama-sama lembaga pemerintah dan non-bisnis, sehingga untuk menjual migas bagian negara harus menunjuk *trader*. Selain itu, juga tidak bisa melanjutkan operasi produksi Blok-blok Migas yang akan selesai kontrak, termasuk Blok Mahakam, yang akan selesai pada 2017 dan akan menyusul Blok-blok besar lainnya, seperti Blok Rokan, yang menghasilkan produksi minyak mentah terbesar di Indonesia (Minas dan Duri).

Tantangan dalam lima tahun ke depan adalah bagaimana mengubah sistem yang berpola 'B to G' menjadi 'B to B'. Tapi, dalam Rancangan Perbaikan UU Migas No.22/2001 yang saat ini sedang dibahas di DPR, yang terjadi justru pola 'B to G' akan dipertahankan dengan memperkuat legalitas eks BP Migas/SKK Migas, meski dengan nama berbeda.

Tantangan EBT ke depan adalah bagaimana meningkatkan peran EBT dalam bauran energi nasional. Dalam Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah sudah menetapkan sasaran *energy mix* yang hendak dicapai pada 2025. Peran minyak diupayakan terus menurun, sementara peran EBT akan terus meningkat. Minyak turun dari 49,7 persen pada 2010 menjadi sekitar 23,7 persen pada 2025. Sementara EBT akan naik dari hanya 5,7 persen pada 2011 menjadi sekitar 25,9 persen pada 2015. Sasaran penggunaan EBT pada 2025 yang relatif sangat besar yakni 25,9 persen adalah tantangan dalam pengembangan EBT karena biaya produksi masih belum mampu bersaing dengan energi fosil. Hanya PLTN skala besar dengan biaya produksi sekitar 0,6 dolar AS per kwh yang dapat bersaing dengan energi fosil.

Grafik 2. Bauran Energi Nasional 2010-2050



Sumber : Dewan Energi Nasional (DEN)

Tantangan pengembangan Energi Terbarukan, khususnya Bahan Bakar Nabati, di samping soal biaya produksi dan jaminan pasokan jangka panjang, juga bahan bakunya bersaing sebagai bahan pangan, seperti biodiesel yang berasal dari kelapa sawit. Bahan Bakar Nabati dari non-pangan hingga saat ini kurang berkembang karena ketidakjelasan dan kurang koordinasi antara kegiatan di hulu (tata kelola/produksi tanaman bahan baku, seperti tanaman jarak) dan kegiatan di hilir, yang memproses bahan baku dan distribusinya.

Sedangkan tantangan pembangunan PLTN terkait dengan masalah keamanan pembangkit. Terjadinya kecelakaan PLTN di Three Mile Island, Chernobyl dan Fukushima telah berdampak sangat luas terhadap persepsi masyarakat akan keamanan PLTN, meskipun sebenarnya jumlah korban tidak sebesar yang diberitakan

dan masalah keamanan pembangkit terus ditingkatkan. Sebagai antisipasi untuk tidak terulangnya kecelakaan PLTN di Fukushima, maka lokasi pembangkit PLTN harus sejauh mungkin menghindari risiko gempa dan tsunami. Untuk Indonesia, kebutuhan akan sumber energi nuklir termasuk untuk keperluan pembangkit listrik sebenarnya sudah disadari sejak Pemerintahan Presiden Soekarno dengan adanya BATAN. Namun, program pembangunan PLTN yang sudah direncanakan, berulang-ulang ditunda, terutama karena psikologis masyarakat yang dinilai ‘belum siap’

PLTN sungguh diperlukan oleh Indonesia untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan listrik terus melonjak. Saat ini, masih ada sekitar 20 persen penduduk yang belum memperoleh listrik. Sedangkan yang sudah teraliri listrik, masih sering mengalami pemadaman. Investasi banyak terhambat karena kekurangan kapasitas listrik, termasuk jaringan transmisi dan distribusi yang masih kurang yang sering kali terhambat masalah pembebasan lahan. Maka, pemenuhan kebutuhan listrik yang terus meningkat ini tidak boleh terkonsentrasi atau bergantung hanya pada satu jenis sumber energi, seperti hanya sumber energi fosil, atau tenaga air, atau gas. Sewajarnya, Indonesia mulai memogramkan kembali PLTN sebagai energi murah karunia Tuhan untuk menyejahterakan masyarakat, sebagaimana telah dinikmati negara-negara maju.

Sementara itu, dalam bidang kehutanan, ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pembangunan kehutanan dapat berjalan baik serta menjamin keberlangsungan peran strategis sektor kehutanan saat ini dan masa mendatang, yaitu: meningkatkan

daya saing dan minat investasi kehutanan, meningkatkan kesiapan menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China, memangkas dan menyederhanakan pungutan kehutanan, dan membenahi sistem tenurial kehutanan.

Besarnya potensi sumber daya hutan adalah keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Namun, keunggulan komparatif tersebut tidak dapat menghasilkan manfaat optimal jika sektor kehutanan tidak dapat mengatasi beberapa permasalahan mendasar, di antaranya, rendahnya daya saing akibat ketidakpastian pasokan bahan baku kayu bulat dan ketidakefisienan produksi akibat mesin-mesin yang sudah tua.

Selain itu, munculnya beberapa pemain baru di pasar internasional, juga membuat tantangan pengembangan industri kehutanan nasional semakin besar. Tantangan lainnya yang juga menjadi perhatian utama pembangunan kehutanan adalah rendahnya minat investasi di sektor kehutanan dan di industri kehutanan. Investasi di sektor berbasis kehutanan selama satu dekade ini cenderung mengalami penurunan (BKPM 2009).

Rendahnya minat investasi di sektor kehutanan ini diduga karena beberapa faktor, di antaranya (Nurrochmat dan Hasan 2012): *Pertama, return of capital* yang relatif lama karena investasi di sektor kehutanan membutuhkan waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan investasi di sektor lainnya. *Kedua, high risk investment*. Bisnis sektor kehutanan pada umumnya dianggap berisiko tinggi karena selain membutuhkan waktu yang lama, juga banyak terjadi konflik tenurial terkait hak pemanfaatan lahan, terutama dengan masyarakat lokal. *Ketiga, high risk economy*. Secara umum, masih banyak terdapat

jenis pungutan bagi para investor yang melakukan usaha di sektor kehutanan.

Dalam *roadmap* revitalisasi industri kehutanan disebutkan bahwa kebutuhan terhadap kayu bulat untuk memenuhi pasokan bahan baku industri kayu olahan dalam negeri saat ini mencapai 50-60 juta m³ per tahun, sementara pasokan kayu bulat hanya sekitar 25-30 m³. Artinya, terjadi kesenjangan permintaan dan pasokan kayu bulat sekitar 25-30 m³ per tahun atau sekitar 50 persen dari total kebutuhan kayu bulat. Kesenjangan ini disinyalir menjadi salah satu faktor pemicu maraknya *illegal logging* dan pasar kayu gelap (Nurrochmat dan Hasan 2012).

Banyaknya pungutan kehutanan merupakan disinsentif investasi. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kehutanan, sedikitnya ada dua hal penting yang dapat ditempuh: *pertama*, memberikan insentif fiskal dengan menertibkan pungutan-pungutan ilegal serta memangkas/menyederhanakan pungutan-pungutan legal, dan *kedua*, memberikan jaminan kepastian usaha, terutama yang menyangkut regulasi masalah tenurial (Nurrochmat dan Hasan 2012).

Biaya bisnis di sektor kehutanan dirasakan masih sangat tinggi dan implementasinya cukup rumit. Selain masih terdapat praktik pungutan liar, terdapat pula puluhan jenis pungutan legal yang terkait dengan bisnis kehutanan. Beberapa jenis pungutan sektor kehutanan diatur dalam Undang- Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, di antaranya, Iuran Izin Usaha, Dana Jaminan Kinerja, Dana Jaminan Reklamasi dan Rehabilitasi, Dana Investasi Pelestarian Hutan, Dana

Investasi Litbang, Diklat, dan Penyuluhan, serta Dana Kompensasi atas Kerugian Masyarakat (Nurrochmat *et al.* 2010). Selain terkena satu atau lebih jenis pungutan PNBP, pelaku usaha kehutanan juga dikenakan beragam pungutan lainnya, baik berupa pajak maupun retribusi yang jumlahnya cukup besar.

Ada dua pengertian yang berubah secara mendasar setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Kehutanan. *Pertama*, kawasan hutan memerlukan penetapan, bukan sekadar penunjukan. *Kedua*, status hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara. Oleh karena itu, setelah putusan Mahkamah Konstitusi terjadi pergeseran tafsir terhadap hutan, yang berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat (hak ulayat) dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara. Namun perlu digarisbawahi, sesungguhnya pengertian kawasan hutan tidak identik dengan hutan negara. Status kepemilikan kawasan hutan atau “hutan tetap” dapat diberikan kepada siapa saja sepanjang mengikuti kaidah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya.

Persoalan tumpang-tindih perizinan atau perambahan kawasan hutan, tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar persoalan hukum yang dapat diatasi hanya dengan pendekatan legalistik-formal, seperti pengukuhan tata batas. Dalam konteks tenurial, klaim kebenaran pada umumnya hanya melekat atau dilekatkan pada aspek legalitas dan bukan legitimasi. Rendahnya legitimasi atas penguasaan lahan dalam beberapa kasus, sama sekali tidak berkaitan dengan hadirnya

rezim tata batas “*de jure*”, melainkan sejauh mana tata batas tersebut sesuai dengan pemahaman dan praktik penguasaan lahan “*de facto*” yang berlaku dan diakui oleh masyarakat di suatu daerah.

Dalam bidang perikanan dan kelautan terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan ke depan. Di antaranya adalah keterkaitannya dengan ketahanan pangan, di mana permintaan produk perikanan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Kebutuhan domestik terhadap produk perikanan diperkirakan akan mencapai 4 juta ton per tahun. Sementara itu, untuk kelangsungan ekspor menuju pasar utama, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa perlu memenuhi persyaratan ketat yang sering tidak dapat dipenuhi di tingkat lapangan. Perhitungan antara permintaan (*demand*) dan penawaran atau produksi (*supply*) juga sering tidak selaras, sehingga melahirkan ‘permintaan semu’ yang kemudian dijawab dengan cara pragmatis, yakni membuka keran impor. Tata kelola bidang perikanan juga masih jauh dari sempurna untuk mewujudkan kelestarian sumber daya perikanan yang benar-benar baik.

Dalam aspek kelautan, masalah kerusakan ekosistem pesisir dan laut masih menjadi tantangan. Sebagai wadah bagi kegiatan berbasis kelautan, kesehatan ekosistem menjadi penting untuk ditingkatkan kualitasnya. Untuk tata batas kelautan, masih ada beberapa perjanjian perbatasan antar-negara yang perlu diselesaikan untuk menjamin tata kelola laut nasional. Belum sempurnanya format pengelolaan pulau-pulau kecil, khususnya yang terkait dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau terdepan dan perbatasan, juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Selain itu, pengembangan Iptek yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan juga belum optimal.

SISTEM DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Jauh sebelum Indonesia merdeka, para ahli geologi mancanegara sudah meyakini bahwa di bumi Indonesia tersimpan sumber daya alam berupa minyak, gas, bahan-bahan mineral dan batubara yang melimpah. Hal ini karena posisi geologis Indonesia berada di pertemuan lempeng Eurasia, Australia dan Pasifik serta

luas wilayah geografi darat dan laut hampir menyamai luas wilayah Amerika Serikat dan Benua Eropa. Potensi migas dan tambang bisa terdapat di darat (*onshore*) dan di lepas pantai (*offshore*). Inilah yang menjadi salah satu alasan, mengapa Indonesia jauh sebelum merdeka menjadi salah satu kawasan di dunia yang selalu diincar untuk diduduki atau minimal sumber daya alamnya dapat dikuasai dan dieksploitasi.

Secara geologis, perkiraan jumlah sumber daya migas nasional saat ini adalah sekitar 56 milyar barrels untuk minyak mentah dan sekitar 334 tcf untuk gas yang terjebak di sekitar 120 cekungan sedimen. Sedangkan yang berupa cadangan yang siap diproduksi saat ini relatif kecil, yakni sekitar 3,7 milyar barrel dan yang berupa cadangan potensial sekitar 4,0 milyar barrel. Apabila tidak ditemukan tambahan cadangan baru, sedangkan cadangan yang ada terus diproduksi pada tingkat produksi saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara produsen tertua minyak dunia yang cadangan minyaknya hanya sekitar 0.20 persen dari cadangan minyak dunia.

Dengan posisi geologis yang strategis, Indonesia jauh sebelum merdeka menjadi salah satu kawasan di dunia yang selalu diincar untuk diduduki atau minimal sumber daya alamnya dapat dikuasai dan dieksploitasi.

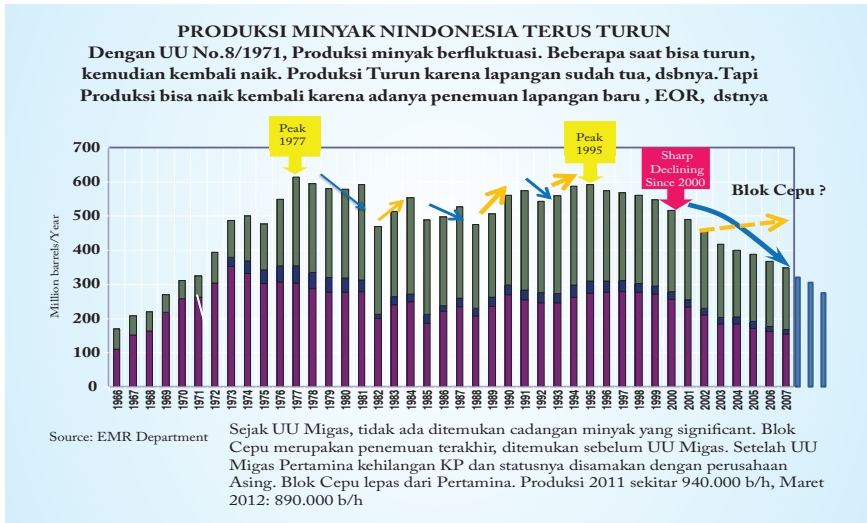
Selama 12 tahun terakhir ini, nyaris tidak ditemukan cadangan baru yang berarti. Maka, hampir dapat dipastikan, produksi minyak nasional yang pada Oktober 2013 sekitar 820.000 bbls/hari akan sangat sulit, bahkan mustahil untuk ditingkatkan ke level swasembada untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional sekitar 1.6 juta bbls/hari. Meskipun Indonesia mempunyai potensi sumber daya minyak yang relatif besar yakni 56 milyar barrel, kalau tidak ada upaya-upaya perbaikan atas sistem tata kelola, Indonesia hampir pasti akan tetap menjadi negara *net-oil importer* secara abadi. Dengan demikian, kebutuhan impor minyak mentah menjadi kebutuhan permanen.

Grafik 3. Penurunan Cadangan Minyak Bumi Indonesia



Sumber : Dewan Energi Nasional (DEN)

Grafik 4. Penurunan Produksi Minyak Bumi



Sumber : Dewan Energi Nasional (DEN)

Harapan untuk menaikkan produksi minyak saat ini hanya tersedia melalui dua opsi. Yaitu, tambahan produksi yang berasal dari penemuan cadangan baru dan tambahan produksi yang berasal dari optimalisasi lapangan-lapangan lama, misalnya dengan menerapkan tehnik produksi EOR (*enhanced oil recovery*). Satu-satunya cadangan blok baru yang bisa diandalkan untuk menaikkan produksi minyak nasional adalah Blok Cepu, yang akan mampu menambah produksi sekitar 160.000 bbls/hari. Blok Cepu ini ditemukan sebelum sistem tata kelola diatur dengan UU Migas No.22/2001. Artinya, dalam tempo lima tahun ke depan, produksi minyak nasional maksimal hanya akan bisa mencapai sekitar 1.0 juta bbls/hari. Padahal, pada tahun 2019 kebutuhan minyak nasional sekitar 1.9 juta bbls/hari.

Untuk mengkonversi sumber daya menjadi cadangan yang siap diproduksi, diperlukan investasi eksplorasi. Persoalannya, dalam waktu sekitar 13 tahun terakhir ini, kegiatan eksplorasi sangat rendah. Penurunan pemboran eksplorasi yang secara nyata terjadi sejak 1999 ini, selain akibat krisis moneter, juga akibat sikap menunggu di kalangan investor migas karena adanya ketidakpastian hukum yang dipicu oleh Sistem Tata Kelola Migas Indonesia yang akan diubah dengan diajukannya RUU Migas di DPR.

Pada 1998, pemboran eksplorasi masih sekitar 145 sumur, lalu turun menjadi 99 sumur pada 1999. Pada saat sudah ada kepastian hukum karena RUU Migas sudah disahkan menjadi UU Migas No. 22/2001, pemboran eksplorasi terus mengalami penurunan menjadi 62 sumur. Bahkan, pada 2003 pemboran eksplorasi hanya mencapai 23 sumur. Pada 2007, pemboran masih tetap sangat rendah, yaitu sekitar 39 sumur. Inipun sebagian besar dilakukan di blok-blok produksi, bukan di blok baru. Ini mencerminkan, para investor migas enggan berinvestasi di blok baru yang mengandung risiko tinggi. Jika gagal atau tidak ada penemuan cadangan baru, 100 persen kerugian ditanggung oleh investor. Tapi, jika gagal dalam pemboran eksplorasi di blok lama, biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan negara lewat mekanisme '*cost recovery*'.

Rendahnya pemboran eksplorasi terjadi karena Sistem Tata Kelola yang didasarkan atas UU Migas No.22/2001 sangat tidak ramah pada investor. Hal itu tercermin setidaknya pada dua hal. *Pertama*, adanya pasal 31 UU Migas yang mewajibkan investor membayar berbagai macam pajak dan pungutan, meskipun pada tahun eksplorasi masih belum menemukan dan memproduksi migas.

Ketentuan dalam pasal 31 ini telah mencabut azas ‘lex specialis’ di sektor migas nasional yang telah berlaku di bawah UU No.8/1971.

Kedua, adanya sistem tata kelola yang birokratis dan berbelit-belit karena pengelolanya merupakan lembaga baru (BP Migas), lembaga non-bisnis yang sebelumnya tidak pernah ada dalam sistem perminyakan nasional. Disisi lain, lembaga baru ini tidak mempunyai kekuatan yang cukup dalam mengawal investasi migas karena meskipun menandatangani kontrak dengan pihak asing/swasta, lembaga ini bukan Pemegang Kuasa Pertambangan. Berbeda dengan UU No.8/1971, di mana Pertamina yang menandatangani Kontrak dan Pertamina adalah Pemegang Kuasa Pertambangan, sehingga posisinya ‘kuat’, misalnya dalam hubungannya dengan hambatan-hambatan yang dialami dalam mencari cadangan baru di daerah.

Sistem Tata Kelola Migas Nasional yang didasarkan atas UU Migas No.22/2001 ini telah menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang tata kelola migasnya terburuk di dunia. Bahkan, untuk kawasan Asia Oceania, tata kelola migas di Indonesia menjadi yang paling buruk jika dibandingkan dengan semua negara tetangga. Lebih buruk dari Australia, New Zealand, Brunei, Philipina, Malaysia, dan bahkan Timor Leste. Hal ini merupakan kesimpulan Hasil Survei Fraser Institute Canada selama dua tahun berturut-turut, seperti yang dilaporkan dalam buku ‘World Petroleum Survey 2011’ dan ‘World Petroleum Survey 2012’.

Penemuan cadangan baru bisa didapat kalau ada kegiatan pemboran eksplorasi. Faktor utama yang mendorong terjadinya investasi eksplorasi adalah adanya potensi sumber daya hidrocarbon yang

terlihat dari peta awal potensi geologi dan faktor ekonomi yang dilihat dari tingkat harga minyak dunia. Peta awal potensi sumber daya hydrocarbon, seyogyanya selalu di *up date* berdasarkan data yang paling mutakhir. Data geologi yang baik akan menarik minat investor. Selain itu, harga minyak yang cenderung terus naik, terutama sejak rapuhnya kendali monopoli oleh kartel 'the seven sisters', juga akan menjadi pendorong bagi investor untuk mencari cadangan-cadangan baru.

Rendahnya produksi minyak nasional sebagai akibat anjloknya kegiatan eksplorasi sangat berdampak luas terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Selain harus keluar dari OPEC, Indonesia juga menjadi sangat tergantung pada minyak impor yang sangat menguras devisa nasional. Pada 2012, nilai impor minyak Indonesia sudah menembus level 45 milyar dolar AS, yang berakibat langsung pada pelemahan nilai tukar Rupiah karena nilai defisit perdagangan migas melebihi 5 milyar dolar AS, yang merupakan nilai defisit migas terbesar dalam sejarah perminyakan nasional.

Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi Pemerintah yang diumumkan pada 23 Agustus 2013, antara lain, untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dan nilai tukar Rupiah. Rencana aksi yang akan ditempuh adalah mengurangi impor solar, dengan mengupayakan peningkatan konsumsi biodiesel dengan menambah kandungan biodiesel dalam solar dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Namun, paket tersebut tidak menjadikan percepatan konversi BBM ke BBG sebagai bagiannya. Padahal, justru jumlah impor bensin jauh lebih besar dari impor solar. Sehingga upaya mengurangi defisit migas akan jauh lebih efektif, apabila konsumsi bensin

premium bisa dikurangi secara signifikan dengan mengalihkan pemakaian BBM ke BBG.

Terjadinya defisit neraca perdagangan migas yang relatif sangat besar saat ini telah terbukti berdampak negatif terhadap indikator ekonomi makro, seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan tingkat suku bunga. Ini merupakan fenomena ‘baru’ dalam industri migas nasional yang telah berumur lebih dari 100 tahun. Sebelumnya, sektor migas selalu menjadi pengumpul devisa nasional terbesar. Selama lebih dari dua dekade sebelum UU Migas No.22/2001, penerimaan devisa nasional mencapai sekitar 80 persen berasal dari ekspor migas.

Sejarah industri perminyakan dunia mencatat bahwa industri migas di Indonesia (d/h Hindia Belanda) termasuk salah satu industri migas tertua di dunia. Kelahiran industri migas di Indonesia hanya terpaut beberapa tahun setelah industri minyak dunia lahir di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 27 Agustus 1859 yang ditandai oleh keberhasilan Colonel Drake mengebor sumur minyak pertama. Di Indonesia, pemboran minyak pertama dilakukan pada 1871, atau sekitar 12 tahun sejak industri migas dunia lahir. Tetapi, pemboran minyak pertama yang dilakukan oleh Jan Reerink di sekitar Gunung Ciremai, Jawa Barat, ini tidak berhasil menemukan minyak.

Kelahiran industri minyak Indonesia ditandai oleh ‘penemuan’ rembesan-rembesan minyak di Daerah Langkat Sumatera Utara oleh A.J. Zijlker pada 1880. Pemboran sumur minyak pertama kali dilakukan di Telaga Said Langkat pada 1884 dan berhasil menemukan minyak meski dalam jumlah yang tidak ekonomis.

Pemboran dipindahkan ke arah Timur di Telaga Tunggal dan pada 15 Juni 1885 dengan kedalaman 121 meter terjadi semburan gas, minyak, dan air. Sumur Telaga Tunggal inilah yang kemudian disebut sebagai sumur minyak komersial pertama di Hindia Belanda.

Aturan Tata Kelola Pertambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda berupa Peraturan Pertambangan 1850 (*Koninklijke Besluit* 1850). Kemudian disempurnakan dengan UU Pertambangan 1899 (*Indische Mijnwet* 1899). Pemerintah Kolonial mengeluarkan Izin Penambangan kepada perusahaan minyak untuk suatu areal atau blok tertentu. Dengan demikian, sistem konsesi menganut pola hubungan '*Business to Government*' (*B to G*) dengan struktur vertikal di mana Pemerintah Kolonial memberi konsesi dan perusahaan memperoleh konsesi untuk jangka waktu 90 tahun. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, Pemerinah Kolonial dapat dituntut di Arbitrase International.

Selain membayar pajak sebagaimana layaknya suatu perusahaan apabila memperoleh keuntungan, Pemegang Konsesi diwajibkan juga membayar royalti yang besarnya satu persen. Sepenuhnya, manajemen berada di tangan Pemegang Konsesi, mulai dari penentuan modal, produksi, pemasaran, tenaga kerja, hingga teknologi dan prasarana tambang. Minyak, gas dan bahan tambang yang diproduksi dari perut bumi wilayah konsesi sepenuhnya menjadi milik Pemegang Konsesi. Pajak dan Royalti yang dibayar oleh Pemegang Konsesi bisa berupa hasil tambang (*in kind*) atau berbentuk *cash* yang dibayar ke Kas Negara. Pemerintah Kolonial hanya memonitor kegiatan penambangan.

Walaupun Pemerintah Kolonial melalui The Royal Dutch Shell (perusahaan minyak Pemerintah Kolonial Belanda yang didirikan oleh A.J. Zijlker kemudian bergabung dengan Shell Transport dari Inggris) mempunyai posisi yang dominan, Pemerintah Belanda merasa perlu untuk melindungi perusahaannya dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan minyak lain. Untuk itu, IMW 1899 dikoreksi dengan melakukan pembatasan pemberian konsesi. Bahkan, pada 1904, pemberian konsesi baru dibekukan. Perubahan yang sangat penting atas IMW 1899 dilakukan pada 1918 dengan menambahkan 'Pasal 5 A' yang mengharuskan perusahaan yang berminat melakukan penambangan minyak di Hindia Belanda melakukan kontrak dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Tercatat, pada awal Abad XX terdapat 18 perusahaan minyak yang beroperasi di Hindia Belanda berdasarkan IMW 1899.

Setelah Indonesia merdeka, Sistem Konsesi atas dasar Indische Mijnwet 1899 ini terus berlaku sebelum ada UU baru yang menggantikannya, meskipun IMW 1899 tidak sejalan dengan Konstitusi Negara RI. Atas dasar IMW 1899 inilah kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berupa minyak, gas dan bahan-bahan tambang dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Shell, Stanvac dan Caltex yang memperoleh konsesi hingga 90 tahun. Sehingga, meskipun Indonesia sudah merdeka, seluruh tata kelola migas mulai dari hulu hingga ke hilir berada di tangan perusahaan asing.

Sewaktu Perang Kemerdekaan, para pejuang dan pekerja minyak mengambil alih lapangan-lapangan dan kilang minyak di berbagai daerah dari tangan asing dan membentuk Perusahaan Minyak

Nasional di tingkat lokal, yang nantinya menjadi cikal bakal dari tiga perusahaan minyak negara, yaitu Permina, Pertamina, dan Permigan. Atas usul Mr. Mohamad Hasan --anggota DPR mantan Gubernur Sumatra-- upaya untuk mengganti IMW 1899 diwujudkan dengan membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan yang bertugas untuk menyusun Rancangan UU Pertambangan sebagai pengganti IMW 1899.

Gelombang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda terjadi pada 1950-an. Semangat nasionalisme masyarakat diperkuat oleh langkah pemerintah mengumumkan Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa perairan di sekitar pulau-pulau merupakan satu kesatuan wilayah Republik Indonesia yang tidak terpisahkan. Sebelumnya, perairan/laut di antara pulau-pulau merupakan perairan internasional. Deklarasi Juanda baru diakui oleh dunia Internasional melalui UNCLOS 1986. Pada 1960, terbit Undang-Undang No.44/Prp/1960 tentang Migas dan UU No.37/Prp/1960 tentang Pertambangan. Perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia berubah status dari Pemegang Konsesi (Konsesiner) menjadi Kontraktor Perusahaan Negara.

Asing tetap boleh melakukan kegiatan penambangan dengan berkontrak dengan Perusahaan Negara dalam bentuk Kontrak Karya. Tercatat, Perusahaan Minyak Caltex berkontrak dengan Permina, Perusahaan Minyak Stanvac dengan Pertamina dan Perusahaan Minyak Shell dengan Permigan. Sistem Kontrak Karya di dalam UU No.44/Prp/1960 menganut pola hubungan '*B to B*', di mana yang berkontrak dari Pihak Indonesia adalah Perusahaan Negara. Pola ini berbeda dengan pertambangan umum yang mengacu kepada UU No.11/1967,

dengan pola 'B to G'. Perusahaan Tambang Freeport misalnya, yang mulai masuk di Irian Jaya (Papua) pada 1967 berkontrak langsung dengan Pemerintah RI dalam bentuk Kontrak Karya atau 'B to G'.

Dalam sejarah perminyakan nasional tercatat bahwa pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, di tanah air sudah lahir beberapa Perusahaan Negara dalam bidang perminyakan di berbagai daerah. Perusahaan-perusahaan tersebut lahir dari pengambilalihan kilang minyak milik Belanda oleh para pejuang dalam bidang perminyakan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah: PTMNRI (Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia) di Sumatera Utara, Permiri (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Republik Indonesia) di Jambi dan Sumatra Selatan, dan PTMN (Perusahaan Tambang Minyak Nasional) di Cepu, Jawa Timur.

Pada 1950, PTMNRI Sumatera Utara berubah menjadi PTMRI Sumatera Utara. Pada 1954, PTMNRI berubah menjadi TMSU (Tambang Minyak Sumatera Utara) dan pada 1957 berubah lagi menjadi PT ETMSU. Pada 10 Desember 1957, PT ETMSU berubah menjadi PT Permina di bawah pimpinan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo dan pada 1961 berubah menjadi PN Permina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional) yang pada 1966 menandatangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) pertama dengan perusahaan asing.

Sedangkan Permiri di Jambi dan Sumatera Selatan membubarkan diri pada 1948. Aset NV NIAM (NV *Nederlands Indische Aardolie Maatschappij/Stanvac*) yang ada di Sumatera Selatan dan Jambi dibeli oleh Pemerintah di bawah PT Permindo (Perseroan Terbatas Pertambangan Minyak Indonesia). Pada 1961, PT Permindo

berubah menjadi PN Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia) yang sebagian besar bergerak di sisi Kilang dan Pemasaran Dalam Negeri.

Di Jawa Timur, PTMN Cepu berubah menjadi PTMRI Cepu (Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia Cepu) pada tahun 1950 dan pada tahun 1961, berubah menjadi PN Permigan (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional). Sehingga pada 1961, Indonesia memiliki 3 Perusahaan Minyak Milik Negara: PN Permina, PN Pertamina dan PN Permigan. Pada 1968, PN Permina dan PN Pertamina digabung menjadi PN Pertamina. Sedangkan, PN Permigan Cepu dilikuidasi dan diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Perminyakan Cepu di bawah Departemen Pertambangan.

Dengan UU No.8/1971 PN Pertamina berubah menjadi Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) yang merupakan perusahaan minyak nasional yang terintegrasi (*integrated national oil company*) bergerak dari hulu (*upstream*) sampai ke hilir (*downstream*). Bila kekurangan dana dan teknologi, Pertamina sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan diberi otoritas untuk melakukan kerja sama dengan Investor Asing dalam bentuk *Production Sharing Contract*. Di sini jelas terlihat, pola hubungan dengan pihak Investor Asing mengikuti pola 'B to B'. Apabila terjadi perselisihan antara Pertamina dan pihak asing, yang bisa dituntut adalah Pertamina yang asetnya terpisah dari aset pemerintah. Selain itu, pemerintah bisa juga mengambil suatu kebijakan yang berbeda dengan isi kontrak, apabila ternyata isi kontrak di kemudian hari ternyata merugikan negara.

Dibawah UU No.8/1971, Pertamina berhasil membangun industri migas nasional yang diakui oleh dunia internasional. Produksi minyak mentah meningkat tajam, penerimaan APBN dari migas dan penerimaan Devisa Nasional dari ekspor migas melonjak tajam. Model tata kelola berdasarkan UUNo.8/1971 dengan *Production Sharing Contract*nya banyak ditiru negara-negara lain. Malaysia dengan *Petroleum Developmeny Act 1975* (PDA 1975) nyaris sama dengan UU No.8/1971 yang memberi otoritas kepada Petronas untuk mengelola kekayaan migas Malaysia dan semua perusahaan minyak asing di Malaysia berkontrak dengan Petronas, bukan dengan Pemerintah Malaysia.

Krisis moneter pada 1998 merupakan titik balik dari sistem tata kelola perminyakan nasional. Karena Indonesia memperoleh pinjaman dari IMF (*International Monetary Fund*), maka sesuai dengan *Letter of Intent* (LOI), Indonesia harus mengubah UU No.8/1971 dengan UU yang baru. Rancangan Undang-Undang Migas yang baru diajukan pemerintah Presiden Habibie, namun DPR menolak mengesahkannya karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi. UU Migas yang baru, yakni UU No.22/2001 disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Dengan undang-undang ini Kuasa Pertambangan harus dicabut dari Pertamina, diambil alih oleh Pemerintah untuk diserahkan kembali ke pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan asing dan perusahaan swasta. Pertamina diubah menjadi PT Persero dan dipecah atas Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir yang merupakan perusahaan terpisah.

Kemudian, Pemerintah akan membentuk BP Migas yang menandatangani Kontrak dengan Pihak Asing/Swasta, menjual

migas Bagian Negara, melakukan Kontrol dan pengendalian atas *cost recovery* yang dibayar negara ke Kontraktor. Di Sektor Hilir terbuka bagi siapapun untuk membuka eceran BBM dengan izin dari Pemerintah. Subsidi BBM akan dihapus dan harga BBM akan diserahkan sepenuhnya kepada Mekansime Pasar Persaingan. Lalu, dibentuk BPH Migas yang berfungsi sebagai *regulator* sektor hilir. Belakangan, Mahkamah Konstitusi menyetujui *Judicial Review* atas undang-undang tersebut dengan mencabut empat pasal penting, termasuk menyangkut keberadaan BP Migas.

Sementara itu, dalam pengelolaan energi terbarukan, terutam *biofuels* atau Bahan Bakar Nabati (BBN), pemerintah mengalokasikan subsidi kepada produsen yang merupakan perusahaan swasta. Demikian juga dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB). Negara sudah memberikan subsidi kepada IPP (*independent power producer*) Listrik Panas Bumi yang merupakan perusahaan swasta. Pemberian subsidi tersebut terjadi karena perusahaan-perusahaan swasta menghasilkan BBN dan listrik jauh di atas harga jual BBM dan TDL. Dalam hal BBN, biaya produksi menjadi relatif mahal karena bahan baku dari BBN berasal dari bahan makanan (kelapa sawit). Tetapi, kalau bahan baku BBN berasal dari minyak goreng bekas (minyak jelantah), seyogyanya biaya produksi menjadi sangat murah. Ke depan, perlu didorong restorasi dan efisiensi tata kelola dengan mendorong transparansi dalam pembukuan biaya produksi dan penetapan besaran subsidi terhadap BBN dan Listrik Panas Bumi.

Untuk tata kelola listrik panas bumi, mengingat berdasarkan Konstitusi uap panas bumi yang ada di bumi merupakan milik negara, maka perlu dievaluasi ulang apakah pemberian hak penge-

lolaan panas bumi kepada perusahaan swasta sudah sejalan dengan konstitusi. Seyogyanya, IPP Panas Bumi akan bisa menghasilkan listrik dengan lebih efisien, sehingga bisa menghasilkan biaya produksi listrik yang lebih murah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh negara (BUMN). Namun, fakta yang terjadi justru terbalik. Yaitu, PLN ‘dipaksa’ membeli Listrik IPP Panas Bumi Swasta dengan harga jauh di atas harga listrik panas bumi yang dikelola BUMN.

Contoh: harga jual listrik Panas Bumi Kamojang Garut yang dikelola Pertamina ke PLN sekitar 0,4 dolar AS per kwh, sebelum dinaikkan oleh pemerintah menjadi 0,6 dolar AS per kwh. Sementara listrik IPP Panas Bumi swasta yang dijual ke PLN harganya sekitar 0,8-1,5 dolar AS per kwh. PLTP Swasta dari Supreme Energi misalnya, menjual listrik ke PLN dengan harga 0,94 dolar AS per kwh, padahal tarif dasar listrik saat ini sudah relatif mahal sekitar 0,8 dolar AS per kwh. Untuk mencegah terjadinya ‘kolusi tiga pihak’, yakni swasta, eksekutif dan legislatif, yang merugikan rakyat dalam penetapan harga jual listrik panas bumi ke PLN, diperlukan transparansi dan keterlibatan pihak independen.

Argumentasi bahwa listrik panas bumi harus ‘mahal’ agar bisa dikembangkan sulit diterima. Umumnya, sumur panas bumi yang dibor relatif lebih dangkal dari sumur migas meski terletak di wilayah pegunungan. PLTPB dibangun di mulut tambang (*mine mouth power generation*) sehingga tidak dibutuhkan biaya angkut bahan baku, sesuatu yang berbeda dengan PLTU Batubara yang bahan bakunya harus diangkut dari produsen di Kalimantan dan Sumatera ke *plant site* di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain. Ternyata

harga jual listrik IPP Batubara ke PLN, sekitar 0,6 dolar AS per kwh, jauh lebih murah dari PLTPB Swasta.

Kondisi tata kelola yang juga perlu diperhatikan saat ini adalah dalam bidang kehutanan. Dalam terminologi hukum di Indonesia, istilah “kawasan hutan” berbeda dengan “hutan”. Istilah “kawasan hutan” mengacu pada areal yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap (*legal term*), sedangkan “hutan” mengacu pada kondisi bio-fisik suatu areal yang ditumbuhi pohon-pohon yang membentuk ekosistem. Artinya, tidak semua kawasan hutan secara fisik kondisinya berhutan.

Berdasarkan RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) 2011, dari 130 juta hektare kawasan hutan, ternyata hanya sekitar 92 juta hektare yang kondisinya masih berhutan. Hal ini terjadi akibat maraknya aktivitas pembalakan liar, perambahan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan. Namun, potret pengelolaan hutan Indonesia tidak semuanya buruk. Hal yang menggembirakan, upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan laju deforestasi telah mulai memperlihatkan hasil. FAO (2010) menilai, walaupun masih terjadi ancaman deforestasi, secara umum negara-negara Asia, termasuk Indonesia, cukup berhasil menekan angka deforestasi.

Pada masa reformasi di penghujung 1990-an, penegakan hukum menyentuh titik nadir dan rata-rata laju deforestasi melampaui angka 3,5 juta hektare per tahun. Namun, berdasarkan data terakhir yang dirilis Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa rata-rata laju deforestasi di Indonesia pada kurun waktu 2006-2009 telah menurun di bawah angka 1 juta hektare per tahun dan pada periode 2009-2011, kembali menurun drastis hingga kurang dari 0,5 juta hektare per tahun (Santosa 2012).

Tidak ada cara lain agar sektor kehutanan tetap eksis dan bangkit kembali memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional kecuali dengan melakukan rehabilitasi hutan alam dan mengembangkan hutan tanaman. Kontribusi hutan tanaman sebagai sumber bahan baku kayu bulat cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2003, kontribusi kayu dari HTI hanya sekitar 5 juta m³ atau kurang dari 50 persen. Sementara pada 2011, dari total produksi kayu bulat sebesar 47 juta m³ hanya sekitar 11 persen yang berasal dari hutan alam. Artinya, hampir 90 persen kayu bulat Indonesia saat ini didominasi oleh kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman, baik Hutan Tanaman Industri (HTI) – termasuk Perum Perhutani, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), maupun Hutan Rakyat (Kementerian Kehutanan 2012). Walaupun proporsi kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman saat ini telah jauh melampaui kayu bulat dari hutan alam, sesungguhnya perkembangan pembangunan hutan tanaman, kecuali hutan rakyat, berjalan sangat lambat. Banyak perusahaan HTI yang tidak dapat melanjutkan usaha karena konflik lahan dengan masyarakat serta harga kayu bulat dalam negeri sangat rendah. Tahun 2011, jumlah perusahaan HTI yang beroperasi justru berkurang dibandingkan dengan tahun 2010, walaupun luas tanaman kumulatifnya bertambah.

Perkembangan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) juga masih sangat jauh dari harapan karena keengganan masyarakat mengikuti program HTR akibat ketidaksesuaian jenis tanaman dan kekurangjelasan aturan di lapangan. Berbeda dengan program HTI dan HTR yang perkembangannya sangat lambat, hutan rakyat yang ditanam di tanah-tanah milik (hutan hak), akhir-akhir ini berkembang cukup pesat. Geliat pembangunan hutan rakyat

dapat dirasakan di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Agar diperoleh hasil optimal, gerakan membangun hutan tanaman harus dilakukan dengan teknik silvikultur yang baik dan memperhatikan kesesuaian ekologi, misalnya dengan mengutamakan penanaman pohon-pohon jenis lokal yang tidak bersifat ekspansif atau membahayakan keanekaragaman hayati.

Dengan asumsi penanaman HTI memerlukan investasi Rp8,7 juta per hektare dan dapat dipanen setelah 12 tahun, Nurrochmat *et al.* (2007) memprediksi, jika penanaman dilakukan pada 2005 dengan luas, misalnya, 100.000 ha per tahun, PDB sektor kehutanan pada 2017 (tahun ke-12, asumsi pertama kali HTI bisa dipanen), akan bertambah sebesar Rp707 milyar. Dengan melakukan proyeksi berdasarkan harga konstan, maka PDB Nasional berturut-turut akan mencapai Rp 3.142 trilyun tahun 2017, Rp 3.299 trilyun tahun 2018, Rp 3.464 trilyun tahun 2019 dan Rp 3.637 trilyun tahun 2020. Dalam simulasi ini, pertumbuhan PDB sektor kehutanan akan tergantung dari luas penanaman.

Pembangunan HTI tidak serta merta mendongkrak kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB secara drastis. Jika investasi HTI dilakukan sejak 2005 dengan luas 100.000 hektare per tahun, PDB kehutanan pada 2017 akan menjadi Rp 31.204 milyar atau 0,99 persen dari PDB nasional. Namun, jika penanaman HTI bisa didongkrak hingga satu juta hektare per tahun, PDB kehutanan pada saat itu akan berlipat hingga Rp37.580 milyar atau 1,2 persen dari PDB nasional (Nurrochmat *et al.* 2007).

Nilai ekspor produk kehutanan Indonesia, khususnya kayu olahan, relatif stagnan dan pangsa pasarnya semakin menurun dibandingkan

dengan negara-negara kompetitor. Penurunan pangsa pasar ekspor produk perkayuan Indonesia disebabkan oleh merosotnya daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional dan semakin besarnya pertumbuhan pasar kayu dalam negeri. Ada beberapa penyebab menurunnya daya saing produk kayu Indonesia di pasar internasional, antara lain, *pertama*, industri kayu Indonesia cukup lama diproteksi dengan penyediaan bahan baku kayu bulat yang murah sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat tahun 1985. Industri kayu dalam negeri terlambat berbenah dan banyak yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Akibatnya, daya saing produk kehutanan Indonesia semakin merosot ketika harus berkompetisi dengan produk perkayuan negara-negara pesaing.

Kedua, pemasaran produk perkayuan semakin sulit setelah krisis ekonomi mendera pada akhir 1990-an. Indonesia sebagai pasien IMF harus mengikuti resep pembubaran Badan Pemasaran Bersama (BPB) produk perkayuan. Hasilnya, industri perkayuan nasional kehilangan kendali di pasar internasional dan posisi pasar produk perkayuan Indonesia semakin melemah didera persaingan internal dalam memperebutkan pasar ekspor.

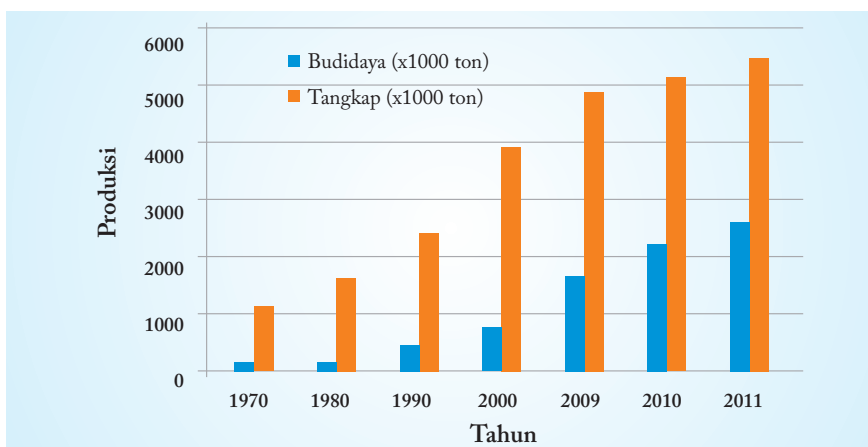
Selain akibat menurunnya daya saing, penurunan pangsa produk perkayuan Indonesia di pasar ekspor diduga juga akibat tumbuhnya pasar domestik. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi memerlukan papan untuk berteduh, membutuhkan perabot untuk berbagai keperluan, serta menggunakan kertas untuk berkomunikasi dan berkarya. Akibat besarnya permintaan dalam negeri dan rendahnya daya saing produk perkayuan Indonesia di pasar internasional menyebabkan nilai eksportnya stagnan, bahkan cenderung menurun.

Indonesia pernah menjadi *market leader* pasar *plywood* dunia pada dekade 1990-an. Namun, nilai ekspor *plywood* Indonesia terus merosot dan pada 2004, nilai ekspor *plywood* Indonesia telah berada di bawah Malaysia dan China. Untuk produk sekunder kayu, sejak 2009, Vietnam dan Malaysia juga telah mengungguli Indonesia. Kondisi ini mengharuskan Indonesia segera melakukan penguatan daya saing dan strategi reposisi produk perkayuan di pasar internasional. Secara teoritis, peningkatan nilai ekspor dapat dicapai melalui dua cara, yaitu: *pertama*, meningkatkan volume ekspor, dan *kedua*, menjual produk yang memiliki harga tinggi. Peningkatan volume ekspor produk perkayuan sangat sulit dilakukan karena produksi kayu bulat nasional relatif tetap dan permintaan kayu dalam negeri semakin meningkat.

Saat ini, sektor kehutanan menghadapi masalah yang sangat kompleks dan seluruh kawasan hutan dalam tekanan yang luar biasa beratnya, baik karena alasan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa tahun terakhir ini, permohonan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, pemukiman, dan pemekaran wilayah serta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan mengalami peningkatan tajam. Kebijakan yang berpihak pada kehutanan tidak identik dengan menghentikan seluruh izin konversi hutan. Pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan, namun pemberian izin konversi hutan hendaknya dilakukan lebih cermat serta diprioritaskan pada lahan-lahan hutan yang telah terdegradasi. Keseimbangan ekosistem harus dijaga, di antaranya, dengan melakukan upaya-upaya rehabilitasi lahan kritis dan pembangunan hutan tanaman secara sungguh-sungguh.

Sebagaimana dalam bidang kehutanan, kondisi tata kelola bidang perikanan juga cukup mengkhawatirkan. Secara umum, produksi perikanan Indonesia pada 2011, mencapai 13,6 juta ton, yang terdiri dari 5,7 juta ton produksi perikanan tangkap dan 7,9 juta ton produksi perikanan budidaya. Pada periode 2007-2011, kenaikan produksi perikanan total mencapai 13,5 persen, di mana pada periode yang sama, kenaikan produksi perikanan tangkap mencapai 3,2 persen dan produksi budidaya perikanan adalah 25,6 persen. Pada konteks periode yang lebih lama lagi, yaitu 1970-2011, terlihat peningkatan signifikan produksi perikanan tangkap mulai tahun 2000, namun kemudian relatif stagnan pada 2009. Sementara itu, produksi perikanan budidaya semakin meningkat secara signifikan pada tahun 2000 dan meningkat terus hingga 2011. Gambar 1-2 menyajikan tren produksi perikanan Indonesia pada periode 1970-2011.

**Grafik 5. Tren Produksi Perikanan Indonesia
Tahun 2007-2011**



Sumber: Laporan Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2012

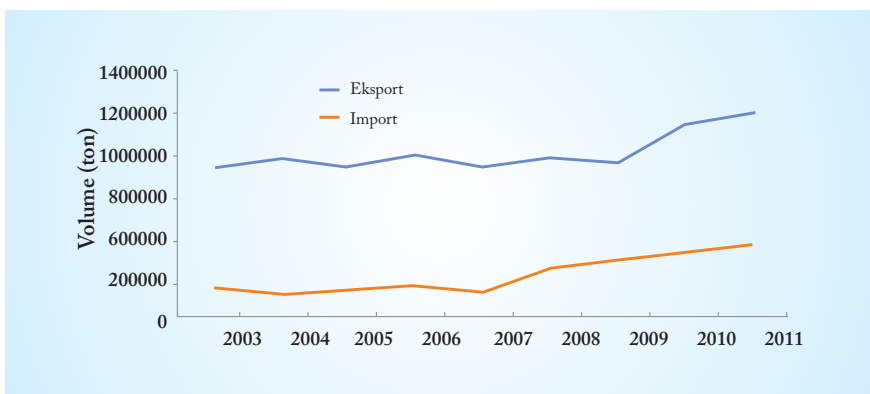
Dalam laporan Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2012, produksi perikanan total sementara pada angka 15,3 juta ton di mana produksi perikanan tangkap mencapai 5,8 juta ton dan produksi perikanan budidaya adalah 9,5 juta ton. Produksi perikanan tangkap Indonesia sangat berfluktuasi, namun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Beberapa hal penting yang dapat disintesis dari dinamika perikanan tangkap Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Produksi perikanan tangkap pada tahun 2012, 5,8 juta ton dengan laju peningkatan produksi 3,83 persen per tahun; (b) tingkat produktivitas per RTP antara 6-9 ton per tahun RTP dengan rata rata 8 ton per tahun; (c) tingkat produktivitas nelayan mencapai 2 juta ton per tahun; (d) jumlah alat tangkap yang beroperasi rata-rata mencapai 0,9 juta unit alat; (e) tingkat produktivitas rata rata alat mencapai 4 ton per tahun; serta (f) produktivitas rumah tangga perikanan mencapai 7,6 ton per tahun, produktivitas alat mencapai 4,4 ton per tahun dan produktivitas kapal mencapai 1,8 ton per tahun.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya terlihat semakin meningkat secara signifikan. Beberapa hal penting terkait dengan dinamika produksi perikanan budidaya dapat disajikan sebagai berikut: (a) Kontribusi produksi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan nasional dari 1970 hingga 2011 menyumbang 9-47 persen; (b) peningkatan produksi perikanan budidaya sangat signifikan sejak periode 2009-2011, yaitu 33-47 persen (rata-rata 41persen); (c) rata-rata kontribusi produksi sektor perikanan budidaya sejak 1970 hingga 2011 mencapai sebesar 26,3 persen pertahun; (d) dari 2003 hingga 2011, kontribusi terbesar produksi budidaya, yaitu rumput laut sebesar 53,2 persen, udang 9,9 persen, bandeng

8,7 persen, mas 7,5 persen, nila 7 persen, dan patin 3,3 persen; (e) nilai produksi perikanan budidaya dari 2003-2011 naik dari Rp1,6 trilyun menjadi Rp6,3 trilyun dengan rata-rata sebesar Rp31 trilyun; (f) daerah dengan kontribusi terbesar produksi perikanan budidaya pada 2010 adalah Sulawesi Selatan 21,6 persen, Sulawesi Tengah 11,8 persen, Jawa Timur 10,1 persen, Jawa Barat 9,9 persen, dan Sulawesi Tenggara 6,4 persen. Lokasi lainnya berkontribusi lebih rendah dari 5 persen; serta (g) pada 2010, pemerintah menetapkan 10 komoditas andalan perikanan budidaya, yaitu udang, kerapu, nila, ikan mas, bandeng, kakap, patin, lele, gurami, dan rumput laut.

Dalam hal ekspor produk perikanan, pada periode 2003-2011, Indonesia menunjukkan tren meningkat dan masih mendominasi perdagangan produk perikanan nasional. Meskipun demikian, impor produk perikanan juga menunjukkan gejala meningkat, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 6. Tren Ekspor dan Impor Perikanan Indonesia



Sumber: Laporan Refleksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2012

SOLUSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Sejumlah tantangan dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) 2014-2019. Konsumsi energi akan terus meningkat, terutama karena faktor pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan seluruh barang yang berbasis SDA migas, mineral dan batubara akan terus meningkat. Hal tersebut membuat persaingan untuk memperoleh jaminan pasokan migas, mineral dan batubara akan semakin ketat, baik lewat persaingan jalur diplomatik antar pemerintah maupun persaingan antarperusahaan. Karena lokasi dan jumlah cadangan migas, mineral dan batubara yang terbatas, maka kawasan yang mengandung potensi cadangan akan tetap menjadi sumber pemicu terjadinya konflik, seperti Kawasan Laut Asia Timur, Laut China Selatan, Samudra Hindia.

Sejalan dengan kecenderungan dunia, konsumsi migas, mineral, batubara, dan listrik di Indonesia akan terus naik. Dalam 5 tahun ke depan, nyaris mustahil untuk meningkatkan produksi minyak secara signifikan, kecuali produksi minyak dari Blok Cepu bisa dipercepat untuk mencapai produksi puncak sebesar 165 ribu bbls/hari. Kapasitas Kilang BBM dan LPG dalam lima tahun dipastikan akan tetap stagnan, yang berarti Indonesia harus siap untuk mengimpor migas berupa minyak mentah, BBM, dan LPG yang akan terus meningkat.

Konsumsi BBM bisa dikurangi secara signifikan dengan mempercepat konversi dari BBM ke BBG, bukan dengan jalan melakukan penjatahan meski dengan memakai RFID (*Radio Frequency Identification*), peningkatan pemakaian BBN, peningkatan jumlah dan mutu angkutan umum. Selain itu, terdapat juga peluang

untuk melakukan perubahan dan restorasi tata kelola migas, mineral dan batubara melalui perubahan UU, apabila DPR dan Pemerintah terpilih pasca-Pemilu 2014 memahami dengan baik kondisi nyata yang dialami bidang SDA serta solusi yang tepat yang didasarkan sepenuhnya untuk kepentingan nasional.

Dengan tantangan tersebut di atas, beberapa solusi diperlukan sebagaimana berikut:

1. Minyak bumi dan gas

Tidak banyak negara di dunia ini yang secara geologis mempunyai kandungan kekayaan sumber daya alam yakni hidrokarbon dan mineral yang relatif melimpah. Menurut data resmi Pemerintah, perkiraan jumlah cadangan tiga jenis energi hydrocarbon (minyak, gas dan batubara) masing-masing adalah minyak 7.73 milyar bbls, gas 152.9 tcf, dan gas sekitar 28.17 milyar ton dengan perkiraan nilai sebagai berikut:

Tabel 2. Perkiraan Nilai Aset Cadangan Migas dan Batubara

Perkiraan Nilai Aset Cadangan Migas dan Batubara					
Jenis Asset	Cadangan	Satuan	Harga US\$	Nilai Dalam US\$	Nilai Dalam Rupiah
Minyak	7.73	Milyar BBLs	\$110/bbls	\$850 milyar	Rp8.075 T
Gas	152.9	Trillion CF	\$15/cf	\$2.293 milyar	Rp21.783 T
Batubara	28.17	Milyar Ton	\$100/ton	\$2.817 milyar	Rp26.761 T
Total				\$5.960 milyar	Rp56.620 T

Note: Kalau misalnya, biaya produksi dan bagian Investor sebesar 50% dan hanya 20% saja dari asset yang berupa cadangan ini bisa dimonetasi, Maka akan ada dana tersedia sebesar Rp5.662 Trilyun yang bisa dipakai untuk melunasi hutang dan membangun Infrastruktur secara massif diseluruh Indonesia !.

Sumber: Kurtubi, 2013

Perhitungan di atas didasarkan atas asumsi, jumlah cadangan dan harga dianggap konstan. Padahal, potensi sumber daya minyak sekitar 50 milyar bbls dan kegiatan pencarian cadangan baru (eksplorasi) masih bisa ditingkatkan, misalnya, dengan mencabut UU Migas No.22/2001 yang merupakan penyebab menurunnya kegiatan pemboran eksplorasi selama ini, sehingga jumlah cadangan dan produksi minyak Indonesia terus menurun.

Dari sumber daya migas non-konvensional, seperti *coal bed methane* (CBM) dan *shale gas*, tentu ke depan akan bisa diperoleh jumlah cadangan terbukti yang besar mengingat potensi sumber daya CBM sekitar 453 tcf dan *shale gas* sekitar 574 tcf. Demikian juga dengan harga minyak. Ke depan, besar kemungkinan, tren harga minyak secara nominal akan terus meningkat. Hal ini karena sifat dari minyak yang tidak bisa diperbaharui (*non-renewable*) sehingga jumlahnya terbatas, padahal pengurasan atau produksi terus berlangsung.

Dengan pendekatan yang sama, kita bisa menghitung perkiraan nilai aset/cadangan dari bahan-bahan tambang, seperti tembaga, emas, nikel, bijih besi, bauksit, timah. Tentunya, kalau sistem tata kelolanya mengikuti acuan pasal 33 UUD 1945 (dikuasai oleh negara dan dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), kekayaan alam yang berbentuk minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, bijih besi, bauksit, mangan, timah, dsb., akan bisa menjadi modal untuk mendorong bangsa ini kembali berjaya menjadi negara besar. Perkiraan sementara yang bersifat konservatif dari nilai cadangan terbukti SDA migas dan bahan tambang adalah sekitar Rp200.000 trilyun.

Persoalannya, apakah dengan sistem tata kelola saat ini, kekayaan migas dan bahan tambang yang relatif melimpah di perut bumi ini sudah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945? Faktanya, sistem tata kelola saat ini masih jauh dari sistem tata kelola bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di sektor migas misalnya, terdapat begitu banyak lubang yang memberikan peluang, penerimaan negara banyak tersedot dan bocor mengalir ke para pemburu rente. Lubang kebocoran, antara lain, bersumber dari Pengelola Kekayaan Migas yang diserahkan kepada Lembaga Non-Bisnis.

Demikian juga di sektor tambang umum, tingkat produksi yang tinggi dengan harga komoditas tambang yang tinggi di pasar internasional, belum menghasilkan penerimaan negara dari sektor tambang yang optimal. Keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha dan sekelompok *rent seekers*. Hal ini karena, antara lain, jenis kontrak yang dipakai di sektor tambang selama ini berupa Kontrak Karya dan sejenisnya seperti PKP2B yang nilai royaltinya sangat rendah dan yang berkontrak adalah Pemerintah atau '*B to G*'.

Berdasarkan atas UU Migas No.22/2001 yang berlaku saat ini, pengelola kekayaan migas nasional dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah non-bisnis BP Migas yang berubah menjadi SKK Migas pasca-Keputusan MK 2012 dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN), bukan Badan Usaha Milik Negara. Semua perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia berkontrak dengan BP Migas atau merupakan kontraktor BP Migas. BP Migas mengendalikan *cost recovery* yang merupakan

biaya (investasi dan biaya operasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan minyak) yang dibayar kembali oleh negara dari hasil produksi migas perusahaan yang bersangkutan.

Sementara itu, Perusahaan Negara di bidang migas yang dibentuk atas dasar UU No.8/1971 (Pertamina) dibubarkan dan dibentuk BUMN baru bernama PT Pertamina (Persero) yang dibentuk atas dasar Akte Notaris. Kuasa Pertambangan yang menurut UU No.8/1971 diberikan kepada Pertamina, diambil alih oleh Pemerintah/Menteri ESDM. Status Pertamina menjadi sama dengan perusahaan minyak asing dan swasta yang berkontrak dengan BP Migas/SKK Migas. Harga BBM sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sedangkan migas bagian negara yang berasal dari kontraktor asing harus dijual melalui penunjukan BP Migas.

Setelah UU Migas No.22/2001 diterapkan, kondisi industri migas nasional tidak memperoleh kemajuan yang berarti, bahkan cenderung terjadi kemunduran dengan fakta-fakta berikut. *Pertama*, produksi minyak mentah terus mengalami penurunan dari sekitar 1.5 juta bbls/hari pada 1998 menjadi sekitar 830 ribu bbls/hari pada 2013. Akibatnya, impor minyak mentah terus meningkat. *Kedua*, pengembangan dan penjualan LNG Tangguh ke luar negeri dengan harga yang sangat murah hingga saat ini tidak mampu dikoreksi untuk dihargai secara normal. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp30 triliun/tahun dan Pembangkit PLN harus pindah memakai BBM.

Ketiga, *cost recovery* yang terus melonjak dan tidak transparan. Berulang kali BPK menemukan pembebanan *cost recovery*

yang tidak semestinya. Akibatnya, potensi penerimaan negara berkurang. *Keempat*, setelah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan BBM beralih dari Pertamina ke Pemerintah melalui BPH Migas, Pertamina enggan membangun kilang baru dengan alasan marginnya kecil. Akibatnya, Indonesia harus impor BBM dalam jumlah besar dan terus meningkat.

Kelima, meski program konversi BBM ke BBG sudah lama dicanangkan, realisasinya nyaris nihil karena ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab mengimplementasikannya. Selain infrastrukturnya sangat minim, kepastian pasok gasnya juga tidak jelas. Padahal, produksi gas relatif melimpah. Akibatnya, subsidi BBM membengkak. Sementara, Pemerintah secara politis ‘takut’ menaikkan harga BBM karena selalu mendapatkan penolakan rakyat. *Keenam*, aset berupa cadangan migas yang ada di perut bumi tidak bisa dijadikan sumber pendanaan yang sangat besar.

Ketujuh, pengelola kekayaan migas nasional adalah lembaga non-bisnis. Akibatnya, pihak kontraktorlah yang memanfaatkan aset/cadangan diperut bumi untuk dijadikan agunan memperoleh pendanaan. Padahal, aset migas di perut bumi sepenuhnya milik negara. *Kedelapan*, privatisasi PGN berdampak pada semakin dominannya peran PGN sebagai Trader, sementara tugas untuk membangun infrastruktur gas, seperti infrastruktur untuk *city gas*, dan SPBBG terabaikan.

Dari sisi hukum, hingga saat ini UU Migas No.22/2001 sudah mengalami *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi sebanyak tiga kali, dan Mahkamah Konstitusi sudah mencabut 17 pasal.

Yakni, pasal 12 ayat 3: Menteri menetapkan Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pasal 22 ayat 1: BU dan BUT wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasal 28 ayat 2: Harga BBM dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Serta semua pasal yang terkait dengan BP Migas.

Mengingat sudah begitu banyak pasal dalam UU Migas No.22/2001 yang sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK, dan secara empirik UU Migas ini sudah terbukti merugikan negara secara finansial dan memperlemah ketahanan energi nasional, maka solusi yang paling rasional adalah: diperlukan Perubahan dan Restorasi Sistem Tata Kelola Migas Nasional dengan mencabut UU Migas No.22/2001 dan melahirkan UU Migas baru yang prinsip pokoknya adalah: *Pertama*, kekayaan yang berupa cadangan minyak dan gas yang ada diperut bumi harus dinyatakan sebagai 'Milik Negara' dan pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Negara Khusus yang dibentuk berdasarkan UU, seperti mengubah SKK Migas sekarang menjadi Perusahaan Negara.

Kedua, hanya Negara sebagai pemilik yang diwakili oleh Perusahaan Negara (PN) yang boleh melakukan penambangan migas. Dalam hal PN kekurangan dana, teknologi dan hendak berbagi risiko, maka PN diberi otoritas untuk berkontrak dengan investor/kontraktor, baik asing maupun nasional dalam pola 'B

to B'. Pemerintah sebagai Pemegang Kebijakan dan Regulator tidak ikut berkontrak dan berada di atas kontrak. *Ketiga*, PN diwajibkan untuk memaksimumkan Penerimaan Negara dari Sektor Migas, antara lain termasuk dengan memonetasi aset atau cadangan. *Keempat*, PN diwajibkan memenuhi kebutuhan BBM dan gas dalam negeri yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Kehutanan

Pengembangan sektor kehutanan harus dilakukan secara terencana dan terukur, serta fokus pada pencapaian strategi prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Walaupun setiap kementerian dan lembaga telah memiliki rencana strategis, tetap diperlukan pencermatan dan masukan untuk mendukung pencapaian program. Dalam rangka mendorong kebangkitan sektor kehutanan, ada tiga strategi kunci yang perlu mendapatkan perhatian dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2014–2019). Yaitu, *pertama*, mendorong pengembangan hutan tanaman; *kedua*, mengembangkan pasar ekspor produk kehutanan bernilai tinggi; dan *ketiga*, optimasi sistem pengelolaan hutan berbasis kebutuhan dan karakteristik lokal.

a. Mendorong pengembangan hutan tanaman

Luas dan produktivitas hutan alam Indonesia semakin menurun karena aktivitas pembalakan hutan, baik melalui kegiatan pemanenan legal maupun kegiatan ilegal, seperti pembalakan liar, perambahan, dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan kayu ke depan tidak lagi dapat bersandar pada hutan alam. Dalam konteks

ini, pengembangan hutan tanaman merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin kontinuitas pasokan kayu di masa mendatang. Program pengembangan hutan tanaman sesungguhnya bukan suatu hal yang baru. Pemerintah telah menginisiasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sejak awal 1990-an.

Selain HTI, pengembangan hutan tanaman juga dilaksanakan dengan beberapa skema lain, di antaranya, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat. Kebangkitan sektor kehutanan hanya dapat dilakukan, salah satunya melalui revitalisasi pembangunan hutan tanaman. Pertumbuhan PDB sektor kehutanan akan terjadi jika dilakukan investasi HTI secara kontinu pada berbagai luasan. Walaupun pembangunan HTI diyakini akan dapat menggerakkan sektor-sektor hilir, peningkatan kontribusi relatif sektor kehutanan yang secara langsung dipengaruhi oleh adanya pembangunan HTI diperkirakan hanya berkisar antara 1-2 persen. Jika mengharapkan pertumbuhan PDB sektor kehutanan yang lebih besar lagi, pembangunan HTI saja tidak cukup. Upaya itu harus dibarengi dengan pembenahan strategi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan manfaat *intangible* lainnya, seperti jasa lingkungan hutan secara bersama-sama.

- b. Optimasi sistem pengelolaan hutan berbasis kebutuhan dan karakteristik lokal

Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk optimasi pembangunan kehutanan adalah menerapkan sistem penge-

lolaan hutan berbasis kebutuhan dan karakteristik lokal. Pengelolaan hutan yang berbasis kebutuhan mempersyaratkan kelenturan dalam sistem pengelolaan hutan tanpa mengubah fungsi pokok hutan. Hutan produksi, misalnya, sesuai dengan fungsinya, harus ditingkatkan semaksimal mungkin produktivitasnya, sehingga perlu fleksibel dalam penentuan jenis-jenis tanaman dan sistem pengelolaannya. Jika ada kebutuhan nasional atau daerah untuk pemenuhan target produksi komoditas tertentu seperti karet, kopi, coklat, padi, atau tanaman lain, hendaknya dibuka peluang untuk mengembangkannya di dalam kawasan hutan, terutama hutan produksi, dengan pola *agroforestry*, tanpa mengubah fungsi pokoknya sebagai hutan. Dengan pendekatan seperti ini, maka berbagai program kehutanan, seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan pola kemitraan yang selama ini berjalan tersendat, akan memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

Pada saat ini, banyak kawasan hutan produksi yang tidak dibebani atas hak dan memicu terjadinya perambahan akibat *open access property* sumber daya hutan. Untuk menertibkannya bukan hal mudah karena menyangkut luasan areal puluhan juta hektare dan terkait dengan kepentingan jutaan warga masyarakat di sekitar hutan. Pada kenyataannya banyak kawasan hutan produksi yang telah dimanfaatkan (baca: dirambah) oleh masyarakat sebagai kebun atau peruntukan lain. Dalam konteks ini, rehabilitasi hutan produksi tidak

mungkin dilakukan tanpa melihat realitas penggunaan lahan di lapangan. Penertiban dengan memberangus kebun dan meratakan tanaman masyarakat dan menggantinya dengan tanaman hutan, jelas bukan pilihan yang bijaksana karena pasti akan meletupkan konflik sosial yang semakin sulit diurai. Sementara, melakukan pembiaran juga bukan langkah yang baik karena hanya akan menunda masalah. Langkah terbaik adalah meregistrasi dan memberikan hak pemanfaatan lahan (hak garap) kepada masyarakat dan menerapkan peraturan yang secara bertahap mengatur komposisi tanaman dengan pola *agroforestry*.

Faktor biofisik adalah salah satu faktor terpenting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sistem pengelolaan hutan. Sistem pengelolaan hutan tunggal, seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang berlaku untuk hutan alam dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) yang diberlakukan di hutan tanaman, perlu diperbaiki dengan menerapkan multisistem silvikultur yang memungkinkan penerapan beragam sistem pengelolaan hutan sesuai dengan kondisi spesifik lokal. Secara umum, sistem TPTI sebenarnya hanya sesuai diterapkan di hutan alam primer dan hutan sekunder bekas tebangan atau *logged over area* (LoA) dengan kerusakan ringan. Sementara, sistem TPTI intensif (TPTII) atau yang sering disebut silvikultur intensif (Silin) sesuai diterapkan di LoA dengan kerusakan sedang. Jika LoA telah mengalami kerusakan berat, sistem THPB adalah pilihan yang paling rasional

Lebih dari sekadar keragaman penerapan sistem silvikultur, perlu juga dibuka ruang untuk pengelolaan hutan multi-tujuan (*multipurpose forests*) dengan sistem perencanaan yang terintegrasi di bawah pengelolaan satu unit manajemen. Dengan sistem ini, maka seharusnya ke depan, suatu unit manajemen pengelolaan hutan dimungkinkan untuk mengelola kawasan hutan dengan berbagai tujuan, seperti pemanfaatan hutan alam (HPH), pengembangan hutan tanaman industri (HTI), pembangunan ekowisata hutan, kluster penggunaan areal hutan untuk pertambangan termasuk reklamasi lahan bekas tambang, usaha penyimpanan/penyerapan karbon, serta kegiatan restorasi ekosistem dan jasa lingkungan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan satu rencana pengelolaan hutan terpadu. Tanpa terobosan kebijakan pengelolaan hutan multi-tujuan, maka produktivitas kawasan hutan akan tetap rendah, sehingga sangat rawan dari ancaman konversi lahan, baik legal maupun ilegal.

3. Perikanan nasional

Potensi perikanan Indonesia sejak tahun 1983-2012 relatif tetap. Tidak terlihat peningkatan potensi perikanan, padahal aktivitas usaha perikanan cenderung meningkat. Beberapa poin penting dalam konteks potensi sumber daya ikan, antara lain, (a) Pendugaan potensi perikanan Indonesia masih dilakukan berbasis data sekunder dengan proses estimasi terhadap kemungkinan produksi dari berbagai aspek. (b) Belum pernah dilakukan pendugaan stok secara menyeluruh baik dari ikan pelagis, demersal, maupun karang di seluruh wilayah Indonesia.

(c) Potensi stok tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia. (d) Proses pemantauan potensi stok ikan nasional belum dilakukan secara baik, sehingga masih banyak terjadi pemanfaatan secara ilegal.

Perikanan Indonesia didesain dalam 11 WPP untuk membantu memudahkan pengelolaan perikanan menurut karakteristik sumber daya ikan. Setiap WPP memiliki karakteristik sumber daya ikan tertentu. Potensi sumber daya ikan di WPP tersebut di antaranya pelagis besar, pelagis kecil, demersal, penaeid, ikan karang konsumsi, lobster, dan cumi cumi. Saat ini, potensi di WPP berkisar dari 276 ribu ton hingga 1,1 juta ton per tahun. Sebaran potensi tersebut adalah 52 persendi bagian barat dan 48 persen di bagian timur Indonesia.

Untuk mengelola potensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan berbagai upaya dan strategi pembangunan sektor perikanan dan kelautan ini. Strategi pembangunan perikanan dapat mencakup pembangunan perikanan tangkap, budidaya, dan industri perikanan, yang dapat dipaparkan sebagai berikut. *Pertama*, menerapkan strategi agribisnis di bidang penangkapan, yaitu dengan sistem rantai dingin (*cold-chain system*) dalam penanganan hasil tangkapan ikan dari mulai ikan disimpan dalam kapal, tempat pendaratan ikan (pelabuhan perikanan), distribusi/transportasi, sampai ke tangan konsumen akhir produk perikanan.

Kedua, peningkatan kemampuan dan keterampilan nelayan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan

mendukung industrialisasi perikanan. *Keempat*, modernisasi armada nelayan tradisional dengan memberikan pinjaman/modal kapal ikan bertonase di atas 30 GT dengan alat tangkap yang lebih canggih, serta memiliki peralatan yang mampu memberikan tingkat keselamatan yang baik. *Kelima*, mempermudah permodalan melalui koperasi, sistem bapak angkat, kemitraan usaha, kredit mina mandiri serta berbagai kredit pemerintah yang tidak membebani.

Keenam, pengembangan alat tangkap, motor tempel, kapal motor dan pemasangan rumpon. *Ketujuh*, revitalisasi dan pengembangan pelabuhan perikanan di beberapa pulau, sejalan dengan pesatnya perkembangan dan letaknya yang strategis, seperti Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di berbagai daerah di Indonesia. *Kedelapan*, peningkatan jumlah aparat pengawasan sehingga dapat mencegah jumlah ikan hasil tangkapan yang langsung dijual ke luar negeri secara ilegal, ataupun menanggulangi nelayan ilegal.

Selain itu, perlu pula dilakukan pengembangan usaha perikanan budidaya yang secara praktis, berupa: *Pertama*, pengembangan diversifikasi usaha, sehingga pola nelayan yang bergantung pada penangkapan mulai diarahkan pada usaha budidaya. *Kedua*, ekstensifikasi budidaya laut, dilakukan dengan mendidik, melatih dan memberi pemagangan disertai dengan memberikan paket bantuan untuk rangsangan budidaya. *Ketiga*, pengembangan komoditas perikanan unggulan, seperti udang, patin, bandeng, rumput laut, dan komoditas air tawar lainnya yang memiliki keunggulan komperatif.

Keempat, diversifikasi spesies atau jenis komoditas budidaya, seperti budidaya udang, sebaiknya tidak hanya mengusahakan udang windu, tetapi juga spesies-spesies baru yang bernilai ekonomis tinggi, seperti udang *vannamei*, udang jerbung (*Penaeus merguinsis*), *P. semisulcatus*. *Kelima*, penyediaan benih yang memadai (swasembada benih) untuk menjamin usaha produksi perikanan. *Keenam*, revitalisasi lahan usaha budidaya tambak yang telah rusak dan tidak produktif lagi. *Ketujuh*, penjagaan kelestarian hutan mangrove dan terumbu karang, sebagai habitat penting organisme laut. *Kedelapan*, penerapan RTRW secara konsisten dan berkelanjutan sehingga tidak terjadi gangguan atau tumpang tindih kepentingan dalam suatu areal. *Kesembilan*, penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengusaha dengan kemudahan izin bagi pihak swasta dan pelatihan serta rangsangan bantuan.

Selain aspek produksi, sektor pengolahan juga perlu dikembangkan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: (a) revitalisasi industri pengalengan ikan, tepung ikan, *cold storage*, *surimi*, *fish meal* dan *fillet* sehingga lebih efisien dan berdaya saing tinggi; (b) peningkatan nilai tambah produk perikanan dengan meningkatkan efisiensi industri pengolahan; (c) pembinaan dan pengawasan mutu produk perikanan mulai dari tingkat produsen baik nelayan dan pembudidaya ikan, distribusi, sampai ke pasar (konsumen) akhir baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri; (d) pembangunan dan operasionalisasi pasar-pasar ikan higienis; (e) pengadaan sarana pengangkutan produk perikanan dari lokasi produsen ke lokasi konsumen ikan (pasar), seperti:

mobil *box* berpendingin, angkutan laut dan udara; (f) pemokusan industri pengolahan hasil perikanan pada pengembangan industri: pembekuan, pengalengan, tepung ikan, *added-value products*, *surimi*, *surimi-based products*, *fishmeal*, *fillet*, dan lain-lain.

Strategi yang juga diperlukan dalam memenangkan persaingan ini adalah dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Sebagai bangsa kepulauan dengan laut yang luas, selain perikanan, daya tarik kawasan adalah aktivitas wisata. Kegiatan tersebut dapat berupa, antara lain, nilai historis, nilai budaya, wisata petualangan, keindahan alam, yang masing-masing atraksi tersebut memiliki *specific market group*-nya. Karena itu, berbagai lokasi pariwisata bahari yang ada, akan bernilai tinggi apabila dalam proses pengembangannya, selain memanfaatkan daya tarik dan keunikan sumber daya hayati laut setempat, juga menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan wisata, baik dari aspek keamanan maupun kenyamanannya.

Dengan demikian, terdapat dua faktor penting dalam strategi pengembangan kegiatan pariwisata. *Pertama*, faktor internal berupa strategi manajemen daya tarik obyek wisata, yang terkait mulai dari aspek teknis, strategi jasa pelayanan sampai kepada strategi pemasaran. *Kedua*, faktor internal berupa dukungan perangkat kebijakan dari pemerintah serta penciptaan iklim keamanan yang kondusif bagi kegiatan wisata.

Menurut Dahuri (2010), untuk mewujudkan pembangunan tersebut harus diikuti oleh langkah-langkah pembangunan sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan layanan jasa transportasi laut yang

menjamin keselamatan dan keamanan serta kualitas pelayanan yang andal dan unggul. Langkah tersebut harus didukung oleh kesiapan SDM yang andal, armada yang layak laut dan disiplin terhadap aturan-aturan pelayaran. *Kedua*, dalam pengembangan transportasi laut, perlu dilakukan penyiapan dan pemberdayaan SDM yang memiliki wawasan kebahariaan yang melekat serta memiliki kemampuan pelayaran yang memadai, sehingga dapat mewujudkan transportasi laut yang berkualitas dan berdaya saing.

Ketiga, pengembangan transportasi laut, perlu diikuti dengan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang *aplicable*, antisipatif dan adaptif dengan perkembangan lingkungan startegis, khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Perangkat peraturan-peraturan hukum mengenai transportasi laut pada hakekatnya meliputi aspek-aspek berikut: keselamatan pelayaran, navigasi, pengawakan kapal, pencegahan pencemaran laut, peraturan ekonomi pelayaran dan hukum perdata pelayaran. *Keempat*, pengembangan bisnis transportasi laut harus lebih berpihak pada ekonomi rakyat dengan memprioritaskan pengembangan bisnis transportasi laut pada golongan usaha kecil dan menengah, terutama di wilayah-wilayah yang akan dikembangkan pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan pulau-pulau kecil yang potensial.

Kelima, dalam meningkatkan peran swasta dalam pengembangan transportasi laut, harus diciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti adanya prasarana dan sarana, kemudahan perizinan, keamanan dan kepastian jaminan hukum. Selain itu, dalam pengembangannya dapat diwujudkan melalui pola kemitraan

antara pemilik muatan dan pemilik kapal yang dilakukan melalui kontrak jangka panjang. *Keenam*, dalam pengembangan transportasi laut perlu disusun kebijakan yang dapat mendorong lembaga permodalan untuk mendukung atau membiayai transportasi laut nasional, baik dalam penyediaan kapal, pemeliharaan, operasional maupun perawatan.

IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Saat ini, Sistem Tata Kelola Migas sudah terbukti bertentangan dengan konstitusi dan merugikan negara secara finansial. Secara geologis potensi sumber daya migas Indonesia relatif besar, yang menurut konstitusi harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dalam lima tahun ke depan, Sistem Tata Kelola Migas Nasional harus segera diubah dan direstorasi lewat perubahan undang-undang, dikembalikan agar sesuai dengan Konstitusi untuk bisa diarahkan menjadi sumber pendanaan mengingat sifat dari aset atau cadangan terbukti yang *'bankable'* dan *'tradeable'*.

Pemerintah dan DPR baru pasca Pemilu 2014 harus dapat melahirkan Sistem Tata Kelola yang konstitusional untuk dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi *'double digit'* agar Indonesia bisa menjadi negara besar, maju, sejahtera, dan disegani dunia. Dana dari SDA Migas (dan tambang) bisa dipakai untuk: melunasi utang negara, membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian secara masif di seluruh Indonesia. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi (minyak mentah, BBM dan LPG) impor, perlu segera mempercepat produksi minyak dan gas dari Blok Cepu dan mengoptimalkan lapangan-lapangan

tua serta pembangunan kilang-kilang BBM baru secara lebih menyebar dan tidak terkonsentrasi di Jawa saja. Selain dengan mempercepat konversi BBM ke BBG. Sedangkan untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan listrik nasional dengan tingkat keandalan yang tinggi, perlu segera menambah kapasitas pembangkit dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi primer dalam negeri berikut sistem transmisi dan distribusi termasuk pemanfaatan energi nuklir (PLTN).

Di sektor kehutanan, keberlangsungan pembangunan harus memperoleh perhatian sungguh-sungguh. Sebab, berperan penting sebagai penyangga sistem kehidupan dan faktor penentu perubahan iklim, menjadi motor penggerak perekonomian, membuka keterisolasian wilayah, dan menciptakan lapangan kerja. Industri kehutanan harus terus didorong untuk bangkit kembali, antara lain, dengan membenahi regulasi kehutanan dari hulu sampai hilir, memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang memadai untuk mendorong berkembangnya usaha hutan tanaman, mengupayakan berbagai alternatif penghasil kayu dan serat dari luar kawasan hutan (misalnya pemanfaatan kayu dan serat dari peremajaan kebun), mengembangkan produk-produk yang berkarakter untuk memenuhi segmen pasar tertentu dengan harga tinggi di ceruk pasar internasional dan membangun kembali sistem pemasaran bersama produk kehutanan agar Indonesia dapat memainkan peran sebagai *market leader* produk perkayuan di pasar internasional.

Luas dan produktivitas hutan alam di Indonesia semakin menurun sehingga strategi pengembangan hutan tanaman adalah keniscayaan. Pengembangan pasar ekspor produk kehutanan bernilai tinggi dapat

dilakukan melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk kehutanan di pasar internasional. Di antaranya, dengan melakukan peremajaan mesin-mesin produksi dan menjual produk kehutanan melalui badan pemasaran bersama. Strategi optimasi sistem pengelolaan hutan berbasis kebutuhan dan karakteristik lokal harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan mencegah terjadinya deforestasi akibat konversi hutan secara legal dan ilegal. Strategi optimasi sistem pengelolaan hutan harus mengakomodir realitas keragaman, baik sosial-ekonomi maupun kondisi biofisik hutan, sehingga ke depan perlu didorong suatu sistem pengelolaan hutan multi-tujuan (*multipurpose forests*) yang dikelola oleh satu unit manajemen, misalnya: HPH, HTI, HTR, reklamasi tambang, ekowisata, usaha jasa penyimpanan/penyerapan karbon, dan restorasi ekosistem dengan satu rencana kelola hutan terpadu.

Di bidang kelautan dan perikanan, perlu dibangun iklim usaha yang kondusif melalui: *Pertama*, konsistensi kebijakan agar pengusaha tidak ragu-ragu dalam melakukan investasinya di daerah. *Kedua*, keamanan berusaha dan kepastian hukum seperti di negara-negara tetangga. *Ketiga*, penghapusan ekonomi biaya tinggi dan penghapusan praktik KKN. *Keempat*, penyediaan infrastruktur (jalan, listrik, telkom, air bersih, pelabuhan laut dan udara) yang memadai terutama di kawasan pulau terdepan dan pulau kecil. Hal ini dilakukan melalui perbelanjaan anggaran pembangunan. Pemerintah harus memberikan bobot anggaran dan belanja pemerintah yang lebih besar untuk pembangunan sektor riil dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pembangunan kelautan, termasuk dalam pengembangan pemasarannya.

Kelima, penyediaan SDM terampil dan beretos kerja tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di bidang kelautan, misalnya nelayan, yang sebagian besar masih berpendidikan sekolah dasar dapat menjadi penghambat revitalisasi sektor riil bidang kelautan. *Keenam*, penyediaan informasi potensi dan peluang usaha. *Ketujuh*, pengembangan dan diseminasi Iptek kepada para pelaku usaha. *Kedelapan*, kebijakan moneter (nilai tukar Rupiah, kredit lunak, dll) dan fiskal yang berpihak pada sektor riil. Kebijakan moneter dari BI seperti kebijakan suku bunga dan per kreditan di bidang kelautan dapat dijadikan alat kebijakan dalam merangsang berkembangnya industri kelautan. Kemudian, perlu ada juga keseimbangan alokasi kredit pada industri hulu dan hilir, sehingga kedua subsistem industri kelautan itu dapat berkembang secara seimbang.*

BAB VI

— PERTAHANAN —

MEMBANGUN
INDONESIA KUAT



PERTAHANAN

MEMBANGUN INDONESIA KUAT

“Bangunlah angkatan perang yang dapat menjadi kebanggaan dari rakyat Indonesia, yang mampu melindungi kemerdekaan negara Indonesia, dan dapat menjamin keamanan rakyat Indonesia”.

~ Panglima Besar Jenderal Sudirman ~

Sistem pertahanan merupakan kesatuan terpadu dari unsur-unsur pertahanan yang dimiliki negara dalam tingkatan, baik doktrin pertahanan sebagai perangkat lunak maupun personil dan alutsista sebagai perangkat keras. Hakikat dari penyelenggaraan sistem pertahanan bertujuan menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dalam koridor NKRI. Karena itu, sistem pertahanan Indonesia harus ditempatkan sebagai salah satu sistem fundamental negara untuk dapat menjawab segala ancaman serta tantangan keamanan yang akan dihadapi bangsa pada masa mendatang. Dalam perkembangan lingkungan strategis yang cepat, baik internal maupun eksternal, tampak bahwa sampai saat

ini, Indonesia tidak mengetahui peperangan seperti apa yang akan dihadapi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan konsep dan sistem serta operasionalisasinya di lapangan.

SISTEM DAN POSTUR PERTAHANAN

Pertahanan Indonesia harus dilihat dalam dua kerangka besar, yaitu secara konseptual sebagai Sistem Pertahanan Indonesia dan secara operasional sebagai Postur Pertahanan Indonesia. Dalam Sistem Pertahanan terdapat dua elemen utama, yakni aspek kewilayahan dan aspek sumber daya. Konsep kewilayahan dalam sistem pertahanan Indonesia membagi wilayah pertahanan Indonesia ke dalam pertahanan berlapis yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pertahanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Wilayah Yurisdiksi (Perairan Teritorial), dan Wilayah Pulau-Pulau Terdalam.

Berdasarkan konvensi UNCLOS 1982, ZEE sebuah negara terbentang sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dalam wilayah ini sebuah negara berhak memanfaatkan sumber daya alam dan juga potensi-potensi lain yang terkandung di dalamnya. Meskipun bukan merupakan wilayah teritorial sebuah negara, wilayah ZEE merupakan bagian dari kepentingan sebuah negara (*national interest*) yang sumber-sumber daya alam strategisnya banyak terkandung di dalamnya.²⁷ Dalam ZEE ini negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) atas sumber-sumber yang terkandung di dalamnya. Karena itu, pengamanan dalam wilayah ZEE ini esensial untuk dilakukan.

Wilayah Yuridiksi atau Perairan Teritorial merupakan wilayah yang terbentang sejauh 12 mil dari dari titik ujung terluar pulau-pulau di

Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut.²⁸ Wilayah inilah yang merupakan patok kedaulatan teritorial kedaulatan sebuah negara. Dalam wilayah ini konsep kedaulatan keruangan merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diperdebatkan. Kedaulatan yang dimaksud dalam hal ini juga meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya. Pelanggaran batas secara ilegal dan pelanggaran fisik lainnya terhadap wilayah ini merupakan sebuah ancaman nyata bagi eksistensi sebuah negara.

Wilayah Pulau Terdalam merupakan wilayah yang sangat krusial dalam aspek kedaulatan sebuah negara. Wilayah ini terbentang dari garis pantai hingga meliputi seluruh wilayah daratan yang dimiliki oleh sebuah negara. Dalam wilayah ini, terdapat obyek-obyek vital sebuah negara, pusat pemerintahan, perekonomian, dan juga ruang hidup bagi masyarakat. Di dalam wilayah inilah pengamanan atas ancaman-ancaman yang datang, baik dari luar maupun dari dalam menjadi sebuah hal yang sangat fundamental. Keberlangsungan eksistensi sebuah negara terletak pada penguasaan pertahanan dan keamanan dalam wilayah ini.

Dengan melihat ketiga konsep kewilayahan yang berlapis tersebut, dapat dicermati bagaimana sistem pertahanan sebuah negara dibangun. Apakah negara tersebut membangun sebuah sistem pertahanan berdasarkan konsep wilayah darat (kontinental), wilayah kelautan atau kepulauan? Dalam kasus Indonesia, misalnya, apakah pembangunan kekuatan laut akan diarahkan untuk membentuk *Brown Navy*, *Green Navy* atau *Blue Navy*? Pembangunan kekuatan laut ini didasarkan atas proyeksi kekuatan yang akan dilakukan oleh sebuah negara berdasarkan konsep kewilayahan.

Pada *Brown Navy*, kekuatan laut dibangun untuk menjaga wilayah di sekitar garis pantai sebuah negara dari ancaman yang akan datang. Sedangkan pada *Green Navy*, kekuatan laut dibangun untuk dapat menjaga wilayah dan menangkal ancaman yang akan datang di wilayah teritorial negara (20 mil laut). Sedangkan pada pembangunan kekuatan *Blue Navy* sebuah negara sudah diproyeksikan pembangunan kekuatan lautnya ke luar wilayah teritorialnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan-kepentingan nasional sebuah negara pada kawasan ZEE (20-200 mil laut) ataupun menjaga kepentingan nasional negara di kawasan lain di dunia.

Dalam aspek sumber daya, sistem pertahanan Indonesia terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, serta infrastruktur pertahanan yang secara umum dikategorisasikan ke dalam komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama adalah kekuatan yang telah diintegrasikan secara resmi dan dibina serta dikerahkan dalam kesatuan kekuatan militer suatu negara. Kekuatan ini dibagi kembali ke dalam tiga matra utama, yaitu darat, laut, dan udara. Sedangkan komponen pendukung dibagi menjadi kekuatan cadangan, infrastruktur pertahanan, dan kewajiban milisi.

Sampai saat ini, paling tidak sampai dengan 2012, kekuatan cadangan pertahanan Indonesia belum terbentuk secara terorganisasi atau terstruktur dalam TNI. Proses pembentukan komponen cadangan masih dalam taraf persiapan yang sedang dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan. Kegiatan yang sedang dilaksanakan terkait dengan komponen cadangan, antara lain, proses penetapan peraturan perundang-undangan, penghitungan kebutuhan kekuatan, dan penghitungan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembentukannya. Kekuatan cadangan ini berupa unsur-unsur militer

yang terlatih dan dapat dimobilisasi sewaktu-waktu dalam keadaan darurat untuk membantu ataupun menggantikan personel dari komponen utama. Besarnya kekuatan Komponen Cadangan sampai dengan 20 tahun yang akan datang ditargetkan mencapai 160.000 personel. Jumlah tersebut dialokasikan untuk cadangan TNI AD sebesar 130.000 orang, cadangan TNI AL sebesar 20.000 orang, dan cadangan TNI AU sebesar 10.000 orang.²⁹

Infrastruktur pertahanan sangat beragam. Secara umum unsur-unsur utama infrastruktur pertahanan terdiri dari: Industri Pertahanan, Transportasi dan Komunikasi, Logistik (pangan, energi, dan lain-lain), dan Riset Pertahanan. Sedangkan dalam subbagian Kewajiban Milisi, ada dua bagian yang dapat kita cermati, yaitu penyiapan warga negara untuk kepentingan pertahanan dan bela negara secara umum yang kemudian harus diikuti dengan penyiapan undang-undang dalam keadaan bahaya dan juga seperangkat peraturan untuk mekanisme mobilisasi.

Selain Sistem Pertahanan, yang juga perlu diperhatikan adalah Postur Pertahanan. Secara umum kerangka besar postur pertahanan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu kekuatan pertahanan, kemampuan pertahanan dan juga gelar pertahanan. Kekuatan pertahanan dalam postur pertahanan Indonesia dapat dilihat dari besaran kekuatan yang dimiliki oleh TNI, yaitu alutsista dan jumlah personel. Saat ini, jumlah personel TNI adalah 302.000 personel dengan rincian 233.000 personel Angkatan Darat, 45.000 personel Angkatan Laut dan 24.000 personel Angkatan Udara.³⁰ Sementara itu, sesuai dengan kategori dari *United Nations Registration of Conventional Arms* (UNROCA), alutsista terdiri dari tujuh kategori senjata konvensional, yaitu *Battle Tanks*, *Armoured Combat Vehicles*, *Large Calibre Artillery Systems*, *Combat Aircraft*, *Attack Helicopters*, *Warships*, dan *Missiles*.³¹

- *Battle Tanks*: Kendaraan beroda atau berantai berlapis baja dengan mobilitas tinggi dengan berat tanpa muatan minimal 16,5 metrik ton serta memiliki kaliber minimal meriam utama 75 mm. Pada 2011 tercatat Indonesia memiliki 275 *Battle Tanks*.
- *Armoured Combat Vehichels*: Kendaraan beroda, semi beroda, berantai atau semi rantai yang memiliki kemampuan lintas alam dan dilapisi dengan baja. Dirancang untuk mengangkut empat atau lebih pasukan infantri atau dipersenjatai dengan senjata integral ataupun organik dengan kaliber 12,5 mm ataupun peluncur rudal. Pada 2011 tercatat Indonesia memiliki 622 *Armoured Combat Vehichels*.
- *Large Calibre Artillery Systems*: Baik Meriam, howitzer maupun artileri yang menggabungkan karakteristik dari meriam, howitzer, mortir ataupun roket dengan sistem *multiple-launch* yang dapat menghancurkan target permukaan dengan kemampuan menembak tidak langsung dan memiliki kaliber 75 mm atau di atasnya. Pada 2011 tercatat Indonesia memiliki 1132 *Large Calibre Artillery Systems*.
- *Combat Aircraft*: Pesawat sayap tetap atau pesawat dengan desain sayap yang memiliki elemen geometri, dilengkapi atau dimodifikasi untuk menghancurkan target dengan menggunakan, baik misil, roket tak berpemandu, bom, senjata, meriam, maupun senjata penghancur lainnya termasuk pesawat dengan misi peperangan elektronik, pesawat penghancur pertahanan udara dan pesawat pengintai. Istilah “pesawat tempur” tidak termasuk pesawat latih utama, kecuali dirancang, dilengkapi atau diubah seperti penjelasan di atas. Pada 2011 tercatat Indonesia memiliki 32 *Combat Aircraft*.

- *Attack Helicopters*: Pesawat dengan sayap berputar yang didesain dilengkapi atau dimodifikasi untuk menghancurkan target dengan menggunakan roket antilapis baja, baik berpemandu maupun tidak, roket udara ke permukaan, udara ke bawah permukaan ataupun roket udara ke udara dan dilengkapi dengan pengontrol tembakan terpadu dan sistem penanda target untuk jenis senjata tersebut termasuk jenis dari pesawat ini yang dikhususkan untuk tujuan pengintaian ataupun misi peperangan elektronik. Pada 2011 tercatat Indonesia memiliki 6 *Attack Helicopters*.
- *Warships*: Baik kapal permukaan maupun kapal selam bersenjata untuk penggunaan militer dengan berat standar 750 metrik ton ke atas ataupun yang memiliki berat standar 750 metrik ton ke bawah, dilengkapi baik dengan peluncur rudal dengan jarak minimal 25 km maupun torpedo dengan jarak jangkauan yang sama. Pada 2011 tercatat Indonesia memiliki 36 *Warships*.
- *Missiles*: Baik roket berpemandu maupun tidak, rudal balistik, rudal jelajah yang mampu membawa baik hulu ledak maupun senjata pemusnah yang memiliki jarak minimal 25 km dan dirancang serta dimodifikasi khusus untuk dapat meluncurkan rudal dan roket tersebut.

Adapun kemampuan pertahanan sebagai bagian dari postur pertahanan merupakan aspek kualitatif dan fungsional dari kekuatan pertahanan yang dikelompokkan ke dalam empat kemampuan utama. Keempatnya adalah kemampuan pertahanan, kemampuan keamanan, kemampuan logistik, dan kemampuan intelijen.³²

- Kemampuan Pertahanan. Kemampuan Pertahanan mencakup mempertahankan udara nasional, pemukul strategis, dan

peperangan elektronika. Kemampuan mempertahankan udara nasional dikembangkan dengan melaksanakan pendeteksian, pengamatan, pengintaian dan perlindungan terhadap seluruh wilayah udara nasional. Kemampuan ini diselenggarakan oleh Kohanudnas dan unsur-unsur pertahanan udara dengan memaksimalkan sistem senjata pertahanan udara yang digelar di tiap matra.

- Kemampuan pemukul strategis disiapkan untuk menangani 4 *trouble spot* secara bersamaan, yang diselenggarakan oleh satuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, kekuatan pemukul laut dan udara strategis.
- Kemampuan pernika, disiapkan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI, meliputi alat peralatan pernika, sumber daya manusia yang mengawaki, serta pendukung lainnya.
- Kemampuan Keamanan. Kemampuan Keamanan mencakup: *Pertama*, kemampuan untuk mengamati dan mengamankan wilayah udara, laut, dan wilayah daratan, serta menempatkan wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terdepan dan terpencil sebagai daerah yang mendapat perlakuan khusus. *Kedua*, kemampuan penegakan hukum di laut dan udara nasional untuk mencegah dan mengatasi setiap pelanggaran-pelanggaran dan ancaman yang membahayakan kepentingan masyarakat dan nasional secara utuh. *Ketiga*, kemampuan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, seperti gerakan separatis, terorisme, pemberontakan bersenjata, insurjensi, perompakan, pembajakan, konflik komunal, dan gangguan keamanan lainnya yang penanganannya melalui operasi militer selain perang.

- Kemampuan Dukungan. Kemampuan Dukungan mencakup: *Pertama*, kemampuan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di luar fungsi pertahanan militer, seperti bantuan kemanusiaan dalam mengatasi dampak bencana alam dan buatan, pemogokan massal, dan bantuan lain dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat. *Kedua*, kemampuan untuk menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara dalam rangka Pertahanan Negara. *Ketiga*, kemampuan untuk memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. *Keempat*, kemampuan untuk membantu fungsi pertahanan nir-militer dalam rangka penyediaan logistik pertahanan, memperkuat diplomasi, survei dan pemetaan wilayah negara, penataan ruang nasional, kegiatan bela negara, serta penelitian dan pengembangan teknologi dan industri nasional untuk pertahanan. *Kelima*, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia atau tugas kemanusiaan pada lingkup internasional dan regional.
- Kemampuan Intelijen. Kemampuan Intelijen yang dikembangkan ke depan adalah keterpaduan 7 kemampuan, yakni *Human Intelligent* (*Humint*), *Imagery Intelligent* (*Imint*), *Measurement and Signal Intelligent* (*Masint*), *Communication Intelligent* (*Comint*), *Telemetry Intelligent* (*Telint*), *Electronic Intelligent* (*Elint*) dan *Open Source*

Kekuatan pertahanan Indonesia diproyeksikan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasional. Oleh karena itu, proyeksi gelar kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan bersifat ofensif dan provokatif, namun tetap untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan NKRI.

Intelligent (Osint). Kemampuan intelijen dikembangkan untuk menghindari pendadakan dan kegiatan spionase lawan, mendukung proses dan implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara, serta menyediakan informasi secara tepat dan akurat.

Intelijen Pertahanan Negara dikembangkan dalam tiga tingkat kemampuan, yakni tingkat intelijen strategis yang diemban oleh badan intelijen pertahanan (saat ini dilaksanakan oleh BAIS TNI); intelijen tingkat operasional yang diemban oleh badan intelijen militer; serta intelijen di tingkat operasional sampai tingkat taktis yang diemban oleh badan intelijen matra. Di tingkat badan intelijen pertahanan, lingkup kemampuan yang dikembangkan adalah kemampuan menganalisa sembilan komponen intelijen strategis yang meliputi: geografi, sejarah, politik, ekonomi, sosial budaya, transportasi & telekomunikasi, teknologi, biografi tokoh, militer. Untuk mewujudkan perannya, Intelijen Pertahanan Negara mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi dan sistem analisa. Lingkup kegiatan dan operasi intelijen mencakup penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, yang dilakukan secara terus menerus sesuai siklus Roda Perputaran Intelijen.

Pada tingkat operasional dan taktis, kemampuan intelijen yang dikembangkan meliputi : *Pertama*, kemampuan melaksanakan penyelidikan untuk mendeteksi faktor-faktor militer yang berkaitan dengan peringatan dini bagi semua tingkat komando jajaran TNI, dan di setiap matra untuk kepentingan operasi militer. *Kedua*, kemampuan melaksanakan pengamanan di bidang personel, materiil, informasi, dokumen, kegiatan militer, operasi dan obyek vital nasional yang bersifat strategis serta pengamanan terhadap VVIP dan VIP. *Ketiga*, kemampuan melaksanakan

penggalangan dan pembentukan opini dalam rangka menciptakan kondisi yang diharapkan bagi penyelenggaraan tugas-tugas operasi militer untuk perang dan selain perang. *Keempat*, kemampuan mengolah bahan keterangan intelijen menjadi ramalan guna kepentingan perkiraan intelijen baik operasional maupun strategis. *Kelima*, kemampuan melaksanakan lawan intelijen, pernika, lawan infiltrasi, dan lawan insurjensi. Intelijen Pertahanan Negara disusun dalam tataran organisasi Badan Intelijen Pertahanan Negara, Badan Intelijen Militer dan Badan Intelijen Matra yang terdiri atas matra darat, laut dan udara.

Sementara itu, gelar kekuatan pertahanan sebagai elemen ketiga postur pertahanan diarahkan untuk menghasilkan efek penangkalan (*deterrent effect*) dengan memperhatikan faktor ancaman, posisi geografis, dan efisiensi sumber-sumber yang tersedia. Untuk kepentingan ini, doktrin dan strategi pertahanan atas dasar keterpaduan tiga matra (darat, laut, dan udara) menjadi pilihan yang rasional yang operasionalisasinya diselenggarakan dengan membentuk Komando Wilayah Pertahanan. Akan tetapi, konsep gabungan yang dijalankan oleh ketiga angkatan masih kurang tepat, misalnya bahwa konsep tersebut hanya diterapkan pada masa latihan saja. Pada masa yang akan datang, gelar kekuatan pertahanan akan dibagi ke dalam lima Komando Wilayah Pertahanan.

Kekuatan pertahanan Indonesia diproyeksikan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasional. Oleh karena itu, proyeksi gelar kekuatan pertahanan Indonesia tidak akan bersifat ofensif dan provokatif, namun tetap untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan NKRI. Untuk itu, diperlukan pembangunan postur pertahanan untuk mewujudkan TNI yang profesional dan menempatkan TNI sepenuhnya di bawah supremasi otoritas

politik. Sebaliknya, otoritas politik sipil harus bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sepenuhnya bagi TNI dalam upaya memperkuat kapabilitas, sehingga TNI dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, kenaikan anggaran pertahanan secara bertahap menjadi hal yang penting.

Profesionalisme TNI dibangun melalui pembangunan postur pertahanan negara yang diselenggarakan secara bertahap, mulai dari 2012 sampai dengan 2029 yang dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama selesai pada 2014, tahap kedua yang akan dimulai pada 2014-2019, tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada 2020-2024, dan tahap keempat akan dilaksanakan pada 2025-2029. Pada pembangunan postur pertahanan tahap kedua, alokasi anggaran pertahanan untuk mewujudkan pembangunan postur pertahanan pada tahap II berkisar 2,2% sampai dengan 2,61% dari PDB.³³

Selain postur pertahanan yang ideal, persyaratan lain dari TNI yang profesional adalah terjaminnya kesejahteraan prajurit. Oleh karena itu, tahapan pembangunan pertahanan 2014-2019 hendaknya juga memperhatikan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Pembangunan postur pertahanan militer dapat diuraikan sebagai berikut ³⁴:

- TNI AD

Pada pembangunan postur pertahanan tahap kedua ini, TNI AD akan melanjutkan realisasi pembangunan Kostrad menjadi 4 divisi dan Pengembangan Penerbad (Penerbang angkatan darat) dalam melayani setiap Kodam dengan kekuatan 1 skuadron heli ringan, Grup Penerbad dan Lanudad (Landasan udara angkatan

darat). Penambahan beberapa unit skuadron heli angkut dan serbu. Pembangunan kekuatan Kewilayahan TNI AD pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan pemantapan kekuatan kewilayahan yang berdaya tangkal melalui pembentukan Makorem, Kodim, Koramil serta Mabrigif dan perkuatannya serta Mabrigkav dan pembentukan baru satuan Kodam yang terdiri dari Yonif Linud dan Yonif Raider secara bertahap dengan prioritas pada Kodam yang memiliki perbatasan darat dengan negara lain.

● TNI AL

Pembangunan Postur TNI AL pada Tahap II diarahkan untuk melanjutkan tahapan peningkatan kemampuan KRI, Pesud, Marinir dan Pangkalan. Pembangunan postur TNI AL tampak dalam tabel di bawah ini.

Striking Force	Submarine	3
	Light Frigates	7
	Corvette	3
	Anti-Submarine Warfare Patrol Boat	2
	Fast Missile Boat	4
Patrolling Force	Fast Patrol Boat	8
	Patrol Boat	60
Supporting Force	Landing Ship Tank	6
	Tanker	2
	Hydro Oceanography	1
	Coastal Troop Transport	2
	Patrol Minesweepers	1
	Fleet Tug	1

Sumber: Kementerian Pertahanan, *Postur Pertahanan Negara 2009-2029*

(Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2007)

● TNI AU

Pembangunan Postur TNI AU untuk melanjutkan pembangunan pada tahap I yang telah dirancang, melalui penambahan Skadron Udara, Satuan Radar, Satuan Rudal dan Satuan Meriam, Korpaskhasau dan Pangkalan Udara. Pembangunan postur TNI AU tampak dalam tabel di bawah ini.

Skadron udara	1 Skadron tempur	14 Multirole Fighter
	2 skuadron angkut ringan/ sedang	
	1 skuadron intai strategis	
	1 skuadron helicopter	
	1 skuadron latih dasar	
	1 skuadron latih lanjut	
Satuan radar	3 satuan radar	27 Satuan radar
Satuan rudal dan meriam Hanud	12 batalion PSU jarak pendek	
	5 batalion rudal baru jarak sedang	
Kopaskhas	4 skuadron	
	1 wing	

Sumber : Kementerian Pertahanan, Postur Pertahanan Negara 2009-2029
(Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2007)

Sesuai dengan UUTNI Pasal 11 Ayat (2), arah pembangunan postur pertahanan Indonesia diutamakan pada wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil

sesuai dengan kondisi geografis dan strategi pertahanan.³⁵ Hal ini dilakukan di antaranya untuk meminimalisasi potensi-potensi konflik perbatasan dan potensi pada daerah rawan lainnya. Untuk menjadikan TNI sebagai kekuatan yang andal, pembangunan postur pertahanan harus mempertimbangkan juga tren potensi ancaman yang berasal dari laut dan udara.

Pembangunan kekuatan maritim tidak hanya dibangun dari segi kuantitas, tetapi yang lebih penting juga adalah kualitas, seperti menggunakan teknologi persenjataan siluman dan nir-awak.

DINAMIKA ANCAMAN

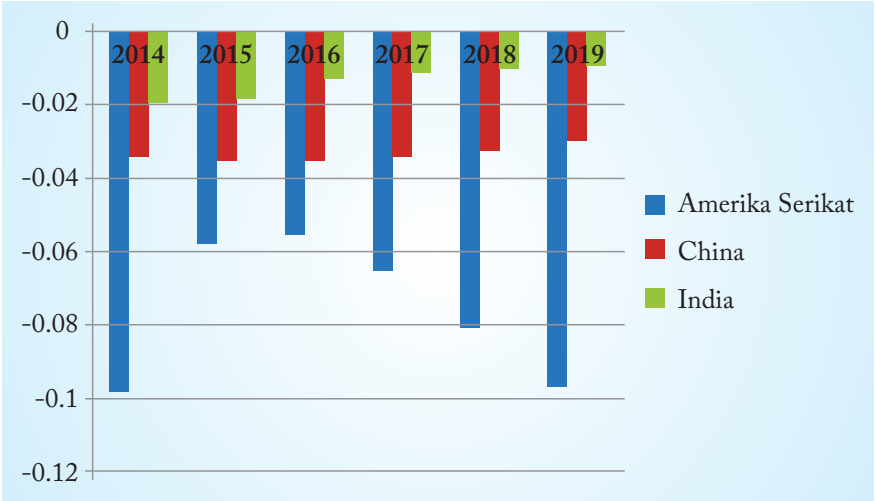
Terdapat beberapa aktor negara dan non-negara maupun isu yang menjadi potensi ancaman atau memberikan tekanan terhadap keamanan Indonesia pada 2014-2019. Aktor-aktor negara yang dapat mengancam atau menekan atau secara signifikan mempengaruhi keamanan Indonesia adalah negara-negara yang selama ini mempunyai kepentingan strategis dengan Indonesia, yaitu Amerika Serikat, China, India, Australia, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Sedangkan aktor-aktor non-negara yang diidentifikasi dapat mengancam keamanan Indonesia adalah ancaman *cyber*, ancaman situasional, sisa-sisa Gerakan Aceh Merdeka (GAM), organisasi kejahatan transnasional, Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta teroris.

Di bawah ini adalah beberapa grafik yang menggambarkan potensi ancaman atau tekanan para aktor terhadap keamanan Indonesia.

Garis 0 pada masing-masing grafik memiliki peran penting untuk menunjukkan aman atau tidaknya Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman dari aktor-aktor tersebut. Jika grafik suatu aktor berada di atas garis 0, Indonesia aman dari potensi ancaman tersebut. Sebaliknya, jika grafik aktor terkait berada di bawah garis 0, atau berada di bilangan negatif, Indonesia tidak aman dari potensi ancamannya. Penjelasan terkait dinamika potensi ancaman dari beberapa negara dijabarkan sebagai berikut:

Grafik 1. Dinamika Potensi Ancaman Amerika Serikat, China, dan India



Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

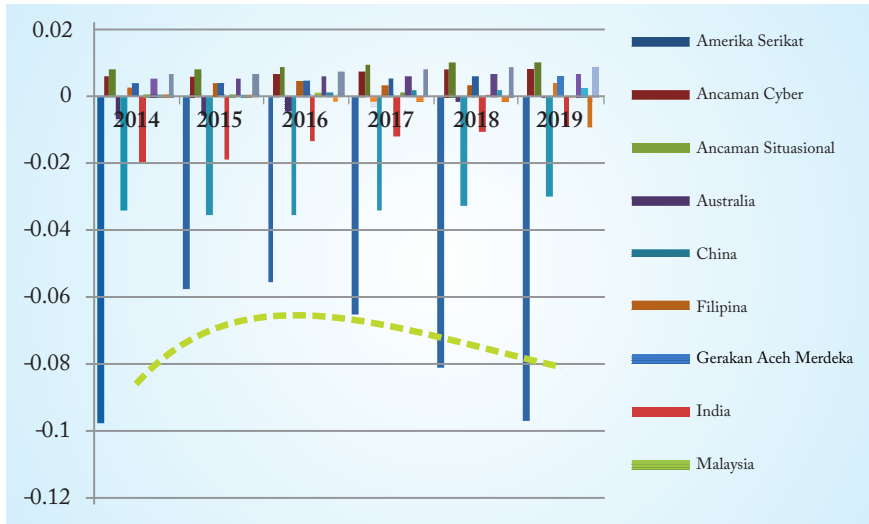
Hal pertama yang dapat dilihat dari grafik di atas adalah bahwa ketiga negara, Amerika Serikat, China dan India berada di bawah garis 0. Artinya, Indonesia tidak aman dari potensi ancaman yang

datang dari ketiga negara tersebut. Dari ketiga negara yang berada pada grafik di atas, Amerika Serikat memiliki potensi yang paling besar untuk menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia. Hal ini didasarkan pada perhitungan kekuatan militer AS dan kesiapan operasionalnya, terutama kemampuannya untuk melakukan kontrol dimensi-dimensi penting pertahanan dan keamanan wilayah serta senjata-senjata strategis pemusnah massal. Tentu hal ini tidak berarti bahwa AS akan melakukan serangan militer terhadap Indonesia, melainkan mampu melakukan kontrol terhadap titik-titik strategis di wilayah Indonesia. Selain itu dari berbagai aspek, AS mampu memberikan tekanan-tekanan politik terhadap Indonesia.

Tren potensi ancaman yang ditunjukkan oleh AS tampak fluktuatif pada lima tahun yang akan datang. Bermula sangat tinggi pada tahun 2014, kemudian turun cukup drastis pada dua tahun selanjutnya. Akan tetapi, mulai tahun 2017 hingga tahun 2019, potensi ancaman atau tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat mulai meningkat mendekati angka -0.1. Ini mungkin terkait dengan upaya AS untuk menghadapi peningkatan kekuatan militer dan manuver China di kawasan.

Perhitungan ini berarti bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat lemah dalam berhadapan dengan AS. Bahkan, dalam keadaan negatif yang ekstrem ancaman yang dihadirkan AS masih lebih besar daripada keseluruhan ancaman lain yang datang bersamaan, khususnya pada tahun 2014, 2018 dan 2019 sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. Peta Ancaman bagi Pertahanan Indonesia



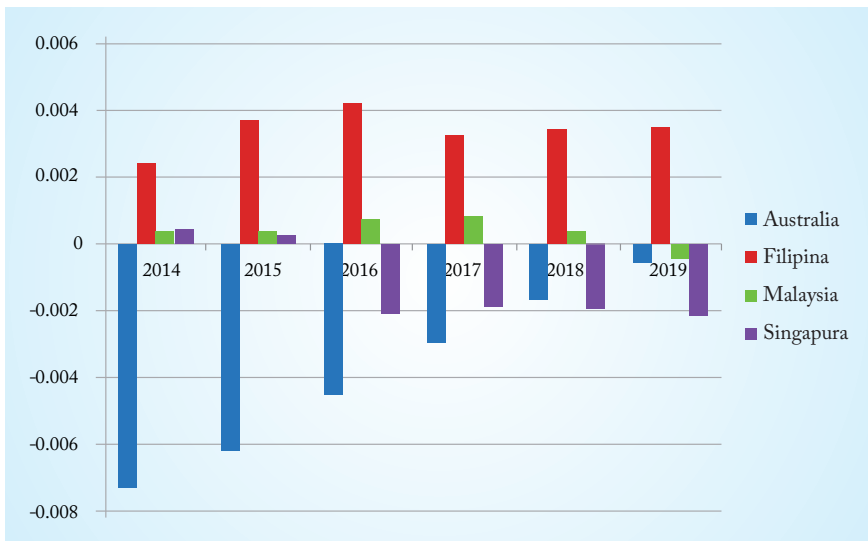
Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

China, yang disebut-sebut sebagai ‘calon pengganti kekuatan Amerika Serikat’ ternyata justru menunjukkan kecenderungan potensi ancaman yang menurun secara perlahan dari 2014 hingga 2019. Meskipun China melakukan pembangunan kekuatan militer, kekuatan militer China masih jauh lebih kecil daripada AS terlebih jika dilihat dari sebaran geografis penempatan militer dan jaringan aliansi AS di dunia. Selain itu, China akan cenderung berusaha menjalin hubungan baik dengan Indonesia dan ASEAN secara umum, seperti yang tampak dalam beberapa tahun terakhir. China juga membutuhkan lingkungan strategis yang mendukung kepentingan-kepentingan ekonominya. Oleh karenanya, sampai 2019, potensi ancaman yang dimiliki China tidak akan sebesar kekuatan yang ditunjukkan Amerika Serikat. Akan tetapi, penting

untuk dicatat, persaingan antara China dan Amerika Serikat yang mempengaruhi politik keamanan global dan regional tidak dapat diabaikan. Hal ini akan dianalisa lebih lanjut pada bagian Analisa Dinamika Ancaman.

Terakhir, India merupakan negara yang paling rendah potensi ancamannya dibandingkan dengan AS dan China. Selain itu, India juga menunjukkan tren yang menurun (mendekati angka 0). Bahkan, hingga 2019, potensi ancaman India hanya separuh dari potensi ancaman China.

Grafik 3. Dinamika Potensi Ancaman Australia, Malaysia, Singapura, dan Filipina



Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

Negara-negara yang ada pada grafik di atas memiliki satu persamaan, yakni secara geografis dekat dengan Indonesia. Berdasarkan

grafik di atas, Indonesia aman dari potensi ancaman Filipina, Malaysia dan Singapura. Filipina adalah satu-satunya negara di antara ketiga negara di atas yang selalu berada di atas garis 0, atau dengan kata lain yang potensi ancamannya selalu dapat dihadapi Indonesia.

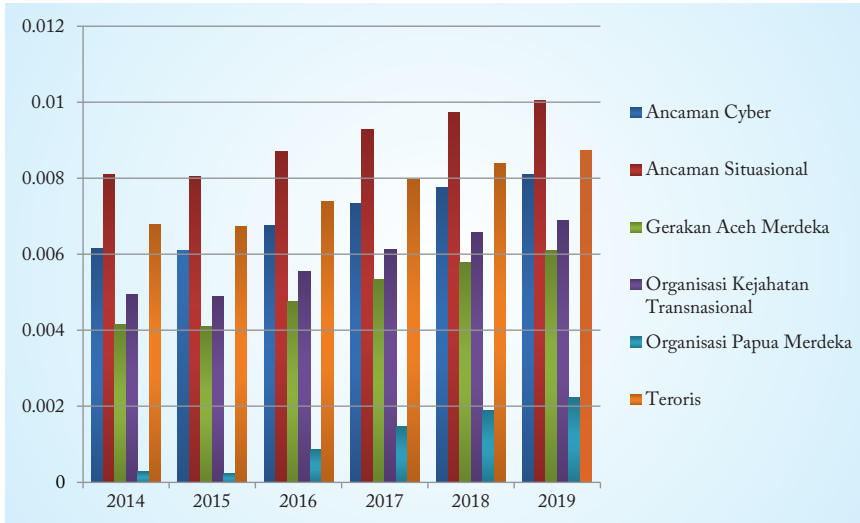
Pada 2014-2018, grafik potensi ancaman Malaysia terhadap keamanan Indonesia bernilai positif. Ini berarti, pada tahun-tahun tersebut Indonesia masih aman dari potensi ancaman Malaysia. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada 2019, potensi ancaman yang datang dari Malaysia justru bernilai negatif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya masalah-masalah keamanan antara kedua negara yang meliputi perbatasan, politik identitas, dan persaingan-persaingan yang berdimensi maritim. Meskipun demikian, potensi ancaman yang muncul dari Malaysia pada tahun tersebut tidak lebih besar dibandingkan dengan Singapura.

Singapura sendiri menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Pada 2014 dan 2015, Singapura bukanlah potensi ancaman yang berbahaya bagi Indonesia. Namun, mulai 2016 situasinya berubah, yaitu Singapura akan mempunyai kekuatan yang lebih besar. Sebab, Singapura akan menjadi bagian kuat dari strategi AS di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Pada periode 2018-2019 potensi ancaman Singapura akan melebihi potensi ancaman Australia. Hal ini dimungkinkan karena seiring dengan bertambah kuatnya Singapura karena AS, Australia mengutamakan kebijakan yang tidak ofensif baik untuk bidang militer, ekonomi maupun politik.

Berdasarkan grafik di atas, jelas terlihat bahwa Australia mempunyai kekuatan militer dan ekonomi yang besar yang ditopang oleh kemapanan sistem politik. Akan tetapi, kecenderungan politik yang berkembang menunjukkan tren bahwa Australia akan menjadikan Indonesia sebagai fokus kebijakan luar negeri (*Jakarta-Centric* dan bukan *Washington-Centric*) tanpa meninggalkan kerja sama dengan AS. Akibatnya, potensi ancaman militer Australia terhadap Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Terdapat fluktuasi hubungan Indonesia dan Australia karena kasus penyadapan, namun Australia tampaknya akan lebih membutuhkan Indonesia baik secara bilateral maupun dalam menghadapi masalah keamanan regional.

Berbeda dengan dua grafik sebelumnya, grafik berikut menunjukkan potensi ancaman yang berasal dari aktor-aktor non-negara. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Indonesia mampu mengatasi potensi ancaman non-negara. Semakin besar nilai menunjukkan semakin besar pula kemampuan Indonesia untuk mengatasi ancaman tersebut. Begitu pula sebaliknya. Dari sini dapat diketahui, nilai keamanan Indonesia terendah terhadap ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM), sedangkan yang tertinggi terhadap ancaman situasional. Jika tren kemampuan Indonesia menghadapi potensi ancaman dari OPM dilihat lebih teliti, terlihat nilainya semakin positif, terutama mulai 2016. Hal ini berarti, mulai 2016 hingga 2019, Indonesia lebih aman dalam menghadapi potensi ancaman yang datang dari OPM.

Grafik 4. Dinamika Potensi Ancaman Non-Negara



Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

Selanjutnya, grafik di atas menunjukkan, Indonesia lebih aman dari potensi ancaman yang berasal dari sisa-sisa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jika dibandingkan dengan yang berasal dari OPM. Namun, patut diperhatikan bahwa proyeksi ini didasarkan pada kondisi terkini GAM yang tidak aktif karena otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh telah bekerja dengan baik dalam meredam gerakan separatis. Oleh sebab itu harus dicegah munculnya kembali gerakan separatis akibat dari kegagalan otonomi yang dapat memperburuk situasi pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, Indonesia relatif lebih mampu menghadapi bencana alam, teroris, dan *cyber*. Indonesia telah memiliki pengalaman dan pengembangan kelembagaan dalam menanggulangi bencana alam. Selain itu, tingkat solidaritas masyarakat dalam menolong korban

dan memperbaiki infrastruktur kehidupan masyarakat juga sangat tinggi. Di tingkat negara, TNI dan aparat memiliki kesiapan untuk membantu menangani situasi bencana.

Indonesia relatif berhasil dalam menanggulangi terorisme. Ke depannya, tren ini akan terus berlanjut seiring dengan penguatan kapasitas penanggulangan terorisme di satu sisi, dan berubahnya metode dan target serangan terorisme di sisi lain. Sebagai contoh, penyerangan terhadap hotel-hotel internasional dan tempat hiburan malam telah berkurang. Justru serangan-serangan teroris kini lebih banyak dilakukan terhadap tempat-tempat yang berafiliasi pada agama tertentu (gereja dan masjid) dan simbol-simbol negara, namun selalu pada skala yang kecil.

Masalah-masalah *cyber* yang saat ini mulai menjadi pusat perhatian banyak kalangan belum menjadi ancaman utama yang mendasari pembuatan berbagai kebijakan keamanan. Penyebabnya adalah karena aktivitas-aktivitas negara dan publik belum terjejaring secara maya. Hal ini berbeda dengan AS yang sudah memiliki sistem yang terintegrasi. Begitu satu bagian diserang, maka informasi dari sistem lainnya dengan mudah untuk diperoleh. Inilah alasan mengapa Indonesia masih aman dari ancaman *cyber*. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ancaman dan serangan *cyber* akan menjadi ancaman dan modus peperangan yang makin meningkat pada masa yang akan datang.

Identifikasi Dinamika Ancaman pada penjelasan sebelumnya menunjukkan ancaman kekuatan dan kemampuan masing-masing aktor terhadap Indonesia. Aspek lain yang harus dilihat dalam

menganalisa ancaman adalah interaksi strategis antara aktor-aktor tersebut yang membentuk situasi tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pada bagian ini akan dijabarkan dengan lebih jelas bagaimana interaksi antara aktor-aktor tersebut berpengaruh pada keamanan Indonesia.

1. Persaingan AS-China

Pasca berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, banyak kalangan meramalkan, sistem internasional akan menjadi unipolar, yaitu munculnya AS sebagai satu-satunya kekuatan besar (*the sole superpower*) yang mampu memikul tanggung jawab sebagai hegemon. Akan tetapi, unipolaritas (*the unipolar moment*) ternyata berakhir lebih cepat. Hegemoni AS memperoleh tantangan dari kekuatan-kekuatan baru dalam persaingan di tingkat global ³⁶.

Dalam dua dekade terakhir, China tumbuh sebagai kekuatan baru di tingkat global. Sebagaimana juga ditunjukkan oleh identifikasi dinamika ancaman di atas, China masih akan menjadi negara yang paling mampu mendekati kekuatan dan kemampuan AS di tingkat global. Bahkan, dilihat berdasarkan belanja militer, jika tren tidak berubah, China akan mengungguli AS pada sekitar dekade 2030-an. Dalam perkembangan situasi seperti ini, tantangan bagi sistem internasional adalah bagaimana AS, sebagai negara terkuat *status-quo*, akan merespon peningkatan kekuatan dan kemampuan China. Sejarah menunjukkan, ketika suatu negara meningkatkan kemampuan dan kekuatannya secara signifikan yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan global, negara atau kekuatan *status-quo* akan merespon

dengan melakukan politik pengimbangan (*balancing*).³⁷ Interaksi strategis antara *rising state* dengan *status-quo state* yang melakukan *balancing* biasanya akan berakhir dengan perang. Hal yang demikian terjadi, misalnya, pada paruh pertama abad 1900-an ketika upaya Jerman untuk menguasai Eropa direspon oleh negara-negara *status-quo* yang akhirnya memicu Perang Dunia I dan II.

Interaksi strategis antara AS dan China menjadi semakin relevan bagi Indonesia karena persaingan fisik antara keduanya terjadi di kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini dalam beberapa tahun yang akan datang akan menyaksikan persaingan kekuatan laut. China saat ini sudah memiliki kapal selam nuklir strategis dan diperkirakan akan mengembangkan kekuatan kapal selamnya. Diperkirakan pada 2016, China sudah akan menantang supremasi kekuatan laut Amerika Serikat di kawasan. China merencanakan pengadaan 5 kapal selam nuklir baru, 30 kapal selam serang, dan kapal induk nuklir. Pada 2011, China telah meluncurkan kapal induk baru. Menurut Congressional Research Service, China akan memiliki sekitar 72 kapal selam serang modern sampai dengan 2020.³⁸

Meskipun tidak secara resmi disebutkan bertujuan untuk merespon peningkatan kekuatan China, pemerintah AS telah mengubah fokus kebijakan luar negerinya dengan berusaha menjamin kehadirannya di kawasan Asia Pasifik. Menurut Council on Foreign Relations, arah kebijakan AS di Asia Pasifik mencakup upaya memperkuat aliansi-aliansi tradisional, seperti dengan Jepang dan Korea Selatan; memperkuat hubungan kemitraan dengan negara-negara lain di kawasan; mengelola dan mengembangkan hubungan yang kooperatif dengan China;

berpartisipasi dan bekerja sama melalui mekanisme-mekanisme multilateral di kawasan; mengembangkan dan memperkuat hubungan dagang, baik bilateral maupun melalui skema multilateral (misalnya melalui Trans-Pacific Partnership).

Menurut pemerintah China, peningkatan kekuatan militer dan perluasan proyeksinya dijustifikasi sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan-kepentingan nasional, termasuk masalah integritas teritorial (mencakup masalah Taiwan dan Xinjiang) dan upaya mempertahankan kedaulatan di wilayah Laut China Selatan.³⁹ Dengan adanya klaim pemerintah China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan, wilayah tersebut menjadi perimeter pertahanan dan proyeksi kekuatan China.

Di sisi lain, kehadiran AS di Laut China Selatan dijustifikasi sebagai upayanya untuk menjamin kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) di wilayah tersebut. Laut China Selatan sendiri terhubung dengan jalur-jalur perdagangan dan transportasi minyak utama dunia. Lebih dari setengah jumlah total tonase perdagangan dunia per tahun melewati Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar. Jumlah minyak bumi yang melewati Selat Malaka untuk terus ke Laut China Selatan adalah enam kali lebih banyak dari yang melewati Terusan Suez, dan 17 kali lebih banyak dari yang melewati Terusan Panama.⁴⁰ Selain itu, sepersepuluh dari jumlah produksi sektor perikanan dunia berasal dari Laut China Selatan. China sendiri, 80% impor minyak mentahnya melewati jalur ini.⁴¹

Bagi AS, Laut China Selatan yang bebas dilalui oleh kapal-kapal dagang dan militer merupakan sebuah kepentingan nasional dan kepentingan keamanan internasional yang harus dipertahankan

meskipun dengan biaya yang besar. Hal ini terkait dengan kepentingan AS untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara-negara sekutunya di kawasan Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Menjadi paradoks ketika sesungguhnya dengan menjamin kebebasan navigasi di Laut China Selatan, AS juga sedang menjamin

keberlangsungan pertumbuhan ekonomi China. Interdependensi kompleks yang terjalin antara China dan negara-negara Asia Timur dengan AS membuat AS juga bergantung pada pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan, sekitar 30% sektor tenaga kerja AS bergantung pada keamanan di kawasan Asia Timur. Dengan kondisi yang demikian, potensi konflik menjadi sangat nyata di wilayah Laut China Selatan dan menimbulkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi keamanan Indonesia pada masa depan.

Secara geopolitik, Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk berperan sentral dalam mencegah dan mengelola potensi konflik antara AS dan China di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara yang berada tepat di tengah pusaran konflik hegemonik ini, Indonesia seharusnya dapat menghadirkan inisiatif-inisiatif pengaturan keamanan yang dapat menjamin stabilitas kawasan dan global. Hal ini tentu saja sudah dimulai melalui kerangka kerja sama multilateral seperti *ASEAN Maritime Forum* serta *Extended Maritime Forum*, *ASEAN Regional Forum* dan *East Asia Summit*, di mana AS dan China sama-sama berada di dalamnya.

Secara geopolitik, Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk berperan sentral dalam mencegah dan mengelola potensi konflik antara AS dan China di kawasan Asia Pasifik.

Tantangan justru hadir dari ketidakmampuan ASEAN, sebagai motor kerangka kerja sama multilateral tersebut, untuk mengarahkannya menuju pembentukan kerangka pengaturan keamanan yang benar-benar kontributif terhadap stabilitas kawasan dan global. Hal ini antara lain disebabkan oleh kelemahan institusional ASEAN sendiri yang pada beberapa isu penting, seperti penetapan Kode Perilaku (*Code of Conduct*), tidak mampu untuk berbicara dalam satu suara, dan masih terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara anggota ASEAN sendiri. Sebagian negara masih berada dalam pengaruh China, sedangkan sebagian yang lain berada dalam pengaruh AS. Kondisi ini tentu saja justru menjadikan ASEAN sebagai ajang perebutan pengaruh antara AS dan China yang pada akhirnya dapat menghambat upaya menuju pembentukan kerangka pengaturan keamanan kawasan serta mengelola potensi konflik. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah: (1) secara aktif mengeluarkan inisiatif-inisiatif baru bagi pengelolaan potensi konflik antara China dan AS beserta sekutu-sekutunya di kawasan, serta (2) secara multilateral menghilangkan perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota ASEAN dan mewujudkan sentralitas ASEAN yang sesungguhnya dalam pengelolaan potensi konflik.

2. Persaingan regional

Di tingkat regional, ancaman terhadap keamanan Indonesia hadir melalui potensi-potensi konflik dengan negara-negara tetangga. Di kawasan Asia Tenggara, salah satu isu penting yang dapat memicu konflik adalah sengketa wilayah dan perbatasan. Selain rumitnya proses negosiasi dengan negara-negara yang

terlibat, sengketa wilayah dan perbatasan juga dipengaruhi oleh kurangnya perhatian pemerintah untuk mengedepankan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan baik dari aspek sosial-ekonomi maupun pertahanan-keamanan.

Isu perbatasan menjadi isu yang penting karena beberapa hal. *Pertama*, isu perbatasan menyangkut persoalan wilayah, yang berarti juga berkaitan langsung dengan masalah kedaulatan dan eksistensi negara. *Kedua*, perbatasan selalu mempunyai nilai strategis. *Ketiga*, perbatasan merupakan pintu terdepan interaksi fisik dengan negara dan kekuatan eksternal. Sejumlah negara secara geografis terlokasi sedemikian rupa sehingga isu perbatasan dapat dikelola dengan lebih leluasa. Hal yang demikian tidak berlaku bagi Indonesia. Karena berada pada wilayah yang terbuka, dengan alur laut yang menyediakan akses bagi pelayaran internasional, serta merupakan persimpangan interaksi internasional, perbatasan menjadi salah satu sumber potensi ancaman bagi keamanan Indonesia.

Di laut, batas wilayah Indonesia terdiri atas batas laut teritorial, batas ZEE, batas landas kontinen dan batas zona tambahan. Di wilayah-wilayah itu, kondisi umum yang terjadi adalah adanya pelanggaran batas laut, baik oleh aparat negara tetangga maupun masyarakatnya serta kegiatan ilegal lainnya. Selain itu, sejumlah garis-garis batas antara Indonesia dan negara-negara tetangga juga belum disepakati, misalnya, antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas ZEE di Selat Malaka dan Laut China Selatan serta Laut Sulawesi. Sementara Indonesia menghendaki landas kontinen dan

ZEE berada pada dua rejim yang berbeda (garis batas yang berbeda), Malaysia menghendaki batas landas kontinen dan ZEE berada pada satu garis yang sama (*single line*).⁴²

Selain itu, mengenai kepanjangan garis *Provisional Territorial Sea Boundary* (PTSB) di blok Ambalat juga belum disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia hingga perundingan teknis ke-22.⁴³ Indonesia juga masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian utara Pulau Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia.⁴⁴ Sementara itu dengan Filipina, Indonesia belum menyepakati dua segmen garis batas ZEE di Laut Sulawesi.⁴⁵

Garis batas ZEE antara Indonesia dan India juga belum disepakati.⁴⁶ Hal ini menyebabkan sering terjadinya penangkapan nelayan Indonesia oleh India dan sebaliknya. Dengan Papua Nugini, Indonesia juga sesungguhnya memiliki persoalan perbatasan laut, di mana kedua negara belum menyepakati penetapan luas daerah Hak Tradisional Nelayan dan bentuk/sifat kegiatannya.⁴⁷ Dengan Timor Leste, persoalan penetapan batas laut menjadi lebih pelik karena harus melibatkan Australia dalam sebuah kerangka perjanjian multilateral.⁴⁸ Hal ini karena sebelum berdiri sebagai negara, ketetapan garis batas yang berlaku di wilayah tersebut adalah perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia di Celah Timor (*Timor Gap Treaty*).⁴⁹ Ditambah lagi, persoalan perbatasan laut antara Indonesia dan Timor Leste di sebelah Utara di antara Selat Ombai dan Selat Leti erat kaitannya dengan penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).⁵⁰

Selanjutnya dengan Singapura, Indonesia belum menyepakati garis batas laut di wilayah Selat Singapura segmen timur II (perairan sekitar South Ledge-Middle Rock-Pedra Branca), khususnya mengenai kepemilikan *South Ledge*.⁵¹ Perundingan ini akan cukup pelik karena akan melibatkan tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) sehubungan dengan keputusan *International Court of Justice* (ICJ) atas kepemilikan Karang Pedra Branca oleh Singapura dan *Middle Rock* oleh Malaysia.⁵² Batas ZEE antara Indonesia dan Thailand di perairan Utara Selat Malaka juga belum selesai ditetapkan/dirundingkan. Hal ini akan menyebabkan permasalahan penegakan hak berdaulat dan hukum di batas ZEE, khususnya batas bagi nelayan penangkap ikan.⁵³ Dengan Palau, negara kepulauan kecil di sebelah Utara Papua, Indonesia juga memiliki persoalan perbatasan, di mana penarikan zona perikanan yang diperluas 200 mil laut sesuai rezim ZEE oleh Palau akan tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia.⁵⁴ Dengan belum adanya batas maritim, dalam hal ini batas ZEE, akan menghambat pengelolaan sumber daya laut di wilayah itu serta penegakan hukumnya. Dengan demikian, Indonesia bermaksud mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim dengan melalui perundingan.

Di darat, Indonesia juga memiliki sejumlah persoalan perbatasan dengan beberapa negara. Dengan Timor Leste, Indonesia belum menyepakati garis batas di wilayah Oecussi yang merupakan wilayah *exclave* yang termasuk dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.⁵⁵ Dengan Malaysia, perundingan terkait kepemilikan wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan di pulau Kalimantan masih belum selesai.⁵⁶ Dengan Papua Nugini, Indonesia juga memiliki persoalan di mana pemerintah Papua

Nugini beberapa kali melayangkan protes terkait masuknya imigran ilegal dari Indonesia ke wilayah Papua Nugini yang menimbulkan masalah repatriasi bagi negara tersebut.

Di udara, persoalan perbatasan sebagian besar sesungguhnya bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi hanya oleh Indonesia. Belum adanya ketentuan khusus mengenai delimitasi batas horizontal dan vertikal dari wilayah udara negara hingga saat ini, dapat juga menjadi potensi ancaman bagi keamanan Indonesia. *Status-quo*, wilayah udara negara secara horizontal didelimitasi sesuai dengan ketentuan batas darat dan laut, di mana yang menjadi wilayah udara nasional (*national airspace*) adalah wilayah udara yang berada di atas wilayah teritorial darat dan laut teritorial. Sedangkan secara vertikal, wilayah udara negara didelimitasi dengan ketentuan wilayah udara nasional adalah 0-±110 km di atas permukaan laut, dan selebihnya merupakan ruang antariksa (*outer space*) sebagai kawasan kepentingan internasional.

Ketiadaan ketentuan khusus mengenai pengaturan batas udara ini sering menyebabkan wilayah ruang udara lebih ditentukan oleh kemampuan negara tertentu untuk memanfaatkan. Sebagai contoh kasus, berdasarkan keputusan pertemuan *Regional Air Navigation* (RAN) 1946, Indonesia diharuskan mendelegasikan kontrol ruang udaranya di wilayah Kepulauan Riau (mencakup Batam, Tanjung Pinang dan Natuna) kepada Singapura.⁵⁷ Hal ini karena Indonesia ketika itu dianggap belum mampu mengontrol wilayah udaranya sendiri. Kewenangan yang dimiliki Singapura itu disebut *Flight Information Region* (FIR). Berdasarkan mandat dari pertemuan RAN 1946 itulah, seluruh pesawat, termasuk pesawat militer Indonesia, yang ingin mendarat, lepas landas atau sekadar melintas di atas Batam, Tanjung Pinang dan Natuna,

wajib diinformasikan kepada Singapura dan harus mendapat izin Singapura.⁵⁸

Selain itu, pemerintah Singapura, atas nama pemerintah Indonesia, juga diberi hak untuk memungut *fee* atau bayaran dari seluruh maskapai yang melintasi FIR, termasuk *fee* dari maskapai Malaysia yang melintas dari kota-kota Semenanjung Malaysia ke Malaysia Timur di Kalimantan dan sebaliknya.⁵⁹ Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagian dari *fee* ini memang disetor kepada pemerintah Indonesia, akan tetapi jumlah sebenarnya dari *fee* penerbangan yang dipungut oleh Singapura tentu saja sulit untuk diketahui. Total wilayah penguasaan Singapura atas wilayah udara Indonesia melalui FIR mencapai 100 *nautical mile* (± 200 km).⁶⁰

Penguasaan wilayah udara Kepri oleh otoritas Singapura tentu saja menjadi sumber kerugian sekaligus potensi ancaman bagi keamanan Indonesia. Selain aspek ekonomi di mana Singapura berhak memungut *fee* penerbangan di wilayah tersebut, penguasaan Singapura atas wilayah udara Kepulauan Riau juga dapat menimbulkan ancaman pada aspek pertahanan. Militer Singapura diketahui acapkali melakukan latihan militer di wilayah udara Indonesia yang masuk area FIR.⁶¹ Pada 2003, pemerintah Indonesia telah menghentikan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) yang membolehkan militer Singapura melakukan latihan di wilayah udara Indonesia (*Military Training Area I* yang meliputi sebelah barat daya Singapura hingga wilayah Batam dan Tanjung Pinang, dan *Military Training Area II* yang meliputi sisi timur Singapura hingga Kepulauan Natuna). Akan tetapi faktanya, Satuan Radar

Indonesia di wilayah tersebut, yakni Satuan Radar 213 Tanjung Pinang dan Satuan Radar 212 Natuna, sering menangkap pergerakan pesawat asing, khususnya pesawat militer Singapura yang melakukan *black flight* di MTA I dan MTA II.⁶²

Keleluasaan pesawat militer Singapura untuk terbang jauh masuk ke dalam wilayah udara Indonesai tentu saja menjadi sumber ancaman bagi keamanan Indonesia. Di sisi lain, pelaksanaan operasi dan penegakan huukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natuna yang dilaksanakan baik oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melalui Komando Sektor I (Kosek I), dan juga oleh TNI AL yang melakukan Operasi Maritim, kerap terkendala karena pengendalian ruang udara wilayah itu ada pada *Air Traffic Control* (ATC) Singapura.

Jika ditarik kesimpulan secara umum, ancaman yang dihadirkan oleh adanya persoalan perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga, antara lain, *pertama*, potensi pecahnya konflik di perbatasan. Setiap negara tentu memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayah perbatasannya, karena ini menyangkut masalah kedaulatan dan eksistensi negara. Hal ini biasanya dilakukan dengan menempatkan militer di wilayah-wilayah perbatasan, baik perbatasan darat, laut maupun udara. Dengan klaim perbatasan yang masih tumpang tindih, pergesekan antara militer Indonesia dan negara-negara tetangga di wilayah perbatasan menjadi sangat mungkin terjadi. Hal ini, jika tidak diantisipasi dapat menjadi sumber konflik yang lebih besar antara Indonesia dan negara-negara tetangga.

Kedua, hilangnya wilayah karena salah urus, baik secara fisik maupun administratif. Pengalaman Pulau Sipadan dan

Ligitan seharusnya mengajarkan pemerintah Indonesia bahwa pengelolaan pulau-pulau terluar melalui kehadiran negara secara fisik dan pengelolaan administratif menjadi mutlak jika wilayah perbatasan ingin diamankan. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional untuk menangani masalah perbatasan, penguatan kapasitas pemerintah dan aparat daerah perbatasan serta pengembangan sentra-sentra ekonomi masyarakat perbatasan, pembangunan pos-pos lintas batas dan penguatan patroli darat, laut dan udara, pengembangan kemampuan patroli melalui udara, sosialisasi kepada masyarakat perbatasan tentang pentingnya batas negara dan penghormatan batas negara, serta peningkatan pemahaman berbagai ketentuan hukum internasional, baik di kalangan aparat pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.

Ketiga, hilangnya kekayaan alam dan sumber ekonomi yang diperkirakan, Indonesia mengalami kerugian hingga 2-4 milyar dolar AS/tahun pada sektor perhutanan, 3 milyar dolar AS/tahun pada sektor perikanan. Diperkirakan sekitar 3.000 kapal beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia), 2-2,5 milyar dolar AS/tahun melalui penyelundupan pasir, 5 milyar dolar AS/tahun melalui penyelundupan minyak.⁶³ *Keempat*, perdagangan lintas batas ilegal. *Kelima*, munculnya ancaman-ancaman transnasional seperti terorisme dan penyelundupan manusia. *Keenam*, munculnya ancaman ideologis serta politis (memudarkan rasa ke-Indonesia-an). *Ketujuh*, melemahnya legitimasi negara.

Selain isu perbatasan, isu lain di tingkat regional yang berpotensi mengancam keamanan Indonesia adalah perubahan arah kebijakan kekuatan-kekuatan regional dan interaksi strategis

yang terjalin di antara negara-negara tersebut. Dua negara yang harus mendapat perhatian di sini adalah India dan Australia.

Didorong oleh kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, India menaruh perhatian lebih terhadap perkembangan di Asia Pasifik. Sejak 1991, India menerapkan kebijakan *Look East Policy* (LEP). Melalui kebijakan ini India berusaha mengintegrasikan ekonominya dengan kawasan Asia Timur. Hal ini dilakukan mengusahakan, secara bilateral, terbentuknya *Free Trade Area* (FTA) dengan negara-negara di Asia Timur. Harapannya adalah perjanjian-perjanjian FTA bilateral ini dapat mencakup seluruh negara di kawasan Asia Timur, dan dengan demikian mengintegrasikan sepenuhnya India ke dalam komunitas ekonomi Asia Timur. Selain inisiatif bilateral, India juga secara politik terlibat aktif dalam forum-forum multilateral seperti *East Asia Summit*, ADMM Plus dan ARF.

Kebijakan India untuk terlibat aktif di Asia Timur memunculkan masalah dengan China. Hingga saat ini, faktor rivalitas antara India dan China, meskipun mulai berkurang, masih menjadi salah faktor penting yang menentukan dinamisme lingkungan strategis di Asia Timur. Sebelumnya, India benar-benar mengucilkan China dari inisiatif-inisiatif kerja sama ekonomi yang digagas India. *The Bay of Bengal Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation* dan *Mekong-Gangga Cooperation*, inisiatif kerja sama regional yang digagas India pada dekade 1990an, misalnya, benar-benar didesain untuk mengimbangi perluasan pengaruh China di kawasan.⁶⁴

Rivalitas India dan China diperburuk dengan masih terdapatnya sengketa perbatasan antara kedua negara. Pada masa depan, faktor

rivalitas India dan China ini agaknya masih akan menjadi faktor penting yang membentuk lingkungan strategis di kawasan yang jika tidak dicermati dengan baik dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi Indonesia.

Demikian juga halnya dengan Australia yang menyadari betul pentingnya Asia dalam perumusan arah kebijakan luar negerinya. Australia akan menjadi salah satu aktor yang semakin penting dalam konstelasi politik kawasan pada tahun-tahun mendatang. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kesadaran pemerintah Australia sendiri untuk ikut terlibat dalam percaturan politik kawasan di Asia. Pada 2012, pemerintah Australia merilis dokumen *Australia in the Asian Century: White Paper*.⁶⁵ Dalam dokumen itu pemerintah Australia menunjukkan perhatiannya terhadap perkembangan yang terjadi di Asia (*the rise of Asia*).⁶⁶ Berdasarkan hal itu, pemerintah Australia menetapkan visinya bahwa pada 2025 negara tersebut akan menjadi lebih makmur dan memiliki ketahanan serta menjadi bagian yang integral dari kawasan Asia. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu cara yang ditempuh Australia adalah apa yang disebutnya sebagai *“building sustainable security in the region”*.⁶⁷

Pemerintah Australia melihat tiga tantangan terhadap keamanan kawasan, yaitu: (1) dampak dari pertumbuhan ekonomi Asia yang memicu peningkatan permintaan terhadap sumber daya serta konsekuensi lingkungan yang ditimbulkannya, (2) pertumbuhan ekonomi dan kepentingan-kepentingan kekuatan regional, terutama China dan India, serta (3) aktivitas aktor-aktor non-negara. Khusus mengenai China, Australia melihat bahwa hubungan China dengan AS akan menjadi salah satu

pertimbangan penting dalam konstelasi keamanan kawasan.⁶⁸ Dalam konteks tersebut, Australia melihat perannya dalam berkontribusi terhadap keamanan kawasan akan dilakukan melalui penguatan aliansi dengan AS.

“We consider a strong and consistent presence by the United States in the region will continue to be as important in providing future confidence in Asia’s rapidly changing strategic environment as it has in the past. We will support this through our alliance with the United States(Australia, 2012).”⁶⁹

Australia menyadari betul peran Indonesia sebagai salah satu *emerging power* sekaligus negara terbesar di ASEAN. Untuk itu, berbagai bentuk kerja sama seperti latihan bersama, patroli bersama dan lain sebagainya, disiapkan oleh pemerintah Australia untuk mendekati Indonesia.

“As regional countries modernise their defence forces, these programs are opening up opportunities for us to pursue deeper strategic and security partnerships. We will direct increasing effort in the period ahead to the development of deeper defence cooperation, joint exercises and other forms of defence and security engagement with our neighbours, particularly Indonesia, other Southeast Asian countries, Japan, South Korea, India and China(Australia, 2012).”⁷⁰

Aspirasi Australia untuk mendekatkan diri dengan Asia dapat membuka sejumlah kesempatan bagi Indonesia. Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari sejumlah kerja sama keamanan yang ditawarkan oleh pemerintah Australia. Meskipun demikian, sikap dan pandangan Australia terhadap hubungan AS dan

China dapat berpotensi menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Dengan posisinya sebagai aliansi AS, peran aktif Australia dalam hubungan antar kedua kekuatan besar tersebut justru dapat menambah kerumitan konstelasi keamanan kawasan. Terlebih Australia akan banyak mengembangkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat dalam kerangka Indo-Pacific yang tidak jauh dari titik-titik strategis di Indonesia.

Perluasan proyeksi keamanan China, yang sebagian diarahkan ke kawasan Asia Tenggara, juga dapat memicu Australia untuk terus mempercepat penguatan kapabilitas pertahanannya serta semakin menguatkan hubungannya dengan AS. Dalam kondisi yang demikian, Indonesia dapat berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan antara perluasan proyeksi kekuatan China dan respon Australia yang didukung AS. Kondisi yang demikian dapat dihindari, salah satunya, dengan mempercepat pembangunan kapabilitas pertahanan Indonesia sendiri sehingga dapat memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dalam konstelasi keamanan kawasan.

Perkembangan konstelasi kawasan ini menunjukkan bahwa hubungan-hubungan ekonomi tidak serta-merta menghilangkan karakter dasar negara untuk bertahan (*survive*) dan bersaing yang membawa implikasi pada pentingnya pembangunan kekuatan militer. Banyak negara masih berpegang pada paradigma ini dan *worst-case scenario* dalam hubungan antarnegara.

3. Kejahatan Transnasional

Ralf Emmers menjelaskan, kejahatan transnasional dapat dilihat, baik dari perspektif kejahatan maupun keamanan (Emmers,

2003).⁷¹ Sebagai tindak kejahatan, kejahatan transnasional harus dibedakan dari kejahatan internasional yang dapat ditangani melalui hukum-hukum internasional, serta dibedakan dari kejahatan domestik yang hanya membutuhkan penanganan melalui hukum domestik.⁷² Suatu kejahatan baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional apabila ia melampaui batasan-batasan dan yurisdiksi negara. Dengan kata lain, dalam diskursus kejahatan, tindakan tersebut berkaitan dengan aspek legal. Terdapat 18 kategori kejahatan transnasional, termasuk di antaranya berupa pencucian uang, aktivitas terorisme, pembajakan di laut, perdagangan manusia, serta perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Di sisi lain, jika dikaji dalam diskursus keamanan, kejahatan transnasional ditangani melalui sekuritisasi, di mana *referent object* yang terancam adalah kedaulatan negara terhadap aspek politik, ekonomi, serta sosialnya.⁷³

Di ASEAN, kejahatan transnasional dilihat sebagai isu keamanan (Emmers, 2003) yang memungkinkan penggunaan berbagai pendekatan dan kerja sama keamanan dalam mengatasinya.⁷⁴ Upaya ASEAN untuk menumpas kejahatan transnasional sebagai isu keamanan dapat dilihat pada pembuatan berbagai deklarasi dan *joint communique*. Salah satu dari deklarasi yang mengaturnya adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuses of Narcotics* yang diadopsi di Manila pada 26 Juni 1976.⁷⁵ Akan tetapi, ciri dari kejahatan transnasional dan upaya untuk mengatasinya akan membawa implikasi terhadap kedaulatan (prinsip non-interference) yang selama ini dipegang teguh oleh ASEAN. Oleh karenanya, implementasi dari berbagai deklarasi dan dokumen sangat lemah karena kepentingan keamanan nasional masing-masing negara.

Sebagai contoh, Laos, Thailand dan Myanmar merupakan pusat produksi narkoba di ASEAN yang disebut sebagai *golden triangle*.⁷⁶ Ketiga negara ini memproduksi sekitar 60 persen dari total produksi opium dunia.⁷⁷ Dari ketiganya, narkoba yang dihasilkan kemudian didistribusikan melalui kota-kota pelabuhan tertentu di Indo-China untuk kemudian masuk ke Singapura dan Malaysia. Selain menjadi salah satu rantai distribusi, Singapura juga turut menjadi tempat pencucian uang hasil produksi opium negara-negara di atas. Dari Malaysia dan Singapura, barang-barang terlarang ini masuk ke Brunei, Filipina, Indonesia dan kemudian ke Australia dan Selandia Baru.

Permasalahan menjadi semakin pelik ketika, baik di negara-negara penghasil maupun tujuan, tidak terdapat tata kelola pemerintahan yang mencukupi untuk mengatasi ancaman perdagangan narkoba ini. Di Myanmar misalnya, sebagian oknum pemerintah telah terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan pebisnis narkoba. Begitu juga di negara-negara tujuan seperti Indonesia, telah ditemukan beberapa kasus keterlibatan aparat-aparat pemerintah dalam perdagangan narkoba. Penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian, menjadi salah satu prasyarat untuk mengatasi ancaman kejahatan transnasional, khususnya yang berupa perdagangan narkoba.

Dalam perkembangannya, terdapat hubungan yang erat antara kejahatan transnasional dan terorisme. Mengingat besarnya potensi ancaman terorisme di Asia Tenggara dan maraknya perdagangan narkoba, menjadi alasan untuk mewaspadai potensi ancaman yang timbul dari hubungan keduanya. Ancaman yang timbul dari hubungan antara kejahatan transnasional

dan terorisme bisa diatasi dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi institusional di tingkat kawasan. Jika upaya tersebut gagal, negara-negara di luar ASEAN akan tergoda untuk melakukan intervensi dalam penanganan kejahatan transnasional tersebut. Misalnya Australia yang dalam beberapa kasus secara unilateral dan multilateral melakukan aksi pencegahan untuk memotong jalur distribusi narkoba ke wilayahnya.

4. Terorisme

Dalam tiga dekade terakhir, kelompok teroris menunjukkan kemampuannya sebagai entitas non-negara yang mengancam keamanan Indonesia. Sejak 1980-an, kelompok teroris menggunakan metode dan target yang berubah tetapi tetap memiliki makna atau nilai simbolis. Hal ini dilihat dari beberapa kasus terorisme sebagai berikut:

- Aksi terorisme terjadi di beberapa tempat di Indonesia dimulai sejak tahun 1985 sampai dengan 2005 dengan target sasaran yang berbeda.
- Pada 2009, serangan secara serentak dilakukan terhadap hotel JW Mariot dan Ritz-Carlton.⁷⁸
- Pada 2011 terjadi serangan terhadap Gereja Christ Cathedral Serpong dan gereja di Solo, serta Masjid Mapolresta di Cirebon.⁷⁹

Contoh-contoh di atas menunjukkan tren penurunan dampak serangan teroris. Hal ini memberikan proyeksi keamanan Indonesia terhadap ancaman teroris yang lebih baik pada periode 2014-2019. Hal ini disebabkan oleh semakin efektifnya aktivitas-

aktivitas intelijen, penegakan hukum, kemampuan pukul, serta dibantu dengan peran aktif masyarakat. Namun, karena karakter ancamannya yang bersifat laten, perlu ditekankan bahwa potensi munculnya terorisme akan selalu ada dengan modus operandi yang makin beragam, baik metode, bentuk, maupun target serangan.

5. *Cyber*

Ancaman *cyber* menjadi isu ancaman baru dalam keamanan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional yang dipahami sebagai interaksi antarnegara, ancaman *cyber* muncul dari aktivitas-aktivitas *cyber* yang mengancam (*cracking* dan *hacking*) yang diotorisasi oleh negara. Amerika Serikat telah beberapa kali menuduh pemerintah China berada di belakang sejumlah serangan *cyber* yang ditujukan kepada institusi-institusi pemerintahan negara tersebut. Sebagai contoh, pada Mei ketika militer China dituduh mendalangi sejumlah serangan ke sistem komputer pemerintah dan kontraktor-kontraktor pertahanan Amerika Serikat.⁸⁰ Dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat ke Kongres mengenai kapabilitas militer China, bahkan disebut telah menjadi negara dengan kemampuan ofensif *cyber* (*offensive cyber technologies*) terkuat saat ini.⁸¹ Kapabilitas perang elektronik China dikembangkan untuk dapat “membutakan” satelit-satelit Amerika Serikat dan mendorong mundur presensi militer AS tidak kurang 2.000 mil ke arah Pasifik.⁸² Dengan kemampuan yang demikian, ada potensi ancaman serangan *cyber* yang diotorisasi pemerintah China terhadap negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia (Sanger, 2013).⁸³

Namun, berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia masih aman terhadap potensi ancaman *cyber*. Setidaknya hal ini dapat diprediksi untuk periode 2014-2019. Penyebabnya adalah serangan *cyber* pada umumnya ditujukan untuk *database* atau pusat-pusat informasi strategis negara. Sedangkan di Indonesia, informasi-informasi yang dipegang oleh instansi-instansi negara belum sepenuhnya berada di dunia maya. Masih banyak instansi penting negara yang mempercayakan penyimpanan informasi secara fisik. Selain itu, jikapun sudah ada informasi yang disimpan di dunia maya, sistem informasi satu instansi dengan instansi lainnya belum terintegrasi. Dengan demikian, jika ada serangan pada satu instansi, informasi yang dimiliki oleh instansi lainnya tidak turut terancam. Hal ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang telah mengintegrasikan semua sistem informasi instansi-instansi. Serangan *cyber* terhadap satu titik akan memungkinkan dicurinya informasi lainnya juga. Inilah mengapa Amerika Serikat, dibandingkan dengan Indonesia, sangat tidak aman terhadap serangan *cyber*.

6. Ideologi

Pada dasarnya, setiap negara di dunia akan terancam oleh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Syarat lainnya bagi ideologi tersebut untuk diperhitungkan sebagai ancaman adalah ia termanifestasi ke dalam gerakan radikal yang tidak mengakui perbedaan dalam interaksi sosial politik dalam masyarakat yang plural. Jika kedua prasyarat tersebut sudah terpenuhi – bertentangan dengan ideologi negara dan termanifestasi – ideologi akan menjadi ancaman keamanan negara dan masyarakat. Dengan kata lain, selama ideologi tersebut

belum terwujudkan dalam sebuah gerakan, atau masih dalam angan-angan saja, maka ia belum dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman yang harus dihadapi dengan instrumen kekerasan

Perkembangan dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan intensitas gerakan radikalisi sebagian elemen masyarakat, baik menggunakan simbol agama maupun non-agama. Gerakan-gerakan radikal dapat terwujud dalam perusakan terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai simbol negara dan kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka. Tindakan-tindakan itu menghasilkan beberapa dampak. *Pertama*, dan yang paling mudah untuk dilihat, adalah rusaknya fasilitas umum atau infrastruktur negara. Pihak yang pertama kali terlihat menghadapi kerugian adalah negara karena fasilitas yang disediakan olehnya menjadi rusak. Akan tetapi, kerugian sesungguhnya dipikul oleh rakyat. Sebab, infrastruktur negara dibangun dengan menggunakan uang pajak. *Kedua*, kehadiran kelompok-kelompok yang menyuarakan ideologi dengan cara yang radikal dapat meresahkan rakyat dan menyebabkan jatuhnya korban. Selain itu, ideologi dan gerakan radikal juga melakukan ‘perekrutan’ terhadap masyarakat umum yang menyebabkan rusaknya modal sosial masyarakat.

Di Indonesia, ideologi-ideologi yang berkembang dan bertentangan dengan ideologi negara dan kerukunan masyarakat, pada umumnya berakar pada penyimpangan terhadap agama Islam. Salah satu contoh kelompok yang terdengar melakukan penyebaran pemahaman Islam yang sesat adalah Negara Islam Indonesia (NII) serta gerakan atau kelompok radikal dan teroris yang mengatasnamakan agama.

NII berawal sebagai kelompok dengan nama Darul Islam (DI) sebagai gerakan politik yang diproklamasikan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Gerakan tersebut berlandaskan pada tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Hal ini jelas bertentangan dengan Pancasila. Tujuan itu diduga berusaha untuk diwujudkan dengan cara merampok, mencuri, menipu, memeras, merampas, dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lainnya. Tindakan-tindakan itu, tentu dilakukan untuk mendanai upaya penyebaran ideologinya. Selain dengan melanggar hukum, NII diduga juga melakukan pencucian otak terhadap mahasiswa-mahasiswa. Telah terjadi beberapa kasus mahasiswa menghilang yang kemudian disebut-sebut sebagai ulah NII.

7. Separatisme

a. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Sejarah panjang GAM dimulai pada 1976 ketika Aceh Merdeka pertama kali disuarakan.⁸⁴ Aspirasi ini ditujukan untuk melawan pemerintah Indonesia dan mendapatkan kemerdekaannya sebagai negara Nanggroe Aceh Darussalam. Aspirasi tersebut diwujudkan melalui perlawanan represif bersenjata yang mendorong terjadinya operasi militer Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1980-1990-an. Meskipun operasi militer itu telah dilakukan, GAM tidak sepenuhnya berhasil dihapuskan. GAM terus beroperasi dan terlibat dalam kontak dengan TNI.

Pada tahun 2000, GAM melakukan serangan selama sekitar 3 jam dengan melontarkan tiga buah roket yang menewaskan

enam anggota marinir di Banda Aceh. Kejadian ini terjadi tepat sebelum Presiden Abdurrahman Wahid mengunjungi tempat tersebut. Serangan juga dilakukan GAM pada 22-23 Mei 2001. Serangan yang dilakukan terjadi pada dua tempat berbeda, yakni satu ditujukan pada patroli aparat TNI/Polri di Desa Lampeneurut Ujong, Kecamatan Darul Imarah, serta di Lhokseumawe antara GAM dan aparat keamanan.

Upaya-upaya penumpasan kekuatan GAM juga dilakukan. Pada Mei 2003, Presiden Megawati memberikan izin untuk menjalankan operasi militer di Aceh dengan menempatkan 30.000 orang tentara dan 12.000 orang polisi. Hasil dari operasi militer ini dianggap sebagai hal yang positif karena ribuan anggota GAM terbunuh, tertangkap, serta menyerahkan diri. TNI juga terlihat aktif dalam upaya penumpasan GAM, sebagaimana yang terjadi pada Agustus 2004.⁸⁵ Kala itu, TNI melakukan serangan udara kepada GAM yang berhasil membuat kekuatan GAM menjadi tercerai-berai.

Meskipun dapat dilihat bahwa serangan-serangan pernah terjadi pada tahun 2000-an, keadaan yang dihadapi Indonesia terkait dengan GAM berbeda dengan OPM. Baik GAM maupun OPM merupakan gerakan yang berbasis pada aspirasi untuk merdeka dari Indonesia. Namun, berbagai faktor menjadikan GAM tidak menjadi ancaman sebesar OPM. *Pertama*, aspirasi kemerdekaan yang dimiliki GAM didasari partikularitas atau kekhususan wilayah Aceh. Provinsi itu menggunakan hukum syariah yang tidak diterapkan di wilayah lainnya. Keadaan ini menjadikan Aceh memiliki ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan seluruh Indonesia.

Akan tetapi, partikularitas itu masih dapat dijembatani melalui otonomi khusus. Jika dibandingkan dengan Papua yang juga diberikan otonomi khusus, GAM tidak merujuk pada janji akan kemerdekaan yang diberikan Belanda ataupun pihak lain, sebagaimana yang terjadi dalam kasus OPM. Rujukan mereka untuk merdeka dari Indonesia adalah keunikan dalam menggunakan hukum syariah. Perbedaan ini – OPM yang ingin merdeka karena partikularitas setempat dan janji kemerdekaan dari Belanda, dan GAM yang ingin merdeka karena partikularitas saja – menjadikan potensi ancamannya tidak sebesar OPM.

Solusi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ancaman dari GAM adalah menghormati partikularitas tersebut. Hal ini dilakukan dengan menjaga relasi pusat dengan Aceh melalui otonomi khusus. Melalui otonomi khusus, partikularitas yang terdapat di Aceh dapat diakui dan dihormati. Dengan kata lain, terdapat jawaban yang bisa diberikan kepada Aceh yang tidak berwujud kemerdekaan, namun tidak memaksanya untuk meninggalkan partikularisme hukum syariah. Hal ini berkaitan dengan faktor *kedua*, yaitu intensitas kontak senjata.

Intensitas kontak senjata GAM dengan aparat Indonesia tidak tinggi. Hal ini terlihat pada tren yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Jika GAM ingin menunjukkan eksistensinya, kini mereka cenderung melakukannya melalui pengibaran bendera GAM. Langkah ini tidak terlalu

mengancam keamanan Indonesia, karena sekadar berupa peringatan akan partikularitas Aceh. Dengan kata lain, yang masih ditunjukkan secara intensif adalah sentimen-sentimen kekhasan daerah, dan bukan melalui kontak senjata.

b. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Ancaman utama OPM adalah tututan kemerdekaannya. Organisasi ini dapat mengancam keamanan negara berdasarkan dua lapisan analisis. Dinamika internal OPM dibentuk oleh beberapa kondisi. *Pertama*, terdapat semangat untuk menolak pembangunan dan kehidupan modern. Adanya semangat itu menjustifikasi alasan OPM tidak membutuhkan pemerintah Indonesia dan program-program yang selama ini berusaha diterapkan di Papua, sehingga berujung pada tututan untuk merdeka. Keadaan ini dapat mengancam keamanan Indonesia. Sebab, semangat itu secara langsung berbenturan dengan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan untuk membangun rasa kebersamaan dan satu Indonesia. Selama ini, program-program yang banyak difokuskan di Papua justru berupaya untuk mewujudkan persis kedua hal yang ditolak itu. Salah satu contoh program pembangunan ekonomi dan kehidupan modern yang telah berusaha dijalankan adalah Rencana Strategis Perbaikan Kampung (Respek).⁸⁶ Jika dilihat secara mendalam, program ini menekankan pada kedekatan dengan warga lokal. Hal ini dapat dilihat dari tiga area pembangunannya, yakni pendekatan terhadap penduduk lokal, pemberdayaan, dan otonomi. Akan tetapi, mengingat adanya semangat untuk menolak pembangunan ekonomi serta

pendekatan yang
sebaiknya dilakukan
ditekankan pada
operasi-operasi
intelijen, penggalangan,
dan pembinaan, bukan
lagi operasi tempur
seperti yang selama ini
dilakukan.

kehidupan modern, program-program seperti Respek ini tidak menjadi hal yang menarik bagi OPM.

OPM menolak bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan alasan bantuan-bantuan itu bukanlah yang diinginkan warga Papua. Jika dianalisis lebih lanjut, selama program-program yang dilaksanakan pemerintah pusat hanya menekankan pada pembangunan dan modernitas, hal itu akan tetap bertentangan dengan semangat yang dimiliki OPM. Keadaan ini dapat menimbulkan suatu ancaman bagi integritas nasional Indonesia karena memperkuat justifikasi tuntutan kemerdekaan OPM, yakni bahwa pemerintah pusat tidak menjawab kebutuhannya. Terlebih lagi, tumpuan harapan untuk dapat membangun rasa kebersamaan sebagai satu Indonesia hanya digantungkan pada program-program pembangunan dan modernitas tersebut.

Kedua, OPM terindikasi memiliki sistemnya sendiri untuk mendatangkan pemasukan melalui perdagangan obat-obatan terlarang. Pada 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa satu kilogram ganja di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yang diduga akan dijual di Jayapura.⁸⁷

Potensi ancaman dari OPM tidak hanya terbatas pada entitas itu sendiri. Lebih jauh lagi, OPM memiliki basis dukungan dari banyak negara lainnya. Pada beberapa negara, terdapat

gerakan-gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Hal ini dapat dilihat di Australia, Selandia Baru, dan yang paling baru adalah Inggris. Pada 28 Februari 2012, sebuah forum regional bernama International Parliamentarians for Papua diadakan di Australia.⁸⁸ Dalam forum tersebut, beberapa pemimpin negara dari Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru terlihat hadir. Dibandingkan dengan Australia, Selandia Baru lebih vokal dalam menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat. Pada 2011, perayaan kemerdekaan ke-50 tahun Papua ditandai pengibaran bendera Bintang Kejora di Auckland dan Wellington.⁸⁹

Dinamika yang paling kini adalah dibukanya kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris.⁹⁰ Tindakan tersebut mendapatkan kecaman dari pihak Indonesia. Hal ini menjadi wajar karena memiliki potensi untuk mengancam keamanan Indonesia. Jika dikaitkan kembali kepada elemen-elemen pembentuk negara, pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford dapat dilihat sebagai suatu bentuk pengakuan Inggris terhadapnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah negara berdaulat yang memberikan pengakuan terhadap sebuah entitas yang berada di dalam wilayah Indonesia. Dengan kata lain, kedaulatan Indonesia sendiri telah diganggu. Ke depannya, kejadian tersebut dapat mengganggu keamanan Indonesia karena dapat memunculkan tekanan-tekanan yang datang dari luar.

Analisis di atas menjadi alasan mengapa prediksi untuk 2014-2019, Indonesia relatif paling tidak aman dari potensi ancaman

OPM dibandingkan dengan yang akan datang dari aktor-aktor non-negara lainnya. Hal ini tetap berlaku meskipun potensi-potensinya masih dapat diatasi oleh Indonesia. Selama keinginan untuk merdeka disuarakan secara terus-menerus, maka sampai itulah gejolak di Papua akan terus berlangsung. Pada saat yang bersamaan, dukungan dari basis-basis simpatisan di luar negeri akan terus menekan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang sebaiknya dilakukan ditekankan pada operasi-operasi intelijen, penggalangan, dan pembinaan, bukan lagi operasi tempur seperti yang selama ini dilakukan. Hal ini mencakup, misalnya, pengumpulan informasi terkait kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat setempat dan penguatan kapasitas institusional. Kebijakan-kebijakan semacam ini bertujuan mengatasi akar masalah berupa persoalan sosial, ekonomi dan budaya yang selama ini memungkinkan berkembangnya bibit-bibit gerakan separatisme.

8. Ancaman Situasional

Potensi ancaman ini sangat berbeda dibandingkan dengan ancaman yang berasal dari entitas negara dan non-negara. Bencana alam adalah ancaman yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Hal ini terkait dengan posisi geografis Indonesia yang terletak di antara tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang bertabrakan di lepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara, serta lempeng Pacific yang berada di utara Irian dan Maluku Utara.⁹¹ Keberadaan Indonesia dalam pertemuan ketiga lempengan tersebut menjadikan negara ini rawan gempa. Jika terjadi gempa besar dalam kedalaman laut

yang dangkal, tsunami menjadi sangat mungkin untuk terjadi.⁹² Oleh karena itu, Indonesia turut rawan terhadap tsunami.

Kedudukan wilayah Indonesia pada posisi tersebut menjadikan negara ini selalu rawan terhadap bencana alam. Karena sifatnya yang tidak dapat dihindari, langkah yang bisa disiapkan untuk menghadapi ancaman yang bersifat *inherent* terletak pada penanganannya. Akan tetapi, terkait dengan penanganan bencana alam, bentuk negara Indonesia merupakan sumber ancaman tersendiri. Indonesia yang berupa negara kepulauan akan menghadapi kesulitan dalam memobilisasi bantuan kepada daerah yang terkena bencana.

Bencana alam menjadi salah satu ancaman keamanan nasional karena beberapa hal. *Pertama*, bencana alam serta kerusakan lingkungan hidup mengurangi kapasitas negara dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan dan pemulihan keadaan menjadi normal selalu memakan biaya yang besar. *Kedua*, bencana alam dapat merusak lingkungan hidup, infrastruktur nasional dan masyarakat yang mengakibatkan penurunan kemampuan untuk memenuhi kepentingan mereka. *Ketiga*, bencana alam membunuh jiwa manusia. Di samping faktor alam, bencana juga disebabkan oleh manusia, terutama kesalahan pola hidup, pola pembangunan, dan kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan kepentingan negara dan manusia.

Bencana alam harus menjadi pertimbangan dalam mengarahkan pembangunan kekuatan pertahanan, ekonomi, sosial, dan politik. Jepang bisa menjadi contoh, bagaimana negara tersebut belajar dari

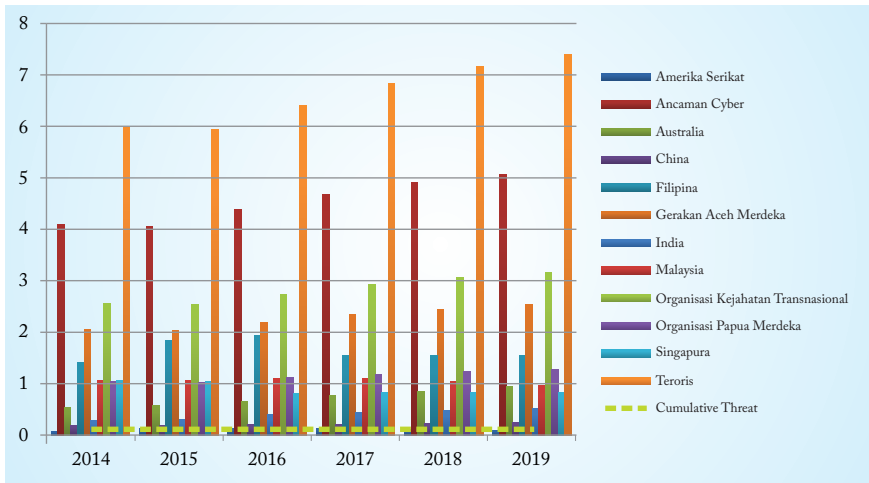
alam dan memasukkannya dalam bagian integral kebijakannya. Untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir korban adalah dengan merancang kebijakan yang memperhatikan lingkungan hidup, mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus untuk menghadapi bencana, mulai dari kesiapan masyarakat, pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*), sampai dengan pembangunan *emergency system* ketika bencana terjadi.

KEKUATAN PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN

Setelah memetakan potensi-potensi ancaman yang dihadapi Indonesia, maka selanjutnya kita dapat melihat seberapa besar tingkat ketahanan sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang datang. Secara garis besar, Indonesia dapat menanggulangi ancaman situasional, seperti bencana alam, dengan sangat baik sekali. Indonesia dapat menghadapi serangan bencana alam hingga hampir 300 kali. Sedangkan serangan yang datang melalui aktor-aktor lain, baik dari negara maupun non negara bervariasi, mulai dari hampir tidak dapat menghadapi serangan yang datang hingga mampu menaggulangnya dengan baik.

Jika kita menghilangkan potensi ancaman situasional untuk dapat memperjelas tingkat ketahanan Indonesia dalam menghadapi aktor-aktor ancaman yang lain, secara detail dapat kita lihat seperti grafik di bawah ini.

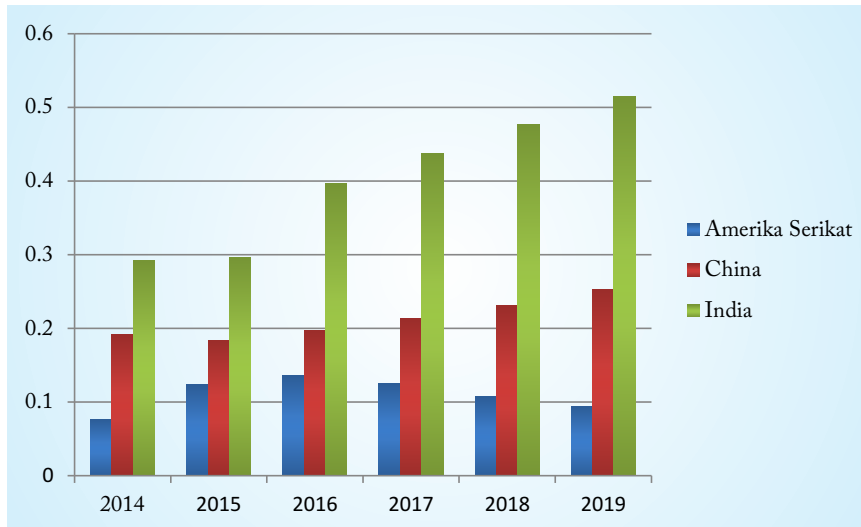
Grafik 5. Ketahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman



Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

Indonesia juga hampir tidak dapat menanggulangi ancaman yang datang dari Amerika Serikat. Secara rata-rata kekuatan Indonesia pada 2014-2019 hanya dapat menanggulangi sepersepuluh kekuatan Amerika Serikat. Hal ini dapat diartikan pula, jika AS menggelar kekuatannya mendekati 10 persen di sekitar kawasan Indonesia, hal ini perlu diwaspadai. Begitu juga, jika dihadapkan dengan ancaman yang datang dari China dan India. Kekuatan Indonesia pada 2014-2019 hanya mampu menanggulangi seperlima dari kekuatan China pada tahun yang sama yang juga berarti Indonesia perlu mewaspadaai apabila China sampai menggelar mendekati 20 persen kekuatannya di sekitar kawasan Indonesia. Untuk ancaman yang datang dari India pada 2014-2015, secara rata-rata Indonesia hanya mampu menanggulangi 40 persen dari kekuatan India. Ini juga berarti, Indonesia perlu mewaspadaai apabila India menggelar kekuatannya mendekati 40 persen kekuatannya di sekitar Indonesia.

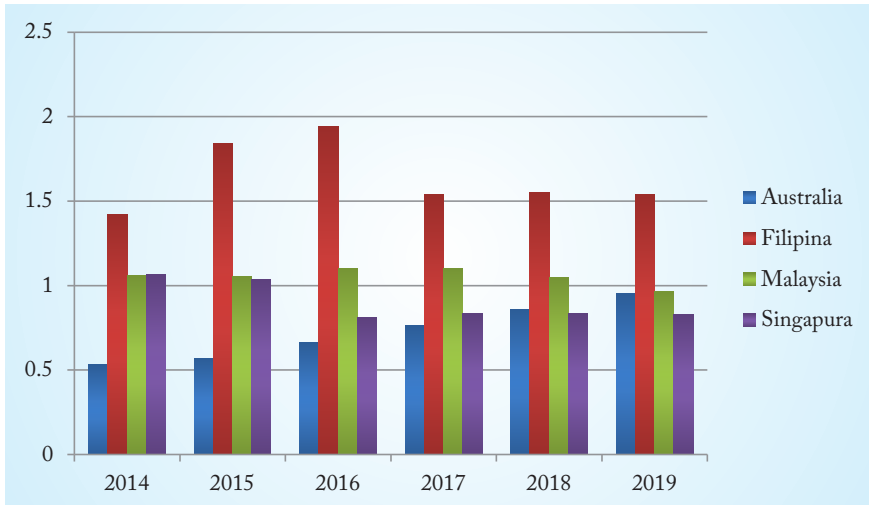
Grafik 6. Kemampuan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Amerika Serikat, China, dan India



Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

Jika dihadapkan pada kekuatan Australia pada 2014-2019, secara rata-rata kekuatan Indonesia hanya mampu menanggulangi 70 persen dari kekuatan Australia. Sedangkan untuk Malaysia pada tahun yang sama, secara rata-rata kekuatan Indonesia dan Malaysia berimbang. Kekuatan Malaysia berada di atas Indonesia pada 2014 hingga 2018, baru pada 2019 Indonesia dapat melampaui kekuatan Malaysia. Itupun dengan perbedaan kekuatan yang tidak terlalu jauh. Untuk Singapura, secara rata-rata Indonesia mampu menanggulangi ancaman dari Singapura meskipun dengan perbedaan kekuatan yang tidak terlalu jauh. Indonesia baru dapat melampaui kekuatan Singapura pada 2016 dan dengan kecenderungan yang terus menguat sampai 2019. Sedangkan untuk Filipina, Indonesia secara rata-rata dapat menanggulangi kekuatan Filipina, akan tetapi perlu dicermati peningkatan kekuatan Filipina yang semakin baik setelah 2016.

Grafik 7. Kemampuan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Australia, Filipina, Malaysia dan Singapura

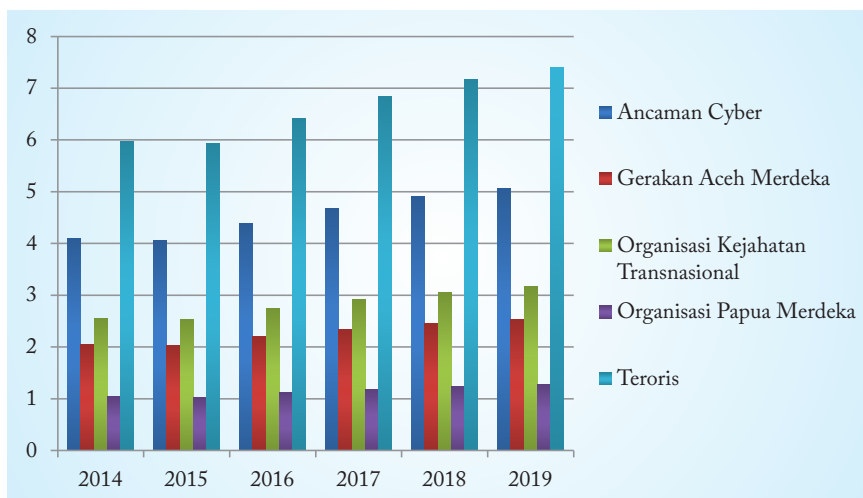


Sumber: Data diolah oleh Tim Penyusun

Secara umum, Indonesia juga dapat menanggulangi semua ancaman yang datang dari aktor-aktor non-negara. Ancaman situasional seperti bencana alam adalah jenis ancaman yang paling siap untuk dihadapi Indonesia, sedangkan OPM merupakan aktor ancaman yang memiliki kekuatan yang hampir menyamai Indonesia. Meskipun secara rata-rata Indonesia dapat menanggulangi ancaman tersebut, perbedaan kekuatan yang tidak terlalu mencolok menyebabkan OPM menjadi aktor ancaman yang harus sangat diwaspadai Indonesia. Apabila sisa-sisa GAM mengaktifkan kembali sel-sel gerakan perlawanannya, GAM menjadi ancaman non-negara yang perlu diwaspadai setelah OPM. Meskipun Indonesia mampu menanggulangi ancaman dari GAM hingga rata-rata dua kali lebih dari kekuatan yang ada, potensi ancaman tersebut perlu menjadi perhatian. Begitu pula potensi

ancaman, baik dari organisasi kejahatan transnasional, *cyber* maupun teroris. Meskipun secara garis besar pada 2014-2019 Indonesia mampu menanggulangi ancaman-ancaman tersebut, kesiapsiagaan menjadi krusial karena eskalasi ancaman dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat.

Grafik 8. Kemampuan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Aktor-Aktor Non-Negara



Sumber : Data diolah oleh Tim Penyusun

IKHTISAR DAN REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, antar-institusi pemerintah perlu melakukan penyeragaman persepsi ancaman. Selain itu, Indonesia juga harus terus mengembangkan kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, tidak hanya sebatas latihan bersama, tetapi juga transfer teknologi pertahanan. Kerja sama pertahanan Indonesia yang akan dikembangkan ke depannya tetap dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena

itu, Indonesia akan menghindari pembentukan pakta pertahanan dengan negara manapun.

Menyangkut anggaran, semestinya ada alokasi yang lebih untuk pembangunan kekuatan pertahanan dengan pembelanjaan yang efektif dan transparan. Sedangkan adanya kasus spionase Amerika Serikat terhadap beberapa negara Uni Eropa dan penyadapan Australia terhadap Indonesia memberikan sinyal bahwa Indonesia harus sigap dan antisipatif terhadap tantangan-tantangan internasional. Dengan kata lain, Indonesia harus selalu siap dengan skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi.

Kedaulatan Indonesia di wilayah-wilayah yang selama ini digunakan oleh negara lain, seperti *Flight Information Region* (FIR) juga perlu ditegakkan. Hal tersebut terkait dengan upaya untuk menjamin kepentingan-kepentingan nasional ke depan, yang mengharuskan Indonesia mampu menetapkan visi jangka panjang menjadi kekuatan regional di Asia Tenggara. Pengembangan postur pertahanan Indonesia harus sejalan dengan visi tersebut.

Sebagai negara yang memiliki beragam suku dan budaya, bibit-bibit perpecahan dapat berkembang kapanpun. Oleh karenanya, menjadi keharusan bagi pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk mencegah munculnya kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengeksploitasi keadaannya. Terlebih lagi, pemerintah harus mewaspadaikan kepentingan-kepentingan negara dan kekuatan asing yang mempersoalkan integrasi Indonesia. Dalam konteks ini, peran diplomasi menjadi vital dalam mengawal dan mewujudkan kepentingan-kepentingan Indonesia.*

BAB VII

— HUBUNGAN INTERNASIONAL: —

MEMPERJUANGKAN
KEPENTINGAN
NASIONAL



HUBUNGAN INTERNASIONAL

MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL

“Politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepercayaan diri dan berjuang dengan kemampuan sendiri. Namun begitu, bukan berarti Indonesia tidak mengikuti perkembangan situasi internasional dan memanfaatkannya demi kepentingan nasional”.

~ Mohammad Hatta - Proklamator Indonesia ~

Sebagai negara berdaulat, Indonesia adalah aktor yang independen dan otonom sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam posisi tersebut, Indonesia telah mencoba menavigasi perubahan global dengan sejumlah penyesuaian dan antisipasi strategis. Indonesia dapat melakukan perannya itu karena memiliki postur politik luar negeri yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara, Asia-Pasifik, bahkan di tingkat global.

Dalam praktik diplomasi dunia, memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara justru menonjol. Aspek inilah yang cenderung diabaikan dalam praktik diplomasi Indonesia selama ini.

Postur ini ditentukan oleh sejumlah hal, seperti posisi geostrategis Indonesia; keberhasilan Indonesia dalam menjaga relasi dengan sejumlah negara; peran aktif memotori sejumlah kegiatan, baik berskala regional maupun internasional; keterlibatan dalam G-20; serta pertumbuhan ekonomi dinamis dan relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di negara dunia.

Selain itu, Indonesia juga dihargai karena banyak menyuarakan sejumlah komitmen yang menjadi perhatian negara-negara lain. Di antaranya, komitmen dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, menghindari proteksionisme dalam perdagangan, serta melaksanakan demokrasi di dalam masyarakat yang sangat plural. Pencapaian Indonesia dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi ini perlu mendapat perhatian dari segenap kalangan di tanah air. Khususnya kaum muda yang akan mengambil alih kemudi kepemimpinan Indonesia di berbagai lini, perlu ikut bertanggung jawab menjaga dan mengembangkan wibawa Indonesia di mata internasional.

KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN VITAL INDONESIA

Diplomasi dan Hubungan Internasional bukan semata untuk membantu bangsa-bangsa lain yang tengah menghadapi persoalan atau mewujudkan tata dunia yang lebih baik, melainkan juga untuk

memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam praktik diplomasi dunia, memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara justru menonjol. Aspek inilah yang cenderung diabaikan dalam praktik diplomasi Indonesia selama ini.

Setidaknya terdapat beberapa aspek kepentingan nasional yang perlu dicermati dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional. Aspek-aspek tersebut adalah kepentingan bidang ekonomi, kepentingan bidang politik, kepentingan bidang sosial, serta kepentingan bidang pertahanan yang dapat diuraikan sebagai berikut:.

1. Kepentingan nasional bidang ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejauh ini memang relatif baik karena angka pertumbuhannya tetap positif meskipun pertumbuhan ekonomi dunia melambat drastis. Tetapi, prestasi tersebut tidaklah abadi jika tidak dipertahankan dengan penuh perencanaan. Kita lihat, perlambatan pertumbuhan ekonomi pun dialami oleh Indonesia dan tidak bisa dipandang enteng. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, namun angka itu turun menjadi 6,23% pada 2012 dan diasumsikan akan turun lagi menjadi 5.9% pada 2013. Jika kondisi makro ekonomi di dalam negeri rapuh, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi juga.

Yang perlu disadari adalah bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah *necessary condition* (faktor yang dibutuhkan) untuk mencapai kesejahteraan, tetapi bukanlah *sufficient condition* (faktor yang mencukupi). Dengan semakin terintegrasinya perekonomian suatu negara pada perekonomian di tingkat

global, maka pandangan Indonesia tidak bisa terbatas pada pertumbuhan ekonomi belaka. Pertumbuhan ekonomi adalah konsekuensi dari kegiatan ekonomi yang dinamis. Indonesia perlu membangun relasi, perspektif dan kelembagaan di dalam negeri yang peka terhadap perubahan zaman, dan perubahan status bangsa Indonesia, atau pertumbuhan tersebut akan semu dan sesaat. Instrumen politik luar negeri Indonesia, baik yang bekerja di Kementerian Luar Negeri, DPR, Kantor Presiden, pemerintah daerah, maupun kantor-kantor kementerian teknis yang diberi tugas Presiden, perlu menopang upaya membangun kepekaan tersebut.

Contoh konkretnya sebagai berikut. Dalam dunia masa kini, muncul pasar penunjang kegiatan ekonomi riil yang dinamis, misalnya pasar modal. Inilah salah satu esensi dari integrasi ekonomi negara-negara dunia pada pasar global. Ada dana-dana asing yang mencari tempat parkir dengan harapan meraup keuntungan di tempat parkir tersebut. Indonesia sudah memanfaatkan pasar tersebut. Memang demikianlah seharusnya karena ada daya tarik tersendiri bagi pemodal untuk masuk ke pasar negara-negara ekonomi baru. Tetapi, kepekaan Indonesia terhadap model kerja pemain di pasar tersebut belum cukup baik sehingga kinerja Indonesia di pasar modal justru belum optimal mendukung kinerja ekonomi di sektor riil.

Sampai akhir 2012, kapitalisasi pasar Indonesia berada di urutan ke-9 di Asia meskipun usia bursa kita tercatat sebagai yang tertua keempat di Asia setelah Hongkong, Mumbai dan Tokyo.⁹³ Pertumbuhan kapitalisasi pasar modal Indonesia memang patut diapresiasi karena pertumbuhan kapitalisasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di peringkat ketiga di Asia setelah Jepang dan China. Ini berarti kepercayaan investor terhadap Indonesia relatif baik, tetapi basis kinerja tersebut kecil. Jumlah perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia ada 459 perusahaan (semuanya perusahaan domestik,) sementara di India, misalnya, ada 5.191 perusahaan yang tercatat di pasar modalnya, Singapura 776 perusahaan, Malaysia 920 perusahaan. Berbeda dengan

pasar modal di negara tetangga seperti Filipina, kapitalisasi pasar saham di Indonesia hanya 35%, dan 50-55% di antaranya adalah milik asing.

Pertumbuhan kegiatan di pasar modal menunjukkan bahwa ada peluang baik untuk mendapatkan dana segar untuk menggerakkan perekonomian, tetapi ada risikonya juga. Keterlibatan di pasar modal membutuhkan kesadaran bahwa dana yang ingin diparkir oleh investor adalah untuk mencari kepastian keuntungan, sehingga para pelaku pasar modal sangat peka melihat pondasi ekonomi suatu negara. Menurut pengamat, pasar keuangan adalah *voting machine* yang independen, spontan, pragmatis, sekaligus bengis.⁹⁴ Pelaku pasar memutuskan untuk terlibat hanya jika pemimpin politik Indonesia, seperti Presiden, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral dianggap

Pasar keuangan adalah *voting machine* yang independen, spontan, pragmatis, sekaligus bengis.¹ Pelaku pasar memutuskan untuk terlibat hanya jika pemimpin politik Indonesia, seperti Presiden, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral dianggap kredibel.

Jika Indonesia sekadar mengandalkan ekspor komoditas bahan mentah, terutama barang tambang, seperti yang sekarang dilakukan, Indonesia menjadi sangat tergantung pada permintaan global semata.

kredibel. Tak masalah jika kondisi sosial politik kurang nyaman untuk berbisnis.

Tetapi, jika pondasi ekonomi makro dianggap bisa diandalkan, mereka akan terus berinvestasi. Sebaliknya, jika pondasi ekonomi makro dianggap keropos, apalagi jika negara memilih opsi banyak berutang, kepercayaan investor akan merosot. Artinya, jika pada 2007 kapitalisasi pasar modal Indonesia telah menyumbang Produk Domestik Bruto

(PDB) 60 persen,⁹⁵ risiko terburuk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ketika investor berlomba-lomba meninggalkan Indonesia karena hilang kepercayaan dan panik.

Selain itu, pasar saham juga belum akan menjadi dana segar bagi perekonomian jika jumlah perusahaan pada sektor riil yang terdaftar di bursa saham terbatas. Banyaknya pemain asing yang masuk ke pasar modal Indonesia adalah medium yang baik untuk mengundang lebih banyak pendana (baik domestik maupun asing) untuk menanamkan modal di sektor riil. Ini yang memang lebih sulit dilakukan karena orang cenderung ingin “main” di sektor yang mudah dan cepat menghasilkan keuntungan. Di Indonesia, keengganan investor untuk masuk ke sektor riil perlu ditanggapi dengan lebih peka sebagai urgensi perbaikan kinerja dan fasilitasi pada sektor riil.

Di sisi lain, investor asing punya kecenderungan untuk kabur jika neraca perdagangan suatu negara defisit. Artinya, jika Indonesia

sekadar mengandalkan ekspor komoditas bahan mentah, terutama barang tambang, seperti yang sekarang dilakukan, Indonesia menjadi sangat tergantung pada permintaan global semata. Jika permintaan global terus menurun, akan sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor, sementara produksi Indonesia terbatas hanya untuk pasar tradisional, baik di dalam negeri maupun di negara-negara yang notabene sedang melemah permintaan produknya. Artinya, perbaikan kemampuan Indonesia seiring dengan integrasi ke pasar global perlu didukung oleh pemerintah, antara lain dengan membuka peluang ke pasar non-tradisional dan menghidupkan sektor riil agar ekspor di bidang industri manufaktur dan olahan terjaga atau meningkat. Di sini kebijakan luar negeri dan strateginya menjadi sangat penting.

Pondasi yang kokoh dari perekonomian suatu negara ditentukan oleh tiga hal pokok. Yaitu, kekokohan daya saing produksi di dalam negeri, pengelolaan sosial politik ekonomi yang peka akan perubahan zaman, dan kerja sama yang baik antarpelaku dan pembuat kebijakan. Aktivitas ekspor dan impor boleh defisit jika sifatnya sementara, tidak ditandai dengan merosotnya produktivitas sektor riil dan ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tanggap. Indonesia akan lebih leluasa mengatur tawaran kerja sama perdagangan bebas jika pondasi tersebut kuat. Dengan pondasi yang kuat, hal-hal yang perlu diwaspadai pun menjadi lebih jelas sehingga pengaturan strategi pun lebih mudah dilakukan. Titik tumpu dari pondasi yang kokoh adalah desain alias rancang bangun kebijakan dan kegiatan yang dipikirkan secara menyeluruh.

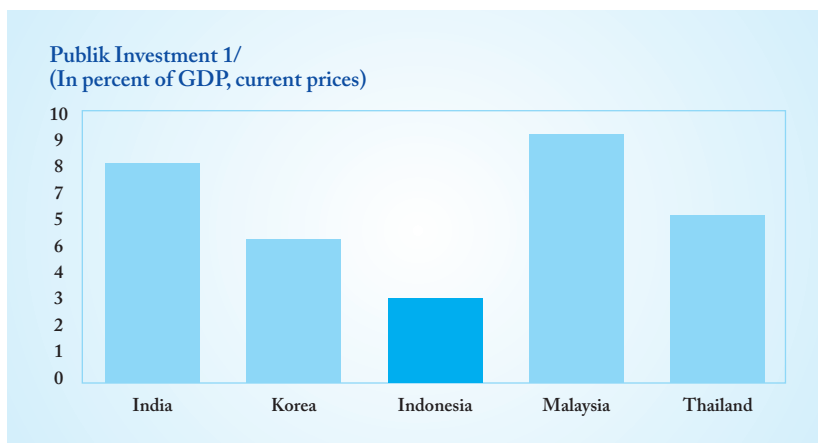
**Gambar 1: Ilustrasi Rancang Bangun
Kebijakan & Kegiatan**



Sumber: Dinna Wisnu, 2013

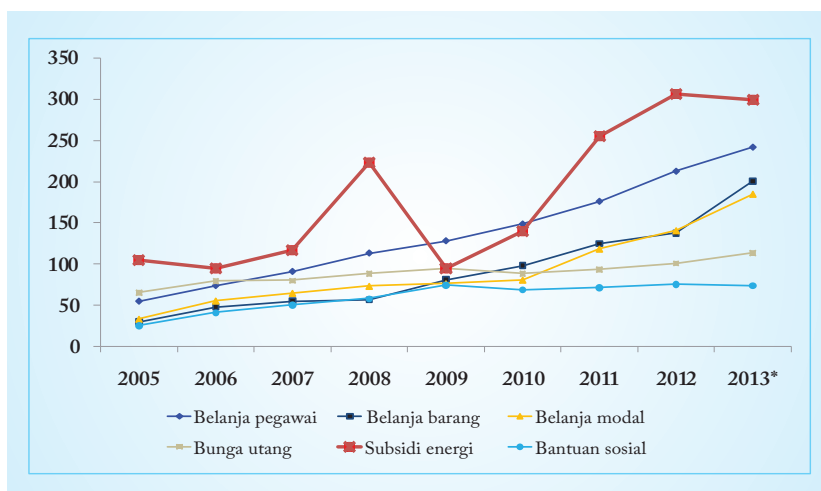
Tiga hal pokok penentu pondasi perekonomian Indonesia ini yang masih kurang baik. Sejumlah pengamat ekonomi meyakini, pondasi perekonomian Indonesia keropos karena sejak tahun 2000-an, kinerja sektor riil terus *melempem*. Data investasi publik dari pemerintah Indonesia berada jauh di bawah Malaysia, India, Thailand, bahkan Korea Selatan. Ini berarti, peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian lemah, apalagi ternyata belanja pemerintah habis untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), belanja pegawai, dan belanja modal.⁹⁶

Grafik 1: Perbandingan Investasi Publik Beberapa Negara



Sumber: Faisal Basri, sebagaimana dikutip dari IMF Country Report No. 12/278, September 2012

Grafik 2: Komparasi Biaya Belanja Pemerintah (Trilyun)



Sumber: Faisal Basri, sebagaimana dikutip dari APBN-P, Kementerian Keuangan 2012

Sementara itu, para pelaku ekonomi di Indonesia masih saja mengeluhkan faktor ekonomi biaya tinggi, yang tak ayal disebabkan oleh birokrasi yang tumpang tindih dan tidak efisien, adanya biaya-biaya siluman, dan kebijakan yang tambal sulam. Penghasilan pemerintah dari pajak tetap sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang membukukan pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia, yang artinya bahwa pertumbuhan ekonomi lebih digerakkan atas dasar konsumsi.

Jumlah kelas menengah di Indonesia memang meningkat tetapi sebagian besar posisinya 'di ujung bawah' kelas menengah. Ukuran kelas menengah di Indonesia adalah tingkat konsumsi 2 dolar AS sehari, sedangkan tingkat konsumsi kelas menengah di negara-negara lain 10-100 dolar AS sehari.⁹⁷ Daya beli masyarakat secara umum masih sangat rendah, terkait dengan jumlah 38 persen penerima upah di Indonesia yang bekerja tanpa kontrak dan 54 persennya lagi bekerja di sektor yang tidak tercatat atau informal,⁹⁸ yang lebih banyak porsi usaha mikro dan kecil. Ini berarti, kerentanan para pekerja Indonesia tergolong tinggi. Jadi jangan heran, jika neraca perdagangan Indonesia bisa demikian defisit pada 2013 karena rata-rata penduduk Indonesia adalah konsumen belaka dan yang diimpor pun terbukti memang barang-barang konsumen pula.

Yang juga tidak bisa diabaikan adalah besaran kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Berapapun angka pertumbuhan ekonomi di tingkat makro, kenyataannya Indonesia masih belum menyelesaikan problem kemiskinan struktural di tanah air. Kita tak bisa berkelit bahwa angka kemiskinan per kepala menurun

karena penetapan garis kemiskinan sesungguhnya bersifat administratif dan politis. Angka kemiskinan perorangan tidak mencerminkan kedalaman problem kemiskinan di tanah air.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2012 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun belum ada perbaikan angka presentase penduduk miskin di tiap provinsi. Provinsi yang dikenal miskin tetaplah miskin, terutama yang berada di Indonesia bagian timur. Demikian pula presentase penduduk miskin di provinsi-provinsi yang padat penduduk di Jawa sebenarnya relatif stabil. Koefisien gini, yakni ukuran kesenjangan konsumsi, meningkat dari 31,7 pada 1999 menjadi 35 pada 2009.⁹⁹ Mereka yang tinggal di pedesaan tetap dicirikan dengan hidup berkekurangan. Karakter kemiskinan di perkotaan dan daerah-daerah penyangga pun tiada berubah. Hal ini ironis karena pemerintah mengklaim, setidaknya pemerintahan masa Presiden SBY, bahwa mereka sudah menggelontorkan dana penanggulangan kemiskinan yang berkali-kali lipat. Kita pun tahu, dana-dana bantuan asing termasuk yang bersumber dari utang telah tersalur pula untuk program penanggulangan kemiskinan.

Gambaran problem kesenjangan ekonomi ini terefleksi pula dalam kualitas pendidikan di Indonesia, yang sampai sekarang baru sekitar enam persen penduduknya bisa mengenyam bangku kuliah S1. Kebanyakan anak-anak masih direpotkan dengan problem tidak punya uang untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Wajar kiranya jika kemudian muncul problem upah murah dan pemasukan dari pajak yang rendah.

Meskipun di sana-sini kita melihat hadirnya pertokoan dan pusat perbelanjaan mewah, menjamurnya *cluster* perumahan baru dan gedung apartemen pencakar langit, serta padatnya jalanan di perkotaan dengan kendaraan bermotor, segalanya semu karena fenomena tersebut bertumpu pada perekonomian yang 92 persennya dikelola oleh pekerja dan pengusaha dengan skala ekonomi mikro dan kecil dan pekerja tanpa kontrak. Data dari Shubham Chauduri (Diskusi Panel Ekonomi *Kompas* 21 Juni 2012) mengungkapkan, hanya dua persen dari angkatan kerja di Indonesia yang merupakan majikan, enam persen bekerja sebagai pekerja tetap dengan kontrak jelas, 38 persen bekerja sebagai upahan tetapi tanpa kontrak, dan 54 persen menjalankan usaha sendiri yang tidak tercatat alias informal.

Jika kedua data di atas dipadukan, sungguh jelas terlihat mengapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih seperti lingkaran setan. Bayangkan, problem ekonomi biaya tinggi di mana masih saja terjadi kutipan-kutipan biaya tidak resmi, pegawai yang mengasong proyek ke sana kemari, atau lemahnya penegakan hukum di sektor-sektor ekstraktif. Hal ini bisa dipahami karena lebih dari 90 persen penduduk hidup dengan ketidakpastian masa depan sosial ekonomi keluarganya. Tak heran kalau Indonesia kesulitan melakukan formalisasi sektor ekonomi dan menghidupkan sektor riil, serta buruh terus turun ke jalan meneriakkan hal-hal mereka pahami saja yakni permintaan kenaikan upah, sementara pengusaha terus menolak kenaikan upah. Tak heran juga, jika angka kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat buruk. Jika ini diteruskan, mustahil Indonesia bisa tembus sebagai negara besar.

Dalam krisis 2013 nampak bahwa profil ekonomi itu membuat rata-rata masyarakat bertindak sebagai konsumen, sehingga Indonesia perlu banyak mengimpor barang-barang jadi termasuk juga barang modal dari luar negeri. Ini menggerus devisa negara, padahal pendapatan negara dari pajak rendah dan kita mau utang tetap rendah. Akibatnya, kepercayaan investor dan spekulasi pada Indonesia turun juga. Maka, mata uang kita yang menjadi sasarannya. Padahal, ketika kondisi moneter kita terganggu, tindakan pemerintah adalah meningkatkan suku bunga yang efeknya juga bagi kantong masyarakat karena tingkat konsumsi menurun.

Indonesia perlu menyadari bahwa kepentingan nasional kita adalah menyudahi kerentanan ekonomi yang sekarang berkembang dan makin mendalam ini. Paradigma *trickle-down effect* (efek menetes) sudah usang, atau setidaknya terbukti belum terjadi juga di Indonesia. Kita tidak mungkin menunggu 92 persen penduduk Indonesia yang bekerja tanpa kontrak dan di sektor informal tadi bisa keluar secara swadaya dari ketidakpastian ekonomi yang melilitnya.

Di sisi lain, Indonesia perlu menyadari bahwa perekonomian global diwarnai oleh praktik penajaman *competitive advantage*, di mana pemerintah bahu membahu dengan pelaku usaha untuk meningkatkan skala produksi suatu barang/jasa, mencari faktor-faktor produksi termurah, dan menekan biaya distribusi supaya unit barang/jasa yang dihasilkan kompetitif dan menarik di mata konsumen. Pemerintah Indonesia perlu menyadari, meskipun kegiatan ekonomi domestik wajib dijaga agar tetap dinamis,

Pemerintah Indonesia perlu menyadari, meskipun kegiatan ekonomi domestik wajib dijaga agar tetap dinamis, negara sebesar Indonesia harus berorientasi pada perluasan sayap kekuatan ekonomi ke negara, bahkan ke benua lain.

negara sebesar Indonesia harus berorientasi pada perluasan sayap kekuatan ekonomi ke negara, bahkan ke benua lain.

Dengan demikian dapat diidentifikasi, kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi adalah: *Pertama*, mendorong dominasi produk Indonesia di pasar dunia. Para pejabat kita perlu berhitung secara realistis tiap kali mendapat tawaran

kerja sama dari negara lain, dan bukannya malah bersaing antarkementerian. *Kedua*, menjaga agar produk Indonesia selalu lebih kompetitif dibandingkan dengan produk negara-negara lain. *Ketiga*, mencegah penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal dengan menjaga kedaulatan di wilayah-wilayah perbatasan, menuntut pencatatan yang akurat dari negara-negara penyedia servis logistik untuk produk-produk Indonesia, dan menempatkan staf-staf yang patuh hukum dan didukung sistem monitoring yang ketat di wilayah-wilayah perbatasan dan negara-negara mitra strategis.

Keempat, melindungi kepentingan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah untuk “naik kelas” dan mengembangkan diri sebagai bagian dari *global value chain*. Informasi yang disediakan bagi para pebisnis harus lebih komprehensif dan detail sehingga keinginan pebisnis untuk ekspansi ke negara-negara sahabat meningkat. *Kelima*,

membangun kepercayaan investor dan pemerintah negara lain terhadap kinerja pemerintah Indonesia. Hal ini sangat diperlukan karena pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan fiskal dan moneter yang peka terhadap kebutuhan zaman. Studi-studi banding dari kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri dan badan intelijen adalah sumber informasi yang memperkaya khazanah pengambilan keputusan dalam hal ini. *Keenam*, menumbuhkan keberanian pihak asing untuk patuh pada prinsip pembangunan berbasis pemerataan sarana dan prasarana ke pelosok-pelosok tanah air, termasuk untuk sektor perikanan dan pertanian. Dengan fasilitas yang dibangun, petani dan nelayan perlu diarahkan untuk menghasilkan produk yang mempunyai harga tinggi di pasaran dunia.

Ketujuh, menyuarakan pada dunia tentang desain realistis dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tidak dengan retorika belaka tetapi dengan menunjukkan harmonisasi kebijakan pengelolaan tata guna lahan: mana lahan untuk pertanian, hutan industri dan konservasi. Pihak kantor-kantor perwakilan RI perlu menggandeng kantor kementerian teknis dan kantor pemerintah daerah untuk memfasilitasi pihak asing yang layak diajak bekerja sama di dalam negeri, dengan menghindari jalur non-formal yang mempertaruhkan akuntabilitas pemerintah. *Kedelapan*, aktif memantau ketersediaan pasokan energi dengan harga terjangkau untuk keperluan industri dan rumah tangga sampai ke pelosok tanah air. Diplomasi Indonesia harus membidik perusahaan pertambangan, perusahaan energi, dan tren kerja sama bidang energi, baik di tingkat regional maupun global.

2. Kepentingan nasional bidang politik

Dalam hubungan internasional, solusi politik adalah hal yang perlu dikembangkan dalam menyelesaikan ketegangan antarnegara. Jangan sampai cara-cara unilateral yang menggunakan kekerasan militer diusulkan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalahnya dengan Indonesia. Sekali saja Indonesia diajukan ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai negara yang “perlu dibantu” karena masalah domestiknya, maka secara tidak langsung Indonesia akan dikenal sebagai negara parah.

Secara umum, ada kesepakatan di antara pelaku hubungan internasional¹⁰⁰ bahwa kondisi internasional saat ini memberi ruang gerak yang lebih baik bagi Indonesia sehingga seharusnya target-target politik luar negeri Indonesia dapat dicapai dengan relatif lebih mudah. Kemudahan ini terbentuk menyusul transisi menuju demokrasi yang dialami Indonesia sejak tahun 1998 dan dengan makin terlibatnya kelompok masyarakat sipil dalam mengedepankan praktik demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia aktif melakukan pertemuan antar-LSM terkait kerja sama penguatan perlindungan HAM. Demikian pula Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak memperoleh perhatian tinggi dari masyarakat sebagai tempat mengadu dan mencari solusi. Sejumlah kegiatan yang mengedepankan karakter Indonesia yang menghormati demokrasi, nilai-nilai keberagaman, pemajuan HAM, pemulihan keamanan dan perdamaian, serta pemulihan ekonomi menjadi titik balik yang turut mengubah aktivitas diplomasi. Secara

umum, dirasakan lebih positif dan mendukung tanggapan dari luar negeri terhadap kegiatan hubungan luar negeri yang dilakukan Indonesia.

Dengan status politik sebagai negara demokrasi, Indonesia memang dipandang cukup serius oleh negara-negara sahabat untuk melakukan konsolidasi demokrasi, termasuk dalam menciptakan suasana lebih kondusif untuk kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat ter-

masuk dengan memberi peluang demonstrasi damai dan perlindungan terhadap perempuan di ruang publik. Di tingkat ASEAN, misalnya, Indonesia dipuji karena andilnya melahirkan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia atau *ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights* (AICHR), *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* dan mengelola *Institute for Peace and Democracy* di Bali. Di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, ada kegiatan *sharing* praktik demokrasi yang aktif yang diapresiasi negara-negara demokrasi baru seperti Mesir dan Myanmar.

Namun, kritik yang berkembang dari dalam dan luar negeri juga cukup tajam, sehingga ada indikasi bahwa kredibilitas dan

Indonesia dipandang cukup serius oleh negara-negara sahabat untuk melakukan konsolidasi demokrasi, termasuk dalam menciptakan suasana lebih kondusif untuk kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat termasuk dengan memberi peluang demonstrasi damai dan perlindungan terhadap perempuan di ruang publik.

reputasi pemerintah dalam konsolidasi demokrasi, khususnya dalam porsi *inclusiveness* (mengikutsertakan segala lapisan dan golongan masyarakat dalam demokrasi) lemah.

Kasus penolakan pada Mei 2013 terhadap pemberian penghargaan untuk Presiden SBY sebagai negarawan dunia “*World Statesman Award 2013*” dari Appeal of Conscience Foundation di New York adalah salah satu contohnya. Publik di dalam negeri masih menganggap perlu kerendahan hati dari pemimpinnya bahwa masalah penghargaan internasional harus bisa dirasakan dulu kenyataannya di tataran individu warga negara. Prof. Magnis Suseno, seorang filsuf dan pemuka agama, menyoroti lemahnya perlindungan kelompok minoritas dan kepastian hukum dalam kebebasan beragama sebagai hal esensial yang absen dalam kepemimpinan Presiden SBY sehingga pemberian penghargaan tadi dianggap tidak pada tempatnya, apalagi karena penghargaan tadi diberikan untuk pertimbangan kinerja dalam toleransi keagamaan.¹⁰¹

Catatan merah juga diberikan oleh Dewan HAM PBB. Meskipun Indonesia terpilih tiga kali berturut-turut sebagai anggota Dewan HAM PBB, termasuk untuk periode 2011-2014, pada periode ini pula Indonesia terus mendapat rapor merah. Disebutkan, meskipun Indonesia punya komitmen dan instrumen-instrumen untuk mendorong dan melindungi HAM, mekanisme untuk pelaksanaannya tidak memadai.¹⁰² Kepolisian masih dituding melakukan pelanggaran HAM karena melakukan penyiksaan atau tindakan kekerasan yang berlebihan. Aktivitas politik yang damai seperti demonstrasi termasuk oleh pendukung HAM dan

peliputan berita oleh jurnalis masih mengalami kriminalisasi, intimidasi, serangan fisik, dan masih ada hambatan pelaksanaan hak-hak seksual dan reproduktif bagi perempuan.

Terkait persoalan minoritas agama dan kebebasan beragama, Indonesia dituntut menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami kelompok minoritas agama, meningkatkan toleransi antarumat beragama, *me-review* dan menghapuskan kebijakan yang diskriminatif dan yang membatasi kebebasan beragama, memastikan kebijakan perundang-undangan sesuai dengan hukum HAM Internasional, mempercepat RUU *Religious Harmony*, mengadakan pelatihan untuk kampanye antidiskriminasi bagi kelompok minoritas, serta mengambil langkah-langkah hukum bagi tindakan syiar kebencian, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan yang dialami kelompok minoritas beragama.

Penilaian tersebut terjadi pada saat Indonesia dipandang heroik dan sigap dalam memperjuangkan hak bagi masyarakat negara-negara lain. Diplomasi yang dilakukan oleh anggota DPR, misalnya, menjadi contoh yang sangat relevan untuk heroisme tersebut. Melalui IPU (*Inter-Parliamentary Union*), delegasi DPR-RI memperjuangkan Palestina menjadi anggota tetap IPU, membebaskan anggota parlemen Palestina dari penjara dan blokade Israel, bahkan tokoh diplomasi DPR seperti Marzuki Darusman, Theo Sambuaga, dan Abdillah Toha mendesak Komite Eksekutif IPU untuk membawa kasus Palestina ke sidang Governing Council IPU dan hasilnya sesuai dengan harapan: Palestina diterima pada sidang IPU berikutnya di Addis Ababa, Ethiopia, pada 5-10 April 2009.

Jika kita sandingkan fakta di atas dengan slogan ribuan teman dan tanpa musuh (*thousand friends and zero enemy*) dari Presiden SBY dan konsep keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*) yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, ada suatu *puzzle* besar. Indonesia sendiri menginginkan apa dalam pergaulan politik global? Sekadar teman dan keseimbangan politik global? Yang meresahkan adalah bahwa menambah teman sebanyak-banyaknya dan mencari keseimbangan dalam politik global berpotensi untuk sekadar menguntungkan kepentingan negara-negara lain. Istilah sinisnya: Indonesia sekadar menari di atas tabuhan genderang negara-negara lain.

Berdasar paparan di atas jelas bahwa kepentingan nasional Indonesia di bidang politik adalah: (a). Meyakinkan negara-negara lain bahwa pemerintah Indonesia mampu dan punya kredibilitas serta reputasi positif di mata masyarakatnya. Kepercayaan dan dukungan domestik akan dibaca oleh pihak asing sebagai wujud solidnya gerak Indonesia sebagai bangsa dalam percaturan politik global. (b). Menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa Indonesia punya strategi, baik jangka pendek, menengah maupun panjang yang meyakinkan untuk melindungi HAM. Kritik internasional perlu diterima dengan lapang dada dan dicarikan solusinya, dan bukannya dipendam lebih lama lagi. Indonesia yang aktif dalam menyuarakan demokrasi perlu konsisten menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mengganggu ketenangan publik dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, Indonesia juga perlu: (c). Menunjukkan komitmen penegakan hukum, termasuk dalam memerangi praktik aturan main yang tidak jelas dan semena-mena, termasuk korupsi dan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Jika terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum, tidak hanya kredibilitas pemerintah akan diragukan, tetapi juga Indonesia berpotensi dipecah belah. Indonesia perlu membangun reputasi juga bahwa siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional Indonesia karena rayuan kepentingan sesaat yang disodorkan negara-negara lain. (d) Mendukung cara-cara multilateral dan kerja sama regional dalam menyelesaikan ketegangan antarnegara. Dari pengalaman keterlibatan dalam isu-isu negara berkembang dan membantu negara-negara yang dipandang sinis oleh negara-negara Barat, Indonesia dapat belajar bahwa instrumen kerja sama multilateral dan regional adalah instrumen yang membantu dalam saat-saat genting. Ketika lembaga multilateral dan regional alpa dalam mendukung anggotanya yang bermasalah untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara elegan dan tetap menjaga prinsip non-intervensi dari negara-negara lain, maka peluang bagi negara yang merasa lebih kuat untuk “main hakim sendiri” lebih besar.

3. Kepentingan nasional bidang sosial budaya

Dalam hubungan internasional, isu sosial budaya dianggap sebagai *low issues*, isu yang tidak perlu mendapatkan perhatian sentral dari pucuk pimpinan politik luar negeri. Asumsinya

karena pencapaian kepentingan dalam bidang ini bersifat teknis. Padahal jika dicermati, penataan strategi yang baik dalam bidang sosial budaya akan mendatangkan keuntungan yang lebih konkret dirasakan pada individu warga negara. Misalnya terkait perluasan kesempatan kerja, peluang mendapatkan beasiswa pendidikan tinggi ke universitas ternama di luar negeri, kerja sama antarlembaga pendidikan atau lembaga penelitian, pengakuan terhadap hak cipta, pengembangan industri kreatif seperti desain, kuliner, film, dan lain-lain.

Kebijakan luar negeri bidang sosial budaya membutuhkan terobosan baru untuk memperkuat *soft power*. *Soft power* adalah kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain melalui daya tarik dan rayuan. Artinya, pengembangan diplomasi yang mengedepankan kebutuhan dalam bidang sosial budaya adalah investasi yang sangat baik untuk membuat individu-individu negara lain tergerak untuk mendukung agenda kepentingan nasional kita dengan tanpa perasaan berat hati. Jika *soft power* ini lancar, biaya-biaya politik dan ekonomi dalam skema kerja sama dengan negara lain dapat diminimalkan karena dengan sukarela penduduk negara lain mau mengekor cara kita.

Negara-negara berpenduduk besar seperti AS, India, China mengerahkan warga negaranya untuk bergerak meraih kepentingan nasionalnya melalui cara-cara yang nyaman bagi negara lain. Formatnya bukan sekadar pameran atau pertunjukan seni, seperti yang sekarang masih terus dipakai oleh kantor-kantor perwakilan RI, melainkan juga unjuk kekhasan kompetensi

dan karya cipta anak bangsa yang dikompetisikan di tingkat internasional. Pembuatan film didorong untuk menembus pasar internasional. Produk-produk buatan Indonesia didorong untuk dipromosikan melalui tampilan dalam film atau konser musik. Untuk hal ketenagakerjaan, pemerintah negara-negara lain aktif menempelkan kegiatan pemberian bantuan luar negeri dengan perluasan peluang bagi warga negaranya bekerja di luar negeri dan belajar tentang budaya kerja dan budaya politik di negara-negara lain.

Khusus untuk soal pendidikan, Indonesia perlu berani juga mempromosikan kompetensi universitas dan lembaga penelitian di Indonesia sebagai penghasil ide-ide menarik dalam wacana internasional. Perlu ditumbuhkan kepercayaan diri anak bangsa bahwa karya dan pemikirannya didorong untuk punya pengaruh yang lebih luas ke negara-negara lain.

Dengan begitu, kepentingan nasional Indonesia di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut: (a). Mengembangkan inisiatif dan karya anak bangsa melalui kegiatan fasilitasi pemerintah atau kantor perwakilan yang membuat inisiatif dan karya tersebut lebih dikenal di tataran global. (b). Memperkenalkan orisinalitas nilai dan karya warga Indonesia sebagai bagian dari penyumbang peradaban baru dunia. (c). Mengembangkan kegiatan yang memperkuat penggunaan *soft power* dalam diplomasi Indonesia. Dan (d). Mempromosikan kompetensi lembaga pendidikan di Indonesia ke luar negeri.

4. Kepentingan nasional bidang pertahanan

Dalam bidang pertahanan, postur Indonesia tergolong masih diragukan. Dalam banyak kesempatan, pemerintah tergolong santai dalam menjaga wilayah-wilayah terdepan di Republik, apalagi yang wujudnya perairan. Studi menunjukkan bahwa sebenarnya ada sejumlah kebijakan pengelolaan perbatasan dan perairan, tetapi kendalanya terletak pada lemahnya kerja sama antar-instansi yang berwenang, terutama antarpemerintah pusat dan daerah, adanya indikasi mafia kejahatan transnasional yang merongrong keamanan daerah-daerah perbatasan, kurangnya fasilitas pendukung pertahanan seperti radar dan kapal yang lincah, serta kurangnya dana untuk kecukupan staf penjaga.¹⁰³

Hal ini sangat kontras dengan China dan India, misalnya, yang terkenal sangat protektif terhadap wilayah-wilayah perbatasan mereka. Mereka tak segan berhadap-hadapan secara konfrontatif dengan siapapun yang mengajukan klaim tandingan. Konflik yang berpangkal dari kedua negara ini tidak dapat dianggap enteng. Pada awal Juli 2013, ketika Menteri Pertahanan India akan mengunjungi China, Deputy Direktur Jenderal dari Departemen Penelitian Militer di Angkatan Bersenjata China mengatakan, India harus hati-hati dalam berkata dan bertindak karena India adalah satu-satunya negara di dunia yang mengatakan terus terang bahwa pengembangan kekuatan militernya didasarkan atas ancaman militer dari China.

Pernyataan itu diarahkan pada India yang dianggap berlebihan dalam menyikapi kegiatan militer China di perbatasan India-

China di pegunungan Himalaya yakni antara Jammu dan Xinjiang, serta Arunachal Pradesh. Sebelumnya, pemerintah India menyerukan bahwa China masuk tanpa izin sampai 20 km di wilayah yang diklaim India. Sikap India yang konfrontatif terhadap China sebenarnya tidak sepenuhnya unik karena dalam sejarah China selalu punya masalah dengan para tetangga yang berbagi wilayah perbatasan dengannya. Sebut saja Vietnam, Filipina, Indonesia di Asia Tenggara, lalu India, Taiwan, dan Rusia. Intensitas masalahnya berbeda-beda, tetapi China memang sangat protektif terhadap wilayah perbatasannya dan kerap menggunakan komponen sejarah sebagai batas wilayahnya.

Pada saat China dan India sangat protektif terhadap wilayah-wilayah perbatasan mereka, Indonesia bahkan belum memiliki dokumentasi yang memadai tentang kondisi terkini wilayah-wilayah terdepan di tanah air.

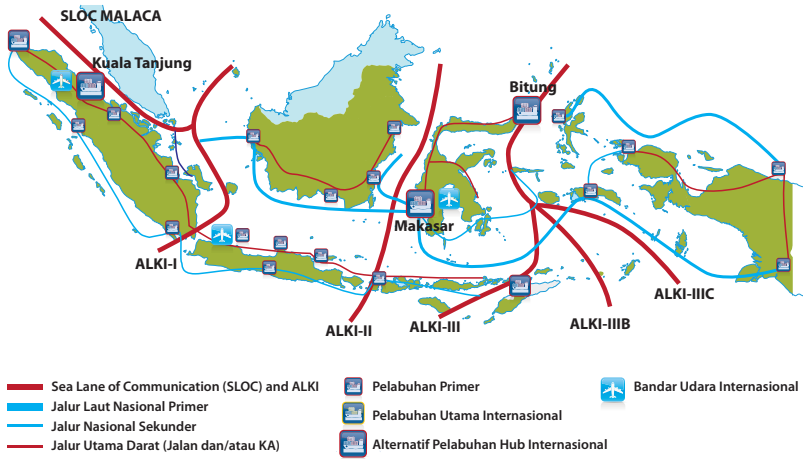
Sementara itu, Indonesia bahkan belum memiliki dokumentasi yang memadai tentang kondisi terkini wilayah-wilayah terdepan di tanah air. Dr. Makarim Wibisono, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI (2000-2002) dan Direktur ASEAN Foundation (2010-2013) mengungkapkan, wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak sepenuhnya dihormati oleh negara-negara tetangga. Australia misalnya, dalam keadaan mendesak dapat memutuskan untuk memotong saja jalur perairan Indonesia dari

Timur ke Barat tanpa peduli pada jalur lintas yang ditentukan dalam ALKI.

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Koordinator Perekonomian RI pada zaman Presiden Megawati Sukarnoputri, bahkan mengatakan, ALKI di Timur Indonesia sangat rentan dilalui kapal-kapal selam yang lewat tanpa permissi, karena kondisinya sebagai laut dalam dan Indonesia belum punya alat canggih untuk mendeteksi pelanggar wilayah kedaulatan. Hal ini dikonfirmasi juga oleh Brigjen Jan Pieter Ate, Direktur Kerja Sama Internasional dari Kementerian Pertahanan RI. Indonesia sampai saat ini baru punya 2 kapal selam, dan itu pun bukan yang tercanggih sehingga belum bisa menjangkau sampai laut dalam. Konsentrasi Indonesia masih pada perbatasan laut dangkal yang lebih banyak dilalui kapal-kapal komersial. Brigjen Ate mengakui, Indonesia punya keterbatasan serius dalam bidang penjagaan wilayah maritim dan sampai saat ini persoalan dana memang paling mencekik. Jika mau menambah armada kapal selam, pembelian alat pertahanan lain harus ditunda dan harus siap juga menambah jumlah tenaga kerja pertahanan.

Sebenarnya Indonesia sudah punya sejumlah aturan tentang wilayah kedaulatan, yakni PP No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 37/2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, dan PP No. 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Gambar Geografis ALKI seperti tertera di bawah ini.

Gambar 2. Gambar Geografis ALKI



Mengingat nilai penting penjagaan wilayah-wilayah perbatasan dan daerah lintas di perairan Indonesia, maka perlu dipikirkan agar ada konsentrasi perhatian pada titik-titik masuk pada jalur ALKI tersebut. Alat canggih dan persenjataan perlu ditempatkan pada posisi-posisi yang rentan penyusupan; bukan untuk kemudian membuka konfrontasi dengan para penyusup karena nanti justru bersifat kontraproduktif pada kepentingan nasional Indonesia, melainkan untuk menggiring mereka yang selama ini belum taat untuk lewat jalur yang sudah ditentukan. Selain itu, ALKI pun punya aspek strategis yang patut dipertimbangkan Indonesia karena yang lewat di sana bukan hanya produk legal seperti minyak bumi dan barang, melainkan juga senjata, limbah, dan obat-obatan terlarang.

Perlu diluruskan pula bahwa pertahanan dan keamanan tidak bisa sekadar mengandalkan persenjataan karena tentunya hal itu

akan sangat mahal dan belum tentu efektif. Maka, pertahanan dan keamanan perlu disinergikan dengan kegiatan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terdekat. Dalam kondisi konflik, yang punya kepentingan untuk menjaga agar wilayah tempat tinggalnya tetap damai adalah masyarakat setempat. Itu berarti, keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk menjaga agar upaya penjagaan perbatasan berjalan efektif sekaligus damai.

Dengan demikian, kepentingan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan antara lain, (a). Menjaga wilayah-wilayah perbatasan dan mengawalinya dengan cermat dan terpadu. (b). Mengelola wilayah-wilayah terdepan di RI dengan menyelenggarakan patroli dan kegiatan masyarakat yang hidup supaya postur pertahanan dan keamanan RI disegani dan terjadi optimalisasi pengelolaan sumber hajat hidup masyarakat di perairan yang strategis. (c). Mengembangkan kerja sama dengan negara lain untuk menjamin keamanan wilayah perbatasan agar terbebas dari kejahatan transnasional. (d). Melengkapi sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan, termasuk dengan meremajakan kelengkapan pertahanan dan keamanan yang dimiliki angkatan bersenjata, kepolisian, dan instansi yang menjaga wilayah-wilayah perbatasan. (e). Merawat munculnya pakar-pakar bidang pengelolaan maritim, hukum internasional dan perbatasan. (f). Melibatkan komunitas masyarakat di daerah perbatasan dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan.

Selain kepentingan nasional yang telah disebutkan di atas, terdapat juga kepentingan vital atau kepentingan yang lebih tegas yang tidak boleh dilanggar, baik oleh negara-negara lain maupun

oleh warga negara Indonesia sendiri. Kepentingan vital harus dipahami sungguh-sungguh oleh semua warga negara, apalagi yang terlibat dalam hubungan internasional dan diplomasi. Berbeda dengan kepentingan nasional yang masih bisa dicarikan alternatif pencapaiannya karena mempertimbangkan suasana diplomasi, kepentingan vital bersifat kaku dan tidak bisa ditawar. Ia seperti garis batas yang jika dilanggar akan memicu perang atau sanksi tegas.

Berdasarkan rangkaian diskusi dalam penyusunan laporan ini, setidaknya ada 2 kepentingan vital Indonesia yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh dalam waktu dekat ini: *Pertama*, integritas wilayah dan nasional. Indonesia telah berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan internasional atas wilayah maritim sehingga bisa diakui dalam konsep internasional yang sebelumnya belum pernah ada, yakni konsep negara kepulauan. Karena perjuangan di UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), wilayah Indonesia yang tadinya 2 juta km persegi bisa bertambah menjadi 8 juta km persegi. Dan karena kita berada di atas lempeng bumi, maka tiap kali terjadi tsunami, wilayah Indonesia bertambah setidaknya 4,000 km persegi. Ini kekayaan Indonesia. Ini pencapaian Indonesia yang harus dijaga sungguh-sungguh. Untuk Natuna, kita sudah berunding 25 tahun dengan Vietnam. Jadi, kita jangan sampai lengah terhadap China.

Kedua, demografi dan sosial budaya. Indonesia adalah negara yang diakui dunia dengan kekayaan demografi dan sosial budaya, sehingga hal ini harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Keaktifan Indonesia pada tataran internasional tidak

boleh sampai mengorbankan penduduk Indonesia dan kekayaan nilai-nilai sosial budaya yang selama ini menjadi perekat dan penguat pembangunan di Indonesia sampai ke dusun-dusun. Persoalannya sekarang, kita menghadapi masalah perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, jaringan terorisme, pengerukan tambang secara ilegal, dan tanah-tanah adat yang digusur oleh kepentingan asing. Ini contoh pelanggaran kepentingan vital Indonesia dan harus segera distop. Kita pun harus sadar bahwa negara-negara lain menggunakan berbagai macam cara untuk menyusupi agar pengawasan kita terhadap kepentingan vital tersebut longgar, misalnya lewat LSM yang sebenarnya “berplat merah” dari negara lain. KGB dan CIA memiliki lembaga-lembaga seperti itu, sehingga Indonesia harus peka pada jenis-jenis lembaga masyarakat yang berkembang.

KELEMAHAN YANG PERLU DIPERBAIKI

Apapun peluang, tantangan, dan ancaman dalam dunia internasional, satu hal yang menjadi modal sangat baik adalah pelaku dan lembaga yang solid namun peka terhadap kebutuhan zaman. Untuk itu, sebelum kita bicara soal peluang, potensi tantangan, dan ancaman selama lima tahun ke depan, perlu disoroti kondisi internal pelaku dan pembuat kebijakan luar negeri Indonesia.

1. Desain politik luar negeri.

Desain politik luar negeri Indonesia saat ini, harus diakui, bersifat lebih banyak reaktif daripada antisipatif dan visioner. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pelaku hubungan

internasional di Kementerian Luar Negeri dan observasi kegiatan mereka, sudut pandang dalam menjalankan tugas adalah: melihat bagaimana negara lain akan bertindak atau berkata barulah Indonesia menentukan sikap, dan untuk melakukan reaksi *post-facto*. Dalam forum-forum internasional, rata-rata diplomat Indonesia punya persiapan terbatas sebelum sidang dan baru membaca situasi ketika di dalam ruang sidang. Di kantor-kantor perwakilan RI, khususnya di wilayah yang banyak migran dari Indonesia, perhatian seluruh diplomat terarah pada pelayanan konsuler atau perlindungan tenaga kerja. Jadi, hal-hal teknis dan rutin saja yang banyak mendapat porsi energi staf.

Ketiadaan desain yang jelas ini dirasakan juga para direktur di Kementerian Luar Negeri RI yang mengaku tidak punya panduan tentang apa kepentingan Indonesia di suatu kawasan. Para direktur yang merasa butuh panduan kemudian berinisiatif membuat panduan sendiri dan biasanya terpusat pada perlindungan tenaga kerja atau orang Indonesia di luar negeri. Hal-hal yang menyangkut kepentingan ekonomi politik tidak bisa ditetapkan secara otoritatif karena memang level mereka “hanya” direktur.

Dengan absennya desain besar tadi, perekrutan staf dan pembagian sumber daya juga tidak cocok dengan kebutuhan di lapangan. Kantor perwakilan Indonesia di Malaysia misalnya, mengaku sangat direpotkan oleh urusan administrasi yang menumpuk terkait layanan TKI dan layanan hukum bila sampai ada TKI yang ditemukan bermasalah dalam hukum Malaysia. Hal ini, antara lain, karena tidak ada visi jangka panjang

terkait kehadiran KBRI dalam merespon persoalan TKI. Hal ini berbeda sekali dengan Malaysia yang telah menyiapkan diri menjadi ‘hub’ untuk pasar tenaga kerja dari kawasan Asia Tenggara ke seluruh dunia. Malaysia tidak memiliki tenaga kerja yang memadai, namun siap mengambil keuntungan dari negara-negara tetangganya yang berlebih dalam jumlah tenaga kerja.

2. Kelembagaan politik luar negeri.

Secara hukum, Indonesia memiliki UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Di sana ditegaskan sejumlah hal yang kiranya perlu diangkat sebagai garis bawah bagi semua pihak sebagai berikut: *Pertama*, Presiden adalah pihak yang berwenang menyelenggarakan kegiatan hubungan luar negeri, dan bilamana diperlukan akan melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri Luar Negeri. Bilamana ada kementerian lain ditunjuk oleh Presiden, Menteri tersebut akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. *Kedua*, tidak ditutup kemungkinan bahwa aktor lain seperti pemerintah daerah, instansi pemerintah, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan warganegara Indonesia secara umum untuk terlibat dalam hubungan luar negeri. Relasi dan jalur komunikasinya memang tidak tergambar jelas dalam ketentuan UU ini, walaupun dapat diasumsikan bahwa mengingat poin pertama tadi, segala hal perlu merujuk pada konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri atau Presiden.

Ketiga, kegiatan hubungan luar negeri diabdikan untuk kepentingan nasional dengan prinsip bebas aktif. *Keempat*, bebas

aktif pada hakikatnya bukan politik netral melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia, serta aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Kelima*, pengabdian untuk kepentingan nasional adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945.

Keenam, diplomasi seyogyanya menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia yang tidak sekadar bersifat rutin, tetapi juga dapat menempuh cara-cara non-konvensional, tidak selalu terikat pada kelaziman protokoler, walau tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional. Diplomasi Indonesia hendaknya dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam bersikap, luwes dan rasional dalam pendekatan, dan bersumber pada kepercayaan diri sendiri. *Ketujuh*, diplomasi Indonesia mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, menjauhi sikap konfrontasi dan politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Dalam praktik pelaksanaan hubungan luar negeri ternyata terdapat sejumlah evaluasi tentang realisasi dari hubungan luar

negeri sebagaimana digariskan dalam UU tersebut. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan hubungan luar negeri sepanjang 10 tahun lalu, nyata betul bahwa Presiden adalah pemegang otoritas hubungan luar negeri tertinggi. Hampir dalam segala kesempatan pergaulan internasional, Presiden menangani langsung. Menteri Luar Negeri hanya terlibat untuk tindak lanjut, pembuka, atau pelengkap. Sejumlah kementerian lain diberi wewenang besar oleh Presiden terkait negosiasi dengan pihak-pihak asing dalam bidang pembangunan ekonomi, misalnya Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertahanan. Namun, level koordinasi dan konsultasi yang terjadi antarkementerian yang diberi wewenang tadi dengan Kementerian Luar Negeri cenderung formalitas belaka atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, juga tidak ada sinergi antarkementerian dan antara kementerian dan para staf khusus Presiden dan Wakil Presiden, seperti UKP4, TNP2K, Dewan Pertimbangan Presiden, Staf Khusus Presiden bidang Politik, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Staf Khusus Presiden bidang Pangan, dan masih banyak lagi.

Bila desain politik luar negeri Indonesia lebih jelas, problem koordinasi tadi tentu tidak akan memberi konsekuensi negatif yang berlebihan. Memang ada upaya menciptakan *grand design* seperti MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) dan MP3KI (Master Plan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia) tetapi rencana itu terlihat janggal di atas kertas karena skala prioritasnya tetap tidak

nampak, serta tidak ada garis-garis panduan tentang apa saja bentuk kerja sama atau jalan kebijakan yang harus dibangun demi pencapaian prioritas tersebut. Hanya *output* dan sasaran waktu saja yang digariskan, selebihnya mengambang. Tanpa *grand design* seperti itu, sulit dibayangkan bahwa pelaku diplomasi punya pegangan tentang apa yang diinginkan oleh Indonesia. Seperti dikatakan berulang-ulang oleh sejumlah pihak di Kementerian Luar Negeri: Indonesia cukup tahu apa yang tidak diinginkan tetapi tidak pernah tahu apa yang diinginkan.

Dalam praktik diplomasi, memang ada ruang untuk “*city diplomacy*” alias relasi antara pemerintah daerah dan pemerintah negara lain, tetapi ruang konsultasinya dengan pemerintah pusat sangat jelas. Di Indonesia, pembagian tugas ini perlu diperjelas. Wewenang pemerintah daerah pun harusnya sangat terbatas, khususnya jika menyangkut atau berpengaruh pada kebijakan nasional. Di Indonesia belum ada etika dan pengaturan dalam hal ini.

Adalah suatu kewajaran bila ada tanggapan yang beragam dari pemerintah daerah terkait relasi dengan pihak-pihak asing. Ada yang lebih aktif daripada yang lain dan ada yang memberikan terjemahan sendiri pada peranan daerah dalam politik ekonomi global. Ini suatu kewajaran dari proses konsolidasi demokrasi dan otonomi daerah. Kita tak bisa mengharapkan keseragaman cara pandang. Yang perlu diatur adalah pagu-pagu keterlibatan daerah dalam sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini yang masih sumir di Indonesia.

Selain itu, di dalam Kementerian Luar Negeri sendiri juga ada tantangan. Sebelum 2002, struktur kepengurusan di Kementerian Luar Negeri berbasiskan sektor dan tercermin pada wewenang Direktorat Jenderal secara fungsional (bidang politik ekonomi dan sosial budaya) yang masing-masing dibantu oleh 6 Direktorat. Implikasinya, dalam rapat kabinet, misalnya, akan selalu hadir Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN) untuk mendampingi Menteri Luar Negeri. Karena Dirjen HELN tadi senior dari segi eselon dan dibantu oleh para direktur yang sifatnya fungsional yang memberi laporan tentang kondisi dari berbagai kawasan dunia, maka sidang kabinet dapat berjalan lebih terarah.

Kondisi ini berubah sejak 2002 karena pengaturan tugas di Kementerian Luar Negeri saat ini adalah berdasarkan pendekatan regional. Dirjen dibagi tugas berdasarkan kawasan, misalnya, Amerika-Eropa, Asia Pasifik, dan Timur Tengah. Alhasil, tiap Dirjen harus punya staf sendiri untuk urusan ekonomi, politik, dan sosial budaya dan level para staf ini sangat rendah, yakni eselon 3 atau 4. Artinya, jumlah staf di Kementerian Luar Negeri membesar tetapi dalam rapat kabinet, Menteri Luar Negeri sulit mendapat informasi yang terintegrasi tentang isu-isu strategis, seperti pangan, energi, dan tenaga kerja karena masing-masing isu itu ada pada semua kementerian. Manakala diadakan rapat atau seminar soal isu, termasuk di luar negeri, perlu hadir banyak staf selevel eselon 3 atau 4 untuk melakukan *briefing* pada duta besar. Kemudian terkait uang dan pendanaan, diurus terpisah oleh kantor Sekretaris Jenderal (Sekjen) sehingga masing-masing

Dirjen hanya bisa menunggu pembagian jatah anggaran dari Sekjen dan sulit mendesak target prioritas kegiatan, kecuali mereka mau saling debat antar kedirjenan. Ini hampir tak mungkin diinginkan dalam budaya kelembagaan Kementerian Luar Negeri. Jelas, pengaturan struktur kelembagaan seperti ini tidak efektif.

Model struktur seperti itu memang lazim. Tetapi sejumlah negara kini mulai melakukan pengaturan ulang. Misalnya di Australia, Kementerian Luar Negeri kini mengatur pula urusan perdagangan sehingga kementeriannya dinamai Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Model penggabungan tugas 2 kementerian ala Australia sempat dianut pula oleh Korea Selatan sejak 1998 tetapi diubah lagi seperti aslinya pada 2013. Di Bahrain, Kementerian Luar Negerinya disusun berdasarkan kawasan juga, tetapi jumlah kawasan yang diberi perhatian hanya dua dan dipadukan dengan isu, dan level eselonnya 2 (*Assistant Undersecretary*): Direktur Arabic Affairs, Afro-Asian and Organizations, Direktur GCC Affairs and Western States, Direktur Legal and Human Rights, Direktur Konsuler, Protokol dan proses, Direktur Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Informasi. Artinya, dimungkinkan adanya penyesuaian di sana-sini terkait struktur kelembagaan Kementerian Luar Negeri supaya gerak pencapaian kepentingan nasional lebih lentur dan efektif.

Pengaturan kelembagaan ini sangat diperlukan karena pihak asing mengacu pada tata kelembagaan ketika melakukan diplomasi dengan Indonesia. Terkait perdagangan dan pembukaan

hubungan bisnis, misalnya, ada duta besar negara sahabat yang mengaku bingung tentang siapa yang bisa diandalkan untuk menggolkan target pencapaian kepentingan nasional negaranya. Sebab, setelah bertahun-tahun di Indonesia, ia menyadari bahwa tidak cukup bicara dengan Kementerian Luar Negeri saja, tapi perlu juga bertemu dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Bappenas, KADIN, pemerintah daerah, dll. Bayangkan ketika masing-masing pihak tadi berbeda pandangan tentang kebijakan dan pendekatan kebijakan.

Lapisan-lapisan staf pembantu Presiden yang terkait hubungan luar negeri juga perlu menjadi perhatian. Saat ini, sejumlah staf terbaik di Kementerian Luar Negeri berstatus “dipinjamkan” ke kementerian lain, seperti ke kantor Wakil Presiden, ke Dewan Pertimbangan Presiden, ke kantor Setwapres, ke kantor Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri, kantor Staf Khusus Presiden bidang Lingkungan Hidup, dan masih banyak lagi. Posisi-posisi “titipan” ini menggiurkan bagi staf Kementerian Luar Negeri karena membantu menaikkan level eselon dan mendekatkan mereka pada lingkaran dalam kekuasaan di RI.

Secara praktis, peminjaman staf ini menimbulkan masalah karena ditemukan sejumlah kecenderungan bahwa staf Kementerian Luar Negeri yang bekerja di kantor atau kementerian lain kemudian sering berbeda pandangan dengan Kementerian Luar Negeri. Artinya, alih-alih memperkuat sinergi, konsultasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, para staf ini justru memperlebar kesenjangan pandangan tentang langkah diplomasi

yang perlu diambil. Entah di mana kesenjangan itu dimulai karena sejumlah staf yang “dipinjamkan” tadi sesungguhnya tergolong berkualitas tinggi dari segi ilmu dan pengalaman.

Di sisi lain, di tataran praktis di kementerian lain di luar Kementerian Luar Negeri, ditemukan, rata-rata pejabat di kementerian teknis seperti di Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Informasi dan Komunikasi memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang kondisi lingkungan strategis Indonesia pada suatu waktu. Meskipun mereka tahu ada prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, pemahaman mereka terbatas pada upaya menjaga kedaulatan negara, dan kedaulatan pun cenderung dimaknai secara sempit, yakni pemenuhan kebutuhan jasmani masyarakat Indonesia. Secara umum, di luar lingkungan Kementerian Luar Negeri, orientasi perhatian para pejabat negara terbatas pada orientasi ke dalam negeri. Alangkah baiknya jika hal ini diubah sehingga kepekaan para pejabat negara lebih tinggi, baik terhadap kebutuhan pelaku kebijakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Perihal pengaturan pendanaan untuk kegiatan kementerian ternyata juga menjadi sumber kritik dari pelaku hubungan luar negeri. Khusus untuk kantor-kantor perwakilan di luar negeri, ruang dana yang tersedia untuk kegiatan tak terduga dinilai terlalu kecil sehingga jika ada kejadian luar biasa yang tiba-tiba terjadi seperti bencana alam, sengketa senjata, atau hukuman mati bagi TKI, ruang gerak kantor perwakilan tidak seluas

kantor-kantor perwakilan AS atau bahkan Malaysia. Dana untuk pos-pos lain tidak mungkin dialihkan untuk kejadian luar biasa tersebut karena akan dianggap pelanggaran.

3. Relasi antarpelaku politik luar negeri.

Pelaku politik luar negeri juga perlu menjadi perhatian karena mereka yang menjadi pelaku diplomasi untuk menerjemahkan target-target kepentingan nasional. Kesiapan pelaku untuk menjalankan tugas diplomasi masih perlu dikembangkan lebih lanjut, baik dari sistem perekrutan, pelatihan-pelatihan yang diberikan, maupun pengembangan kapasitasnya melalui penugasan-penugasan. Para pelaku tentu harus menguasai berbagai aspek kepentingan nasional, serta mampu mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut di kancah internasional.

Model pelatihan dari Lemhannas dapat diadaptasi sesuai dengan keperluan. Penyampaian Wawasan Nusantara yang diperlukan bukan sebatas pemahaman akan kondisi fisik dan filosofis, melainkan juga pemahaman akan psikologis para pelaku dunia usaha dan pemerintahan di tanah air. Para pejabat tinggi dan diplomat perlu bisa merasakan logika, misalnya, mengapa para petani kakao dan sawit memilih untuk menjual buah mentah secara ilegal ke Tawau Malaysia daripada ke pengepul di tanah air,¹⁰⁴ dan apa opsi kerja sama yang perlu dibangun di daerah perbatasan.

Selain itu, perlu dicatat pula di sini faktor kepemimpinan dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Sebab, hal ini selalu diangkat

dalam setiap perbincangan terkait pencapaian kepentingan nasional Indonesia, khususnya di kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri. Kepemimpinan di sejumlah kedutaan besar masih banyak yang kosong, padahal untuk membuka satu kantor perwakilan biasanya dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk penilaian dan penyesuaian waktu yang tepat. Target pemerintah Indonesia secara umum adalah untuk menancapkan kaki di sebanyak mungkin negara, meskipun minimalis. Alasannya, karena target diplomasi multilateral yang diperkenalkan sejak zaman Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda adalah setiap negara punya satu suara. Dengan demikian, Indonesia perlu memiliki kantor perwakilan di negara manapun yang strategis bagi kepentingan Indonesia, seperti baru-baru ini membuka kantor perwakilan di Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaidjan, dan Ukraina. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan faktor imbal balik pada negara-negara yang selama ini telah membuka kantor perwakilan di Indonesia, seperti Ekuador, Chile, Peru, Venezuela, dan Columbia. Pembukaan kantor perwakilan di Bahrain dibuat atas pertimbangan bahwa negara itu akan menjadi salah satu pusat investasi dunia pada masa mendatang.

Saat ini, pertimbangan-pertimbangan tersebut belum diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai serta jalur informasi yang jelas dan baku. Beda KBRI, beda negara, maka beda pula kinerja stafnya. Kepemimpinan seorang dubes sangat berpengaruh dalam variasi kultur kelembagaan. Tapi sayangnya, seorang duta besar rata-rata cuma punya waktu tugas 3 tahun dan banyak dari mereka ditunjuk dari kalangan

Filosofi bebas aktif selama 10 tahun masa pemerintahan SBY diterjemahkan sebagai prinsip “*thousand friends zero enemy*”, sebagai upaya menjaga harmoni hubungan baik dan tidak mencari musuh.

luar Kementerian Luar Negeri dan sekadar figur politis. Akibatnya, di kantor-kantor perwakilan yang pimpinannya luwes dan komunikatif, hubungan antarstafnya akan baik. Tapi, jika pimpinannya kaku dan tertutup, hubungan antarstafnya pun terganggu.

Relasi antardiplomat dan atase di kantor-kantor perwakilan RI, misalnya, sering menjadi persoalan walaupun seharusnya saling membantu dan saling melengkapi. Di beberapa kantor perwakilan, ketegangan antar-kedua pihak masih terjadi. atase sering dipandang tidak loyal pada duta besar karena informasi yang mereka kumpulkan langsung diantar ke “pusat” (Jakarta) serta sibuk dengan agendanya sendiri. Sementara itu, Atase ada pula yang tidak puas karena tidak dilayani dengan mobil bagus dan sopir seperti layaknya staf Kementerian Luar Negeri. Hal-hal *superficial* ini jelas mengganggu pencapaian kepentingan nasional.

4. Filosofi ‘bebas aktif’

Sebagaimana dibahas dalam UU No. 37/1999, filosofi bebas aktif adalah panduan bagi penyikapan tantangan dan peluang di luar negeri. Para pelaku hubungan internasional dari Indonesia diharapkan punya kebebasan dalam menentukan sikap terhadap

permasalahan internasional, tidak terikat secara apriori pada satu kekuatan dunia dan aktif memberikan sumbangan sebagai bagian dari solusi permasalahan global agar terciptalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan pantauan dan wawancara para pelaku hubungan internasional di beberapa kementerian, filosofi bebas aktif tadi selama 10 tahun masa pemerintahan SBY diterjemahkan sebagai prinsip *“thousand friends zero enemy”*, sebagai upaya menjaga harmoni hubungan baik dan tidak mencari musuh. Sebagai *marketing branding*, turunan dari filosofi bebas aktif tadi memang cukup *catchy*. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengartikan prinsip tadi dalam wujud tugas Indonesia menjaga *dynamic equilibrium*, yakni selalu menjaga keseimbangan dalam politik global dengan tidak berpihak, baik ke sana maupun ke sini dan mencarikan *win-win solution* dalam setiap kesempatan.

Di atas kertas, prinsip dan turunan prinsip di atas terdengar masuk akal, tetapi dalam keseharian di Kementerian Luar Negeri, arahan Presiden dan Menteri Luar Negeri tadi justru kerap dianggap jargon belaka dan belum menjadi pegangan praktis. Diplomat muda pada khususnya mengaku kesulitan menerjemahkan ‘tanpa musuh’ dan selalu mencari keseimbangan baru, karena dalam banyak kasus Indonesia memang harus berhadap-hadapan dengan pihak asing yang hanya menekan dan mencari keuntungan diri semata. Jika Indonesia terus mencari keseimbangan, Indonesia akan cenderung menjadi pengikut saja dalam politik global; diplomat sekadar bertanya ke kanan dan

ke kiri dan menyesuaikan pernyataannya dengan negara lain. Pertanyaannya, apa yang dicari Indonesia? Konsep ‘tanpa musuh’ memang positif untuk mencari teman tetapi tidak punya gigi ketika mendesak kepentingan nasional. Yang hilang dalam arahan Presiden dan Menteri Luar Negeri tadi adalah arahan akan skala prioritas yang dituju pemerintah.

Contohnya di ASEAN. Di satu sisi para duta besar negara sahabat, baik dari lingkaran ASEAN maupun di luar itu, melihat bahwa prinsip bebas aktif adalah kelebihan dan kekuatan politik luar negeri Indonesia. Indonesia dipandang tidak egois dalam mengedepankan kepentingan nasionalnya dan selalu berpikir independen meskipun ada tekanan-tekanan eksternal yang mendesak Indonesia untuk berpihak. Duta Besar Filipina untuk Indonesia dengan kagum mengatakan, prinsip bebas aktif diturunkan dari generasi ke generasi pelaksana kebijakan luar negeri di Indonesia dan menjadi benang merah kebijakan luar negeri Indonesia sehingga kecil kemungkinan bahwa apa yang diusulkan oleh satu pemerintahan akan langsung digulingkan oleh pemerintahan berikutnya.

Tetapi di sisi lain, kebebasan tadi membingungkan karena banyak mitra yang bisa digandeng Indonesia, misalnya untuk urusan kerja sama ekonomi, tetapi sumber daya untuk membangun kerja sama tadi terbatas dan wewenang yang dimiliki Kementerian Luar Negeri dalam merancang kebijakan pun terbatas. Peneliti senior di DPR RI mengatakan, tenaga Indonesia kerap terserap pada agenda-agenda heroik untuk membantu negara-negara lain, tetapi punya dampak kecil di dalam negeri.

PELUANG DAN TANTANGAN

Sejumlah peluang untuk mewujudkan pencapaian kepentingan nasional terbuka lebar. Di antara peluang itu, antara lain: *Pertama*, negara-negara dunia masih akan banyak bertumpu pada intensifikasi perbaikan kinerja ekonomi masing-masing. Hal itu juga membuat Indonesia dapat lebih fokus melakukan sejumlah perlindungan untuk kepentingan ekonomi di dalam negeri, seperti intervensi negara dalam hal belanja modal, perbaikan kebijakan fiskal, perbaikan kebijakan perdagangan, perbaikan kebijakan moneter, dan revitalisasi industrialisasi, tidak akan dianggap sebagai hambatan dalam kerja sama ekonomi, tapi sebagai investasi kepastian dunia usaha pada masa mendatang. Yang perlu dijamin oleh kementerian teknis dan dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri adalah *output* jangka pendek dari kebijakan-kebijakan itu, misalnya sistem *single window*, kepastian hasil bagi investor asing, serta barang *intermediate* dan *consumer goods* yang bermutu dan layak jual di pasar negara lain.

Jendela peluang untuk ini kemungkinan besar sangat pendek, yakni sampai siklus krisis ekonomi lima tahun lagi. Ini karena melihat gelagat aksi *quantitative easing* yang dilakukan oleh AS, yakni aksi Federal Reserve di AS untuk memperlambat pembelian obligasi sehingga arus uang lebih banyak terserap masuk ke AS dan bukan oleh negara lain. Tidak mustahil bahwa kondisi ekonomi domestik AS bisa jauh lebih baik dibandingkan hari ini, sehingga gerak AS setelah lima tahun mendatang akan lebih aktif dan luwes. Akhirnya, lebih sulit bagi negara-negara seperti Indonesia untuk merapikan ini itu di dalam negeri.

China membaca gelagat AS dengan mengajak negara-negara tetangganya membentuk kerja sama perdagangan atas dasar swap dan mata uang regional. Efeknya, bukan mustahil adalah penguatan pengaruh China di kawasan Asia. Kondisinya akan menjadi lebih kuat lagi mengingat cadangan devisa China yang pada 2012 saja sudah terbesar di dunia, yakni 3,31 Trilyun dolar AS. Penguatan China berarti risiko pula pada kekuatan ekonomi yang relatif lebih lemah di kawasan, apalagi China sudah “menguasai” cara praktik yang menguntungkan di titik-titik perdagangan, bahkan pelabuhan, di tempat-tempat strategis seperti di Singapura, Dannang Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan lain-lain.

Penguasaan sekuritas pemerintah AS oleh China dan Jepang berpotensi menimbulkan geliat yang berbeda pula dalam relasi kedua negara ini di masa pasca lima tahun mendatang, khususnya bila AS kemudian menyadari bahwa dependensi semacam ini mengganggu kedaulatannya. Bila hal ini terjadi, kondisi global akan berubah juga. Saat ini, China terus memanfaatkan cadangan devisanya untuk membeli sekuritas pemerintah AS. Kabarnya, ada sekitar 70 persen dari sekuritas AS yang dikuasai China.

Kedua, negara-negara dunia masih dalam tahap pencarian bentuk tata kelola ekonomi, baik domestik, regional, maupun dunia yang cocok dengan kondisi masyarakat setempat. Artinya, model ekonomi pasar liberal bukanlah satu-satunya, dan jelas bukan yang dominan, dalam praktik perekonomian masa kini. Di sini para pucuk pimpinan politik luar negeri Indonesia, juga para pemimpin pasca-Pemilu 2014 perlu sadar bahwa *local wisdom* punya tempat dan justru

menjadi kekhasan yang tidak diharamkan dalam praktik pergaulan politik ekonomi global masa kini. Orientasi pejabat Indonesia yang semata-mata liberal terbukti belum bisa menyelesaikan masalah tata niaga dan tata produksi di dalam negeri karena komunitas basis di Indonesia tidak dikelola atas dasar ekonomi liberal. Justru Indonesia perlu mengangkat panji-panji model pengentasan kemiskinan dari komunitas basis ke tingkat global sebagai alternatif atas wacana ekonomi yang selama ini sangat liberal. Tokoh-tokoh ekonomi dan sosial, bahkan budayawan, yang selama ini terlibat pada tataran pengembangan ekonomi basis perlu digandeng untuk menambah *value* dalam usulan inisiatif kebijakan Indonesia dalam tata kelola ekonomi global masa kini.

Ketiga, negara-negara dunia masih dalam tahap pencarian bentuk baru kerja sama ekonomi. Dengan demikian, terdapat ruang bagi Indonesia mendorong formula kerja sama yang mengedepankan kepentingan pekerja dan kepatuhan terhadap tata ruang. Dilema yang riil dalam lima tahun ke depan adalah tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menggiatkan industri serta ekonomi rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin harkat hidup pekerja. Hal ini terbukti sulit diterapkan dalam sejarah ekonomi dunia. Manakala terjadi revolusi industri, pekerja hanya menjadi komoditas yang harus mau menerima nasib berapapun gaji dan kondisi kerjanya. Industrialisasi di AS, Eropa, Rusia, dan China bersifat *state-led*, alias diintervensi dengan cukup kuat oleh negara (meskipun titik intervensi dan jenis intervensinya beragam), sehingga telah mengorbankan banyak nyawa, menyebabkan pergeseran gaya hidup dan kesengsaraan pada

Indonesia perlu lebih agresif membukakan jalan bagi industri-industri Indonesia untuk berekspansi ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri perlu mendesak kementerian-kementerian teknis untuk mengembangkan insentif-insentif khusus bagi pebisnis yang mau berisiko dengan berekspansi ke luar negeri.

kelas menengah bawah (*displacement*). Dalam masa lima tahun mendatang, dilema tersebut akan muncul lagi dan akan lebih rumit karena jumlah penduduk dan konsentrasi penduduk per kapita sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan abad 18 atau abad 20.

Kecenderungan masa kini adalah negara-negara mengambil strategi ekspansi wilayah operasi untuk industrinya. Bisnis-bisnis ditopang oleh diplomasi ekonomi negaranya masuk ke negara-negara lain untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga

kerjanya. Kita dapat saksikan Jepang, AS, China, India, Inggris, bahkan Brazil melakukan strategi ini. Hal ini menguntungkan bagi bisnis dari negara-negara itu karena selain memotong biaya produksi, juga menimbulkan simpati karena terbangun kerja sama politik antarnegara, dan mendekatkan bisnis dengan konsumen juga. Ruang gerak mereka adalah kerja sama bilateral dan perdagangan bebas yang selama ini sudah berkembang, di mana tiap negara yang terlibat perdagangan bebas punya kewajiban untuk memberi ruang bagi mitranya untuk mengembangkan bisnis di negaranya.

Dengan demikian di dalam negeri, Indonesia punya ruang untuk mendesak perusahaan-perusahaan asing memberi tempat lebih besar bagi pekerja lokal untuk bekerja di situ, dan agar perusahaan asing

patuh terhadap tata ruang di Indonesia. Seharusnya ini menjadi dasar yang kuat untuk membongkar skema kerja sama yang keluar dari kedua pagu kerja sama tadi. Sebab, negara-negara tersebut memang dalam posisi sangat membutuhkan mitra kerja sama yang akurat secara politik. Indonesia memenuhi syarat tersebut. Selain pasar domestiknya besar, secara politik Indonesia juga diterima oleh banyak negara di dunia karena posisi geostrategisnya. Daya tawar Indonesia cukup kuat di situ.

Sementara itu di luar negeri, Indonesia perlu lebih agresif membukakan jalan bagi industri-industri Indonesia untuk berekspansi ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri perlu mendesak kementerian-kementerian teknis untuk mengembangkan insentif-insentif khusus bagi pebisnis yang mau berisiko dengan berekspansi ke luar negeri. Pihak Kementerian Luar Negeri perlu pula mengembangkan keahlian intelijen pasar di negara-negara perwakilan supaya peta jalur usaha di negara-negara lain terbangun dan menjadi masukan berharga bagi para pebisnis dan kementerian teknis.

Keempat, perhatian negara-negara besar akan terpusat pada konflik perebutan pengaruh di Timur Tengah. Berbeda dengan kasus Laut China Selatan di mana negara-negara yang terlibat kompak berupaya meredam internasionalisasi dan perluasan isu dari ketegangan di situ, kasus-kasus di Timur Tengah, seperti Suriah, Irak, Iran, Mesir, dan Turki dapat dengan mudah melebar menjadi konflik horizontal yang melumpuhkan karena di dalam negeri masing-masing tidak ada pemerintahan yang berwibawa dan tidak ada perkumpulan negara kawasan yang dianggap punya cukup legitimasi untuk menengahi konflik di sana.

Keadaan seperti itu memberi peluang bagi Indonesia untuk membangun pengaruh di Timur Tengah, khususnya di negara-negara yang relatif stabil dalam bidang politik dan sedang berambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi kawasan. Kerja sama bilateral bidang ekonomi perlu didorong untuk berkembang pesat di sana, misalnya di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk pengembangan bisnis keuangan dan ekonomi syariah serta jalur kerja sama untuk memperluas pasar Indonesia di sana, misalnya untuk *fashion*, produk makanan dan minuman, serta hotel yang melayani turis-turis asal Indonesia atau Asia Tenggara.

Kelima, bertambahnya kelas menengah di hampir semua negara di Asia. Artinya, ada peluang untuk masuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja bagi orang-orang Indonesia. Kelas menengah adalah penopang kegiatan pemerintah untuk perbaikan ekonomi dan pembangunan, sehingga kehadiran mereka perlu difasilitasi agar punya dampak yang lebih luas.

Sektor jasa adalah sektor ekonomi tersier yang diandalkan negara-negara di Asia untuk meningkatkan nilai devisa. Sektor jasa sesungguhnya merupakan sektor yang perlu didorong dalam lima tahun mendatang mengingat jumlah kelas menengah di negara-negara maju selama ini telah meningkat. Seiring adanya perbaikan taraf hidup, keinginan menikmati liburan, kebutuhan untuk tinggal di hotel atau menikmati sajian kuliner terstandar adalah peluang bisnis yang perlu disikapi dengan cekatan.

Sektor jasa kerap disorot sebagai penyerap tenaga kerja yang potensial di ASEAN. Teknologi di sektor ini berkembang sangat pesat. Tengok saja industri dot.com, industri layanan kesehatan, industri

pendidikan, industri pariwisata, dan industri perbankan. Potensinya besar tetapi justru menjadi sektor yang belum optimal menyerap tenaga kerja di Indonesia. Sektor ini tercatat hanya menyerap tak lebih dari dua persen tenaga kerja Indonesia. Investasi pemerintah Indonesia dalam bidang pariwisata masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Indonesia memilih untuk memasarkan daerah pariwisata yang sudah “jalan” saja atau dengan mengandalkan pemain swasta.

Bandingkan ini dengan Malaysia yang berinvestasi besar untuk membangun Langkawi atau Singapura yang terus mempercantik dan memperlengkap sentra perdagangan di bandara internasional Changi. Akibatnya, jumlah turis asing ke Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan turis yang memilih berlibur dan menyumbang pada perekonomian lokal di Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam.

Berkembangnya kelas menengah juga perlu ditopang agar merata sampai ke pelosok-pelosok. Jika kelas menengahnya merata, niscaya sebaran industri juga lebih merata dan partisipasi ekonomi lebih tinggi sehingga total produksi Indonesia lebih bisa digenjut. Di negara-negara lain, pengembangan kelas menengah ini ditopang dengan investasi yang besar dalam bidang perluasan akses listrik (*electrification*). Investasi ini sangat penting untuk mengoptimalkan kerja sama luar negeri bidang pengembangan infrastruktur dan konektivitas antarnegara.

Indonesia jelas masih terbelakang dalam hal respon cepat dalam bidang pengembangan sumber energi. Elektrifikasi masih rendah

di Indonesia bagian Timur. Upaya ke arah pengembangan sumber daya listrik pun sangat lamban, meskipun sejumlah studi telah mengeksplorasi dan mendorong Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pemerintah untuk bergerak lebih cepat. BPPK di Kementerian Luar Negeri pernah menerbitkan studi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang melibatkan perjalanan sejumlah peneliti ke negara-negara tetangga pada 2010. Studinya diterbitkan pada 2011. Ada pula Institut Pertanian Bogor yang meneliti soal penggunaan arus laut dalam untuk pembangkit listrik.

Jika Indonesia tidak mengubah pola pengembangan sumber energinya, tidak mustahil Indonesia nanti akan terpaksa membeli listrik dari Malaysia untuk kawasan Kalimantan, padahal sumber listriknya dari sungai yang juga mengalir di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Jawa-Bali, bila belum ada terobosan, kita masih akan kerepotan dengan problem kelebihan daya, listrik mahal, dan mati lampu bergilir. Kita bahkan belum memberi perhatian pada pengembangan teknologi biofuel, teknologi geothermal, teknologi surya, apalagi teknologi nuklir. Padahal sejak masa Presiden Soekarno, Indonesia telah mendirikan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), namun sampai sekarang belum menyiapkan diri secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sungguh-sungguh aman seperti Korea Selatan.

Kelima peluang itu merupakan indikasi bahwa jika hal-hal yang bobrok dan ruwet di dalam negeri diselesaikan, peluang Indonesia untuk meningkatkan peran yang lebih besar dalam menjaga ketertiban dunia sebenarnya terbuka lebar.

Selain peluang tersebut tentu terdapat pula tantangan bagi pencapaian kepentingan nasional, baik yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, tantangan yang muncul adalah menyusul kegiatan pengetatan ikat pinggang dan orientasi ke dalam negeri dari mitra-mitra kerja sama Indonesia, seperti negara-negara anggota Uni Eropa, Australia, Chile, dan Brazil. Sejauh ini, Indonesia belum terlalu merasakan dampaknya karena mitra perdagangan utama yakni AS, China dan Jepang masih mau membeli produksi Indonesia dan mengucurkan bantuan untuk pengembangan sosial politik dan budaya. Namun, tren yang berkembang tidak boleh dianggap enteng.

Pengetatan ikat pinggang berarti pula pengetatan aturan bagi negara-negara lain untuk masuk ke pasar, sehingga kompetisi akan cenderung makin sengit. Para investor mengamati China untuk melihat, apakah negeri panda ini akan memutuskan untuk lebih menutup diri dari integrasi global? Jika hal ini sampai terjadi, ruang gerak Indonesia akan makin terbatas dan berarti Indonesia perlu lebih lihai dalam menembus ruang-ruang sempit yang tersedia.

Selain itu, strategi yang selama ini dikembangkan Indonesia untuk melakukan diversifikasi bisnis ke ASEAN adalah modal yang sangat baik, walaupun belum cukup. Jika orientasi Indonesia masih membidik ke negara-negara yang relatif sudah makmur di ASEAN, kinerja ekonomi Indonesia masih akan seperti sekarang, yakni mudah digoyang ketika terjadi perlambatan ekonomi dan kompetisi dengan mitra non-ASEAN. Tantangannya adalah untuk membuka pasar di negara baru di ASEAN. Perlu kesigapan kantor-kantor perwakilan di ASEAN untuk membaca situasi bisnis. Tantangan berikutnya

Ada pertanyaan tentang apakah Indonesia masih menjadi pemimpin di ASEAN? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya cukup jelas, yakni masih, karena suka ataupun tidak, Indonesia termasuk salah satu negara penggagas ASEAN yang terbilang sangat aktif memperjuangkan kelangsungan ASEAN

adalah masih lemahnya konektivitas infrastruktur antarwilayah di dalam ASEAN. ASEAN bergerak lambat dalam hal ini, padahal untuk pengembangan bisnis, infrastruktur adalah faktor fasilitasi yang lebih mudah menggerakkan pebisnis untuk berani berinvestasi.

Gerakan ASEAN untuk menghidupkan lagi wacana percepatan konektivitas ASEAN perlu diapresiasi walaupun perlu diwaspadai juga. Pada September 2013, Lembaga Perdagangan dan Pem-

bangunan Amerika Serikat (USTDA) mensponsori pertemuan ASEAN terkait konektivitas yang membahas lagi inisiatif AS bernama Inisiatif Kerja Sama Konektivitas ASEAN-AS yang sempat diluncurkan pada tahun 2011. Dalam forum itu dihidupkan lagi wacana implementasi rencana pembangunan jalur kereta api dari Singapura ke Kunming. Negara-negara yang belum merespon, yakni Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos dan Myanmar, didesak untuk mendukung inisiatif tersebut. Malaysia mendukung inisiatif ini atas pertimbangan kebutuhan akan alat transportasi yang ramah lingkungan. Di sini dapat dilihat, AS punya kepentingan untuk mempermudah jalur transportasi dari China sampai ke jantung Asia Tenggara. Pertanyaannya, apa yang akan dimuat dalam gerbong-gerbong kereta api itu? Apakah sumber daya alam yang murah? Apakah hasil produksi yang sudah punya nilai tambah? Tentu jalur

kereta lintas negara macam ini membutuhkan pengaturan fiskal dan keamanan serta pertahanan yang dihitung dengan jeli. Ini tantangan yang perlu segera ditanggapi oleh Indonesia, dan tidak dianggap enteng.

Dari sisi desain, kelembagaan dan relasi antar-individu yang membuat dan melaksanakan politik luar negeri, tantangan yang perlu diantisipasi adalah monitoring kinerja pimpinan dan staf, baik dari segi akurasi perencanaan maupun ketepatan implementasinya. Selama ini, kantor-kantor perwakilan berjalan dengan sistem yang lebih mirip *autopilot* daripada terarah. Keluhan staf-staf di kantor perwakilan tentang “informasi apa yang harus saya cari?” dan “kemana informasi yang saya dengar harus saya arahkan?” harus dapat diselesaikan dengan jalur komunikasi dan kelembagaan yang lebih responsif. Ini reformasi yang belum tentu sederhana dan punya tantangan sendiri.

Ada pertanyaan tentang apakah Indonesia masih menjadi pemimpin di ASEAN? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya cukup jelas, yakni masih, karena suka ataupun tidak, Indonesia termasuk salah satu negara penggagas ASEAN yang terbilang sangat aktif memperjuangkan kelangsungan ASEAN sebagai suatu kesatuan dengan *brand* yang lebih dikenal di dunia saat ini. Catatannya adalah, kepemimpinan di ASEAN sebenarnya bukan terbatas pada masalah-masalah yang tak terelakkan, seperti fakta historis dan persoalan jasa sebagaimana disebutkan tadi, melainkan juga masalah kemampuan Indonesia hadir sebagai kekuatan terbesar di ASEAN.

Berhadapan dengan China, Indonesia justru kalah dari Filipina dan Vietnam yang sudah bisa masuk menembus kerumitan operasi bisnis

di sana. Indonesia masih terhambat. Bicara soal pemanfaatan jalur laut dan udara, yang paling diuntungkan sejauh ini adalah Singapura yang sudah lebih siap dengan perusahaan maskapai penerbangan dan logistik yang andal dan kompetitif. Urusan investasi, negara-negara ASEAN justru mengandalkan China, AS, Jepang, Korea Selatan, alias negara-negara non-ASEAN sebagai penanam modal di kawasan ASEAN. Indonesia belum sanggup hadir untuk menjawab kebutuhan ASEAN. Hal ini sangat disayangkan karena implikasi teknisnya cukup jelas. Yakni, ASEAN lebih sulit membangun sentralitas di mata negara-negara anggotanya karena kenyataannya kepentingan ekonomi mereka harus tunduk pada agenda negara-negara non-ASEAN.

GANGGUAN DAN ANCAMAN

Gangguan pencapaian kepentingan nasional dalam waktu lima tahun ke depan adalah hal-hal yang bersumber dari kelemahan manajemen dalam birokrasi di Indonesia serta kualitas politisi Indonesia yang rendah. Hal itu terjadi terutama pada masa awal periode lima tahun mendatang, saat para pejabat publik baru masih dalam tahap “masa belajar”. Dengan rotasi kepengurusan di Kementerian Luar Negeri setiap tiga tahun, koordinasi dalam pencarian solusi dan penyelesaian masalah akan menghadapi persoalan. Inilah sumber gangguan pencapaian kepentingan nasional.

Sementara itu, setidaknya terdapat lima ancaman pencapaian kepentingan nasional dalam beberapa waktu mendatang. Kelimanya adalah: *Pertama*, kegagalan Indonesia untuk bergegas memperbaiki pondasi ekonomi supaya punya desain yang kokoh dan terpadu sebagai modal bersaing. Bila lima tahun ke depan segala pengelolaan

ekonomi masih keseharian yang biasa, periode berikutnya Indonesia akan kehilangan banyak momentum. Efek kehilangan momentum ini akan cukup signifikan sehingga patut dikategorikan sebagai ancaman karena ada 4 jenis konflik besar yang akan merepotkan Indonesia dalam lima tahun ini, seperti sudah dijabarkan di atas tadi, dan siapa yang tahu hasil dari konflik-konflik tersebut.

Studi dari Dorodjatun Kuntjoro-Jakti¹⁰⁵ menunjukkan bahwa kesempatan Indonesia untuk tinggal landas sangat pendek, yakni maksimal pada 2030, dan kita tahu ada banyak hal yang harus diusahakan secara bertahap. Ancaman dari dalam negeri cukup riil karena ada kebiasaan yang kurang baik, yakni untuk saling menyalahkan antar-instansi, dan ada kecenderungan untuk kurang peka akan kebutuhan zaman akibat perhatian yang berlebihan pada urusan-urusan teknis yang rutin belaka.

Kedua, keengganan negara-negara besar untuk menggunakan instrumen diplomasi multilateral dalam menyelesaikan protes-protesnya terhadap negara lain. Ancamannya adalah adu *power* yang akan mengemuka, di mana risiko salah strategi akan berakibat pada runyamnya citra Indonesia sebagai negara pecinta damai. Rapor merah Indonesia yang terus menerus dalam bidang HAM adalah catatan khusus yang perlu diwaspadai. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada yang macet terkait tindak lanjut penindakan sejumlah kasus pelanggaran HAM, seperti kasus pembunuhan aktivis Munir tahun 2004 yang sampai sekarang belum ada titik terang. Berbagai kasus HAM dapat diangkat menjadi isu internasional yang merusak legitimasi pemerintah. Bagi negara sekompleks dan sebesar Indonesia, legitimasi pemerintah yang rusak adalah ancaman serius bagi persatuan bangsa.

Ketiga, tidak solidnya komunikasi antarpembuat kebijakan luar negeri di tingkat pusat dengan pemerintah daerah. Dalam konteks masa kini, pemerintah daerah punya tempat yang penting dalam diplomasi dan tidak bisa diabaikan. Jika tidak diatur dan digandeng, mereka akan makin bebas membangun kerja sama langsung dengan pebisnis asing atau bahkan dengan negara lain, padahal mereka tidak punya gambar makro dari pergaulan global. Dan lebih parah lagi, mereka berpotensi membangun kebijakan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Berubahnya strategi ekonomi China dari ketergantungan pada ekspor dan investasi menjadi penguatan industrialisasi di dalam negeri. Saat ini, China adalah salah satu pangsa pasar tiga terbesar untuk produk Indonesia, sehingga penguatan industri di dalam negeri China berarti potensi turunnya permintaan atas produk Indonesia. Hal ini bisa menjadi ancaman karena selama ini sumber daya alam Indonesia banyak yang diserap oleh China, seperti batubara, rotan, kayu, benih akasia, dan bijih besi. Dengan alih strateginya, Indonesia berisiko terpuruk, apalagi jika tidak ada perbaikan berarti dari perilaku pengusaha di dalam negeri.

Problemnya, China adalah negara produsen batubara terbesar di dunia, diikuti oleh AS di posisi kedua dan India di posisi ketiga, sementara Indonesia di posisi kelima saja. Dibandingkan dengan karakter batubara di negara lain, batubara Indonesia memiliki sulfur berkadar rendah sehingga aman untuk pembangkit listrik dan dicari oleh negara-negara dunia. Maka, tak heran India pun gencar melakukan akuisisi terhadap perusahaan batubara di Indonesia.¹⁰⁶ Kita juga melihat, dengan mengeksport rotan, kayu dan benih akasia,

sebagian secara ilegal, Indonesia secara tidak langsung “membunuh” industri lokal seperti furnitur dan besi baja dan memberi peluang pada China untuk tumbuh lebih besar. Perilaku pengusaha Indonesia yang beramai-ramai segera mengekspor bijih besi meskipun harganya jatuh juga sangat mengherankan, karena China sedang ketakutan akan kekurangan pasokan bahan mentah sehingga memang sedang mengejar stok. Rupanya perilaku pengusaha tambang Indonesia ini dipicu oleh rencana pemberlakuan kebijakan *clean and clear* (CnC) yang mengharuskan pengusaha mengantongi surat persetujuan ekspor bila mengajukan proposal pembangunan *smelter*. Jadi, alih-alih mendukung perbaikan tata kelola sektor pertambangan, Indonesia digerus oleh perilaku picik para pengusahanya.

IKHTISAR & REKOMENDASI

Perlu disadari bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki letak strategis karena menjadi pertemuan dua samudera yakni Hindia dan Pasifik serta Laut China Selatan. Ini posisi yang sangat penting di dunia karena menjadi perlintasan arus transportasi dan komunikasi dunia, menghubungkan dua benua yang sangat dinamis pertumbuhannya, dan terletak di khatulistiwa dengan alam tropis yang kaya sumberdaya alam. Selama berpuluh-puluh tahun, terlepas dari kekurangan yang dimiliki bangsa Indonesia, kita terbukti masih bisa bertahan sebagai negara kepulauan yang peranannya cukup diperhitungkan, baik di tingkat regional maupun global. Hal ini harus diingat sebagai modal kegiatan para penerus Republik ini. Posisi geostrategis Indonesia membuat Indonesia sebagai negara tak bisa diabaikan dan

tak tergantikan. Karena itu, segenap pelaku hubungan internasional dan diplomasi di Indonesia, baik aktor negara maupun non-negara perlu luwes dalam berelasi dengan bangsa-bangsa lain.

Peluang dalam lima tahun mendatang sebenarnya cukup baik untuk Indonesia. Tantangannya pun tidak sepele yang harus dikelola oleh negara-negara dunia yang kerepotan dengan resesi. Tetapi sudut pandang pemerintah Indonesia yang diinspirasi oleh pencarian keseimbangan dinamis justru memperlambat kemampuan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional karena Indonesia menari-nari di atas genderang yang ditabuh oleh negara-negara lain yang lebih peka akan perkembangan situasi global dan bergegas memperbaiki pondasi ekonomi dan tata kelola di dalam negerinya.

Mengingat potensi empat jenis konflik pada masa lima tahun mendatang, yakni perang *proxy* antarnegara besar, konflik pencarian aturan main dalam fora internasional, konflik di wilayah perbatasan, dan konflik penggunaan sumber daya alam, Indonesia sangat rentan terseret dalam ketidakpastian relasi antarnegara. Demi kokohnya peran Indonesia yang sebenarnya punya komitmen sangat mendalam untuk menjadi bagian dari solusi problem-problem dunia, para diplomat Indonesia, di kementerian atau instansi manapun, perlu fokus pada pencapaian kepentingan nasional yang akan menciptakan soliditas pondasi ekonomi Indonesia, menciptakan daya gentar sekaligus daya tarik terhadap Indonesia, mempromosikan dan mengembangkan inisiatif dan karya anak bangsa, mengembangkan kegiatan yang memperkuat penggunaan *soft-power*, meyakinkan dunia bahwa pemerintah Indonesia mampu, punya kredibilitas dan reputasi positif di mata masyarakatnya, bahwa pemerintah

Indonesia punya strategi dan komitmen dengan tahapan-tahapan prioritas yang jelas, dan bahwa Indonesia punya desain realistis untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peka terhadap perkembangan zaman, termasuk juga terhadap perkembangan status Indonesia sebagai negara yang pamornya meningkat di mata dunia.

Dari paparan di atas jelas bahwa semakin banyak pihak yang ikut menentukan tingkat keberhasilan politik ekonomi Indonesia di tingkat global. Ada keterlibatan pemerintah pusat dari berbagai instansi dan kementerian, pemerintah daerah, pengusaha dari beragam lini dan skala usaha, parlemen, masyarakat, universitas, media massa, bahkan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan mereka haruslah secara efektif terukur kinerjanya dalam kelompok kerja. Kegiatan diplomasi Indonesia perlu menyentuh dan menyapa masing-masing pihak ini agar gerak mereka terpantau dan tidak kontra produktif terhadap rencana pemerintah. Di sisi lain, pemantauan gerak mereka juga hendaknya ditangkap dengan baik oleh pemerintah untuk bahan perbaikan kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia perlu ditempatkan pada posisi yang cukup tinggi dan jelas, sehingga semua pihak yang tidak saling bicara pun dapat memperoleh rujukan tentang arah yang harus ditempuh bersama, serta apa konsekuensinya bila ada yang melawan arah angin.

Dari segi kerja sama, paradigma yang perlu dibangun adalah pencapaian kepentingan nasional sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan negara-negara di Asia, Indonesia perlu keluar dari bayang-bayang kendali China, khususnya dalam hal ekonomi, supaya Indonesia tidak tergantung pada permintaan dari China, dan

melebarkan sayap mencari mitra-mitra kerja sama lain. Ada baiknya Indonesia mengeksplorasi bidang-bidang usaha yang selama ini menjadi unggulan, seperti agribisnis, produk makanan minuman, perbankan, properti, dan industri kreatif untuk ekspansi ke negara-negara lain, mulai dari yang terdekat di ASEAN sampai yang jauh di Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Pihak kantor-kantor perwakilan di luar negeri perlu peka akan kebutuhan pengusaha di dalam negeri dan memfasilitasi kebutuhan mereka agar dapat mengembangkan sayap di negara-negara sahabat.

Kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri perlu diatur ulang agar orang-orang yang ditempatkan adalah orang-orang yang paham betul akan kondisi riil sektor bisnis dan masyarakat Indonesia. Mereka harus supel bergaul dengan pebisnis sehingga bisa menangkap peluang global tetapi tidak terjebak pada kepentingan asing daripada Indonesia. Arah kebijakan ekonomi kita hendaknya tidak lagi pada pemburuan rente, tetapi pada peningkatan produksi barang-barang bernilai tambah tinggi yang sarat akan inovasi, ilmu pengetahuan dan diperkaya dimensi budaya Indonesia yang sangat kaya dan unik.

Terkait pertahanan dan keamanan, para generasi penerus bangsa perlu lebih percaya diri bahwa Indonesia bisa dijaga agar selalu utuh. Para generasi muda perlu peka akan perbedaan antara konflik yang perlu diselesaikan segera dalam jangka pendek dan konflik yang hanya bisa dikelola dalam jangka panjang. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan senjata, demikian pula tidak semua hal bisa diselesaikan hanya dengan jalur diplomasi. Indonesia perlu gigih dan mawas diri dalam hal menjaga kepentingan vital dan dalam

memanfaatkan momentum agar kepentingan nasional untuk tinggal landas dapat terlaksana sesegera mungkin.

Untuk itu, segenap pengambil dan pelaksana kebijakan luar negeri, baik yang ada di Kementerian Luar Negeri maupun kementerian-kementerian lain, juga perlu mendapatkan gambaran tentang situasi pertahanan keamanan dan kerumitan pengelolaannya. Maka, pelatihan di Lemhannas perlu diambil agar kaum sipil pun terbiasa bergaul dengan orang-orang berlatar belakang militer dan intelijen, serta paham akan situasi di lapangan dalam bidang pertahanan.

Masa tugas di kementerian-kementerian perlu ditinjau ulang agar tidak hanya tiga tahun, masa yang terlalu singkat untuk melakukan transformasi dan reformasi. Perlu dibangun sistem komunikasi dan monitoring kegiatan yang baik agar pergeseran pejabat bukan berarti pergantian kebijakan dari nol lagi. Sistem rekrutmen pejabat juga perlu diperhatikan agar tidak mengorbankan agenda-agenda nasional hanya karena pejabat yang terpilih tidak punya kompetensi memadai. Selain itu, sistem pengaturan direktorat di Kementerian Luar Negeri perlu juga ditinjau ulang agar tidak berbasis kawasan saja. Sebab, terbukti model ini justru menciptakan kesenjangan komunikasi dan informasi yang besar antar para diplomat yang seharusnya memainkan peran penting dalam menginformasikan dan mengkoordinasikan arah kebijakan luar negeri.

Meskipun Presiden punya hak untuk memimpin kebijakan luar negeri, ia pun harus menyadari bahwa ia adalah politisi. Presiden wajib selalu mendengarkan masukan dan saran dari para pakar di bidangnya, atau jika tidak yakin maka membangun komunikasi

dengan pemangku kepentingan di dalam negeri. Indonesia harus keluar dari lingkaran setan pembangunan yang tambal sulam hanya karena para pejabat dan politisinya tidak paham situasi riil di lapangan dan lebih gemar menyenangkan pejabat negara lain daripada menyenangkan masyarakatnya sendiri.

Mengingat bahwa diplomasi masa kini tidak lagi bisa ditopang semata oleh kegiatan para diplomat dan *residential ambassador*, para pejabat kementerian teknis pun perlu lebih fasih dan supel dalam bergaul di tingkat internasional. Selain itu, karena meningkatnya jumlah penduduk yang memandang dirinya sebagai warga global, pemerintah Indonesia perlu juga memanfaatkan peran para diaspora Indonesia di luar negeri. Kegiatan diplomasi juga perlu diperluas untuk mendukung upaya memperkenalkan keunggulan cara pikir dan imajinasi masyarakat Indonesai melalui seni film, musik, kuliner, fashion dan seni rupa lainnya. Hal ini mengingat bahwa konfrontasi terbuka akan selalu dihindari pada masa-masa mendatang, tetapi kompetisi antar-negara tidak berkurang dan justru semakin tajam, padahal komunikasi yang arahnya kepada perlindungan HAM dan hak-hak politik sulit dilakukan karena masalah kedaulatan.

Dengan demikian, prinsip ‘ribuan teman dan tanpa musuh’ serta doktrin ‘keseimbangan dinamis’ hanya bisa disuarakan pada tataran tertentu saja dan justru menjadi bumerang jika diterapkan pada segala lini kementerian yang terlibat dalam hubungan internasional. Indonesia tidak boleh lupa pada prioritas kepentingan nasional sebagaimana diuraikan di atas, dan perlu mampu menghindari dari sekadar menari di atas genderang yang ditabuh negara-negara lain.*

CATATAN

- 1 Lihat misalnya “KPU Diminta Bekerja Keras Kurangi Angka Golput,” diakses dari <http://www.sayangi.com/politik1/read/4854/kpu-diminta-bekerja-keras-kurangi-angka-golput>, 29 Agustus 2013.
- 2 Batas nilai untuk masuk dalam kategori “free” adalah 1-2,5. Dengan demikian, Indonesia memang masuk dalam kategori “free,” namun dengan batas yang minimal. Sila lihat <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2013/methodology>. Untuk nilai Indonesia pada tahun 2013, sila lihat <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/indonesia>.
- 3 Komisi Pemberantasan Korupsi, diakses dari <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>
- 4 Larry Diamond dan Svetlana Tsalik, “Size and Democracy: the Case for Decentralization,” dalam Larry Diamond (Ed.), *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (Baltimore: the Johns Hopkins University Press, 1999), halaman 117-160.
- 5 *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009* (Jakarta: Bappenas/UNDP, 2009).
- 6 Chairul Tanjung, “Indonesia Economy Outlook,” diakses dari <http://alumniconnections.com/olc/filelib/HAA/cpages/180/Library/CT%20presentation%20materials.pdf>
- 7 *Ibid.*
- 8 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, “Kemiskinan dan Perekonomian,” diakses dari <http://tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Poverty%20Brief%20February%202013-%20Bahasa%20version.pdf>
- 9 Grafik diambil dari Riyana Miranti, Yogi Vidyattama, Erick Hansnata, Rebecca Cassells dan Alan Duncan, “Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia,” halaman 31.
- 10 Diambil dari Riyana Miranti, Yogi Vidyattama, Erick Hansnata, Rebecca Cassells dan Alan Duncan, “Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia,” halaman 25.

- 11 Lihat misalnya Vedi Hadiz, "Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called Democratic Transition," *The Pacific Review*, Vol. 16, No. 4, 2003, halaman 591-611.
- 12 STATT, "NGO Sector Review: Phase I Findings," dapat diakses di <http://www.ausaid.gov.au/business/Documents/indo-ks15-ngo-sector-review-phase1.pdf>
- 13 *ibid.*
- 14 Diakses dari <http://www.socialbakers.com/blog/647-top-10-biggest-facebook-cities>
- 15 Indonesia Corruption Watch (ICW), *Annual Report 2012*, (Jakarta: ICW, 2012), halaman 20.
- 16 *Ibid.*, halaman 21.
- 17 CSIS, "Survei Nasional CSIS: Partai Politik, Capres dan Partai Baru (Juli 2012-April 2013)," *power point* presentasi, Juli 2013, tidak diterbitkan.
- 18 Karen Remmer dan Francois Gelineau, "Subnational Electoral Choice: Economic and Referendum Voting in Argentina, 1983-1999," *Comparative Political Studies*, Vol. 36, No. 7, 2003, halaman 801-821.
- 19 KPK, *Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2012*, (Jakarta: KPK RI, 2012).
- 20 "Indonesia's Middle Class: Missing BRIC in the Wall," *The Economist*, 21 Juli 2011. Diakses dari <http://www.economist.com/node/18989153>
- 21 Saiful Mujani, "Mengkonsolidasikan Demokrasi Indonesia: Refleksi Sewindu Reformasi," Laporan Lembaga Survei Indonesia, Mei 2006.
- 22 Anies Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory," *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5, September/October 2004, halaman. 669-690. Dalam artikel tersebut, Baswedan juga mengajukan pandangan bahwa kelompok-kelompok yang dahulu menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai Islam kini memiliki saluran-saluran di beragam partai: (1) partai Islamis; (2) partai Islam-Inklusif; dan (3) partai Sekuler-Inklusif.
- 23 Edward Aspinall dan Mark T. Berger, "The Break Up of Indonesia? Nationalism after decolonization and the limits of the nation-state in post-cold war Southeast Asia," *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 6, 2001, halaman 1005.

- 24 Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague dan Bandung: W. Van Hoeve Ltd., 1958).
- 25 Martin van Bruinessen, "Islamic State or State Islam? Fifty Years of State Islam Relations in Indonesia," in Ingrid Wassel, *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts*. (Hamburg: Abera Verlag, 1996), halaman 19-34.
- 26 Bachtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2003)
- 27 United Nation, United Nations Conventions on The Law of The Sea, diadopsi pada 10 Desember 1982, Montego Bay, Jamaika, artikel 56-57, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.
- 28 Ibid., artikel 21.
- 29 Kementerian Pertahanan, *Postur Pertahanan Negara 2009-2029* (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2007), 62.
- 30 International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2013* Chapter Six: Asia (London: Routledge, 2013), 279.
- 31 UNROCA, "The Global Reported Arms Trade: The UN Registered of Conventional Arms," UN-register, diakses pada 26 Agustus 2013, <http://www.un-register.org/Background/Index.aspx>.
- 32 Kementerian Pertahanan, *Postur Pertahanan Negara 2009-2029*, 50-52.
- 33 Ibid., 69.
- 34 Ibid., 69-71.
- 35 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.
- 36 Istilah "unipolar moment" digunakan oleh Charles Krauthammer untuk merujuk pada tahun-tahun awal awal pasca berakhirnya Perang Dingin dimana AS, sebagai great power, tidak lagi memiliki saingan pasca runtuhnya Uni Soviet. Struktur internasional ketika itu, menurut Krauthammer, bersifat unipolar dengan AS sebagai hegemon. Lihat Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," dalam *Foreign Affairs* 70, no. 1 (1990/1991).
- 37 Perihal politik pengimbangan (balancing) dapat dilihat pada teks-teks utama realis seperti Kenneth Waltz, *Man, the State and War: A Theoretical Analysis* (New York: Columbia University Press, 1959); Kenneth Waltz,

Theory of International Politics (New York: McGraw-Hill, 1979); John Mearsheimer, "Back to the Future Instability in Europe after the Cold War," dalam *International Security* 15, no. 1 (1990), 5-56; John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W. W. Norton, 2001), Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power," dalam *International Security* 9, no. 4 (1985), 3-43; Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987); Randall Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," dalam *International Security* 19, no. 1 (1994), 72-107

- 38 Ronald O'Rourke, "China Naval Modernization : Implications for U.S Navy Capabilities-Background and Issues for Congress," Congressional Research Service, 10 Juni 2010, 23.
- 39 The Diversified Employment of China's Armed Forces (Beijing: Information Office of the State Council The People Republic of China, 2013).
- 40 Robert D. Kaplan, "The South China Sea is the Future of Conflict", *Foreign Policy*, Sept/Okt. 2011, diakses pada 2 Januari 2012, www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/15/the_south_china_sea_is_the_future_of_conflict
- 41 Ibid.
- 42 "Perbatasan Maritim dengan 10 Negara," Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses pada 10 Oktober 2013, strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf
- 43 Ibid.
- 44 Ibid.
- 45 Ibid.
- 46 Ibid.
- 47 Ibid.
- 48 Ibid.
- 49 Ibid.
- 50 Ibid.
- 51 Ibid.

- 52 Ibid.
- 53 Ibid.
- 54 Ibid.
- 55 “Timor Leste: Oecusse and the Indonesian Border,” International Crisis Group, 20 Mei 2010, diakses pada 10 Oktober 2013, www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/timor-leste/B104-timor-leste-oecusse-and-the-indonesian-border.aspx
- 56 I Made Andi Arsana, “Understanding border issues in Camar Bulan, Tanjung Datu,” *The Jakarta Post*, 20 Oktober 2011, diakses pada 10 Oktober 2013, www.thejakartapost.com/news/2011/10/20/understanding-border-issues-camar-bulan-tanjung-datu.html
- 57 Chappy Hakim, *Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?* (Jakarta: Red & White Publishing, 2012), 186.
- 58 Ibid., 186-187
- 59 Ibid., 193.
- 60 Ibid., 192-193.
- 61 Ibid., 195.
- 62 Ibid., 191.
- 63 Edy Prasetyono, “Masalah Wilayah Perbatasan,” makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 17 Mei 2010.
- 64 Dong Zhang, *India Looks East: Strategies and Impacts*, AusAID Working Paper (Canberra: AusAID, 2006), 6.
- 65 *Australia in the Asian Century: White Paper* (Canberra: Australian Government, 2012).
- 66 Ibid., 28-47.
- 67 Ibid., 222-249.
- 68 Ibid., 228.
- 69 Ibid., 228.
- 70 Ibid., 230.

- 71 Ralf Emmers, "ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia," dalam *The Pacific Review* Vol. 13 no. 3 (2003): 420.
- 72 G. Mueller, "Transnational crime: definitions and concepts," dalam *Combating Transnational Crime*, a Special Issue of *Transnational Organized Crime* 4, P. Williams and Vlassis (eds) (1998): 13–21.
- 73 Emmers, "ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia": 424.
- 74 Ibid., 432.
- 75 ASEAN, ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuses of Narcotics, diadopsi pada 26 Juni 1976, Manila, Filipina, http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/195_ASEAN-1976-0012.pdf.
- 76 Emmers, "ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia."
- 77 "United Nations says opium production in South East Asia's 'Golden Triangle' up 22 per cent," Australia Network News, diakses pada 26 Agustus 2013, <http://www.abc.net.au/news/2013-12-18/an-opium-production/5163102>.
- 78 "Fatal Blasts Hit Jakarta Hotels," BBC News, diakses pada 21 Agustus 2013, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8155084.stm>; John Aglionby, "Al-Qaeda Link is Suspected in Jakarta Bombings," The Washington Post, diakses pada 21 Agustus 2013, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/17/AR2009071700756.html>; Lee Glendinning dan Matthew Weaver, "Eight Dead as Bomber Target Western-Owned Jakarta Hotels," The Guardian, diakses pada 21 Agustus 2013, <http://www.theguardian.com/world/2009/jul/17/bombs-explode-hotels-indonesia>.
- 79 "Bom Serpong Sempat Meledak," Kompas, diakses pada 21 Agustus 2013, <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/22/18494676/Bom.Serpong.Sempat.Meledak>; "Ledakan diduga bom meledak di Solo," BBC News Indonesia, diakses pada 21 Agustus 2013, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/09/110925_bomsolo.shtml; "Kronologi Bom Bunuh Diri di Masjid Mapolresta Cirebon," Republika, diakses pada 21 Agustus 2013, <http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/04/15/ljomtb-kronologi-bom-bunuh-diri-di-masjid-mapolresta-cirebon>.

- 80 Dexter Roberts, "The U.S.-China Showdown Over Cyber Attacks Heats Up," Bloomberg Businessweek Global Economy, diakses pada 28 Agustus 2013, <http://www.businessweek.com/articles/2013-05-24/the-u-dot-s-dot-china-showdown-over-cyberhacking-heats-up>.
- 81 Ibid.
- 82 David Sanger, "U.S. Blames China's Military Directly for Cyberattacks," The New York Times, diakses pada 20 Agustus 2013, <http://www.nytimes.com/2013/05/07/world/asia/us-accuses-chinas-military-in-cyberattacks.html>.
- 83 Ibid.
- 84 Kirsten Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Group* (Washington: East-West Center, 2004), 1-3.
- 85 Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM)*, 46-8.
- 86 M. Widjojo, et.al, *Papua Road Map: Model Jangka Panjang Penyelesaian Konflik di Papua* (Jakarta: LIPI, 2008), 172.
- 87 "Anggota OPM Tertangkap Bawa Ganja Sekilo di Perbatasan," Suara Pembaruan, diakses pada 19 Agustus 2013, www.suarapembaruan.com/home/anggota-opm-tertangkap-bawa-ganja-sekilo-di-perbatasan/16696.
- 88 "Oz Govt Denies Support for Meeting on W. Papua's Independence," The Jakarta Globe, diakses pada 20 Agustus 2013, <http://www.thejakartaglobe.com/archive/oz-govt-denies-support-for-meeting-on-w-papuas-independence/501179/>.
- 89 "New Zealand Support for Papuan's 50th Anniversary of Independence Declaration," Radio New Zealand International, diakses pada 28 Agustus 2013, <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/201237/new-zealand-support-for-papuans'-50th-anniversary-of-independence-declaration>.
- 90 "Kontroversi Pembukaan Kantor OPM di Oxford, Inggris," Radio Australia, diakses pada 28 Agustus 2013, <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kontroversi-pembukaan-kantor-opm-di-oxford-inggris/1127024>.
- 91 "Gempabumi," Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, diakses pada 24 Agustus 2013, www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/Geofisika/gempabumi.bmkg.

- 92 Ibid
- 93 “Di Asia, Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Tertinggi Ketiga”, *Bisnis.com*, 16 Agustus 2013, <http://www.bisnis.com/m/di-asia-pertumbuhan-kapitalisasi-pasar-tertinggi-ketiga>
- 94 Wawancara dengan Budi Hikmat, *Chief Economist* dan Direktur Relasi Investor di PT Bahana TCW Investment Management, 18 September 2013.
- 95 “Kapitalisasi Pasar Modal Sumbang 60% Terhadap PDB”, *Antaranews.com*, <http://www.antaranews.com/print/88222/>
- 96 Presentasi Faisal Basri dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture, Desember 2012.
- 97 Dinna Wisnu, 13 Juni 2012, “Apa Artinya Berkecukupan”, *Koran Sindo*.
- 98 Wawancara Faisal Basri, 25 Mei 2013.
- 99 Semakin besar angka koefisien gini, semakin besar pula kesenjangan sosial ekonomi antar individu atau rumah tangga di Negara tersebut.
- 100 Wawancara dengan 2 pejabat dan 1 staf ahli senior dari Kementerian Luar Negeri RI, juga atas dasar studi literatur.
- 101 “Franz Magnis-Suseno: Religious Tolerance is SBY Responsibility”, *tempo.com*, 4 Juni 2013, <http://en.tempo.co/read/news/2013/06/04/241485763/Franz-Magnis-Suseno-Religious-Tolerance-is-SBY-Responsibility>
- 102 Lihat Analisis Dinna Wisnu, “HAM Indonesia di Mata Dunia”, *Koran Sindo*, 26 September 2012.
- 103 Wawancara dengan Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, juga dengan mencermati hasil studi Tirta Mursitama & Dinna Wisnu terkait illegal logging, dan tesis mahasiswa Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina yang dibimbing oleh Dinna Wisnu yakni Abdul Halim terkait pengelolaan Selat Malaka.
- 104 “Geliat Ilegal Perkebunan di Perbatasan”, *Media Perkebunan*, Edisi 18, September 2013.
- 105 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (2012).
- 106 Cepi Setiadi, 2013, Tesis Program Magister Bidang Diplomasi Universitas Paramadina.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney-Risakotta, Bernard. 2002. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aglionby, John. "Al-Qaeda Link is Suspected in Jakarta Bombings." The Washington Post. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/17/AR2009071700756.html>.
- "Four Arrested Over Australian Embassy Bomb." The Guardian. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://www.theguardian.com/world/2004/nov/25/indonesia.alqaida>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2003. *Shari'a and Positive Legislation: Is an Islamic State Possible or Viable?*. Public Lecture the Application of Syari'ah and the Issue of Human Rights in Muslim World, Auditorium Utama UIN Jakarta 4 Januari 2003. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Anonymous. 2006. *Atlas Sumberdaya Pesisir Kabupaten Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat*. Manokwari: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat & Konsorsium Atlas Sumberdaya Pesisir Kabupaten Raja Ampat.
- 2012. *Dimensions of Biodiversity: National Science Foundation 2010-2012 Projects*. Washington DC: National Science Foundation.
- Anwar, Dewi Fortuna, dkk. 2005. *Konflik Kekerasan Internal. Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: YOI, LIPI, CNRS, KITLV.
- Arkoun, Mohammad. 1997. *Min Faysal al-Tafriqah ila Fasl al-Maqal: Ayna Huwa al-Fikr al-Islamu al-Muasir*. Beirut: Dar al-Saqi.

----- 2003. *Islam Agama Sekuler: Penelusuran Sekularisme dalam Agama-agama di Dunia* (al-'Almanah wa al-Din: al-Islam, al-Masih, al-Gharb). Yogyakarta.

Arsana, I Made Andi. "Understanding border issues in Camar Bulan, Tanjung Datu." *The Jakarta Post*, 20 Oktober 2011. Diakses pada 10 Oktober 2013, 15.10 WIB, www.thejakartapost.com/news/2011/10/20/understanding-border-issues-camar-bulan-tanjung-datu.html.

ASEAN. ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuses of Narcotics. Diadopsi pada 26 Juni 1976, Manila, Filipina. http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/195_ASEAN-1976-0012.pdf.

"Asing Kuasai Pasar Modal RI, di Filipina Domestik Jadi Raja", *Liputan6.com*, 9 September 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/687379/asing-kuasai-pasar-modal-ri-di-filipina-domestik-jadi-raja>

Aspinall, Edward dan Mark T. Berger,. 2001. "The Break Up of Indonesia? Nationalism after decolonization and the limits of the nation-state in post-cold war Southeast Asia," *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 6, 2001.

-----, dan Marcus Mietzner (eds.).2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.

Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

'Australia in the Asian Century': White Paper. Canberra: Australian Government, 2012.

Azra, Azyumardi. 2002. *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*. Jakarta: Rajawali Press.

- Baldwin, Richard E. 2006. "East Asian Regionalism: Managing the Noodle Bowl", presentasi di Tokyo 23 Januari.
- "Bali Bomb Attacks Claim 26 Lives." BBC News. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/4300274.stm>.
- Ball, Desmond. 2011. "China's Cyber Warfare Capabilities", *Security Challenges* 7(2): 81-103.
- BAPPENAS dan UNDP. 2009. *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*. Jakarta: Bappenas.
- Baswedan, Anies Rasyid. 2004. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory," *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5, September/Oktober 2004.
- Benda, Harry J 1958. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague dan Bandung: W. Van Hoeve Ltd.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Bjørlykke, K. 2010. *Petroleum Geoscience: From Sedimentary Environments to Rock Physics*. New York: Springer.
- Bloom, Irene dan Wayne L Proudfoot. 1996. *Religious Diversity and Human Rights*. New York: Columbia University Press.
- "Bom di gedung Bursa Efek Jakarta." Museum Polri. Diakses pada 19 Agustus 2013. http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-bej.html.
- "Bom Natal tahun 2000." Museum Polri. Diakses pada 19 Agustus 2013. http://www.museum.polri.go.id/lantai2_gakkum_bom-natal2000.html.
- "Bom Serpong Sempat Meledak." Kompas. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://nasional.kompas.com/read/2011/04/22/18494676/Bom.Serpong.Sempat.Meledak>.

- “Bomb blast at home of Philippines ambassador to Indonesia.” Independent. Diakses pada 19 Agustus 2013. <http://www.independent.ie/world-news/bomb-blast-at-home-of-philippines-ambassador-to-indonesia-26110600.html>.
- “Bonner, Raymond dan Jane Perlez. “Bali Bombing Kills at Least 25 in Tourist Spot.” The New York Times. Diakses pada 21 Agustus 2013. http://www.nytimes.com/2005/10/02/international/asia/02bali.html?pagewanted=all&_r=0.
- Borras Jr, Saturnino M., Franco, Gomez, Kay & Spoor. 2012. “Land Grabbing in Latin America and the Caribbean”. Journal of Peasant Studies 39 (3-4): 845-872.
- Bourdieu, Pierre, Randal Johnson [ed] 1993. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* Pierre Bourdieu, Randal Johnson [ed]. Columbia: Columbia University Press.
- BPPK Kementerian Luar Negeri RI. 2011. *ASEAN Connectivity in Indonesian Context: A Preliminary Study on Geopolitics of Hydropower and Maritime Transport*. Jakarta: BPPK, Kementerian Luar Negeri RI.
- Bruinessen, Martin van. 2006. “Islamic State or State Islam? Fifty Years of State Islam Relations in Indonesia,” in Ingrid Wassel, *Indonesien am Ende des 20. Jahrhunderts*. Hamburg: Abera Verlag.
- Cadangan devisa China mencapai 3,31 triliun dolar di akhir tahun 2012. Lihat “Cadangan Devisa China Terbesar di Dunia”, Kompas.com, 10 Januari 2013, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/10/16320578/cadangan.devisa.china.terbesar.di.dunia>.
- “Catatan Ledakan Bom Marriot tahun 2003.” Kompas. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://nasional.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.marriott.tahun.2003>.

- Conboy, Ken. 2003. *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*. Sheffield : Equinox Publishing.
- Cook, H.J. 2007. *Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age*. New Haven: Yale University Press.
- CSIS. 2013. "Survei Nasional CSIS: Partai Politik, Capres dan Partai Baru (Juli 2012–April 2013)" power point presentasi, Juli 2013, tidak diterbitkan.
- Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Darlis, Muhammad. "Bom di Gereja Pantekosta Palu Lukai Seorang Polisi." Tempo. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2002/01/01/05817/Bom-di-Gereja-Pantekosta-Palu-Lukai-Seorang-Polisi>.
- DBS. *Imagining Asia 2020: Make Way for the Asia Giant*. Hong Kong: DBS.
- "Densus 88 Lumpuhkan Teroris di Malam Tahun Baru." Deutsche Welle. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://www.dw.de/densus-88-lumpuhkan-teroris-di-malam-tahun-baru/a-17336078>.
- "Detik-Detik Sebelum Aksi Bom Natal 2000." Berita Satu. Diakses pada 19 Agustus 2013. <http://www.beritasatu.com/hukum/46781-detik-detik-sebelum-aksi-bom-natal-2000.html>.
- "Di Asia, Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Tertinggi Ketiga", Bisnis.com, 16 Agustus 2013, <http://www.bisnis.com/m/di-asia-pertumbuhan-kapitalisasi-pasar-tertinggi-ketiga>
- Diamond, Larry (Ed.). 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: the Johns Hopkins University Press.
- Diamond, Larry, dan Marc F. Plattner (eds.). 2001. *The Global Divergence of Democracies*. Maryland: Johns Hopkins University and the National Endowment for Democracy.

- Diamond, Larry, et. al., (eds). 1997. *Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges*. Maryland: Johns Hopkins University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia.
- Effendy, Bachtiar. 2013. *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Emmers, Ralf. 2003. "ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia." *The Pacific Review* Vol. 13 no. 3, 2003.
- Falleti, Tulia. 2005. "A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective." *American Political Science Review*, Vol. 99, No. 3, 2005.
- "Fatal Blasts Hit Jakarta Hotels." BBC News. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8155084.stm>.
- "Fatia, Chairina. "Rangkaian Teror Bom di Hotel JW Marriot." Detik. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://news.detik.com/read/2008/09/21/171520/1009934/10/rangkaian-teror-bom-di-hotel-jw-marriot>.
- Franz Magnis-Suseno: *Religious Tolerance is SBY Responsibility*", tempo.com, 4 Juni 2013, <http://en.tempo.co/read/news/2013/06/04/241485763/Franz-Magnis-Suseno-Religious-Tolerance-is-SBY-Responsibility>
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How It Affects Our Daily Lives*. New York, London: W.W. Norton.
- Friedrich Ebert Stiftung. 2010. "The Role of Indonesia in G-20: Formulating Recommendations for the G-20 Summits in 2010 and Beyond". Draft G-20 Research Project disseminated in October 2010. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan and Friedrich Ebert Stiftung.

- Fromm, Erich. 2002. *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, terj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fues, Thomas & Wolff, Peter. 2010. "G20 and Global Development." Makalah. Bonn: German Development Institute.
- Gani, Ashraf dan Clare Lockhart, *Fixing Failed States: a Framework for Rebuilding a Fractured World*, (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Gause III, Gregory F. 2011. "Why Middle East Studies Missed the Arab Spring", *Foreign Affairs* July-August: 81-90.
- "Geliat Ilegal Perkebunan di Perbatasan", *Media Perkebunan*, Edisi 18, September 2013.
- "Gempabumi." Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Diakses pada 24 Agustus 2013. www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/Geofisika/gempabumi.bmkg.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Glendinning, Lee dan Matthew Weaver. "Eight Dead as Bomber Target Western-Owned Jakarta Hotels." *The Guardian*. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://www.theguardian.com/world/2009/jul/17/bombs-explode-hotels-indonesia>.
- Grijns, C.D. and S.O. Robson. 1986. *Cultural Contact and Textual Interpretation*. Holland: Foris Publication.
- Hadianto A. 2010. *Analisis Pertumbuhan Sektor Berbasis Kehutanan dan Dampaknya terhadap Distribusi Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Pendekatan Analisis Input-Output Miyazawa*. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Hadiz, Vedi. 2003. *“Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called Democratic Transition.”* The Pacific Review, Vol. 16, No. 4, 2003.
- Hakim, Chappy. 2012. *Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?* Jakarta: Red & White Publishing.
- Halili, et.al. 2013. *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012.* Jakarta: Setara Institute.
- Hamid, Sandra. 2012. *“Is the Party Over for Indonesia’s Political Parties?”* In Asia, 25 Juli 2012.
- Hamilton, Keith & Langhorne, Richard. 1995. *The Practice of Diplomacy.* London: Routledge.
- Hanafi, Hassan. 2000. *Oksidentalisme: Sikap Kita terhadap Tradisi Barat, Pengantar Oksidentalisme.* Jakarta: Paramadina.
- Harris, Marvin. 1997. *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology.* USA: Longman Inc.
- Harris, Marvin. 1999. *“Cultural Materialism” dalam Theories of Culture in Postmodern Times.* USA: Altamira Press.
- Hartanto, Dwi Agung. *“Data Ledakan Bom di Indonesia 2000–2009.”* Detik. Diakses pada 19 Agustus 2013. <http://news.detik.com/read/2009/07/17/161656/1167203/10/data-ledakan-bom-di-indonesia-2000-2009>.
- Harvey, David W. 1973. *Social Justice in the City.* London: Edward Arnold.
- Haryatmoko. 2004. *Etika Politik Kekuasaan.* Jakarta: KPG.
- Haynes, Jeff (ed). 2001. *Towards Sustainable Democracy in the Third World.* London: Palgrave.

- Hefner, Robert W. 1990. *Geger Tengger. Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LkiS.
- Held, David,. 2006. *Models of Democracy*, 3rd ed. Cambridge: Polity Press.
- Hiratsuka, Daisuke. 2006. “*Escaping from FTA Trap and Spaghetti Bowl Problem in East Asia*”. Dapat diunduh dari http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/Ch9_Hiratsuka.pdf
- Honna, Jun. 2008. “*The Peace Devidend*,” Inside Indonesia, Vol. 92, Apr-Jun 2008.
- Humaedi, M. Alie. 2007. *Strategi Kebijakan dan Advokasi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Kemanusiaan Aceh Pasca Tsunami*. Jakarta: YTBI & Christian Aid.
- , M. Alie. 2008. *Konflik Islam-Kristen di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Depag.
- , M. Alie. 2011. *Potensi Awal Peran Masjid dalam Situasi Bencana di Indonesia: Enam Masjid di Dua Provinsi*. Jakarta: UN OCHA.
- , M. Alie. 2012. *Ekspedisi Menuju Tuhan: Mencari Kebijakan di Tengah Hutan pada Masyarakat Tau Taa Wana*. Jakarta: Valia Press.
- Huntington, Samuel. 1996. *The Clash of Civilizations*.
- Hutchinson, 2005. *Geological framework*. In Gupta, A. 2005. *The physical geography of Southeast Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- , C.S. 1996. *South-East Asian Oil, Gas, Coal & Mineral Deposits*. Oxford: Oxford Monographs on Geology and Geophysics 36. Clarendon Press.

ILR,. 2013. *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012*. Jakarta: ILR-Tahir Foundation.

Imparsial. 2011. *Securitization in Papua*. Jakarta: Imparsial.

Indonesia Corruption Watch (ICW). 2012. *Annual Report 2012*. Jakarta: ICW.

Indonesian Military Warn of Threat to Borobudur Temple." Jakarta Globe. Diakses pada 19 Agustus 2013. <http://www.thejakartaglobe.com/archive/indonesian-military-warn-of-threat-to-borobudur-temple/>.

International Crisis Group. 2002. *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia*, Asia Briefing 8 Agustus (Jakarta/Brussels: International Crisis Group); Juga terdapat pada www.crisisweb.org.

International Foundation for Electoral Systems (IFES) Indonesia, "Jajak Pendapat Pemilu 2010, <http://www.ifes.org/~media/Files/Publications/Survey/2010/201009_Key_Findings_Indonesia_Electoral_Survey_Indonesian.pdf>

"International Institute for Strategic Studies. 2013. *The Military Balance 2013* Chapter Six: Asia. London: Routledge.

"Jakartans Still Visit Malls Despite Bombings." The Jakarta Post. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/03/jakartans-still-visit-malls-despite-bombings.html>.

Juergensmeyer. 2007. *Terorisme Para Pembela Agama*, terjemahan bebas *Terror in the Mind of God: the Global Rise of Religious Violence*. Jakarta: Rajawali Press.

"Kapitalisasi Pasar Modal Sumbang 60% Terhadap PDB", Antaranews.com, <http://www.antaranews.com/print/88222/>

Kaplan, David dan Albert Mannerns. 1999. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kaplan, Robert D. *"The South China Sea is the Future of Conflict."* Foreign Policy, Sept/Okt. 2011. Diakses pada 2 Januari 2012. www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/15/the_south_china_sea_is_the_future_of_conflict.
- Kartamihardja, Ahdiat (Editor). 2007. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Pertahanan. 2007. *Postur Pertahanan Negara 2009-2029*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kenawas, Yoes C., dan Fitriani. 2013. *"Indonesia's Next Parliament: Celebrities, Incumbents, and Dynastic Members?"* RSIS Commentaries, No. 089/2013, 8 Mei 2013.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2008: Fakta Korupsi dalam Layanan Publik*. Jakarta: KPK RI.
- , 2012. *Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2012*. Jakarta: KPK RI.
- "Konflik Ambon Picu Bom Malam Natal 2000."* Tempo. Diakses pada 19 Agustus 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/15/063390412/Konflik-Ambon-Picu-Bom-Malam-Natal-2000>.
- Kontra S. 2011. *"Penyiksaan: Tindakan Keji yang Tidak Dianggap Serius"*, 25 Juni 2011.
- "Kontroversi Pembukaan Kantor OPM di Oxford, Inggris."* Radio Australia. Diakses pada 28 Agustus 2013. <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kontroversi-pembukaan-kantor-opm-di-oxford-inggris/1127024>.

- Krauthammer, Charles. 1990/1991. *"The Unipolar Moment."* Dalam Foreign Affairs 70, no. 1 (1990/1991).
- Krekel, Bryan. 2009. *"Capability of the People's Republic of China to Conduct Cyber Warfare and Computer Network Exploitation"*, Report prepared for the US-China Economic and Security Review Commission. Available on the web <http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-030.pdf>
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 2012. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke 21*. Jakarta: Gramedia.
- Kurtubi. 2002. *"Industri LNG Nasional dan UU Migas No.22/2001"*. Majalah Tempo, 13 Oktober 2002.
- , 2011. *"Manajemen Energi Primer dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional."* Seminar Kelistrikan Nasional, Institut Teknologi Bandung, Bandung, November 2011.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- "Ledakan Bom Warnai Malam Pergantian Tahun."* Liputan6. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://news.liputan6.com/read/26381/ledakan-bom-mewarnai-malam-pergantian-tahun>.
- "Ledakan diduga bom meledak di Solo."* BBC News Indonesia. Diakses pada 21 Agustus 2013. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/09/110925_bomsolo.shtml.
- Lia, Brynjar. 2005 *Globalization and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions*. Routledge.
- Lombard, Deny's. 2000. *Nusa Jawa Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Mahtani, Shibani. *"Kondisi 'Ground Zero' Bom Bali Menyedihkan."* The Wall Street Journal Indonesia. Diakses pada 20 Agustus

2013. <http://indo.wsj.com/posts/2012/10/14/kondisi-ground-zero-bom-bali-menyedihkan/>.
- “*Massive Blast at Jakarta Embassy*.” BBC News. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/3639922.stm>.
- Mearsheimer, John. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton.
- , 1990. “*Back to the Future Instability in Europe after the Cold War*.” Dalam *International Security* 15, no. 1, (1990). 5-56
- Miranti, Riyana Yogi Vidyattama, Erick Hansnata, Rebecca Cassells dan Alan Duncan,. 2013. “*Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia*,” OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.148, 23 Juli 2013.
- Möhring. 2008. *Deutsche Forschungsgemeinschaft: Biodiversity Research*. Weinheim: Wiley
- Moisi, Dominique. 2009. *The Geopolitics of Emotion*. NY: Anchor Books.
- Mueller, G. 1998. “*Transnational crime: definitions and concepts*.” Dalam *Combating Transnational Crime*, a Special Issue of *Transnational Organized Crime* 4, P. Williams and D. Vlassis (eds).
- Mujani, Saiful. 2006. “*Mengkonsolidasikan Demokrasi Indonesia: Refleksi Sewindu Reformasi*,” Laporan Lembaga Survei Indonesia, Mei 2006.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2009. (ed). *Masalah-Masalah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea*. Jakarta: DPR RI.
- , 2013. “*Parlemen dan Hubungan Internasional*”, orasi ilmiah pengukuhannya sebagai Guru Besar Riset di LIPI, 18 September 2013.

New Zealand Support for Papuan's 50th Anniversary of Independence Declaration." Radio New Zealand International. Diakses pada 28 Agustus 2013, <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/201237/new-zealand-support-for-papuans'-50th-anniversary-of-independence-declaration>.

Nurhayati, Nunuy. "Pelaku Peledakan Bom di Mabes Polri Mulai Diadili." Tempo. Diakses pada 21 Agustus 2013. <http://tempo.co.id/hg/nasional/2003/08/06/brk,20030806-24,id.html>.

Nurrochmat DR. dan Hasan F. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan. Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. Jakarta: INDEF.

----- et al. 2007. *Reposisi Kehutanan Kita*. Jakarta: Departemen Kehutanan

Nye, Joseph. 2008. *The Powers to Lead*. Oxford: Oxford University Press.

O'Rourke, Ronald. 2010. "China Naval Modernization : Implications for U.S Navy Capabilities-Background and Issues for Congress." Congressional Research Service. 10 Juni 2010.

Parson, Talcott. 1951. *The Social System*. Glencoe III: Free Press.

Parthesius, R. 2010. *Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595-1660*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Pasiak, T. 2002. *Revolusi IQ/EQ/SQ. Antara Neurosains dan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Perbatasan Maritim dengan 10 Negara." Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Diakses pada 10 Oktober 2013, 14.05 WIB. www.strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf

"Pertumbuhan Kapitalisasi Saham Bursa Indonesia Rendah", Bakrie.com, <http://www.bakrieglobal.com/news/read/2786/Pertumbuhan-Kapitalisasi-Saham-Bursa-Indonesia-Rendah>

- Phyo, Aung Kyaw. "Policy Outcomes in Indonesia: Before and After Democratization". <http://www.martin.uky.edu/centers_research/Capstones_2012/Phyo.pdf>
- Pinault, David. "Indonesia's Buddhist Temple." America Magazine. Diakses pada 19 Agustus 2013, <http://new.americamagazine.org/issue/461/article/indonesias-buddhist-heritage>.
- Prasetyono, Edy. 2010. "Masalah Wilayah Perbatasan." Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 17 Mei 2010.
- Price, Megan, Jeff Klingner, Anas Qtiesh, dan Patrick Ball. 2013. *Updated Statistical Analysis of Documentation of Killings in the Syrian Arab Republic*. The Office of the UN High Commisioners on Human Rights.
- Raine, Sarah & Le Miere, C. 2013. *Regional Disorder: The South China Sea Disputes*. New York: The International Institute for Strategic Studies & Routledge.
- Remmer, Karen, dan Francois Gelineau. 2003. "Subnational Electoral Choice: Economic and Referendum Voting in Argentina, 1983-1999". Comparative Political Studies, Vol. 36, No. 7, 2003.
- Roberts, Dexter. "The U.S.-China Showdown Over Cyber Attacks Heats Up." Bloomberg Businessweek Global Economy. Diakses pada 28 Agustus 2013. <http://www.businessweek.com/articles/2013-05-24/the-u-dot-s-dot-china-showdown-over-cyberhacking-heats-up>.
- Robertson, Roland. 1988. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: LP3ES.
- Sanger, David. "U.S. Blames China's Military Directly for Cyberattacks." The New York Times. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://www.nytimes.com/2013/05/07/world/asia/us-accuses-chinas-military-in-cyberattacks.html>.

- Schiebinger, L. 2004. *Plants & Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World*. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press.
- Schulze, Kirsten. 2004. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Group*. Washington: East-West Center.
- Schumpeter, J.A. 1976 [1942] *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Allen & Unwin.
- Schweller, Randall. 1994. "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In." dalam *International Security* 19, no. 1 (1994). 72-10
- Secretariat Republic Federal of West Papua. 2012. *Basic Guidelines Republic Federal of West Papua* edisi pertama. Secretariat State.
- Setiadi, Cepi. 2013. "Kemunculan Resource Nationalism: Arah Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara di Indonesia Melalui UU Minerba No. 4/2009". Tesis magister Program Studi Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina, Jakarta.
- Sheldon, WH. 1997. *The Varieties of Temperament: A Psychology of Constitutional Differences*, revisi dari 1948. New York: Harper & Brother.
- Siagian, Sabam. 2013. "Bergumul dalam Pengharapan" dalam buku *Pemantauan, Pemikiran dan Pemahaman*, kumpulan tulisan 1973-2013, Jakarta.
- Stepan, Alfred. 2001. *Arguing Comparative Politics*. New York: Oxford University Press.
- Suhartono. 1995. *Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya.
- Tebay, Neles. 2011. *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.

- "*The 12 October 2002 Bali Bombing Plot.*" BBC News Asia. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://www.bbc.com/news/world-asia-19881138>.
- "*The Diversified Employment of China's Armed Forces.*" Beijing: Information Office of the State Council The People Republic of China, 2013.
- Till, Geoffrey. 2012. *Asia's Naval Expansion: An Arms Race in the Making?* New York: The International Institute for Strategic Studies & Routledge.
- Tim Bappenas. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (RPJM) 2010-2014. Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan – Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.* Jakarta: Bappenas
- Tim Kementerian Kesehatan. 2010. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014.* Jakarta: Diknas.
- "*Timor Leste: Oecusse and the Indonesian Border.*" International Crisis Group, 20 Mei 2010. Diakses pada 10 Oktober 2013, 15.11 WIB. www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/timor-leste/B104-timor-leste-oecusse-and-the-indonesian-border.aspx
- Tjandraningsih, Christine. "*Bomb Explodes in Makassar, anti-U.S. Protesters Suspected.*" Free Republic. Diakses pada 20 Agustus 2013. <http://www.freerepublic.com/focus/f-news/545982/posts>.

- Tomasic, Roman. 2007. *"The Sociology of Legislation" dalam Legislation and Society in Australia*. Sydney: The Law Foundation of New South Wales.
- Transteq & Equinoccio. 2010. *"Indonesia's Trade Access to the EU: Opportunities and Challenges"*. Laporan proyek oleh Montague Lord, Rina Oktaviani, Edzard Ruehe.
- Tucker, Joshua A. 2006. *Regional Economic Voting: Russia, Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tworzecki, Hubert. 2003. *Learning to Choose: Electoral Politics in East-Central Europe*. California: Stanford University Press.
- Uchrowi, Zaim. 2013. *Karakter Pancasila. Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*. Jakarta: Balai Pustaka
- UNDP. 2010. *Report On The Achievement of The Milenium Development Goals Indonesia 2010*. Jakarta: UNDP Indonesia
- . 2013. *Human Development Report. The Rise of The South: Human Progress in a Diverse World*. New York: UNDP
- "United Nations says opium production in South East Asia's 'Golden Triangle' up 22 per cent." Australia Network News. Diakses pada 26 Agustus 2013. <http://www.abc.net.au/news/2013-12-18/an-opium-production/5163102> .
- . *United Nations Conventions on The Law of The Sea*. Diadopsi pada 10 Desember 1982, Montenegro Bay, Jamaika. http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- UNROCA. *"The Global Reported Arms Trade: The UN Registered of Conventional Arms."* UN-register. Diakses pada 26 Agustus 2013. <http://www.un-register.org/Background/Index.aspx>.

- Usdeky, Bambang. "193 *Ledakan Bom Selama Tahun 1999-2003.*" Suara Merdeka. Diakses pada 19 Agustus 2013. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/10/nas07.htm>.
- Van Bemmelen, R. W. 1970. *The Geology of Indonesia. Ia: General geology of Indonesia & Adjacent Archipelagoes. 2: Economic geology.* Ib: Portfolio & Index. 2nd ed. The Hague (Den Haag): Martinus Nijhoff.
- Van Royen, P. 1980. *The Alpine Flora of New Guinea.* Vol 1, J. Cramer, Vaduz.
- Wagey, T. & Arifin, Z. 2008. *Marine Biodiversity Review of the Arafura & Timor Seas.* Jakarta: Ministry of Marine Affairs & Fisheries, Indonesian Institute of Sciences, United Nation Development Programme & Census of Marine Life.
- Walt, Stephen M. 1985. "Alliance Formation and the Balance of World Power." Dalam *International Security* 9, no. 4 (1985). 3-43.
- Walt, Stephen M. 1987. *The Origins of Alliances.* Ithaca: Cornell University Press.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics.* New York: McGraw-Hill.
- , 1959. *Man, the State and War: A Theoretical Analysis.* New York: Columbia University Press.
- Weber, Max. 1972. *The Sociology of Religion.* Boston: Beacon Press.
- Widjaja, E.A; Maryanto, I; Wowor, D. & Prijono, S.N. [eds.]. 2011. *Status Keanekaragaman Hayati Indonesia.* Jakarta: LIPI Press.
- Widjojo, M. et.al. 2008. *Papua Road Map: Model Jangka Panjang Penyelesaian Konflik di Papua.* Jakarta: LIPI.

Wisnu, Dinna & Supiarso, Frans. 2013. “*Outsourcing (and Offshoring) as Incentive for Economic Growth?*”, makalah dipresentasikan dalam diskusi “Decent Work for Labour in Service Sector” oleh the Asian Brotherhood of Clerical Workers, di Bangkok, Thailand, 19-21 Februari 2013.

----- . 2012. “*Apa Artinya Berkecukupan*”, Koran Sindo, 13 Juni.

----- . 2012. “*HAM Indonesia di Mata Dunia*”, Koran Sindo, 26 September.

----- . 2012. “*Human Rights Protection in Indonesia: Between Domestic Politics and International Posture*”, makalah disiapkan untuk rapat Konrad Adenauer Stiftung, Malang, 26 September.

----- . 2012. *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zakaria, Fareed. 2009. *Post American World*. NY: W.W. Norton.

Zhang, Dong. 2006. *India Looks East: Strategies and Impacts*. AusAID Working Paper. Canberra: AusAID.

<http://acch.kpk.go.id/>

<https://crawford.anu.edu.au/>

<http://ffp.statesindex.org/>

<http://tnp2k.go.id/>

<http://www.aid.gov.au/business/Documents/indo-ks15-ngo-sector-review-phase1.pdf>

<http://www.flca.net/images/ScenarioPlanning.pdf>

<http://www.freedomhouse.org/>

<http://www.sayangi.com/>

<http://www.socialbakers.com/>

<http://www.kpu.go.id/>

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Buku ini memuat pikiran-pikiran dan prediksi terhadap dinamika yang akan dihadapi oleh negara bangsa Indonesia. Dengan ketajaman analisa mereka, mengenai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan itu, maka seluruh jajaran administrasi Presiden RI yang akan datang, dapat lebih leluasa dalam membuat rencana jawaban strategis yang lebih cepat dan tepat.

Jenderal TNI (Purn) DR. AM Hendropriyono ST, SH, MH - Kepala BIN 2001-2004

Buku ini dapat menjadi pijakan awal bagi perancang kebijakan negara untuk mengetahui di mana posisi Indonesia dan apa yang ingin kita raih di dalam perubahan konstelasi politik, ekonomi, dan pertahanan yang sangat dinamis.

Dr. Ikrar Nusa Bhakti - Profesor Riset LIPI

Buku ini meneropong Indonesia dalam lima tahun ke depan. Capaian pembangunan di tengah kompleksitas serta ketidakpastian ekonomi dunia menjadi modal berharga untuk lebih mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata di masa mendatang.

Prof. Dr. Firmanzah - Guru Besar Ekonomi UI dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dari dulu sampai sekarang masih bergantung dengan pihak asing. Ini mengakibatkan 'kita seperti tikus mati di lumbung padi'. Buku ini merupakan salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap kebijakan pengelolaan SDA sehingga masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan.

Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, M.Eng.Sc, Ph.D - Guru Besar Universitas Udayana

